BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIKKA

LKPJ
2025

@bapperidasikka

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa patut kita panjatkan atas limpahan kasih dan karuniaNya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Sikka Akhir Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini memuat kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Secara substantif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat tentang Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk pendapatan dan belanja daerah, Penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penyelengaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan Penugasan, dan penyelengaraan tugas umum pemerintahan, serta tindak lanjut Rekomedasi DPRD Kabupaten Sikka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Tahun 2025. Secara normatif, DPRD akan membahas dan memberikan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dipedomani dan ditindaklanjuti Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

Akhirnya pemerintah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berperan aktif dan turut serta mengambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Semoga Tuhan memberkati.

Maumere, 6 Maret 2026

Bupati Sikka,

Juventus Prima Yoris Kago

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... I-i
DAFTAR ISI ..... I-ii
DAFTAR TABEL ..... I-iii
DAFTAR GRAFIK ..... I-vi
DAFTAR GAMBAR ..... I-viii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum I-2
1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan I-3
1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... I-4
1.4. Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... I-5
1.5. Program Pembangunan Daerah I-9
1.6. Data Umum Daerah I-12
1.6.1. Data Geografis Wilayah I-12
1.6.2. Jumlah Penduduk I-25
1.6.3. Pertumbuhan Penduduk I-21
1.6.4. Jumlah ASN I-25
1.6.5. Realisasi APBD Tahun 2025 ..... I-27

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.1. Pendapatan Daerah II-4
2.2. Belanja Daerah II-5
2.3. Pembiayaan Daerah II-7

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan III-2
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-2
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-67
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan III-188
3.1.4. Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-234
3.1.5. Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-261
3.1.6. Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan III-281
3.1.7. Pelaksanaan Unsur Kewilayahan III-287
3.1.8. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum III-330
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan III-340
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 ..... III-345
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama III-370

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan IV-2
4.1.1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura IV-2
4.1.2. Bidang Perkebunan IV-6
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan IV-12
4.3. Upaya Penyelesaian IV-13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... I-4
Tabel 1.2. Program Pembangunan Daerah I-8
Tabel 1.3. Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan I-11
Tabel 1.4. Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka I-14
Tabel 1.5. Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka I-14
Tabel 1.6. Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka..... I-15
Tabel 1.7. Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita dari Pos Hujan Ledalero Kabupaten Sikka I-16
Tabel 1.8. Curah Hujan Bulan Kecamatan Paga dari Pos Hujan Paga, Kabupaten Sikka I-16
Tabel 1.9. Curah Hujan Bulan Kecamatan Lela dari Pos Hujan Lela Kabupaten Sikka I-17
Tabel 1.10. Curah Hujan Bulan Kecamatan Alok Timur dari Pos Hujan Stamet Maumere, Kabupaten Sikka I-17
Tabel 1.11. Curah Hujan Bulan Kecamatan Magepanda dari Pos Hujan Magepanda, Kabupaten Sikka..... I-17
Tabel 1.12. Curah Hujan Bulan Kecamatan Waigete dari Pos Hujan Waigete, Kabupaten Sikka I-18
Tabel 1.13. Curah Hujan Bulan Kecamatan Bola dari Pos Hujan Bola, Kabupaten Sikka I-18
Tabel 1.14. Curah Hujan Bulan Kecamatan Mego dari Pos Hujan Nangablo, Kabupaten Sikka I-19
Tabel 1.15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2024..... I-19
Tabel 1.16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... I-21
Tabel 1.17. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025..... I-22
Tabel 1.18. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... I-22
Tabel 1.19. Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang..... I-23
Tabel 1.20. Data PNS Berdasarkan Jabatan..... I-23
Tabel 1.21. Data PNS Berdasarkan Usia..... I-24
Tabel 1.22. Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan I-24
Tabel 1.23. Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Jabatan I-24
Tabel 1.24. Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Usia I-24
Tabel 1.25. Data Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2025 ..... I-25
Tabel 1.26. Data Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-26
Tabel 1.27. Data Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-27
Tabel 2.1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025..... II-3
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2025 ..... III-6
Tabel 3.2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2022-2025 ..... III-19
Tabel 3.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tersebar di Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-19
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2025 ..... III-25
Tabel 3.5. Kondisi Jalan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-34
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025..... III-35

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ..... III-43
Tabel 3.8. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, Tahun 2025 ..... III-47
Tabel 3.9. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2025 ..... III-47
Tabel 3.10. Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2025 ..... III-47
Tabel 3.11. Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2025 ..... III-48
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ..... III-53
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2025 ..... III-63
Tabel 3.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2025 ..... III-67
Tabel 3.15. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 ..... III-68
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ..... III-74
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-82
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2025 ..... III-90
Tabel 3.19. Data Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sikka III-93
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ..... III-96
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ..... III-107
Tabel 3.22. Perkembangan Indeks Desa Membangunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-113
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ..... III-114
Tabel 3.24. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ..... III-120
Tabel 3.25. Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-126
Tabel 3.26. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2025 ..... III-128
Tabel 3.27. Titik Hotspot di Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-132
Tabel 3.28. Lokasi Pembangunan Internet Satelit (VSAT) untuk Pelayanan Fasilitas Publik di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-132
Tabel 3.29. Data Tower BTS Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-135
Tabel 3.30. Data Blank Spot Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-142
Tabel 3.31. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ..... III-143
Tabel 3.32. Data Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... III-151
Tabel 3.33. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ..... III-153
Tabel 3.34. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2025 ..... III-156
Tabel 3.35. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 ..... III-162
Tabel 3.36. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ..... III-171
Tabel 3.37. Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka III-172
Tabel 3.38. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2025 ..... III-175
Tabel 3.39. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-180
Tabel 3.40. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2025 ..... III-182
Tabel 3.41. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2025 ..... III-185

Tabel 3.42. Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-188
Tabel 3.43. Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan Tahun 2025 ..... III-188
Tabel 3.44. Jenis Armada Yang Digunakan Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-188
Tabel 3.45. Jenis Komoditi Yang Dikirim Keluar Wilayah Kabupaten Sikka..... III-189
Tabel 3.46. Produksi perikanan Tangkap Kabupaten Sikka..... III-190
Tabel 3.47. Konsumsi ikan penduduk Kabupaten Sikka III-191
Tabel 3.48. Pendapatan Nelayan Kabupaten Sikka..... III-191
Tabel 3.49. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ..... III-192
Tabel 3.50. Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-195
Tabel 3.51. Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-199
Tabel 3.52. Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-203
Tabel 3.53. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2025 ..... III-205
Tabel 3.54. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2025 ..... III-213
Tabel 3.55. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2025 ..... III-225
Tabel 3.56. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2025 ..... III-232
Tabel 3.57. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2025 ..... III-233
Tabel 3.58. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Tahun 2025 ..... III-236
Tabel 3.59. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Tahun 2025 ..... III-263
Tabel 3.60. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2025 ..... III-269
Tabel 3.61. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2025 ..... III-277
Tabel 3.62. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025..... III-280
Tabel 3.63. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pengawasan Tahun 2025 ..... III-283
Tabel 3.64. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2025 ..... III-288
Tabel 3.65. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025 ..... III-331
Tabel 3.66. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025 ..... III-340
Tabel 3.67. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024..... III-345
Tabel 3.68. Data Target dan Realisasi IKU Kabupaten Sikka Tahun 2025 ..... III-370

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2024 ..... I-21
Grafik 3.1. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-2
Grafik 3.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-3
Grafik 3.3. Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-3
Grafik 3.4. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-4
Grafik 3.5. Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-4
Grafik 3.6. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-4
Grafik 3.7. Indeks Distribusi Guru SD dan SMP Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-5
Grafik 3.8. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-17
Grafik 3.9. Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-17
Grafik 3.10. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-18
Grafik 3.11. Rasio Posyandu per-Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-18
Grafik 3.12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-20
Grafik 3.13. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-20
Grafik 3.14. Cakupan TC TB dan TSR Kabupaten Sika Tahun 2021-2025 ..... III-21
Grafik 3.15. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2021–2025 ..... III-32
Grafik 3.16. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2021 – 2025 ..... III-33
Grafik 3.17. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Tahun 2021 – 2025 ..... III-33
Grafik 3.18. Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025 ..... III-34
Grafik 3.19. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun 2021-2025 ..... III-41
Grafik 3.20. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR Tahun 2022-2024 ..... III-41
Grafik 3.21. Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-42
Grafik 3.22. Gambaran Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2021-2025 Yang Tertangani III-42
Grafik 3.23. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-72
Grafik 3.24. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-73
Grafik 3.25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-92
Grafik 3.26. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2021-2025 ..... III-95
Grafik 3.27. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-119
Grafik 3.28. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-119
Grafik 3.29. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Tahun 2021 – 2025 ..... III-124
Grafik 3.30. Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2025 ..... III-124
Grafik 3.31. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2025 ..... III-125
Grafik 3.32. Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2025 ..... III-125
Grafik 3.33. Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2025 ..... III-126
Grafik 3.34. Pemuda Pelopor Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2025 ..... III-170

Grafik 3.35. Perolehan Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga Tahun 2021 – 2025 ..... III-170
Grafik 3.36. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-180
Grafik 3.37. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelolah Arsip Secara Baku Tahun 2021-2025 ..... III-184
Grafik 3.38. Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-190
Grafik 3.39. Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-190
Grafik 3.40. Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-203
Grafik 3.41. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-203
Grafik 3.42. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-204
Grafik 3.43. Data Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-211
Grafik 3.44. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-212
Grafik 3.45. Data Jumlah Kelompok Tani Yang Dikukuhkan Tahun 2025 ..... III-212
Grafik 3.46. Data Peternakan Tahun 2021-2205 ..... III-213
Grafik 3.47. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-224
Grafik 3.48. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 ..... III-231
Grafik 4.1. Sebaran Lokasi Pengembangan Pala IV-6
Grafik 4.2. Sebaran Lokasi Peremajaan Kakao IV-7
Grafik 4.3. Sebaran Lokasi peremajaan Jambu Mete IV-7
Grafik 4.4. Sebaran Lokasi Perluasan Pala IV-8
Grafik 4.5. Sebaran Lokasi Tusip Padi Gogo IV-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Geografis Kabupaten Sikka I-11
Gambar 1.2. Peta Topografi Kabupaten Sikka I-13
Gambar 1.3. Peta Hidrologi Kabupaten Sikka..... I-15

Bab I
P e n d a h u l u a n

1.1 Dasar Hukum
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.3 Arah Kebijakan
1.4 Strategi
1.5 Program Pembangunan Daerah
1.6 Data Umum Daerah

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 151);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 29).
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 6).

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal;
   b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan;
   c. Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat ;
   d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka, dengan sasaran:
   a. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka;
   b. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal;
   c. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata.

3. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, dengan sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan, dengan sasaran: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan.

5. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN dengan sasaran :
   a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel;
   b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah;
   c. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan;
   d. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat;
   e. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah:

1. Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial dengan arah kebijakan Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan manusia melalui inovasi dan integrasi sosial berbasis komunitas.
2. Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan arah kebijakan Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan Mendorong akselerasi dan inovasi infrastruktur strategis yang tangguh, cerdas, dan inklusif untuk memperkuat daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat.
4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan Mendorong transformasi sistem pengelolaan lingkungan yang inovatif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dalam tata kelola wilayah serta pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ekosistem yang sehat, tangguh dan berkelanjutan.
5. Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN dan Kolaboratif dengan arah kebijakan Pembangunan tata kelola pemerintah melalui peningkatan kualitas SDM serta pengawasan dan akuntabilitas.

1.4 Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Strategi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif berbasis Kearifan Lokal	1. Transformasi pendidikan dengan integrasi Digital dan Inovasi Pembelajaran terkini;
		2. Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
		3. Peningkatan Kualitas, Kompetensi, dan kesejahteraan Tenaga Pendidik;
		4. Penguatan Pendidikan Nonformal dan Pembelajaran Alternatif;
		5. Pendidikan Karakter dan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan;
		6. Pemerataan dan Peningkatan Infrastruktur sarana Pendidikan, dan distribusi tenaga pendidikan;
		7. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga dan antar komunitas satuan pendidikan untuk menjaga ekosistem pendidikan;
		8. Integrasi kearifan lokal dan pelestarian bahasa dan budaya daerah dalam sistem pendidikan;
		9. Membangun Ketahanan pendidikan dalam situasi bencana, ekonomi, dan konflik.
2	Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	1. Transformasi Layanan Kesehatan Berbasis Teknologi dan Inovasi;
		2. Penguatan Kompetensi dan Pemerataan SDM Kesehatan;
		3. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kesehatan;
		4. Penanganan Mortalitas, Stunting, dan Masalah Gizi Masyarakat bersama lintas sektor;
		5. Promosi Kesehatan dan Edukasi Masyarakat berbasis komunitas;
		6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular berbasis surveilans;

No	SASARAN	STRATEGI
		7. Membangun sistem layanan kesehatan Jiwa dan Perlindungan Sosial;
		8. Penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, obat-obatan, dan produk konsumsi untuk perlindungan konsumen yang kolaboratif;
		9. Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola kesehatan Lintas Level.
3	Meningkatnya Kehidupan Layak masyarakat yang bermartabat	1. Penguatan Perlindungan dan jaminan Sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi;
		2. Penguatan SDM dan sistem pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;
		3. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM berbasis desa/kelurahan, SDA, dan kewirausahaan komunitas;
		4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya dari ancaman sosial-budaya;
		5. Penguatan sistem Perlindungan Migran dan Tenaga Kerja Rentan;
		6. Penguatan kapasitas keluarga dengan Literasi Digital dan Keuangan;
		7. Penguatan Perlindungan Keluarga dan Anak;
		8. Membangun sistem penempatan tenaga kerja pemuda yang responsif terhadap kebutuhan wilayah dan perkembangan pasar kerja;
		9. Meningkatkan akses perlindungan sosial dan kesetaraan pemuda rentan terhadap layanan dasar dan ketenagakerjaan;
		10. Meningkatkan kesempatan kerja lokal, menekan migrasi kerja informal, dan menciptakan skema kerja layak bagi pemuda.
4	Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
		2. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender;
		3. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
		4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif;
		5. Peningkatan Akses layanan dasar yang responsif gender untuk peningkatan kualitas hidup;
		6. Afirmasi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan penguatan peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan;
		7. Reformasi Sosial dan Edukasi Anti-Patriarki.
5	Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka	1. Mendorong pengembangan sentra produksi berbasis potensi lokal dan mendorong diversifikasi komoditas unggulan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal;
		2. Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi terintegrasi yang terintegrasi antar wilayah guna mendukung kelancaran rantai pasok sektor primer;
		3. Peningkatan Kapasitas SDM, Regenerasi, dan Kelembagaan Petani–Nelayan;
		4. Memperkuat akses pembiayaan, kemitraan, serta pemasaran berbasis teknologi;
		5. Penguatan sistem ketahanan pangan melalui diversifikasi produksi pangan lokal, pengembangan pangan berbasis sumber daya perairan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan;
		6. Membangun pendekatan adaptif berbasis ekosistem serta sistem mitigasi risiko untuk menghadapi dampak

No	SASARAN	STRATEGI
		perubahan iklim dan bencana dalam pengelolaan sektor kelautan, perikanan, dan pertanian;
		7. Integrasi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata berbasis potensi lokal untuk sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan;
		8. Mendorong adopsi inovasi teknologi dan pengembangan smart farming dan smart fisheries guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing sektor primer secara berkelanjutan.
6	Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	1. Mendorong pengembangan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan serta peningkatan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
		2. Mempercepat transformasi digital pada industri kecil, menengah, dan UMKM, termasuk sistem pemasaran dan promosi produk perikanan dan kelautan secara terpadu;
		3. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekosistem Industri Rakyat sebagai pendorong utama industrialisasi berbasis rakyat;
		4. Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Industri untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan;
		5. Memperluas jangkauan pasar melalui penguatan identitas produk, sertifikasi mutu, dan pengembangan saluran ekspor;
		6. Penguatan SDM Industri dan Kewirausahaan Yang kompeten dan berdaya saing tinggi;
		7. Membangun infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung logistik fasilitas logistik terpadu guna mendukung efisiensi produksi, distribusi, dan konektivitas antar wilayah;
		8. Memperkuat ketahanan dan keberlanjutan industri lokal melalui penerapan prinsip industri tangguh, rendah emisi, dan ramah lingkungan berbasis sumber daya laut.
7	Terwujudnya Ekonomi Lokal Yang Kokoh Melalui Dukungan Perdagangan Dan Pariwisata	1. Transformasi digital dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor tersier yang terintegrasi dan adaptif;
		2. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya, komunitas, dan kemitraan;
		3. Transformasi pariwisata tangguh, berkelanjutan, dan inklusif, serta berorientasi pada pasar wisata tematik;
		4. Revitalisasi Perdagangan Serta Pelaku Usaha Lokal;
		5. Penguatan Promosi, Branding, dan Positioning Daerah;
		6. Mendorong ekosistem kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan sektor tersier;
		7. Membangun sistem Adaptasi dan Mitigasi Risiko Ekonomi terhadap Geopolitik dan Krisis Eksternal.
8	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Penguatan infrastruktur jalan, transportasi, dan konektivitas wilayah yang terintegrasi untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal;
		2. Penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh inklusif berbasis kolaborasi dan tata ruang;
		3. Penguatan sistem penyediaan infrastruktur dasar yang adaptif, efisien dan berkelanjutan;
		4. Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim;
		5. Modernisasi tata kelola infrastruktur berbasis teknologi, data, dan digitalisasi infrastruktur;
		6. Penguatan penataan ruang dan Percepatan Legalisasi Dokumen Perencanaan Infrastruktur serta sinkronisasi lintas sektor;

No	SASARAN	STRATEGI
		7. Memperkuat kapasitas dan koordinasi kelembagaan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan;
		8. Penguatan kolaborasi dan kemandirian infrastruktur;
		9. Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
9	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan	1. Penguatan sistem pengelolaan sampah dan air limbah berbasis regulasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas;
		2. Penguatan peran komunitas dan CSR dalam menjaga pengelolaan lingkungan dan mendorong perubahan perilaku;
		3. Pengendalian Pertambangan dan Pengelolaan Konservasi DAS Berbasis Data dan Komunitas;
		4. Digitalisasi dan pemantauan lingkungan berbasis data dan peralatan modern;
		5. Pengembangan RTH dan Ekowisata berbasis komunitas, data dan teknologi untuk Rehabilitasi Lahan dan Pengendalian Ruang;
		6. Penguatan perlindungan kawasan lindung dan rawan melalui pemantauan, penghijauan, dan pemberdayaan;
		7. Penguatan perangkat hukum dan penegakan aturan untuk perlindungan lingkungan;
		8. Pengendalian dampak urbanisasi dan integrasi lingkungan dalam perencanaan ruang;
		9. Tata kelola adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko lingkungan.
10	1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel 2. Akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah 3. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan 4. Meningkatnya keamanan dan kerukunan Masyarakat 5. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital;
		2. Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam memperkuat tata organisasi, serta dan mitigasi keamanan dan kebencanaan;
		3. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk peningkatan PAD;
		4. Penyelarasan dan penegakkan regulasi pusat dan daerah;
		5. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan;
		6. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.

1.5 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Program Pembangunan Daerah

Tujuan / Sasaran	Program
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing	
a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal	• Pengendalian Perijinan Pendidikan
	• Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	• Pengelolaan Pendidikan
	• Pengembangan Kurikulum
	• Pembinaan Perpustakaan
b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan	• Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	• Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	• Pengendalian Penduduk
	• Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	• Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
c. Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	• Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	• Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	• Penempatan Tenaga Kerja
	• Hubungan Industrial
	• Pemberdayaan Sosial
	• Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	• Penanganan Bencana
	• Rehabilitasi Sosial
	• Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	• Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan	• Perlindungan Perempuan
	• Peningkatan Kualitas Keluarga
	• Pemenuhan Hak Anak (Pha)
	• Perlindungan Khusus Anak
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	
e. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka	• Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	• Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	• Penyuluhan Pertanian
	• Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	• Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	• Penanganan Kerawanan Pangan
	• Pengawasan Keamanan Pangan
	• Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan / Sasaran	Program
	• Administrasi Pemerintahan Desa
	• Penataan Desa
	• Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	• Pengelolaan Perikanan Tangkap
f. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal	• Pengembangan UMKM
	• Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	• Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	• Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	• Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	• Promosi Penanaman Modal
	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	• Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	• Pelayanan Penanaman Modal
	• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
g. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata	• Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	• Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	• Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	• Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	• Pemasaran Pariwisata
	• Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	• Pengembangan Kebudayaan
	• Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri	
Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	• Penyelenggaraan Jalan
	• Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	• Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	• Pengembangan Jasa Konstruksi
	• Penataan Bangunan Gedung
	• Penyelenggaraan Penataan Ruang
	• Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	• Pengelolaan Pelayaran
	• Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	• Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	• Pengembangan Perumahan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang	
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan	• Perencanaan Lingkungan Hidup
	• Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	• Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	• Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	• Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tujuan / Sasaran	Program
	• Pengelolaan Persampahan
	• Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN dan Kolaboratif	
a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel	• Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	• Penyelenggaraan Pengawasan
	• Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	• Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	• Pengelolaan Keuangan Daerah
	• Pengelolaan Barang Milik Daerah
	• Pengelolaan Pendapatan Daerah
c. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan	• Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	• Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	• Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	• Aplikasi Informatika
	• Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	• Perekonomian Dan Pembangunan
	• Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	• Kepegawaian Daerah
	• Pengembangan Sumber Daya Manusia
	• Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	• Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	• Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	• Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	• Pengelolaan Arsip
d. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat	• Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	• Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	• Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	• Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	• Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	• Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	• Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	• Penanggulangan Bencana
e. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat	• Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	• Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	• Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	• Pencatatan Sipil
	• Pendaftaran Penduduk
	• Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tujuan / Sasaran	Program
	• Pengelolaan Profil Kependudukan
	• Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1.6 Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

1.6.1 Data Geografis Wilayah

A. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8022'– 8050' Lintang Selatan dan 121055'40" – 122041'30" Bujur Timur di Pulau Flores. Kabupaten Sikka memiliki luas wilayah 1.675,36 Km² dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende; dan
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Laut Sawu.

Gambar 1.1 Peta Geografis Kabupaten Sikka

Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2025

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.3
Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km²)
1	Paga	Paga	76,23
2	Tanawawo	Wolofeo	81,52
3	Mego	Lekebai	100,59
4	Lela	Lela	45,47
5	Bola	Bola	43,97
6	Doreng	Edat	54,43
7	Mapitara	Hebing	83,28
8	Talibura	Talibura	273,07

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km²)
9	Waiblama	Tanarawa	141,28
10	Waigete	Waigete	226,76
11	Kewapante	Kewapante	22,89
12	Hewokloang	Baowunut	19,33
13	Kangae	Waipare	39,24
14	Nelle	Nelle Urung	13,42
15	Koting	Koting B	16,62
16	Palue	Uwa	38,46
17	Nita	Nita	117,27
18	Magepanda	Magepanda	130,10
19	Alok	Kota Uneng	19,37
20	Alok Barat	Wailiti	48,84
21	Alok Timur	Waioti	74,46
Jumlah			1.675,36

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 273,07Km², sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Nelle 13,42 Km².

Kabupaten Sikka secara nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Penetapan tersebut diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2045, yang mengidentifikasi kawasan strategis kabupaten berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi serta kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis dari perspektif ekonomi bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan yang berbasis pada potensi unggulan wilayah serta memperkuat struktur ruang ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi meliputi:

a) Kawasan Strategis Agropolitan bertujuan sebagai pusat kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi Daerah berada di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Paga, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura, dan Kecamatan Waigete.
b) Kawasan Strategis Perkotaan Maumere bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah berada di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, dan Kecamatan Nita.
c) Kawasan Strategis Perkotaan Baru bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah di Kecamatan Kewapante.
d) Kawasan Strategis Sentral Kerajinan Tenun bertujuan sebagai pusat pengembangan produk unggulan berada di Kecamatan Bola dan Kecamatan Nita.

Selanjutnya, kawasan strategis berdasarkan fungsi lingkungan hidup ditetapkan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta daya dukung lingkungan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat dan ekosistem. Salah satu kawasan tersebut adalah Kawasan Strategis Penyangga Hutan Lindung Gunung Egon yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dan berada di Kecamatan Mapitara dan Kecamatan Waigete.

B. Topografi

Topografi Kabupaten Sikka dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelas ketinggian. Klasifikasi ini menggambarkan variasi kondisi morfologi wilayah yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, sistem hidrologi, serta potensi dan

kendala pengembangan wilayah. Perbedaan ketinggian lahan tersebut dapat diamati melalui peta gambar 1.2 :

Gambar 1.2 Peta Topografi Kabupaten Sikka

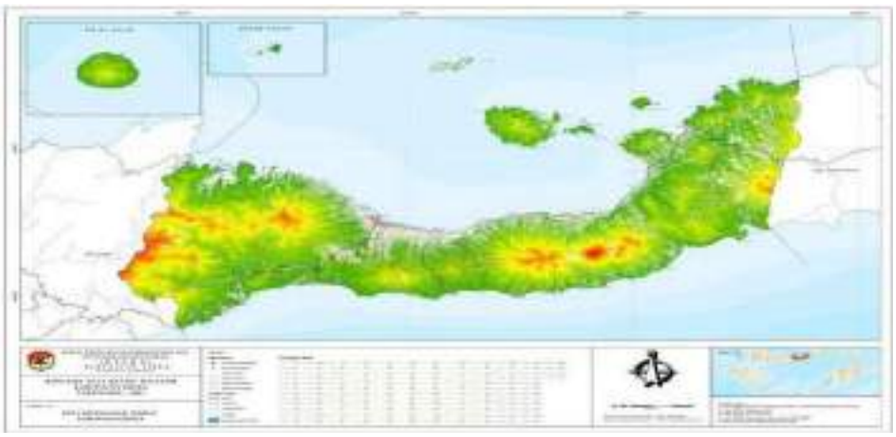

Sumber : RTRW Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan peta ketinggian lahan pada gambar 1.2 peta topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan ke dalam lima kelas ketinggian lahan, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
b) Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03 persen persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
c) Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
d) Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
e) Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

Topografi Kabupaten Sikka yang bervariasi, mulai dari dataran rendah pesisir hingga kawasan perbukitan dan pegunungan, merupakan potensi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan antar wilayah. Wilayah pesisir yang berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pariwisata bahari dan pariwisata berbasis budaya.

Sementara itu, wilayah perbukitan dengan ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut (mdpl) sangat sesuai untuk pengembangan pertanian lahan kering, hortikultura, serta sistem agroforestri, khususnya bagi komoditas unggulan seperti kemiri, kakao, kopi, dan vanili. Di sisi lain, kawasan pegunungan yang mendominasi hampir separuh wilayah Kabupaten Sikka memiliki nilai strategis sebagai kawasan konservasi sumber daya alam, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan

ekosistem, fungsi hidrologi, serta keberlanjutan lingkungan hidup secara keseluruhan.

C. Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan mengenai sifat iklim di suatu wilayah yang disusun berdasarkan analisis berbagai unsur iklim. Unsur-unsur tersebut meliputi suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, serta jumlah hari hujan yang saling berinteraksi dan membentuk karakteristik iklim wilayah tersebut. Kondisi suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka

Bulan	Suhu Udara (˚C)		Kelembaban Udara (%)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	23,60	33,20	87,81	100
Februari	23,60	32,20	87,75	100
Maret	24,00	33,00	86,80	100
April	21,80	34,00	81,18	100
Mei	23,40	33,80	82,01	100
Juni	22,50	33,80	78,11	100
Juli	20,50	33,20	75,48	100
Agustus	20,80	33,80	72,01	93
September	20,70	35,20	73,80	98
Oktober	22,50	36,00	75,77	98
November	24,40	36,20	79,11	100
Desember	22,70	34,40	85,33	100

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa suhu maksimum pada tahun 2025 tercatat pada bulan November sebesar 36,20°C, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Juli sebesar 20,50°C. Kelembaban udara minimum sebesar 72,01 persen terjadi pada bulan Agustus, dan nilai maksimum mencapai 100 persen yang tercatat pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Juli, November dan Desember. Sedangkan secara umum rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	303,40	18,00	4,60
Februari	72,90	18,00	3,80
Maret	56,10	18,00	5,10
April	98,20	13,00	7,40
Mei	124,70	13,00	7,30
Juni	14,00	5,00	6,60
Juli	0,00	0,00	8,50
Agustus	0,00	0,00	9,20
September	15,80	4,00	8,90
Oktober	32,00	5,00	9,10
November	93,50	11,00	7,50
Desember	174,40	23,00	4,90

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, secara umum curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 14,00 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan

Desember sebesar 174,40 mm. Persentase penyinaran matahari pada tahun 2025 terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 4,90 %, dan tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 9,20 %. Sedangkan informasi lebih lanjut mengenai tekanan udara dan kecepatan angin di Kabupaten Sikka dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin di Kabupaten Sikka

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Januari	2,98	13	1.005,20	1.008,80
Februari	3,01	20	1.005,93	1.012,00
Maret	2,76	10	1.005,60	1.009,70
April	3,46	12	1.006,89	1.010,80
Mei	3,81	16	1.007,19	1.010,70
Juni	4,53	12	1.008,78	1.011,30
Juli	5,61	15	1.008,68	1.011,40
Agustus	5,22	16	1.009,35	1.012,20
September	4,47	17	1.008,82	1.011,90
Oktober	4,01	14	1.007,27	1.011,40
November	3,52	15	1.005,88	1.010,40
Desember	2,93	15	1.004,96	1.009,20

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Februari sebesar 20,00 m/detik, sedangkan kecepatan angin minimum terjadi pada bulan Maret sebesar 2,76 m/detik. Sementara itu, tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 1.004,96 mb, sedangkan tekanan udara maksimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 1.012,20 mb.

D. Hidrologi

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering dan sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

Gambar 1.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sikka

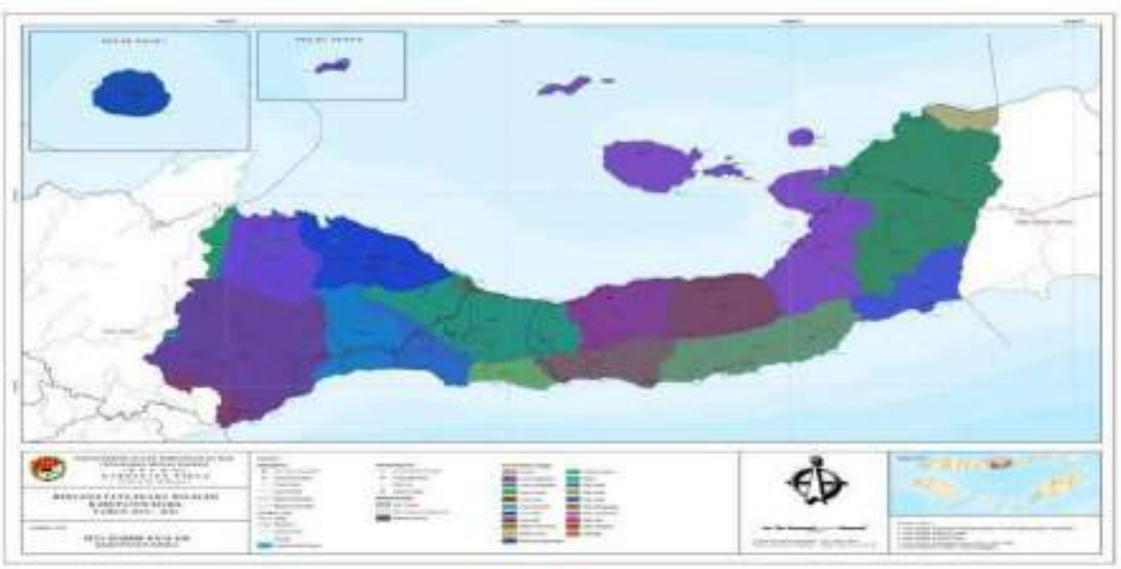

Sumber: RTRW Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2044

Berdasarkan kondisi iklim yang telah dijelaskan sebelumnya, distribusi curah hujan di Kabupaten Sikka cenderung tidak merata antar wilayah, yang berdampak langsung pada ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau. Untuk memahami variasi spasial curah hujan bulanan secara lebih rinci berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Curah Hujan Bulan Kecamatan Nita dari Pos Hujan Ledalero, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	105,0	225,0	275,0	85,0	86,0	34,0	0,0	5,0	1,0	24,0	36,0	277,0
2021	323,5	645,0	237,0	263,0	2,0	0,0	0,0	28,0	90,5	25,0	370,5	554,9
2022	372,5	615,0	217,5	102,0	36,0	104,0	13,5	18,0	97,0	122,0	269,0	136,0
2023	109,5	520,0	86,5	67,5	4,5	36,0	125,5	3,0	0,0	0,0	41,0	127,0
2024	116,0	213,0	635,5	506,5	7,0	80,0	34,5	0,0	0,0	167,0	152,5	486,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Ledalero di Kecamatan Nita untuk tahun 2020 hingga 2024, bahwa pola curah hujan menunjukkan karakteristik iklim monsun tropis dengan musim hujan yang dominan terjadi pada bulan November hingga Maret dan musim kemarau pada bulan Juni hingga September. curah hujan tertinggi cenderung terjadi pada bulan Januari dan Februari, sebagaimana terlihat pada tahun 2021 (645 mm di Februari), tahun 2022 (615 mm di Februari), dan tahun 2023 (520 mm di Februari). Sebaliknya, bulan-bulan dengan curah hujan terendah umumnya terjadi pada Juli sampai dengan september, di mana beberapa tahun mencatat curah hujan berada di angka nol, seperti Juli 2021 (0,0 mm), September 2023 (0,0 mm), dan Agustus 2024 (0,0 mm). Setiap pos bulan menunjukkan dinamika musiman yang konsisten, mencerminkan periode basah dan kering yang cukup kontras, dengan fluktuasi antar tahun yang menunjukkan adanya variasi iklim tahunan. Keseluruhan data mengindikasikan bahwa Kecamatan Nita, khususnya pada Pos Ledalero, mengalami siklus hidrologi yang tajam antara musim hujan dan kemarau, yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan sektor pertanian, konservasi air dan mitigasi risiko kekeringan maupun banjir.

Tabel 1.8

Curah Hujan Bulan Kecamatan Paga dari Pos Hujan Paga

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	86,5	233,0	107,0	170,0	68,5	0,0	4,5	8,0	8,0	46,5	21,5	289,5
2021	330,6	365,0	176,5	208,5	22,0	35,0	26,0	58,0	53,5	22,0	90,0	192,5
2022	283,0	294,5	182,0	34,0	22,0	333,0	142,5	22,0	49,0	145,0	81,5	74,5
2023	85,5	295,5	107,5	146,0	30,6	12,5	106,0	38,5	0,0	0,0	65,5	143,3
2024	43,5	91,0	344,5	234,5	157,0	68,0	26,0	16,0	22,0	78,0	41,0	383,5

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Paga di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa pola hujan mengikuti karakteristik iklim monsun dengan curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga April, serta bulan November hingga Desember, sementara curah hujan cenderung rendah pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember 2024 sebesar 383,5 mm dan diikuti bulan Maret 2024 sebesar 344,5 mm, yang menunjukkan anomali peningkatan intensitas hujan pada akhir tahun. Di sisi lain, bulan-bulan kering terjadi pada bulan Juni 2020 (0,0 mm), September 2023

(0,0 mm), dan bulan Okotber 2023 (0,0 mm) memperlihatkan ketimpangan distribusi hujan yang tajam. Setiap tahun, data curah hujan di Pos Paga menunjukkan fluktuasi intensitas yang mencerminkan adanya variabilitas iklim, baik dari sisi intensitas maupun distribusi waktunya. Hal ini menandakan pentingnya strategi adaptif dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kecamatan Paga.

Tabel 1.9
Curah Hujan Bulan Kecamatan Lela dari Pos Hujan Lela

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	150,0	145,0	151,0	115,0	84,0	24,0	2,0	41,0	14,0	133,0	112,0	420,0
2021	411,0	451,0	496,0	304,0	75,0	12,0	44,0	24,0	90,0	133,0	372,0	204,0
2022	522,0	586,0	96,0	76,0	49,0	115,0	29,0	22,0	124,0	146,0	187,0	99,0
2023	252,0	450,0	73,0	455,0	44,0	2,0	185,0	22,0	0,0	0,0	181,0	151,0
2024	103,0	160,0	322,0	310,0	151,0	58,0	33,0	0,0	10,0	126,0	37,0	277,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Lela di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa distribusi curah hujan menunjukkan pola musiman yang konsisten dengan puncak hujan umumnya terjadi pada bulan Januari hingga April serta bulan November hingga Desember. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 586,0 mm, yang mencerminkan intensitas hujan yang sangat tinggi di awal tahun tersebut. Sebaliknya, bulan september dan Oktober, terutama pada tahun 2023 (0,0 mm), menunjukkan curah hujan sangat rendah yang identik dengan periode musim kemarau. Variabilitas tahunan juga terlihat dari perbedaan signifikan curah hujan antar tahun, seperti pada bulan Maret yang mencapai 496,0 mm di tahun 2021, namun hanya 73,0 mm di tahun 2023. Setiap pos bulan mengindikasikan dinamika iklim tropis basah-kering yang tajam, sehingga data dari Pos Lela menjadi representasi penting untuk memahami kondisi iklim lokal di Kecamatan Lela.

Tabel 1.10
Curah Hujan Bulan Kecamatan Alok Timur dari Pos Hujan Stamet Maumere

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	80,7	101,0	79,8	103,0	154,4	24,1	0,0	0,0	1,5	71,0	54,5	218,0
2021	179,5	567,7	151,5	94,3	0,0	22,8	0,0	9,3	26,6	28,0	286,9	210,5
2022	248,3	435,3	151,6	27,9	6,0	98,8	13,2	0,0	20,9	41,3	263,8	117,1
2023	119,8	372,6	51,0	110,2	0,0	65,6	19,2	0,0	0,0	1,0	38,0	79,7
2024	52,3	54,2	196,0	384,1	2,0	9,0	8,9	2,1	0,7	33,7	39,0	433,9

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan dari Pos Hujan Stasiun Meteorologi Maumere yang merepresentasikan wilayah Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selama periode 2020 hingga 2024, pola hujan menunjukkan tipikal iklim monsun tropis dengan konsentrasi curah hujan tinggi pada bulan Februari Desember sampai dengan Februari, dan curah hujan rendah atau hampir tidak ada pada bulan Mei, Juli, Agustus dan September. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2021 sebesar 567,7 mm, sementara curah hujan terendah atau nihil terlihat pada beberapa bulan musim kemarau, yaitu pada bulan Mei (2020 dan 2023), Juli (2020 dan 2021), Agustus (2020,2022 dan 2023) serta September (2023). Lonjakan curah hujan ekstrem juga tampak pada bulan Desember 2024 sebesar 433,9 mm, yang mengindikasikan pergeseran intensitas hujan ke akhir tahun. Secara keseluruhan, data dari Pos Stamet Maumere menunjukkan bahwa Kecamatan Alok Timur mengalami dinamika hujan yang cukup tajam antara musim hujan dan musim kemarau.

Tabel 1.11
Curah Hujan Bulan Kecamatan Magepanda dari Pos Hujan Magepanda

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	590,3	171,0	233,0	39,0	146,0	0,0	0,0	2,0	10,0	34,0	20,3	441,0
2021	482,0	418,0	135,0	183,0	0,0	33,8	0,0	0,0	21,0	0,0	304,0	249,0

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2022	230,9	686,0	148,0	108,0	3,0	25,0	18,0	0,0	12,0	189,0	86,0	166,0
2023	114,0	658,0	109,0	54,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	94,0
2024	273,0	156,0	204,0	247,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2,0	10,0	698,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan bulanan di Kecamatan Magepanda yang tercatat melalui Pos Hujan Magepanda selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang khas dengan dominasi curah hujan tinggi pada bulan-bulan basah, terutama Januari hingga Maret dan November hingga Desember. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 698,0 mm dan Februari 2022 sebesar 686,0 mm, sementara curah hujan sangat rendah atau bahkan nihil terjadi pada bulan Mei (2020, 2021 dan 2023), bulan Juni (2020 dan 2024), bulan Juli (2020, 2021, 2023), Agustus (2021 sampai dengan 2024), bulan September (2023 dan 2024) dan pada bulan Oktober (2021, 2023) yang tercatat angka 0,0 mm. Pos Hujan Magepanda menjadi sumber penting dalam merekam dinamika iklim lokal yang secara umum mencerminkan kondisi iklim musiman dengan perbedaan ekstrem antara periode basah dan kering. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Magepanda menghadapi ketimpangan distribusi curah hujan tahunan yang cukup tajam sehingga pengelolaan sumber daya air dan strategi adaptasi iklim menjadi aspek vital dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 1.12

Curah Hujan Bulan Kecamatan Waigete dari Pos Hujan Waigete, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	458,0	231,0	107,0	26,0	220,0	0,0	0,0	0,0	N/A	37,0	113,0	633,0
2021	385,0	972,0	519,0	426,0	0,0	0,0	0,0	7,0	15,0	16,0	270,0	386,0
2022	377,0	1017,0	121,0	14,0	11,0	48,0	109,0	2,0	3,0	44,0	222,0	389,0
2023	130,0	563,0	106,0	241,0	0,0	19,0	32,0	0,0	0,0	0,0	22,0	127,0
2024	294,0	129,0	434,0	368,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	28,0	100,0	878,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Pos Hujan Waigete yang merekam curah hujan bulanan di Kecamatan Waigete selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika iklim yang sangat kontras antara musim hujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2022 sebesar 1.017,0 mm dan Desember 2024 mencapai 878,0 mm, menandakan puncak musim hujan yang cukup ekstrem di awal dan akhir tahun. Sebaliknya, sejumlah bulan seperti Mei hingga Oktober di tahun 2021 sampai tahun 2024 tercatat tanpa hujan sama sekali atau hanya menunjukkan nilai yang sangat minim, yang menunjukkan periode kekeringan yang cukup signifikan. Angka curah hujan pada bulan Maret juga menunjukkan variasi cukup besar, dari hanya 106,0 mm di tahun 2023 hingga 519,0 mm di tahun 2021.

Tabel 1.13

Curah Hujan Bulan Kecamatan Bola dari Pos Hujan Bola, Kabupaten Sikka

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	152,4	252,7	148,6	135,7	125,5	27,0	N/A	34,0	0,5	83,7	133,4	458,1
2021	345,2	505,1	316,0	140,0	105,0	20,5	35,0	0,0	147,2	74,0	240,6	208,4
2022	348,0	562,8	146,2	142,0	59,3	148,6	11,0	18,2	64,1	142,1	110,4	277,1
2023	223,2	263,6	193,0	233,9	15,7	37,8	61,1	0,0	0,0	0,0	429,9	273,3
2024	93,9	58,3	249,0	294,2	13,2	11,6	12,5	0,0	38,0	61,0	29,3	392,7

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Rekaman curah hujan dari Pos Hujan Bola yang berlokasi di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, memperlihatkan variasi hujan bulanan yang cukup nyata selama rentang waktu 2020 hingga 2024. Beberapa bulan mencatat intensitas tinggi, seperti Februari 2022 dengan 562,8 mm dan Desember 2020 yang mencapai 458,1 mm. Sebaliknya, periode kemarau sangat terasa pada bulan Agustus yang beberapa kali

mencatat curah hujan nol, seperti pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Data juga menunjukkan adanya catatan tidak tersedia (N/A) pada bulan Juli 2020, yang menandakan adanya kekosongan data dan perlu dicermati dalam evaluasi longitudinal. Pola hujan di Kecamatan Bola menunjukkan ketergantungan tinggi pada musim basah sebagai sumber utama pasokan air, sementara musim kering cenderung panjang dan minim hujan. Hal ini mencerminkan perlunya sistem pengelolaan air yang adaptif dan terencana, baik untuk mendukung aktivitas pertanian maupun mengantisipasi risiko kekeringan di masa mendatang.

Tabel 1.14
Curah Hujan Bulan Kecamatan Mego dari Pos Hujan Nangablo

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	241,0	366,0	407,0	21,0	30,0	11,0	0,0	0,0	8,0	16,0	6,0	353,0
2021	687,0	448,0	192,5	250,5	1,0	0,0	2,0	2,0	4,0	42,0	49,0	39,0
2022	259,0	428,0	23,0	10,0	7,0	63,0	11,0	4,0	91,0	27,0	45,0	75,0
2023	117,0	349,0	116,0	131,0	23,0	55,0	61,0	6,0	0,0	0,0	29,0	77,0
2024	51,0	50,0	308,0	261,0	40,0	59,0	37,0	0,0	19,0	43,0	22,0	357,0

Sumber: BMKG Kabupaten Sikka, 2025

Data curah hujan dari Pos Hujan Nangablo yang berlokasi di Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, memperlihatkan fluktuasi musiman yang cukup mencolok selama periode 2020 hingga 2024. Beberapa puncak curah hujan terjadi pada bulan Januari 2021 sebesar 687,0 mm serta Maret 2020 dan Desember 2024 masing-masing mencapai 407,0 mm dan 357,0 mm. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Juni hingga September secara konsisten menunjukkan intensitas rendah bahkan nihil, misalnya Juli 2020 dan Agustus 2025 yang mencatatkan 0,0 mm. Sebaran hujan di bulan April hingga Juni umumnya tidak signifikan, menunjukkan transisi menuju musim kering. Meskipun terdapat variasi antar tahun, terlihat bahwa musim hujan cenderung terkonsentrasi pada kuartal pertama dan akhir tahun.

1.6.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025 yaitu sebanyak 345.319 jiwa, yang terdiri dari laki laki sebanyak 168.336 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 176.983 jiwa.

1.6.3 Pertumbuhan Penduduk

A. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat memberikan gambaran mengenai sebaran dan konsentrasi penduduk di suatu wilayah, yang sangat relevan untuk alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang efisien dan merata. Berdasarkan data tahun 2025, total luas wilayah Kabupaten Sikka adalah 1.675,36 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 345.319 jiwa, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sikka pada tahun 2025 mencapai 206,12 jiwa per km2. Angka ini menunjukkan kepadatan rata-rata yang cukup moderat untuk skala kabupaten.

Tabel 1.15
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km^2
Paga	76,23	17.379	227,99
Mego	81,52	13.953	138,71
Tanawawo	100,59	9.351	114,70
Lela	45,47	11.995	263,82
Bola	43,97	11.174	254,15

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk Per km^2
Doreng	54,43	12.842	235,92
Mapitara	83,28	7.094	85,18
Talibura	273,07	24.251	88,81
Waigete	141,28	27.289	120,34
Waiblama	226,76	8.923	63,16
Kewapante	22,89	15.992	698,73
Hewokloang	19,33	9.711	502,37
Kangae	39,24	19.572	498,83
Palue	13,42	9.824	255,47
Koting	16,62	6.835	411,17
Nelle	38,46	6.544	487,70
Nita	117,27	24.334	207,51
Magepanda	130,10	13.822	106,24
Alok	19,37	33.751	1.742,09
Alok Barat	48,84	26.438	541,34
Alok Timur	74,46	34.345	459,93
Jumlah	1.675,36	345.319	206,12

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas, kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Sikka menunjukkan kepadatan penduduk yang signifikan, dimana kecamatan Alok menjadi kecamatan terpadat dengan 1.742,09 jiwa per km2 dan kecamatan Kewapante juga memiliki kepadatan yang sangat tinggi, yaitu 698,73 jiwa per km2. Beberapa kecamatan seperti Lela (263,82 jiwa/km2), Palue (255,47 jiwa/km2), Bola (254,15 jiwa/km2), Doreng (235,92 jiwa/km2), dan Paga (227,99 jiwa/km2) menunjukkan kepadatan di atas rata-rata kabupaten namun tidak setinggi area perkotaan. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan relatif rendah, yaitu Waiblama (63,16 jiwa/km2), Mapitara (85,18 jiwa/km2), Talibura (88,81 jiwa/km2), Magepanda (106,24 jiwa/km2), dan Tanawawo (114,7 jiwa/km2) memiliki kepadatan penduduk yang jauh di bawah rata-rata kabupaten. Wilayah ini umumnya memiliki karakteristik geografis yang lebih luas atau topografi yang menantang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut 1.1:

Grafik 1.1
Piramida Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2025

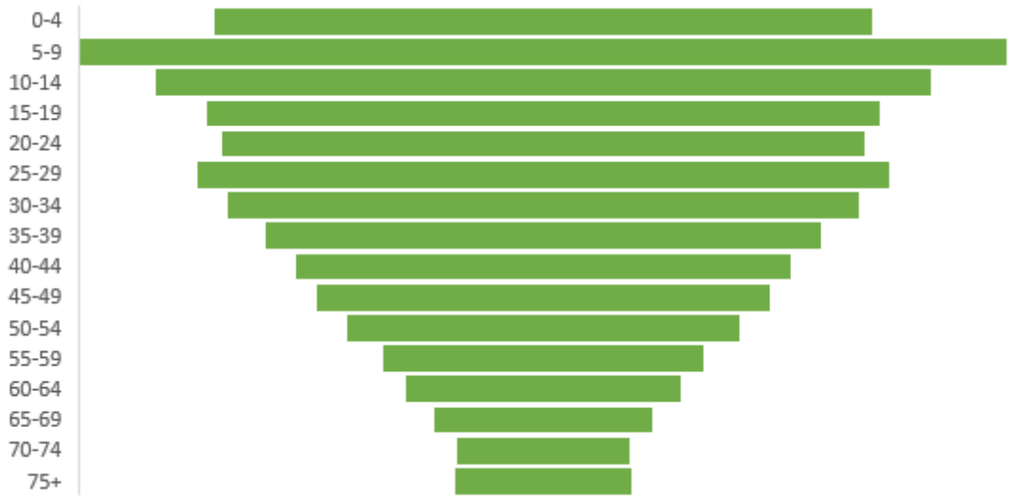

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun diikuti 10-14 tahun diikuti 25-29 tahun dan 15-19 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 108.878 jiwa atau sekitar 63,67 persen dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 62.131 jiwa atau sekitar 36,33 persen.

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Kabupaten Sikka yang tergolong angkatan kerja sebanyak 178.805 dari jumlah usia angkatan kerja Kabupaten Sikka dengan komposisi laki-laki sebanyak 95.655 dan perempuan sebanyak 83.150. Pada usia angkatan kerja terdapat pula Pengangguran terbuka sebanyak 4.693 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Sikka sebanyak 174.112.

Tabel 1.16
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kegiatan Utama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja/Working	93.420	80.692	174.112
Pengangguran Terbuka	2.235	2.458	4.693
Sekolah/Attending School	9.861	10.542	20.403
Mengurus Rumah Tangga	2.434	30.535	32.969
Lainnya/Others	10.727	5.287	16.014
Jumlah	118.677	129.514	248.191

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

D. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
PAGA	836	34	16.877	5	-	-	1	17.753
MEGO	194	81	14.325	-	-	-	-	14.600
LELA	7	10	10.002	-	-	-	-	10.019
NITA	20	40	12.133	5	-	-	-	12.198
ALOK	8	24	11.142	-	1	-	-	11.175
PALUE	35	30	12.947	-	-	-	-	13.012
NELLE	12	15	7.505	-	-	-	-	7.532
TALIBURA	4.641	112	21.016	1	-	-	-	25.770
WAIGETE	464	156	27.416	-	-	-	-	28.036
KEWAPANTE	23	17	9.090	-	-	-	-	9.130
BOLA	1.430	230	14.169	4	8	-	-	15.841
MAGEPANDA	33	17	10.035	-	-	-	1	10.086
WAIBLAMA	1.210	277	18.287	6	1	-	-	19.781
ALOK BARAT	7	43	10.420	1	-	-	-	10.471
ALOK TIMUR	19	33	6.710	-	-	-	-	6.762
KOTING	26	42	6.310	7	-	-	-	6.385
TANAWAWO	60	83	23.666	-	-	-	-	23.809
HEWOKLOANG	1.485	80	13.364	1	-	-	-	14.930
KANGAE	10.383	1.186	21.735	40	21	1	-	33.366
DORENG	8.179	1.164	15.711	14	1	-	1	25.070
MAPITARA	7.242	2.208	25.408	98	32	1	-	34.989
	36.314	5.882	308.268	182	64	2	3	350.715

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kementrian Dalam Negeri Semester II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut, Katolik sebanyak 87,90 persen, Islam sebanyak 10,35 persen, Protestan sebanyak 1,68 persen, Hindu sebanyak 0,05 persen, Budha sebanyak 0,02 persen dan Konghucu 0,001 persen. Walau adanya keberagaman agama di Kabupaten Sikka, akan tetapi kerukunan antarumat beragama senantiasa terjaga.

1.6.4 Jumlah ASN

Jumlah PNS Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebanyak 4.894 orang yang diuraikan sebagai berikut:

A. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data PNS Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.18:

Tabel 1.18.
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	23	-	23
2	SLTP/SLTP Kejuruan	28	1	29
3	SLTA/SLTA Kejuruan	322	324	646
4	Diploma I	1	12	13
5	Diploma II	23	25	48
6	Diploma III/ Sarjana Muda	201	1.054	1.255
7	Diploma IV	44	75	119

8	S-1 / Sarjana	884	1.722	2.606
9	S-2 / Sarjana	64	91	155
	Jumlah	**1.590**	**3.304**	**4.894**

Sumber : BKPSDMD, 2026

B. Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Data PNS Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel 1.19:

Tabel 1.19

Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
GOLONGAN IV				
1.	Pembina, IV/a	102	125	**227**
2.	Pembina Tk. I, IV/b	94	99	**193**
3.	Pembina Utama Muda,IV/c	57	79	**136**
4.	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	**1**
GOLONGAN III				
1.	Penata Muda, III/a	292	555	**847**
2.	Penata Muda Tk.I, III/b	260	733	**993**
3.	Penata, III/c	123	373	**496**
4.	Penata Tk. I, III/d	386	901	**1.287**
GOLONGAN II				
1.	Pengatur Muda, II/a	27	8	**35**
2.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	26	5	**31**
3.	Pengatur, II/c	109	241	**350**
4.	Pengatur Tk. I, II/d	97	185	**282**
GOLONGAN I				
1.	Juru Muda, I/a	-	-	**-**
2.	Juru Muda Tk. I, I/b	1		**1**
3.	Juru, I/c	5		**5**
4.	Juru Tk. I, I/d	10		**10**
Jumlah		**1.590**	**3.304**	**4.894**

Sumber : *BKPSDMD, 2026*

C. Data PNS Berdasarkan Jabatan

Data PNS Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.20:

Tabel 1.20.

Data PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	23	4	27
2.	Administrator	127	49	178
3.	Pengawas	150	146	296
4.	Fungsional Umum/Pelaksana	430	415	845
5.	Fungsional Tertentu	860	2.690	3550
Jumlah		**1.590**	**3.304**	**4.894**

Sumber : *BKPSDMD, 2026*

D. Data PNS Berdasarkan Usia

Data PNS Kabupaten Sikka Tahun 2025 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.21:

Tabel 1.21
Data PNS Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	21-25 Tahun	14	46	60
2	26-30 Tahun	79	226	305
3	31-35 Tahun	129	328	457
4	36-40 Tahun	138	435	573
5	41-45 Tahun	211	573	784
6	46-50 Tahun	310	582	892
7	51-55 Tahun	357	487	844
8	56-60 Tahun	352	627	979
Jumlah		**1.590**	**3.304**	**4.894**

Sumber : BKPSDMD, 2026

Sedangkan Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 sebanyak 3.220 orang yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.22
Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1.	X	S2/Profesi	14	77	91
2.	IX	S1	639	1.184	1.823
		DIV	2	33	35
3.	VII	DIII	91	380	471
4.	V	SLTA	466	268	734
5.	I	SD	53	13	66
	Jumlah		**1.265**	**1.955**	**3.220**

Sumber : *BKPSDMD, 2026*

Tabel 1.23
Jumlah PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Guru	480	1.028	1.508
2.	Kesehatan	93	492	585
3.	Teknis	692	435	1.127
TOTAL		**1.265**	**1.955**	**3.220**

Sumber : BKPSDMD, 2026

Tabel 1.24
Data PPPK Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	21-25 Tahun	9	16	25
2	26-30 Tahun	106	201	307
3	31-35 Tahun	296	520	816
4	36-40 Tahun	400	606	1.006
5	41-45 Tahun	255	376	631
6	46-50 Tahun	118	150	268
7	51-55 Tahun	57	71	128
8	56-60 Tahun	24	14	39
Jumlah		**1.265**	**1.955**	**3.220**

Sumber : BKPSDMD, 2026

1.6.5 Realisasi APBD Tahun 2025

Realisasi APBD Tahun 2025 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2025 adalah data unaudit sesuai yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per tanggal 25 Februari 2026. Secara detail Realisasi APBD Kabupaten Sikka diuraikan sebagai berikut :

1.6.5.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditarget sebesar Rp1.330.875.000.000 direalisasikan sebesar Rp1.261.991.565.056,86 atau 94,82% (sesuai data LRA per 20 Februari 2026). Target dan realisasi pendapatan daerah per jenis pendapatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 1.25 di bawah ini:

Tabel 1.25
Data Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2025

Kode	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.330.875.000.000,00**	**1.261.991.565.056,86**	**94,82**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**124.083.709.163,00**	**134.247.371.146,51**	**108,19**
4.1.01	Pajak Daerah	38.156.896.345,00	36.313.112.500,00	95,16
4.1.02	Retribusi Daerah	71.782.725.307,00	82.878.989.761,47	115,45
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.635.916.846,00	2.635.916.846,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.508.170.665,00	12.419.352.039,04	107,91
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.186.282.500.337,00**	**1.112.888.102.866,00**	**93,81**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.145.615.549.000,00	1.083.926.043.077,00	94,61
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.666.951.337,00	28.962.059.789,00	71,21
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.508.790.500,00**	**14.856.091.044,35**	**72,43**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.508.790.500,00	14.856.091.044,35	72,43

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2025 (data Unaudit)

Realisasi Pendapatan daerah terealisasi sebesar 94,82% dengan komponen terbesar ada pada PAD sebesar 108,19%. Sedangkan komponen Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 93,81% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 72,43%.
Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 134.247.371.146,51 atau 108,19% dari target sebesar Rp124.083.709.163,00 terdiri dari:

1. Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp36.313.112.500,00 atau sebesar 95,16% dari target sebesar Rp38.156.896.345;
2. Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp82.878.989.761,47 atau sebesar 115,45% dari target sebesar Rp71.782.725.307;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.635.916.846 atau 100%; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp12.419.352.039,04 atau 107,91% dari target sebesar Rp11.508.170.665.

B. Pendapatan Transfer

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.112.888.102.866 atau 93,81% dari target sebesar Rp1.186.282.500.337 yang terdiri dari:

1. Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.083.926.043.077 atau 94,61% dari target sebesar Rp1.145.615.549.000

2. Dana Pendapatan Transfer antar Daerah terealisasi sebesar Rp28.962.059.789 atau 71,21% dari target sebesar Rp40.666.951.337.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp14.856.091.044,35 atau 72,43% dari target sebesar Rp20.508.790.500 yang diterima dari komponen lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.6.5.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.345.224.170.981,66 terealisasikan sebesar Rp1.228.338.301.222,01 atau mencapai 91,31%. Target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka per jenis belanja Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada Tabel 1.26 :

Tabel 1.26
Data Realisasi Belanja dari Menurut Jenis Belanja

Kode	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
5	**BELANJA DAERAH**	**1.345.224.170.981,66**	**1.228.338.301.222,01**	**91,31**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.037.919.587.429,29**	**966.937.890.594,49**	**93,16**
5.1.01	Belanja Pegawai	642.009.633.384,25	612.839.846.125,00	95,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.443.478.905,04	308.261.563.731,49	88,72
5.1.03	Belanja Bunga	9.254.225.286,00	8.746.704.644,00	94,51
5.1.05	Belanja Hibah	36.517.749.854,00	35.418.670.094,00	96,99
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.694.500.000,00	1.671.106.000,00	62,01
5.2	**BELANJA MODAL**	**79.470.274.858,17**	**65.835.401.114,00**	**82,84**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	174.261.508,00	46.961.508,00	26,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.982.583.054,00	33.543.877.173,00	86,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.209.651.108,17	22.147.008.637,00	81,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.386.810.688,00	5.974.536.454,00	63,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.716.968.500,00	4.123.017.342,00	110,92
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.135.421.364,20**	**136.900.296,00**	**12,05**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.135.421.364,20	136.900.296,00	12,05
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**226.698.887.330,00**	**195.428.109.217,52**	**86,20**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.802.900.000,00	2.074.881.000,00	43,20
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.895.987.330,00	193.353.228.217,52	87,13

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2025 (data Unaudit)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.228.338.301.222,01 atau 91,31% dari target Rp1.345.224.170.981,66 dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp966.937.890.594,49,- atau mencapai 93,16% dari target sebesar Rp1.037.919.587.429,29 dengan rincian:

1. Belanja Pegawai, terealisasi sebesar Rp612.839.846.125,,- atau mencapai 95,45% dari target sebesar Rp642.009.633.384,25;
2. Belanja Barang dan Jasa, terealisasi sebesar Rp308.261.563.731,49 atau mencapai 88,72% dari target sebesar Rp347.443.478.905,04;
3. Belanja Bunga, terealisasi sebesar Rp8.746.704.644 atau 94,51% dari target sebesar Rp9.254.225.286,00;

4. Belanja Hibah, terealisasi sebesar Rp35.418.670.094,- atau 96,99% dari target sebesar Rp36.517.749.854,00;
5. Belanja Bantuan Sosial, terealisasi sebesar Rp1.671.106.000 atau mencapai 62,01% dari target sebesar Rp2.694.500.000,00.

B. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp65.835.401.114,- atau mencapai 82,84% dari target sebesar Rp79.470.274.858,17 dengan rincian:

1. Belanja Modal Tanah, terealisasi sebesar Rp46.961.508 atau mencapai 26,94% dari target sebesar Rp174.261.508,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terealisasi sebesar Rp33.543.877.173 atau mencapai 86,04% dari target sebesar Rp38.982.583.054,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp22.147.008.637 atau mencapai 81,39% dari target sebesar Rp27.209.651.108,17;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, terealisasi sebesar Rp5.974.536.454 atau mencapai 63,64% dari target sebesar Rp9.386.810.688,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, terealisasi sebesar Rp4.123.017.342 atau mencapai 110,92% dari target sebesar Rp3.716.968.500,00.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar Rp136.900.296 atau mencapai 12,05% dari target sebesar Rp1.135.421.364,20.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp195.428.109.217,52 atau mencapai 86,20% dari target sebesar Rp226.698.887.330 dengan rincian:

1. Belanja Bagi Hasil, terealisasi sebesar Rp2.074.881.000 atau mencapai 43,20% dari target sebesar Rp4.802.900.000,-;
2. Belanja Bantuan Keuangan, terealisasi sebesar Rp193.353.228.237,52 atau mencapai 87,13% dari target sebesar Rp221.895.987.330,-.

1.6.5.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 berasal dari dua sumber penerimaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah. Realisasi pembiayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.27 di bawah ini :

Tabel 1.27
Data Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Kode	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**14.349.170.981,66**	**14.349.170.981,66**	**100**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**43.749.590.645,66**	**43.749.590.645,66**	**100**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.749.590.645,66	43.749.590.645,66	**100**
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**43.749.590.645,66**	**43.749.590.645,66**	**100**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**100**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	**100**
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**100**
	PEMBIAYAAN NETTO	**14.349.170.981,66**	**14.349.170.981,66**	**100**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**48.002.434.816,51**	

BPKAD Kabupaten Sikka, 2025 (data Unaudit))

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.349.170.981,66 atau 100% dari target Rp14.349.170.981,66 dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan, terealisasi sebesar Rp43.749.590.645,66 atau 100% dari target sebesar Rp43.749.590.645,66. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya, terealisasi Rp104.414.699.451,00 atau 100% dari target sebesar Rp104.414.699.451,00.
- Pengeluaran Pembiayaan, terealisasi sebesar Rp29.400.419.664,00 atau 100% dari target untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 **Pendapatan Daerah**
2.2 **Belanja Daerah**
2.3 **Pembiayaan Daerah**

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

1) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi dengan melakukan berbagai upaya, antara lain:
   a. Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah;
   b. Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi;
   c. Melakukan kebijakan reward and punishment kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak;
   d. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak retribusi;
   e. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, serta melakukan upaya jemput bola.
2) Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap pendapatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
3) Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD.
4) Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dan upaya peningkatan dana transfer melalui upaya meraih Dana Insentif Daerah (DID).

Sedangkan Kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer Tahun 2025 diarahkan pada :

1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
2) Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
3) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
4) Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
5) Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PERUBAHAAN ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.350.612.500.000,-**	**1.330.875.000.000,-**	**-19.737.500.000,-**	- 1,48
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**122.744.621.614,-**	**124.083.709.163,-**	**1.339.087.549,-**	1,08
4.1.01	Pajak Daerah	43.661.837.055,-	38.156.896.345,-	-5.504.940.710,-	- 14,43
4.1.02	Retribusi Daerah	67.079.980.873,-	71.782.725.307,-	4.702.744.434,-	6,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.698.073.291,-	2.635.916.846,-	937.843.555,-	35,58
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.304.730.395,-	11.508.170.665,-	1.203.440.270,-	10,46
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.207.359.087.886,-**	**1.186.282.500.337,-**	**-21.076.587.549,-**	- 1,78
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.167.725.000,-	1.145.615.549.000,-	-22.552.176.000,-	- 1,97
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.191.362.886,-	40.666.951.337,-	1.475.588.451,-	3,63
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.508.790.500,-**	**20.508.790.500,-**	**0**	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.508.790.500,-	20.508.790.500,-	0	-
	Jumlah Pendapatan	**1.350.612.500.000,-**	**1.330.875.000.000,-**	**-19.737.500.000,-**	- 1,48
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.102.613.448.713,33**	**1.037.919.587.429,29**	**-64.693.861.284,04**	- 6,23
5.1.01	Belanja Pegawai	690.636.990.176,-	642.009.633.384,25	-48.627.356.791,75	- 7,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.704.811.893,33	347.443.478.905,04	-16.261.332.988,29	- 4,68
5.1.03	Belanja Bunga	9.254.225.286,-	9.254.225.286,-	0	-
5.1.05	Belanja Hibah	36.010.421.358,-	36.517.749.854,-	507.328.496,-	1,39
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.007.000.000,-	2.694.500.000,-	-312.500.000,-	- 11,60
5.2	**BELANJA MODAL**	**98.047.981.675,67**	**79.470.274.858,17**	**-18.577.706.817,50**	- 23,38
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.800.000,-	174.261.508,-	-66.538.492,-	- 38,18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.868.157.592,-	38.982.583.054,-	-5.885.574.538,-	- 15,10
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.822.325.675,67	27.209.651.108,17	-612.674.567,50	- 2,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.771.365.230,-	9.386.810.688,-	-11.384.554.542,-	-121,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.345.333.178,-	3.716.968.500,-	-628.364.678,-	- 16,91
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.467.189.091,-**	**1.135.421.364,20**	**-3.331.767.726,80**	-293,44
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.467.189.091,-	1.135.421.364,20	-3.331.767.726,80	-293,44
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**230.371.380.520,-**	**226.698.887.330,-**	**-3.672.493.190,-**	- 1,62
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.153.035.000,-	4.802.900.000,-	-350.135.000,-	- 7,29
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.218.345.520,-	221.895.987.330,-	-3.322.358.190,-	- 1,50
	Jumlah Belanja	**1.435.500.000.000,-**	**1.345.224.170.981,66**	**-90.275.829.018,34**	- 6,71
	Total Surplus/(Defisit)	**-84.887.500.000,-**	**-14.349.170.981,66**	**70.538.329.018,34**	-491,58
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**114.287.919.664,-**	**43.749.590.645,66**	**-70.538.329.018,34**	-161,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.287.919.664,-	43.749.590.645,66	-70.538.329.018,34	-161,23

KODE	URAIAN	PERUBAHAAN ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**114.287.919.664,-**	**43.749.590.645,66**	**-70.538.329.018,34**	-161,23
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**29.400.419.664,-**	**29.400.419.664,-**	**0**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,-	29.400.419.664,-	0	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**29.400.419.664,-**	**29.400.419.664,-**	**0**	
	Pembiayaan Netto	**84.887.500.000,-**	**14.349.170.981,66**	**-70.538.329.018,34**	-491,58
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	

Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab. Sikka T.A 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 PENDAPATAN DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, direncanakan tetap sebesar Rp1.330.875.000.000,- yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dianggarkan tetap sebesar Rp124.083.709.163,- dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp38.156.896.345,- dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pajak Reklame dianggarkan tetap sebesar Rp551.478.807,-
      2) Pajak Air Tanah dianggarkan tetap sebesar Rp104.309.800,-
      3) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan tetap sebesar Rp31.000.000,-
      4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan tetap sebesar Rp1.500.000.000,-
      5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dianggarkan tetap sebesar Rp7.511.354.863,-
      6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dianggarkan tetap sebesar Rp4.000.000.000,-
      7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dianggarkan tetap sebesar Rp-
      8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dianggarkan tetap sebesar Rp14.212.552.875,-
      9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan tetap sebesar Rp7.246.200.000,-
      10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan tetap sebesar Rp3.000.000.000,-
   b. Hasil Retribusi Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp71.782.725.307,- dengan rincian sebagai berikut:
      1) Restribusi Jasa Umum dianggarkan tetap sebesar Rp62.885.024.000,-
      2) Retribusi Jasa Usaha dianggarkan tetap sebesar Rp8.632.201.307,-
      3) Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan tetap sebesar Rp265.500.000,-
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan tetap sebesar Rp2.635.916.846,- yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp11.508.170.665,- dengan rincian sebagai berikut:
      1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan tetap sebesar Rp189.000.000,-
      2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan tetap sebesar Rp248.815.000,-
      3) Jasa Giro dianggarkan tetap sebesar Rp1.075.000.000,-
      4) Pendapatan Bunga dianggarkan tetap sebesar Rp29.201.000,-

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp3.000.000.000,-
6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain dianggarkan tetap sebesar Rp273.071.797,-
7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp27.100.000,-
8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp126.333.679,-
9) Pendapatan BLUD dianggarkan tetap sebesar Rp6.539.649.189,-
10) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp-

2. Pendapatan Transfer dianggarkan tetap sebesar Rp1.186.282.500.337,- terdiri dari:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan tetap sebesar Rp1.145.615.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Dana Desa dianggarkan tetap sebesar Rp147.124.963.000,-
      2) Insentif Fiskal dianggarkan tetap sebesar Rp7.699.143.000,-
      3) Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan tetap sebesar Rp8.715.967.000,-
      4) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan tetap sebesar Rp714.634.061.000,-
      5) Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan tetap sebesar Rp267.441.415.000,-
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan tetap sebesar Rp40.666.951.337,- yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp20.508.790.500,- yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

2.2 BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Belanja Daerah, dianggarkan tetap sebesar Rp1.345.224.170.981,66 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi dianggarkan tetap sebesar Rp1.037.919.587.429,29 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja Pegawai dianggarkan tetap sebesar Rp642.009.633.384,25 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan tetap sebesar Rp485.022.008.809,15
      2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan tetap sebesar Rp138.716.059.911,10
      3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp17.104.223.464,-
      4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp177.251.200,-
      5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp510.880.000,-
      6) Belanja Pegawai BLUD dianggarkan tetap sebesar Rp479.210.000,-
   b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan tetap sebesar Rp347.443.478.905,04 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Barang dianggarkan tetap sebesar Rp99.995.962.656,87
      2) Belanja Jasa dianggarkan tetap sebesar Rp116.955.510.512,17
      3) Belanja Pemeliharaan dianggarkan tetap sebesar Rp2.179.308.320,-
      4) Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan tetap sebesar Rp38.645.628.950,-
      5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan tetap sebesar Rp527.052.800,-
      6) Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan tetap sebesar Rp26.067.948.416,-

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan tetap sebesar Rp63.072.067.250,-

c. Belanja Bunga dianggarkan tetap sebesar Rp9.254.225.286,- yang bersumber dari belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah.

d. Belanja Hibah dianggarkan tetap sebesar Rp36.517.749.854,- dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp7.489.680.000,-
   2) Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp13.087.029.200,-
   3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan tetap sebesar Rp810.914.654,-
   4) Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp15.130.126.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan tetap sebesar Rp2.694.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp2.694.500.000,-
   2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp-

2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp79.470.274.858,17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp174.261.508,- digunakan untuk belanja modal tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan tetap sebesar Rp38.982.583.054,- dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp4.039.799.050,-
   2) Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp3.029.652.700,-
   3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp151.224.600,-
   4) Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp85.538.600,-
   5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.961.839.400,-
   6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp80.689.700,-
   7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp17.641.314.000,-
   8) Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp287.623.900,-
   9) Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp4.585.245.054,-
   10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP dianggarkan tetap sebesar Rp2.119.656.050,-
   11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan tetap sebesar Rp2.000.000.000,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp27.209.651.108,17 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp27.076.811.408,17
   2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan tetap sebesar Rp132.839.700,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan tetap sebesar Rp9.386.810.688,- dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan tetap sebesar Rp4.398.005.843,-
   2) Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan tetap sebesar Rp75.000.000,-
   3) Belanja Modal Instalasi dianggarkan tetap sebesar Rp4.184.799.000,-
   4) Belanja Modal Jaringan dianggarkan tetap sebesar Rp729.005.845,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp3.716.968.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp282.163.500,-
2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan tetap sebesar Rp61.452.000,-
3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dianggarkan sebesar Rp3.373.353.000,-

3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan tetap sebesar Rp1.135.421.364,20
4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp226.698.887.330,- dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan tetap sebesar Rp4.802.900.000,- dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dianggarkan tetap sebesar Rp3.815.700.000,-
      2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa dianggarkan tetap sebesar Rp987.200.000,-
   b. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan tetap sebesar Rp221.895.987.330,- digunakan untuk belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

2.3 PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan tetap sebesar Rp43.749.590.645,66 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp43.749.590.645,66.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan tetap sebesar Rp29.400.419.664,00 yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp29.400.419.664,-.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
3.4. Capaian Indikator Kinerja Daerah

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan Tahun pertama pelaksanaan pembangunan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025, maka prioritas pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan RPJMD meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif.

Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, selanjutnya disusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 yang terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah (PD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, insentif pendidikan serta manajemen kependidikan yang berkualitas dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Capaian Kinerja Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas. AMH Kabupaten Sikka selama periode Tahun 2021-2025 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1.
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

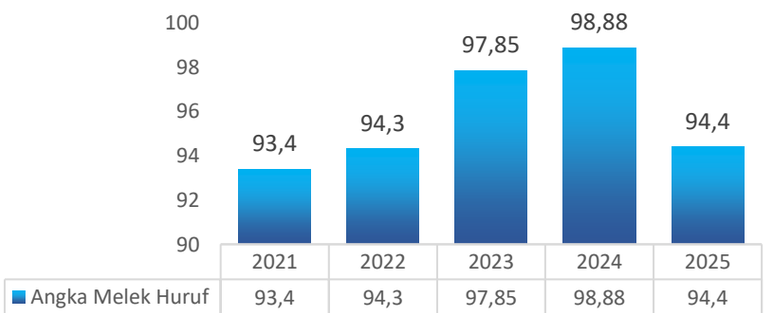

Sumber: Data Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 sebesar 93,40% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 94,03%. Untuk Tahun 2023 ada peningkatan menjadi 97,85% dan pada Tahun 2024 kembali naik menjadi 98,88%. Sedangkan untuk Tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 94,40%.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yangpernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

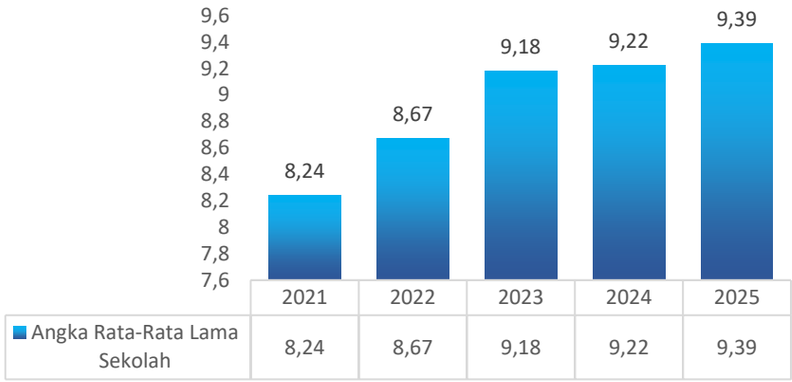

Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2021 sebesar 8,24, Tahun 2022 naik menjadi 8,67 dan pada Tahun 2023 juga ada kenaikan menjadi 9,18. Untuk Tahun 2024 kembali naik menjadi 9,22. Dan pada tahun 2025 kembali naik menjadi 9,39.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3

Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

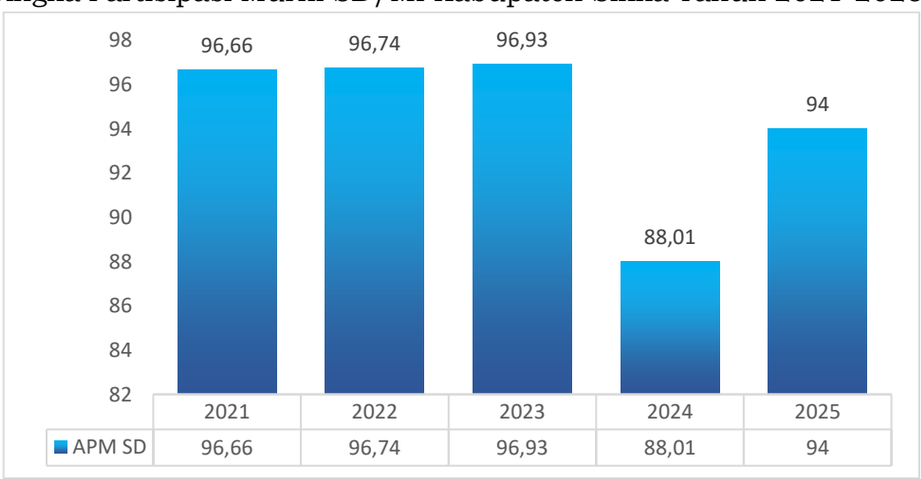

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 96,66%, Tahun 2022 naik menjadi 96,74%, pada Tahun 2023 ada kenaikan menjadi 96,93% dan pada Tahun 2024 turun menjadi sebesar 88,01%. Sedangkan untuk tahun 2025 naik menjadi 94%.

APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

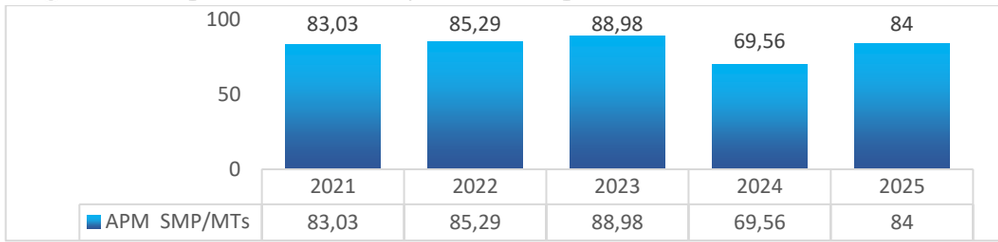

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 terus mengalami mengalami fluktuasi. Tahun 2021 APM SMP/MTs Kabupaten Sikka sebesar 83,03%, pada Tahun 2022 naik menjadi 85,29%, dan Tahun 2023 ada kenaikan menjadi 88,98%. Pada Tahun 2024 turun 69,56%. Dan pada tahun 2025 kembali naik menjadi 84%.

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

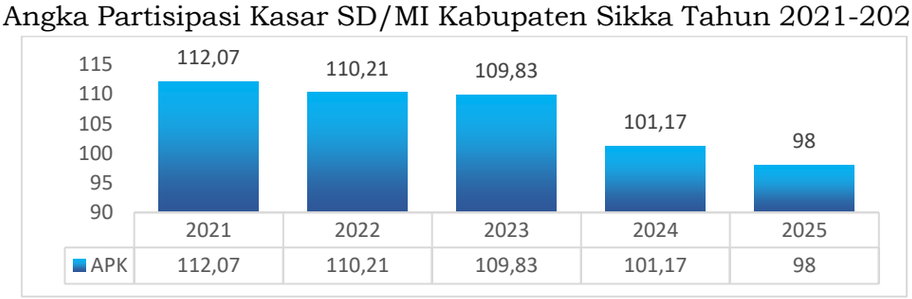

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 112,07, pada Tahun 2022 turun menjadi 110,21 dan Tahun 2023 kembali turun menjadi 109,83. Pada Tahun 2024 sebesar 101,17 dan tahun 2025 turun menjadi sebesar 98. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

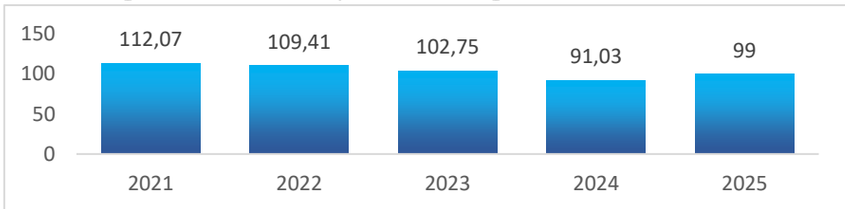

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 112,07% , pada Tahun 2022 menjadi 109,41% dan pada Tahun 2023 turun menjadi 102,75% dan turun lagi pada Tahun 2024 menjadi 91,03. Sedangkan untuk tahun 2025 naik menjadi sebesar 99.

e. Indeks Distribusi Guru

Rasio guru terhadap murid disesuaikan melalui asesmen nasional menjadi indeks distribusi guru. Indeks Distribusi Guru adalah alat ukur untuk mengetahui ketidakmerataan guru disuatu wilayah. Indeks Distribusi Guru SD pada Tahun 2021 – 2023 sebesar 0,6 dan Tahun 2024 sebesar 0,88. Sedangkan Tahun 2025 sebesar 0,88. Untuk Indeks distribusi Guru SMP Tahun 2021 – 2023 sebesar 0,33 dan Tahun 2024 sebesar 0,71. Sedangkan Tahun 2025 sebesar 0,71. Indeks Distribusi Guru SD dan SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.7
Indeks Distribusi Guru SD dan SMP Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

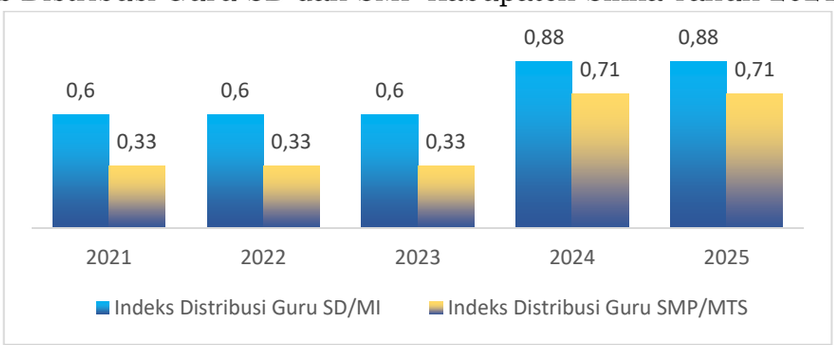

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pendidikan Tahun 2025 di dukung dengan Program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran sertab Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)**	**80**	**71**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**100%**	**97,21%**		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				
				Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734 Orang	2.734 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	420 Orang	420 Orang		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**83,30%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	-	tidak dilaksanakan (DAU BG)	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
			Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	54	54,25		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	47,97	49,77		
				Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	66,03	66,15		
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen Nasional (Nilai)	58,83	59		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**100%**	**87,60%**		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	98,84	92,07		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	75,96	70,15		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	7,98	8		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)				
				Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	75,67	90,01		
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**100,00%**	**96,52%**		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	Tingkat Kualitas dan kuntitas standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum Optimal yang dipengaruhi juga ketersediaan Data pokok pendidikan belum maksimal	Peningkatan Bantuan teknis Pemtakiran Data Pokok Pendidikas di setiap satuan Pendidikan dan Penguatan sistim kloordinasi pemenuhan syarat akses program Revitalisasi Nasional
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit	8 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	4 Ruang		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3 Ruang	3 Ruang		
				Pengadaan Mebel Sekolah	21 Paket	21 Paket		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	3 Ruang		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranan dan Utilitas Sekolah	8 Unit	8 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	103 Ruang	103 Ruang		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	23 Paket	9 Paket	terdapat 14 paket pengadaan laptop yang tidak sesuai dan dikembalikan ke pihak penyedia.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48 Siswa	48 Siswa		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	490 Orang	450 Orang	Karena ada yang lulus PPPK	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	150 Orang	Masih Tingginya Jumlah Kepala sekolah belum memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala Sekolah serta masih terbaatas jumlah guru memperoleh kesempatan Pendidika dan Pelatihan pengembangan Metode dan strategi [embelajaran berpusat pada Pesertadidik (Koding/ Kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam)_	Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimbingan teknis dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Komptensi Kodig dan Kecertdasan artifisial serta pembelajaran mendalam
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	336 Orang	336 Orang		
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	150 Orang		
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	3 Konten Pembelajaran	3 Konten Pembelajaran		
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	180 Orang	180 Orang		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan	Belum optimalnya Kemampuan Manajemen Sekolah dalam pelaksanaan Tata kelola Sekolah dengan dukungan Digitalisasi Sekolah/ Pemanfaat IT dalam Pengelolaan Manjemen dan Pembelajaran	Mpeningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pembinaan Kelembagaan, Dukunaghn pendamping Supervisi dan Evaluasi Layanan pendidikan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	336 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	Ada 1 sekolah tidak memenuhi syarat salur	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Laporan	4 Laporan		
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	21 Kombel	21 Kombel		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kependidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	336 Satuan Pendidikan	336 Satuan Pendidikan		
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**100%**	**99,59%**		
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	1 unit	Tingkat Kualitas dan kuntitas standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum O(ptimal yang dipengaruhi juga ketersediaan Data pokok pendidikan belum maksimal	Peningkatan Bantuan teknis Pemtakiran Data Pokok Pendidikas di setiap satuan Pendidikan dan Penguatan sistim kloordinasi pemenuhan syarat akses program Revitalisasi Nasional
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Unit	2 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6 Ruang	6 Ruang		
				Pengadaan Mebel Sekolah	3	3		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	5 Ruang	5 Ruang		
				Pengadaan Alat raktek dan Peraga Peserta didik	8	8		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	28 Orang	28 Orang		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	244	223 Orang	Lulus PPPK	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150 Orang	150 Orang	Masih Tingginya Jumlah Kepala sekolah belum memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala Sekolah serta masih terbaatas jumlah guru memperoleh kesempatan Pendidika dan Pelatihan pengembangan Metode dan strategi	Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimbingan teknis dan Pelatihan Calon Kepala

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	90 Orang	90 Orang	[embelajaran berpusat pada Pesertadidik (Koding/ Kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam)	Sekolah, Komptensi Kodig dan Kecertdasan artifisial serta pembelajaran mendalam
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	3 konten	3 konten		
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	90 Orang	90 Orang		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	Belum optimalnya Kemampuan Manajemen Sekolah dalam pelaksanaan Tata kelola Sekolah denga dukunghan Difigitalisasi Sekolah/ Pemanfaat IT dalam Pengelolaan Manjemen dan Pembelajaran	Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pembinaan Kelembagaan, Dukunaghn pendamping Supervisi dan Evaluasi Layanan pendidikan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Orang	90 Orang		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Laporan	4 Laporan		
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8 Kombel	8 Kombel		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**100%**	**95,62%**		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Unit	3 Unit		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	4 Unit		
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	6 Paket	6 Paket		
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	270 orang	270 orang		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	40 Orang	40 Orang		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	82 Orang	82 Orang		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	270 satuan pendidikan	270 satuan pendidikan		
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	290 satuan pendidikan	290 satuan pendidikan		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	270 Orang	270 Orang		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Laporan	2 Laporan		
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				
				Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	12 Paket	12 Paket		
			Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Non Formal	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**100**	**58,67**		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15 Orang	12 Orang		
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	5 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Laporan	2 Laporan		
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan	0 Kegiatan		
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**100%**	**100%**		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan	11%	12%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				kurikulum mulok bahasa dan sastra				
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40 orang	40 orang		
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**100%**	**100%**		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD)	1	1		
				Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1	masih terdapat distribusi guru yang belum merata	
				Kegiatan Pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/kesetaraan	**100%**	**100%**		
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 laporan	3 laporan		
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 laporan	3 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**100%**	**0**		
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional (%)	100%	0		
				Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**100%**	**0**		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 laporan	-	Tata kelola keuangan yang belum otpimal	
				Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**100%**	**0**		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 laporan	-	Tata kelola keuangan yang belum otpimal	

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026.

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi keluarga miskin; meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; memperbaiki sarana dan prasarana serta kualitas Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, dengan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan. Capaian Kinerja Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran pada Tahun 2021 adalah 3,6 per 1000 kelahiran namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi 13,73 per 1000 kelahiran. Pada Tahun 2023 menurun menjadi 9 per 1000 kelahiran dan pada Tahun 2024 kembali menurun menjadi 3 per 1000 kelahiran. Sedangkan untuk tahun 2025 adalah 10,5 per 1000 kelahiran. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

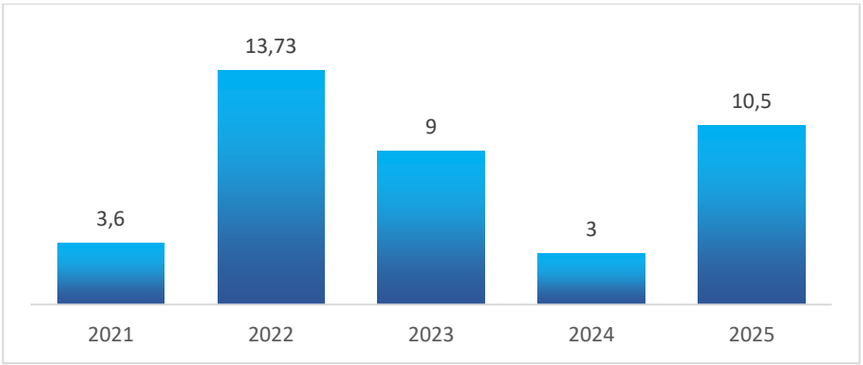

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

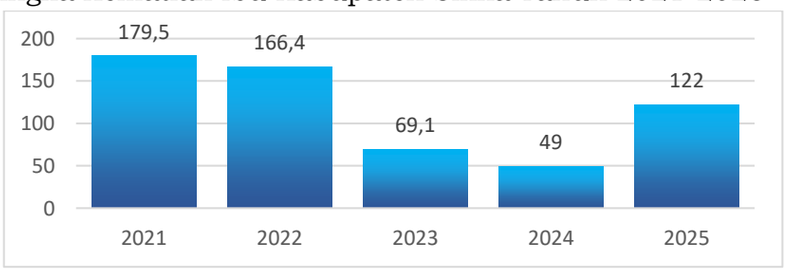

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2025.

Dilihat dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi, walaupun masih dibawah target nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 179,5 per 100.000 KH dan

pada Tahun 2022 sebanyak 166,4 per 100.000 KH (8 kasus), sedangkan pada Tahun 2023 turun menjadi 69,1 per 100.000 KH (3 kasus) dan pada Tahun 2024 menjadi 49,1 per 100.000 KH (2 kasus). Untuk Tahun 2025 menjadi 122 per 100.000 KH (5 kasus)

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10

Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

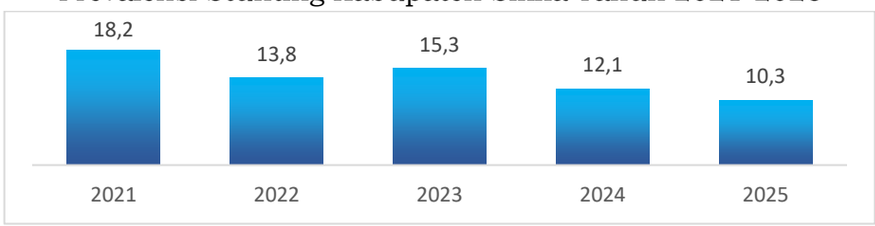

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian data stunting di Kabupaten Sikka sejak Tahun 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi. Kondisi data stunting di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 tercatat sebesar 18,2% , pada Tahun 2022 ini mengalami penurunan menjadi 13,8%, pada Tahun 2023 ada kenaikan menjadi 15,3%, pada Tahun 2024 turun menjadi 12,1% dan Tahun 2025 turun kembali menjadi 10,3%.

d. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11

Rasio Posyandu per-Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

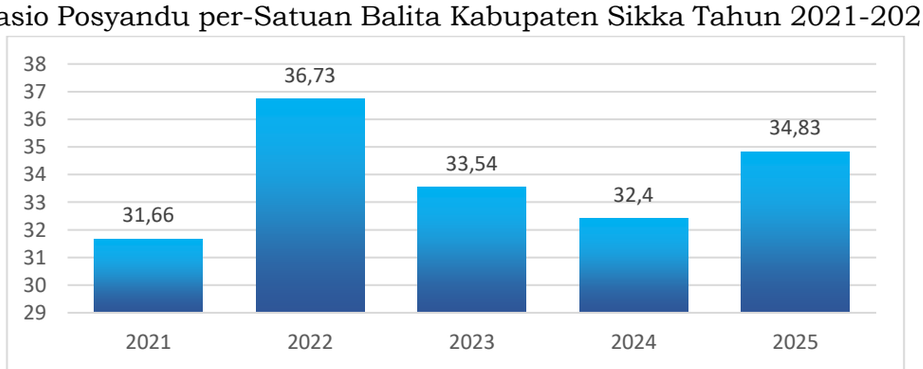

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 31,66% dan pada Tahun 2022 naik

menjadi 36,73%, sedangkan pada Tahun 2023 turun menjadi 33,54%. Sedangkan pada Tahun 2024 kembali turun menjadi 32,4% dan pada Tahun 2025 34,83%.

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2022-2025

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pem.Kab	Swasta	Jumlah	Pem.Kab	Swasta	Jumlah	Pem.Kab	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit Umum	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Puskesmas Rawat Inap	14		14	14		14	14		14
Puskesmas Non Rawat Inap	11		11	13		13	13		13
Puskesmas Pembantu	61		61	68		68	68		68
Posyandu	650		650	666		666	679		679

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Gambaran perkembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tersebar di Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Dokter Spesialis	25 Orang
2	Dokter Umum	29 Orang
3	Dokter Gigi	11 Orang
4	Epidemologi (Kesehatan Masyarakat)	6 Orang
5	Perawat	750 Orang
6	Bidan	746 Orang
7	Terapis Gigi dan Mulut	34 Orang
8	Nutrisionis /Gizi	66 Orang
9	Promkes	57 Orang
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	67 Orang
11	Sanitarian / Kesehatan Lingkungan	54 Orang
12	Apoteker	38 Orang
13	Analis Teknologi Laboratorium Medik	73 Orang
14	Fisioterapi	15 Orang
15	Rekam Medik	58 Orang
16	Elektromedis	5 Orang
17	Total	2.565 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Sikka selama periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlihat pada grafik 3.12:

Grafik 3.12
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

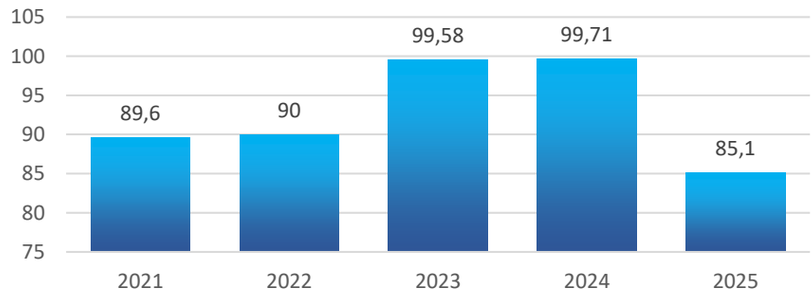

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 sebesar 89,6% yang naik pada Tahun 2022 menjadi 90% dan Tahun 2023 menjadi 99,58%. Untuk Tahun 2024 juga ada kenaikan menjadi 99,71%. Pada Tahun 2025 sebesar 85,1%.

g. Imunisasi

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila ≥ 80% bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar 95%, Tahun 2022 meningkat menjadi 96.9%, dan mengalami penurunan di Tahun 2023 menjadi 95% dan Tahun 2024 sebesar 80,3%. Sedangkan Tahun 2025 sebesar 50,1%. Pencapaian UCI Kabupaten Sikka selama periode Tahun 2021 –2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025

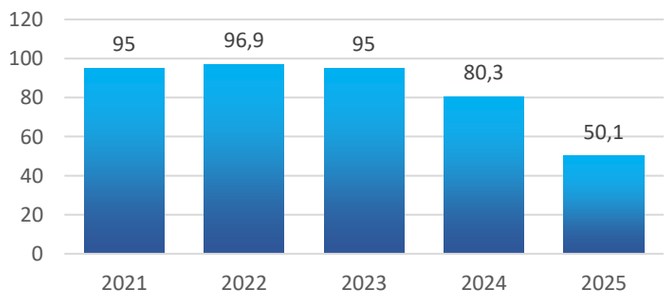

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026.

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Penanganan

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu Tahun 2021-2025 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

i. Cakupan Treatment Coverage Tuberkulosis (TCTB) dan Treatment Success Rate (TSR)

TC TB adalah singkatan dari Treatment Coverage (TC) Tuberkulosis (TB). TC TB merupakan persentase jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada Tahun tertentu. TSR (Treatment Success Rate) adalah indikator keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB). TSR merupakan persentase penderita TB paru yang telah menyelesaikan pengobatannya dan sembuh.

Capaian TC TB Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 sebanyak 38,4% (426 Kasus), pada Tahun 2022 naik menjadi 40,1% (444 Kasus), Tahun 2023 naik menjadi sebesar 45,3% (501 Kasus) dan Tahun 2024 turun menjadi sebesar 43,3% (564 Kasus). Pada Tahun 2025 sebanyak 47,89%. Capaian TSR Tahun 2021-2025 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 sebesar 90,71%, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 91,98 dan turun pada Tahun 2023 menjadi 83,36% sedangkan pada Tahun 2024 naik menjadi sebesar 86,1% dan pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 158,50%. Cakupan TC TB dan TSR Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14
Cakupan TC TB dan TSR Kabupaten Sika Tahun 2021-2025

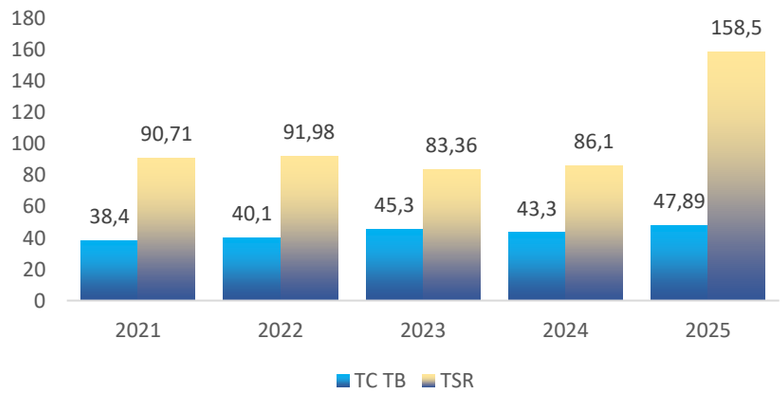

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penderita DBD Tahun 2021–2025 semuanya tertangani 100% oleh petugas kesehatan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yangrealisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga	Jumlah Kematian Ibu	2 Org	5 Org	Masih rendahnya cakupan pelayanan imunisasi rutin yang disebabkan terjadinya kekosongan vaksin DPT dan MR pada bulan Januari s/d Maret (tidak ada pengiriman dari kementerian kesehatan) Masih rendahnya Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) disebabkan oleh : Penemuan aktif case finding belum optimal, Kerjasama lintas program dan dukungan lintas sektor belum maksimal Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan : Masih Terdapat 7 Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter karena : 1).Tidak ada pelamar dokter pada formasi pengadaan dokter tahun 2024; 2) Pemda tidak diberikan kewenngan pengadaan tenaga lain diluar pengadaan ASN (UU 20/2023 tentang ASN)	Koordinasi dengan bidang SDK pada Dinas Kesehatan untuk rencana kebutuhan dokter spesialis Membuat surat penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait kepatuhan terhadap SOP dan pendampingan langsug di puskesmas oleh tim Dinkes Tetap dilakukan permintaan ke Kementerian Kesehatan agar vaksin dikirimkan tepat waktu Penguatan Penemuan Kasus Aktif dan Intensif melalui : Investigasi Kontak Masif: Melakukan pelacakan kontak erat dari pasien TB positif secara proaktif di tingkat keluarga dan komunitas. Skrining Masif di Kelompok Berisiko: Skrining terfokus pada tempat penampungan padat penduduk, penjara, panti jompo, dan tempat kerja. Pemberdayaan Kader Kesehatan (Detektif TB): Mengaktifkan kader komunitas untuk mengenali gejala dan mendampingi suspek TB ke layanan kesehatan. Menggalang kerja sama dengan pihak luar untuk memperluas jangkauan penemuan kasus melalui : Lokakarya Tribulanan Puskesmas Pendekatan kepada Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik, Dokter Praktek Mandiri,
				Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13,5 %	11%		
				Prevalensi Stunting	31,26 %	10,3 %		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98,38 %	99,53 %		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	90 %	81,78 %		
				Persentase Hipertensi dalam pengendalian	20 %	9,04 %		
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	36 %	41,24 %		
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	80 %	50,1 %		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	69,60%		
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100%	70,2%		
				Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	85%	0%		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	11,5%	10,5 %		
				Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	55%	44 %		
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1,4 %	0,63 %		
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23,4%	2,16 %		
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	77%	89,61 %		
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	50%	66,67 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Apotek) agar Menerapkan strategi Public-Private Mix (PPM) untuk merujuk pasien bergejala TB ke Puskesmas atau rumah sakit Dinas Kesehatan telah bersurat ke MenpanRB, Kemenkes dan Depdagri perihal pemberian kemudahan pengadaan khusus tenaga dokter dengan pembiayaan DAU.
				Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna	20%	26,67 %		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	90%	47,89 %		
				Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	421	319		
				Jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	33	33		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	66,33 %		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	85,10 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	87,70 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%	75,60 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	100%	98,20 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	100%	53,50 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	100%	83,50 %		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	48,80 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100%	51,20 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	90,60 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	100%	158,50 %		
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100%	107,17 %		
				Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	0,9%	1,1 %		
				Positifity rate Malaria	4,9%	0,40 %		
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	88,33%		
				Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	2 unit	1 Unit		
				Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	25 Unit	25 Unit		
				Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250 Unit	250 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Sub Kegiatan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250 Unit	250 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman difasilitas Kesehatan	250 paket	225 paket		
				Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	25 unit	15 unit		
				Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	200 paket	200 paket		
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	90,05%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.809 Orang	3.190 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.809 Orang	4.092 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.562 Orang	4.000 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60.666 Orang	59.588 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.204 Dokumen	31.066 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.069 Orang	969 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.114 dokumen	6.522 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.402 dokumen	6.861 dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 paket	-		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 unit	12 unit		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan	12 laporan		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 orang	12 orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	125 orang	125 orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	125 Dokumen	125 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12 unit	12 unit		
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Dokumen	-		
				Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500 orang	623 orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terpadu	100%	0%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	-		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	25%		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	69,78%		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	82,71%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	350 org	229 org		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 dokumen	12 dokumen		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100%	56,84%		
				Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehata Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	607 org	345 org		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	90,97%		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	93,62%		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47 Sarana	44 Sarana		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	88,32%		
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	137 Sarana	121 Sarana		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia	100%	100%		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,5	69		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4175 Org	4175 Org		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	88,24%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	7 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Paket	18 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	22 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	83,33%		
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	83,33%		
				Pengadaan Mebel	79 Paket	79 Paket		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	2 Unit		
				Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyedaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2 Dokumen	1 Dokumen		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 Keg	48 Keg		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Keg	1 Keg		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2026

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup penyediaan infrastruktur dasar serta pengaturan tata ruang guna menjamin pemanfaatan ruang yang tertib, aman, produktif dan berkelanjutan. Dalam aspek pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem drainase, irigasi, penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah menjadi prioritas utama. Sementara itu, dalam aspek penataan ruang, bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator dibawah ini:

a. Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik

Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik adalah luas irigasi kondisi baik dibandingkan dengan luas irigasi kabupaten. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, persentase irigasi kabupaten kondisi baik di Kabupaten Sikka sebesar 46,25% dan Tahun 2024 naik menjadi 49,09%. Pada Tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 49,40% dengan capaian luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 497,95Ha dari total luas irigasi sebesar 1.008Ha. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya rehabilitasi 2 Daerah Irigasi di Kabupaten Sikka.

Grafik 3.15
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2021–2025

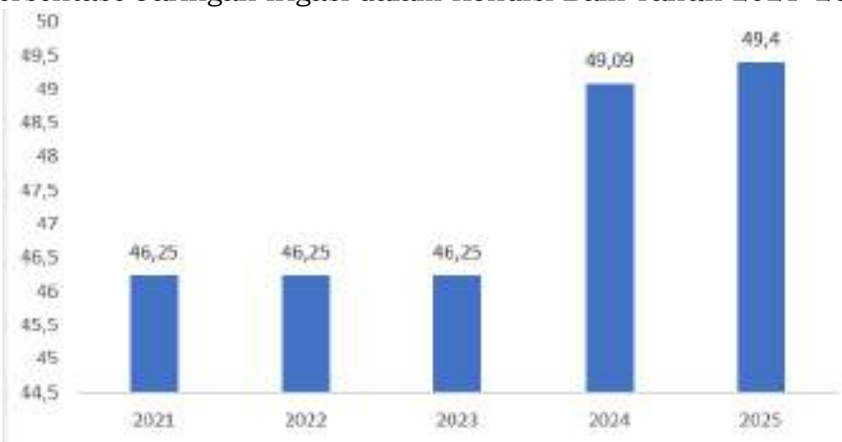

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2026

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Rumah tangga dengan akses air minum layak merupakan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum terlindungi dari pencemaran, baik secara fisik maupun konstruksi. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2025 jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Sikka selalu mengalami peningkatan, mulai dari Tahun 2021 jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak sebanyak 28.187 rumah tangga, Tahun 2022 sebanyak 34.478 rumah tangga, Tahun 2023 sebanyak 35.254 rumah tangga, Tahun 2024 sebanyak 36.585 rumah tangga, hingga Tahun 2025 mencapai 46.437 rumah tangga.

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak dengan total jumlah rumah tangga. Pada periode Tahun 2021 s/d Tahun 2025 persentase rumah tangga dengan akses air minum layak terjadi peningkatan bertahap. Pada Tahun 2021 persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 43,74%, Tahun 2022 naik menjadi 53,51%, Tahun 2023 kembali naik menjadi 54,71 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 56,41% hingga pada Tahun 2025 masih terjadi peningkatan menjadi 57,29%. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan air minum yang mengindikasikan terjadinya efektivitas program pengembangan jaringan perpipaan,

optimalisasi sistem penyediaan air minum dan peningkatan cakupan layanan kepada masyarakat.

Grafik 3.16
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak 2021 – 2025

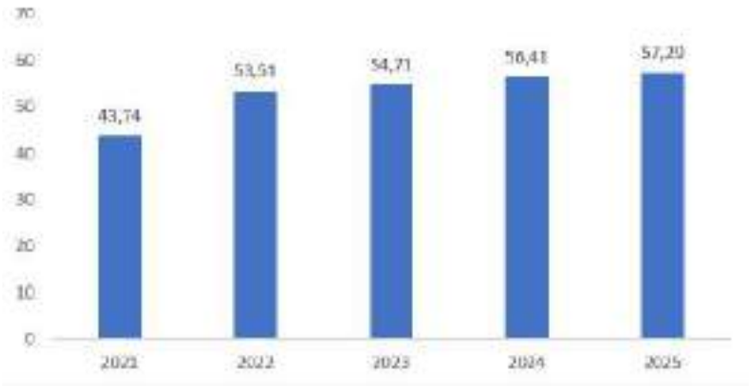

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2026

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak merupakan rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas buang air besar yang memenuhi standar kesehatan. Akses sanitasi layak wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin lingkungan yang bersih dan sehat.

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan total jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Sikka pada periode Tahun 2021 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021, akses sanitasi layak baru menjangkau 49,34%. Kemudian pada Tahun 2022 meningkat menjadi 50,97%. Kenaikan ini masih berlanjut pada Tahun 2023 menjadi 51,28%, namun pada Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 51,03%. Akses sanitasi layak kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 51,31. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan secara bertahap, upaya percepatan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi yang layak, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar target akses sanitasi layak dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Grafik 3.17
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak Tahun 2021 – 2025

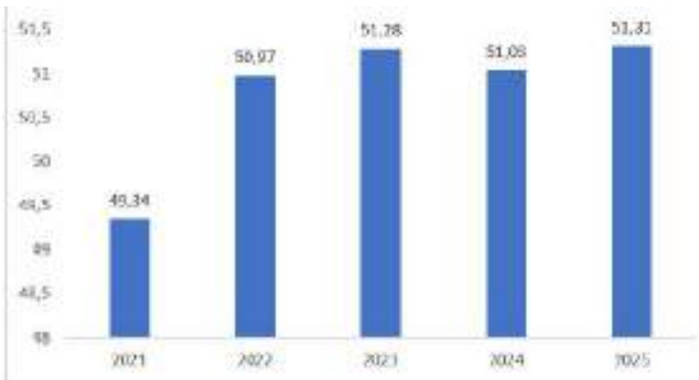

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2026.

d. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik

Sistem drainase mendukung kualitas permukiman, pengendalian banjir dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Efektivitas jaringan drainase sangat menentukan kenyamanan, keamanan dan kelangsungan aktivitas

sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru.

Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang drainase dalam kondisi baik dengan total panjang drainase. Pada Tahun 2021, drainase dalam kondisi baik sepanjang 14.803 meter atau setara 61,67% dari total panjang drainase 24.005,05 meter. Upaya peningkatan kualitas jaringan drainase terus dilakukan secara bertahap, sehingga pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 15.590 meter panjang drainase dalam kondisi baik atau 64,94%. Kondisi ini masih sama hingga Tahun 2023. Dan pada Tahun 2024 kembali terjadi peningkatan drainase dalam kondisi baik yaitu menjadi 15.690 meter atau menjadi 65,36%. Pada Tahun 2025, capaian kondisi drainase dalam kondisi baik tetap sama seperti capaian Tahun 2024. Capaian Tahun 2025 yang tidak mengalami perubahan menunjukkan tidak adanya kegiatan pananganan drainase pada tahun berjalan, sekalipun sudah terdapat perencanaan penanganan drainase namun dikarenakan keterbatasan fiskal daerah sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Grafik 3.18
Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2021 – 2025

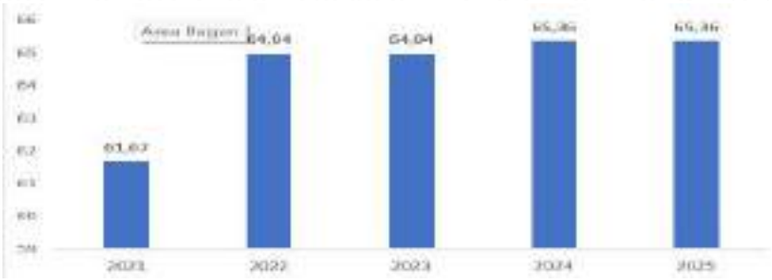

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2026

e. Tingkat Kemantapan Jalan

Tingkat kemantapan jalan merupakan persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Berikut kondisi jalan kabupaten pada Tahun 2021-2025 yang dapat dijelaskanpada tabel berikut:

Tabel 3.5
Kondisi Jalan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Kondisi Jalan Kabupaten	**Panjang Jalan Kabupaten (Km)**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Baik	293,013	375,34	376,15	379,71	389,31
Sedang	186,127	161,30	161,30	129,30	88,19
Rusak Ringan	132,884	108,55	108,55	144,55	67,82
Rusak Berat	232,221	199,06	198,25	227,86	336,10
Total Jalan Kabupaten (Km)	**844,25**	**844,25**	**844,25**	**881,42**	**881,42**

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2025

Pada Tahun 2021-2025, tingkat kemantapan jalan mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2021 tingkat kemantapan jalan sebesar 56,75%, kemudian meningkat menjadi 63,56% pada Tahun 2022 dan relative stabil pada Tahun 2023 sebesar 63,66%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik. Namun, pada Tahun 2024 tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan menjadi 57,75% dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 54,17%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi rusak, meskipun terjadi penambahan total panjang jalan kabupaten dari 844,25 Km pada Tahun 2021-2023 menjadi 881,42 Km pada Tahun 2024-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan jalan, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pada ruas jalan dengan kerusakan berat masih cukup tinggi.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Merata dan Berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Layanan Infranstruktur Ke PU an**	**55,38**	**55,51**		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**100**	**0**		
				Indikator : Persentase Panjang irigasi kabupaten kondisi baik	49,15%	49,40%		
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**0%**		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	0	Sudah diajukan telaahan staf untuk pelaksanaan, namun tidak disetujui oleh TAPD	Percepatan Proses PBJ
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**100%**	**50%**		
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	**56,91%**	**57,29%**		
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**50%**		
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 Liter / Detik	50 Liter / Detik		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 Liter / Detik	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**100%**	**0%**		
				Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	**52,11%**	**64,06%**		
				Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**0%**		
				Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Ton / Hari	0	Sudah diajukan telaahan staf untuk pelaksanaan, namun tidak disetujui oleh TAPD	Percepatan Proses PBJ
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM AIR LIMBAH	**100%**	**100%**		
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	**51,28%**	**51,31%**		
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	20 M3 / Hari	20 M3 / Hari		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**100%**	**0**		
				Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	**65,36%**	**65,36%**		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**0**		
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	20 Meter	0	Sudah diajukan telaahan staf untuk pelaksanaan, namun tidak disetujui oleh TAPD	Percepatan Proses PBJ
				Sub Kegiatan Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	0	0	Pagu sub kegiatan merupakan sisa pembayaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pelaksanaan pekerjaan tahun 2024	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**100%**	**100%**		
				Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	**99,29%**	**99,26%**		
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**100%**	**100%**		
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	80 Dokumen		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**100%**	**50,00%**		
				Tingkat Kemantapan Jalan	**54,23%**	**54,17%**		
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	**100**	**50,00**		
				Pembangunan Jalan	6 KM	0	Pagu sub kegiatan merupakan sisa pembayaran pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 - Terdapat pekerjaan dari pokir, telah dibuat telaah staf untuk pelaksanaannya, namun tidak disetujui	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	2,5 KM	0	Disetujui TAPD, namun waktu pelaksanaan tidak cukup	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembangunan Jembatan	1 Meter	1	Merupakan sisa pembayaran tahun 2024 untuk pembangunan jembatan napun seda	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100 KM	100		
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**100%**	**83,33%**		
				Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis / Terampil	**14,89%**	**22,44%**		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**100%**	**50,00%**		
				Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	30 Orang	0	Tidak mendapat suport Dana sharing	Melakukan koordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**100%**	**100%**		
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha		
				Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**100%**	**100%**		
				Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terhadap RT RW	**99,35%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20 Layanan	168 Layanan		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja dalam Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)**	**80,90**	**Disclaimer**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**98,80%**		
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**98,80%**		
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10 Laporan		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	61 Orang/Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	2 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA /PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**58,33%**		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	0	Sudah diajukan telaahan staf untuk pelaksanaan, namun tidak disetujui oleh TAPD (pengadaan alat lab, kalibrasi)	Percepatan Proses PBJ
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6 Unit	6 Unit		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2 Unit	2 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan/ permukiman bagi masyarakat kurang mampu, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator dibawah ini:

a. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana adalah jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani dibandingkan dengan rumah korban bencana keseluruhan. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten Sikka Tahun 2021 ada 8 unit RTLH atau sebesar 2,89%, Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak ada penanganan bagi korban bencana atau sebesar 0% dan pada Tahun 2024 sebanyak 8 unit RTLH bagi korban bencana atau sebesar 0,93% dan tahun 2025 sebanyak 100% yang dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.19
Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun 2021-2025

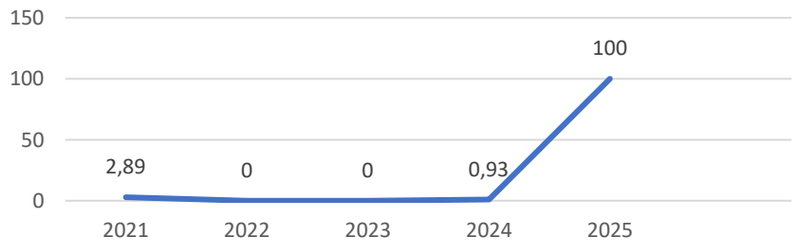

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

b. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu berbanding dengan jumlah rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sikka sebanyak 20.175 unit. Yang tertangani pada Tahun 2022 sebanyak 485 unit atau sebesar 2,40% sehingga berkurang menjadi 19.690 unit, dan pada Tahun 2023 sebanyak 45 unit atau sebesar 0,23% sehingga berkurang menjadi 19.645 unit, sedangkan pada Tahun 2024 sebanyak 21 unit atau sebesar 0,11% dan berkurang menjadi 19.624 unit dan untuk Tahun 2025 sebanyak 115 unit atau sebesar 100% dan berkurang menjadi 19.509 yang dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.20
Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR Tahun 2022-2024

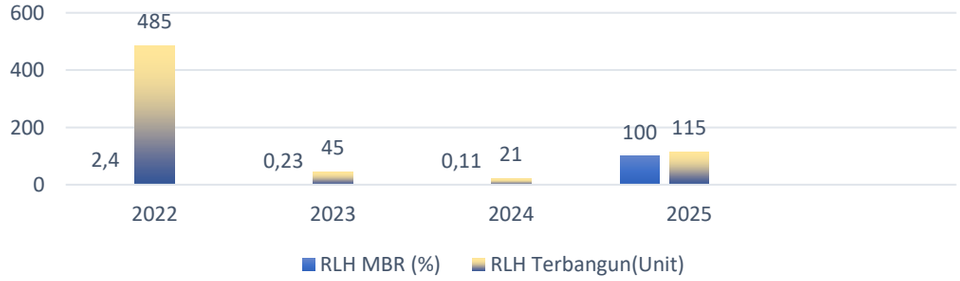

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

c. Persentase Rumah Tangga Yang Dilayani Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk disuatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebanyak 1004 sambungan. Dan pada Tahun 2022 sebanyak 1581 sambungan, sedangkan Tahun 2023 sebanyak 341 SR dan Pada Tahun 2024 tidak ada SR yang dikerjakan. Untuk Tahun 2025 sebanyak 112 SR dari target 500 SR. Perkembangan rasio elektrifikasi di Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar 54,48% dan Tahun 2022 sebesar 95,42% sedangkan Tahun 2023 sebesar 95,60% dan Tahun 2024 sebesar 98,46% dan Tahun 2025 sebesar 98,49%.

Grafik 3.21
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

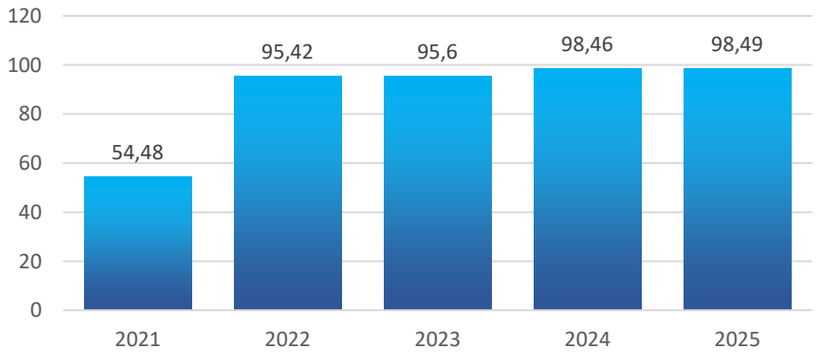

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025.

d. Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan

Luasan Wilayah Kumuh berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 385/HK/2022 adalah sebesar 145,66 Ha, tersebar di Kelurahan Waioti, Beru, Kabor, Madawat, Nangalimang, Kota Uneng, Wolomarang, Hewuli, Wuring. Gambaran tentang Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.22
Gambaran Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2021-2025 Yang Tertangani

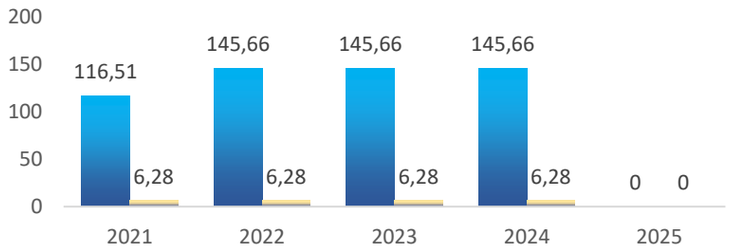

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani sebanyak 116,51 Ha dengan Pengurangan kumuh sebanyak 6,28 Ha. Pada Tahun 2022-2024 Luas Kawasan Kumuh yang ditangani 145,66 Ha dengan Pengurangan Kumuh sebanyak 6,28 Ha. Untuk Tahun 2025 belum ada penanganan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	14	14		
				Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)	19.681	19.509		
				Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	24,07	24,85		
				Jumlah Rumah Keseluruhan	81.750	81.865		
				Persentase Pelanggan Listrik	87	98,89		
				Jumlah Rumah Layak Huni	60.693	60.808		
				Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	0	76,06		
				Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	74,24	21.717		
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	21.717	1,56		
				Persentase SR Air Minum	1,58	26,57		
				Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	26,57	100		
				Jumlah Pelanggan Listrik	71.126	71.238		
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**	**Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	**Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	**37,48%**	**43,75%**		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**100%**	**100%**		
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**14 Unit**	**14 Unit**		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	12 Unit rumah	12 Unit rumah		
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	2 Unit rumah	2 Unit rumah		
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan		
				PROGRAM PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**100%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	**60 Unit**	**101 Unit**		
				Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	60 Unit rumah	101 Unit rumah		
				PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**100%**	**61,90%**		
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**21 Lokasi**	**13 Lokasi**		
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	21 Lokasi	13 Lokasi		
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Dalam Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,25%**	**82,25%**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**100%**		
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**7 Laporan**	**7 Laporan**		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang 14 bln	25 orang 14 bln		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Rapat	1 Laporan Rapat		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN			Tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada alokasi anggaran. Kegiatan Penataan Kawasan tidak dilaksanakan (RLH, drainase, jalan lingkungan, sanitasi) di Tahun 2025	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, 2026

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka.

Capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 tercermin melalui indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, yang menggambarkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

a. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pada Tahun 2025, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebesar 68 dan terealisasi sebesar 68,60, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka relatif kondusif serta penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat berjalan dengan baik.

b. Indeks Kriminalitas (Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk).

Pada Tahun 2025, dengan jumlah tindak kejahatan sebanyak 280 kasus dan jumlah penduduk 350.715 jiwa, Indeks Kriminalitas tercatat sebesar ±79,84 per 100.000 penduduk. Capaian ini lebih rendah dari target sebesar 90, sehingga menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sikka relatif kondusif serta kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum telah melampaui sasaran yang ditetapkan.

c. Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

Pada Tahun 2025, Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga menunjukkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sikka.

d. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pada Tahun 2025, Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat terhadap kejadian kebakaran guna meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 65,30 dan terealisasi 72,05, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja perangkat daerah, khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Dalam rangka mengukur kapasitas kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan tugas,

digunakan beberapa indikator kinerja lain yang akan memberikan gambaran mengenai kecukupan sumber daya aparatur, dukungan partisipasi masyarakat, serta intensitas upaya preventif dan penegakan ketertiban di wilayah Kabupaten Sikka. Berikut capaian indikator-indikator dimaksud pada Tahun 2025.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 3.8
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	103
2	Jumlah Penduduk	350.715
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	3:10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 jumlah personel Satpol PP Kabupaten Sikka sebanyak 103 orang dengan jumlah penduduk 350.715 jiwa. Dengan demikian, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah sebesar 3 orang per 10.000 penduduk. Hal ini berarti bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 3 orang personel Satpol PP dalam pelaksanaan tugas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sikka.

b. Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara jumlah anggota Linmas dengan jumlah penduduk.

Tabel 3.9
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2025

No	**Uraian**	**Tahun 2025**
1.	Jumlah anggota Linmas	2.763
2.	Jumlah Penduduk	350.715
3.	Rasio	79:10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, 2026

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pada Tahun 2025, jumlah anggota Linmas Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 2.763 orang, dengan jumlah penduduk 350.715 jiwa. Berdasarkan data tersebut, rasio jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk adalah sebesar 79 orang per 10.000 penduduk. Artinya, dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 79 anggota Linmas yang berperan membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

c. Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP

Frekuensi patroli merupakan jumlah kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP, baik patroli siaga maupun patroli gabungan, dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.10
Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2025

No	**Uraian**	**Tahun 2025**
1.	Frekuensi Patroli Siaga Pol PP	244
2.	Frekuensi Patroli Gabungan Pol PP	12

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pada Tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan Patroli Siaga Pol PP sebanyak 244 kali dan Patroli Gabungan Pol PP sebanyak 12 kali.

Dengan demikian, total frekuensi patroli yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 mencapai 256 kali. Pelaksanaan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sikka.

d. Petugas Linmas di Kabupaten Sikka

Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Petugas Linmas di Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah
1.	Alok Timur	Kojadoi	10
		Kojagete	12
		Lepolima	18
		Parumaan	12
		Watugong	8
		Beru	22
		Kotabaru	23
		Nangameting	15
		Waioti	42
		Wairotang	17
		Gong Bekor	11
2.	Alok	Gunung Sari	12
		Pemana	19
		Samparong	12
		Kabor	15
		Kota Uneng	30
		Madawat	20
		Nangalimang	21
3.	Alok Barat	Hewuli	12
		Wailiti	19
		Wolomarang	27
		Wuring	28
4.	Paga	Lenandareta	14
		Wolowona	12
		Wolowiro	16
		Masebewa	19
		Mauloo	10
		Paga	25
		Wolorega	21
		Mbengu	19
		Kotandelu	8
		Begu	10
		Lowolabo	14
		Aebubu	20
		Regapu'u	11
		Rejo	9
5.	Mego	Bhera	12
		Dobo	9
		Dobo Nua Puu	10
		Gera	16
		Korobhera	12
		Kowi	10
		Liakutu	10
		Napugera	6
		Parabubu	10
		Wolodhesa	13
		Ndaimbere	9
		Ratekalo	10
6.	Tanawawo	Bu Selatan	8

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah
		Bu Utara	8
		Bu Watuweti	13
		Detubhinga	10
		Loke	11
		Poma	15
		Renggarasi	13
		Tuwa	14
		Bu Barat	8
		Bu Nua Puu	8
7.	Nita	Bloro	13
		Ladogahar	15
		Lusitada	14
		Mahebora	5
		Nirangkliung	10
		Nita	27
		Nitakoang	25
		Riit	14
		Takaplager	13
		Tebuk	18
		Tilang	12
		Wuliwutik	18
		Nangablo	9
		Kara Kabu	9
		Tadalado	10
8.	Koting	Koting A	16
		Koting B	12
		Koting C	11
		Koting D	12
		Paubekor	12
		Ribang	7
		Waturepa	10
9.	Nelle	Manubura	18
		Nelle Barat	12
		Nelle Lorang	16
		Nelle Urung	10
		Nelle Wutung	16
10.	Magepanda	Kolisia	32
		Kolisia B	15
		Magepanda	15
		Reroroja	24
		Done	9
		Waturia	20
		Woda Mude	12
		Legu Woda	17
11.	Kangae	Blatatatin	16
		Habi	15
		Kokowahor	14
		Langir	22
		Mekendetung	15
		Tanaduen	19
		Teka Iku	10
		Watuliwung	20
		Watumilok	12
12.	Kewapante	Waiara	14
		Namangkewa	14
		Seusina	14
		Kopong	10
		Geliting	13
		Wairkoja	14
		Umagera	10
		Iantena	7
		Watukobu	12
13.	Hewokloang	Baomekot	12
		Heopuat	16
		Hewokloang	12
		Kajowair	16
		Munerana	17
		Rubit	16
		Wolomapa	12

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah
14.	Waigete	Aibura	12
		Egon	12
		Hoder	16
		Nangatobong	24
		Pogon	14
		Runut	23
		Wairbleler	29
		Watudiran	16
		Wairterang	20
		Mahe Kelan	16
		Egon Buluk	22
15.	Talibura	Bangkoor	13
		Darat Gunung	21
		Darat Pantai	12
		Hikong	15
		Kringa	17
		Lewomada	13
		Nangahale	21
		Nebe	7
		Ojang	12
		Talibura	13
		Timutawa	9
		Wailamung	9
		Udek Duen	11
		Waipaar	14
		Baokremot	12
		Likonggete	12
		Watubaing	9
		Mamai	9
		Henga	10
		Watu Omok	10
16.	Waiblama	Ilinmedo	10
		Natarmage	12
		Pruda	13
		Tanarawa	11
		Tuabao	10
		Werang	13
		Watu Moning	17
17.	Bola	Bola	20
		Hokor	12
		Ipir	5
		Umauta	32
		Wolokoli	21
		Wolonwalu	12
		Bura Bekor	16
		Watukrus	16
18.	Lela	Baopaat	10
		Du	11
		Hepang	14
		Iligai	15
		Kolidetung	20
		Korowuwu	13
		Lela	20
		Sikka	17
		Watutedang	12
19.	Mapitara	Egon Gahar	7
		Hale	14
		Hebing	13
		Natakoli	10
20.	Doreng	Kloangpopot	10
		Nenbura	11
		Waihawa	8
		Watumerak	12
		Wogalirit	15
		Wolomotong	17
		Wolonterang	12
		Mahe Tanah	9
		Pelibaler	11
21.	Palue	Maluriwu	15

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah
		Reruwairere	10
		Lidi	12
		Ladolaka	15
		Tuanggeo	15
		Rokirole	12
		Nitunglea	8
		Kesokoja	6
Jumlah			**2.793**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Linmas secara keseluruhan tercatat sebanyak 2.793 orang yang tersebar pada seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka. Sebaran tersebut menunjukkan distribusi pada setiap kecamatan dengan variasi jumlah yang berbeda-beda, yang mencerminkan kondisi wilayah, luas area, serta kebutuhan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada masing-masing kecamatan.

Dari hasil rekapitulasi, Kecamatan Talibura merupakan kecamatan dengan jumlah Linmas terbanyak, ditinjau dari akumulasi total pada seluruh desa/kelurahan di wilayah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Mapitara tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah Linmas paling sedikit, karena hanya terdiri dari beberapa desa dengan jumlah anggota yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Sebaran ini menjadi dasar dalam perencanaan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran Linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sikka.

Selain Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga didukung oleh kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka.

a. Indeks Risiko Bencana

Pada Tahun 2025, Indeks Risiko Bencana ditargetkan sebesar 140,81 dan terealisasi sebesar 180,09. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Sikka belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan masih tingginya potensi risiko bencana di daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ancaman bencana alam, tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat, serta kapasitas penanggulangan bencana yang masih perlu ditingkatkan.

b. Potensi Penduduk Terpapar Bencana

Pada Tahun 2025, potensi penduduk terpapar bencana ditargetkan sebesar 34.092 jiwa dan terealisasi sebesar 6.892 jiwa. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berpotensi terdampak bencana lebih rendah dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya peningkatan upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana..

c. Potensi Kerugian Fisik Akibat Bencana

Pada Tahun 2025, potensi kerugian fisik akibat bencana ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000, namun terealisasi sebesar Rp90.018.170.000. Capaian ini menunjukkan bahwa potensi kerugian fisik jauh melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan masih tingginya dampak bencana terhadap infrastruktur, fasilitas umum, serta aset masyarakat di Kabupaten Sikka.

d. Potensi Kerugian Lingkungan Akibat Bencana

Pada Tahun 2025, potensi kerugian lingkungan akibat bencana ditargetkan seluas 100 hektar dan terealisasi sebesar 30 hektar. Capaian ini menunjukkan bahwa luas wilayah terdampak kerusakan lingkungan lebih rendah dari target yang ditetapkan,

yang mengindikasikan efektivitas upaya mitigasi dan pengendalian dampak bencana terhadap lingkungan di Kabupaten Sikka.

e. Indeks Ketahanan Daerah

Pada Tahun 2025, Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan sebesar 0,44 dan terealisasi sebesar 0,55, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menghadapi dan mengelola berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan melalui penguatan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.

f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 72,50 dan terealisasi sebesar 72,05. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah hampir mencapai target yang ditetapkan, yang mencerminkan penerapan manajemen kinerja telah berjalan dengan baik meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	75%	100%	Minimnya perlengkapan operasional, kendaraan dinas, dan sarana pendukung lainnya (sebagian dalam kondisi rusak berat), serta keterbatasan personel baik dari sisi jumlah maupun kualitas, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.	Mengusulkan peningkatan alokasi pagu anggaran untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana operasional, pengadaan dan rehabilitasi kendaraan dinas, penguatan kapasitas personel Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan, serta penambahan personel
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%	100%		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	55%	71.42%		
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	6,73%	6,73%		
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Persentase Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	100%	100%	Belum tersedianya alokasi anggaran yang memadai serta belum optimalnya koordinasi lintas SKPD/OPD dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.	Mengusulkan penyediaan alokasi pagu anggaran yang memadai serta penguatan koordinasi lintas OPD melalui perencanaan terpadu, forum koordinasi rutin, dan penyelarasan program/kegiatan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
				Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas	55 Orang	55 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Laporan	30 Laporan		
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
				Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Dibina Dan Meningkat Kompetensinya	0	0		
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0		
			2. Meningkatnya daya tanggap darurat dan cakupan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berbasis kesiapsiagaan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14 Menit	7,88 Menit	Belum tersusunnya rencana kontingensi penanggulangan kebakaran, termasuk pemetaan area rawan, strategi penanganan, serta langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan	Mengupayakan penyusunan rencana kontingensi penanggulangan kebakaran secara komprehensif melalui identifikasi dan pemetaan wilayah rawan, penyusunan strategi penanggulangan, penetapan mekanisme koordinasi lintas sektor, serta penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%	100%		
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Kejadian Kebakaran Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Yang Ditangani	100%	71%	Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas/kompetensi, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Mengusulkan penambahan personel sesuai kebutuhan serta penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) secara berkelanjutan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur.
				Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Unit	1 Unit		
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
				Persentase Masyarakat Yang Mendapat Edukasi Dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	13 Kelurahan	13 Kelurahan		
			3. Meningkatnya kapasitan dan akuntanbilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perangkat Daerah Yang Disusun				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Palet	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit		
		2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA			1.Belum tersedia dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kurang adanya dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.Perlu adanya penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	2. Kurangnya alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi KIE, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada wilayah rawan bencana	2. Dukungan dana dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder termaksud pemerintah pusat untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	600 Orang	600 Orang	3. Alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah khusus untuk	3. Dukungan dana dari Pemerintah Daerah khusus

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				kesiapsiagaan terhadap bencana			kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat, mengingat sangat minimnya prasarana pada BPBD saat ini	untuk kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat.
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	800 Orang	6.292 Orang	4. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek ketahanan fisik bangunan terhadap bencana	4.Perizinan pembangunan sarana fisik harus memperhatikan resiko bencana yang ada pada lokasi rencana pembangunan
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	600 Orang	600 Orang	5.Belum maksimalnya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.	5. Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%		
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%		
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
				Persentase Informasi Rawan Bencana Yang Disampaikan Kepada Masyarakat	100%	100%		
				Sub Kegitan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	400 Orang	400 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
				Persentase Korban Bencana Yang Diselamatkan Dan Dievakuasi	100%	102%		
				Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	5 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang		
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
				Persentase Dokumen Dan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Tersusun Dan Terimplementasi Sesuai Ketentuan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,94%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		
				Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Admistrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20 Paket	20 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100%	50%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	4 Unit	0		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100%	95,65%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	0		

6. Urusan Sosial

Pelayanan urusan sosial diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).Capaian Kinerja urusan Sosial Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

a. Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial sehingga membutuhkan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial secara wajar. PPKS mencakup berbagai kelompok rentan seperti anak terlantar, disabilitas, lansia, dan fakir miskin. Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar mencapai 9,86 % dari target 3,58% pada tahun 2025.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sosial Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**DINAS SOSIAL**	**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif**	**Persentase Penduduk Miskin yang Tergraduasi**	**53,31%**	**0,02%**		
				Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	**3,58%**	**9,86%**	Kurangnya Sarana Prasarana (belum adanya Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)/Rumah Aman dan tidak adanya Kendaraan Khusus untuk Penanganan PPKS) dan Terbatasnya Anggaranm sehingga proses penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS tidak maksimal dan masih banyak PPKS belum tertangani	Perlu Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung dalam Proses Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS dan Penambahan Alokasi Anggaran
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bekerjasama dengan Dinas Sosial	**57,14%**	**94,24%**		
				Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	**100%**	**100%**	Sarana Prasarana Pendukung untuk Penanganan Korban Bencana masih terbatas dan Belum ada Gudang untuk menyimpan Logistik Bantuan Bencana	Perlu Pengadaan Sarana Prasarana pendukung untuk Penanganan Korban Bencana dan perlu adanya Gudang untuk penyimpanan logistik bantuan bencana
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	**0,88**	**12,18**		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	**0,16**	**9,93**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	**4,23**	**3,85**		
				Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	**100**	**100**		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**74,90**	**81,60**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**100%**	**94,91%**		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org/Bulan	22 Org/Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	-	-		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Pengadaan Mebel	25	25		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**69,44%**		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Paket	2 Paket		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**100%**	**75,68%**		
				Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**-**		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	-		
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**75,68%**		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	19 Orang		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	45 Keluarga		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20 Lembaga		
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**100%**	**36,00%**		
				Pemulangan Warga Negara Migran Tindak kekerasan dari Titik Deborkasi di Daerah Kabupaten /Kota Untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	**100%**	**36,00%**		
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kota	25 Orang	9 Orang		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**100%**	**111,89%**		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	**100%**	**111,89%**		
				Penyediaan Permakanan	40 Orang	40 Orang	Sarana Prasarana kurang mendukung dalam proses Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Perlu Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung dalam Proses Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
				Penyediaan Alat Bantu	35 Orang	38 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	Efisiensi Anggaran	
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	275 Orang	275 Orang	Ada Kesalahan Kode Rekening sehingga Pembayaran Uang Transportasi Peserta tidak bisa dicairkan	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50 Orang	115 Orang		
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Orang	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Metode Pengadaan Barang/Jasa	
				Pemberian Layanan Rujukan	12 Orang	12 Orang		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**100%**	**102,89%**		
				Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	**100%**	**100,00%**		
				Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	75 Orang	75 Orang		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**105,78%**		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	34.763 Keluarga	34.814 Keluarga		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	21.000 KPM	23.113 KPM		
				PROGRAM PENAGANAN BENCANA	**100%**	**54,35%**		
				Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**100%**	**54,35%**		
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	25 Orang	21 Anggota TAGANA sudah lulus PPPK dan Paruh Waktu	
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**100%**	**100%**		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Taman Makam Pahlawan	1 Taman Makam Pahlawan		

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Sikka dilaksanakan melalui upaya peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta Peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam jangka pendek peningkatan peluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti padat karyaserta peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 Tahun dan lebih) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambaran TPAK Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2025

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja		**95.655**	**83.150**	**178.805**
1	Bekerja	93.420	80.692	**174.112**
2	Pengangguran Terbuka	2.235	2.458	**4.693**
Bukan Angkatan Kerja		**23.022**	**46.364**	**69.386**
1	Sekolah	9.861	10.542	**20.403**
2	Mengurus Rumah Tangga	2.434	30.535	**32.969**
3	Lainnya	10.727	5.287	**16.014**
Jumlah		**118.677**	**129.514**	**248.191**

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 adalah 72,04% dan tingkat pengangguran terbuka 2,62%.

Pada Tahun 2025 tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka sebanyak 602 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkatan Antar Kerja Antar Daerah sebanyak 127 orang; dan
2. Pencari Kerja sebanyak 475 orang.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**Meningkatnya Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja**	**Angka Kemiskinan**	**11,51**	*** 11,89**	Rendahnya produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana.
				Pengeluaran per Kapita	**9,463**	*** 9,233**		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**72,58**			
				Tingkat Pengangguran Terbuka	**2,53**	*** 2,33**		
				Tingkat Produktifitas Tenaga kerja	**456,2**	*** 384,07**		
				Pengeluaran Per Kapita	**9,463 Rp Juta / Orang / Bulan**	*** 10 Rp Juta / Orang / Bulan**		
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	**0,75**	**3,59**		
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	**0,35**	**0,54**		
				Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger	**3,97**	**3,99**		
				Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	**28**	**6,44**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**109,18%**		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**87,50%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	9		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**97,92%**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	35		
				Penyediaan bahan logistik kantor	12	14		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16	12		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	5		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**200%**		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	2		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**83,33%**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	8		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**95,54%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	9		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	5		
				Penataan Organisasi	**100%**	**100%**		
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	12		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**100%**	**109,98%**		
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**100%**	**224,22%**	Kekurangan Tenaga Instruktur	Dengan Menggunakan/ mendatangkan Instruktur dari Luar Daerah atau luar instansi Pemerintaham
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	64	223		
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	7	7		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**100%**	**100%**		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10	10		
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**100%**	**5,71%**		
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	35	2		
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**100%**	**169,33%**		
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**84,67%**	Pencegahan TKI / PMI non prosedural yang belum maksimal.	Pembentukan Satgas Penempatan Calon Tenaga Kerja AKAD dan AKAN non prosedural di tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
				Pelayanan antar Kerja	75	127		
				Perluasan Kesempatan Kerja	40	0		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**100%**	**383,33%**		
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	2		
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50	475		
				Job Fair/Bursa Kerja	50	0		
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**40%**		
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	25	20		
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	20	0		
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**100%**	**89,17%**		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**116,67%**		
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	6	7		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**61,67%**	Kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan ketentuan norma-norma	Perlu diberdayakan pengawas fungsional propinsi yang ditempatkan di kabupaten.

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	5	ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum adanya pengawasan secara baik.	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	22		
				Persentase Penduduk Miskin Transmigran	**54,53%**			
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**100%**	20%		
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	20%	Sudah memiliki dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Namun Belum terekspose	Tingkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat untuk proses ekspose dokumen RKT.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1		

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak diarahkan pada peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai aspek pembangunan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam rangka peningkatan kualitas terhadap perempuan dan anak. Hasil yang dicapai dapat dicermati melalui:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.23
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

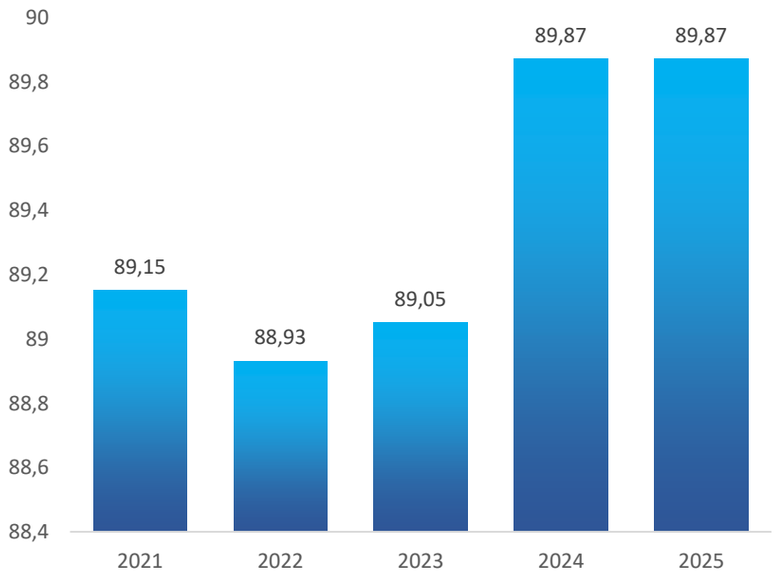

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar 89,15 dan pada Tahun 2022 sebesar 88,93, Tahun 2023 89,05 dan Tahun 2024 sebesar 89,87. Untuk Tahun 2025 sebesar 89,87.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengembilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.24
IDG Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

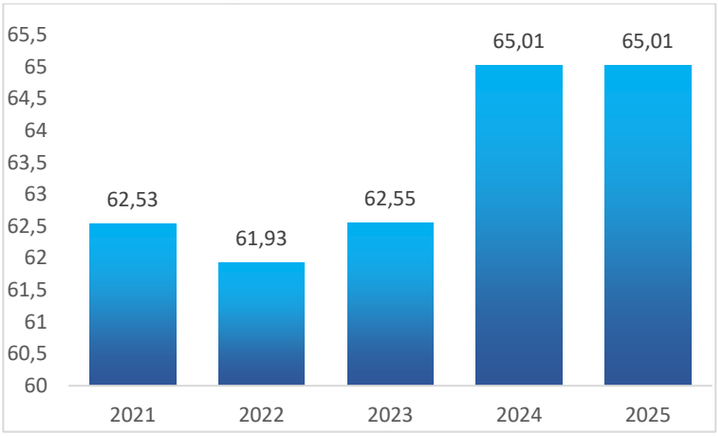

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar 62,53, pada Tahun 2022 sebesar 61,93, pada Tahun 2023 sebesar 62,55 dan Tahun 2024 sebesar 65,01. Untuk Tahun 2025 sebesar 65,01.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**66,73%**	**62,39 %**	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Peningkatan Kualitas KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	**68,63%**	**68,37 %**	Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Pelaksanaan KIE yg efektif dan efisien tentang Partisipasi Perempuan dalam berbagai Aspek Pembangunan
							Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan yg Berprespektif Anak	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan yg Berprespektif Anak dgn KIE yang berkelanjutan
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	100%		
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2%	1,20%		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	67,6%	67,48%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Pemahaman dan Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga		
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang		
				Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**100%**	**100%**		
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%		
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Masyarakat yang mendapat Advokasi dan sosialisasi Kebijakan Program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 OPD	15 OPD		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten				
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang		
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan		
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedialayanan perlindungan perempuan tingkat Kab/ kota				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				umlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**100%**	**100%**		
				Persentase Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar (%)	30,5%			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Kepala Keluarga Miskin Perempuan				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	21 OPD	21 OPD		
				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**100%**	**100%**		
				Kabupaten Layak Anak				
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Organisasi	20 Organisasi		
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**100%**	**100%**		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	68,63			
				Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif (%)	100%	100%		
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi kebijakan program dan koordinasi Lintas Sektor dalam kegiatan pencegahan kekerasan lingkup daerah kabupaten				
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	10 Kegiatan	10 Kegiatan		
				Jumlah kegiatan pencegahan KLA terpadu	209,05	-		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**116%**		
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**175%**		
				Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bln	38 Orang/bln		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Cakupan Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 unit	40 unit		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**100%**	**100%**		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 unit	1 unit		
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan diarahkan pada Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Sasaran pada Terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan. Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	1	1		
				Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1		
				Persentase pengawasan keamanan pangan	33,33	33,33		
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	1	1		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau	Pertumbuhan sektor pertanian	3,25%	4,54%		
				Indeks ketahanan pangan	77,72	61,80	Tidak adanya cadangan beras pemerintah kabupaten, penurunan produksi pertanian dan konsumsi protein di tingkat masyarakat yang masih rendah	Mendorong percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan aman)
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	100%	100%		
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100%	100%		
				Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)				
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota	2 Lap	2 Lap		
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)				
				Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	2 Lap	2 Lap		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)				
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dok	1 Dok		
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)				
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	100%	0%		
				Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan				
				Pengadaan cadangan pangan pemerintah kab/kota	25.575 Ton	0	karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga alokasi anggaran untuk cadangan	untuk mengatasi kekurangan cadangan pangan pemerintah, Pada tahun 2025, terdapat alokasi beras bantuan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pangan ditiadakan	pangan dari Pemerintah Pusat sejumlah 568.480 ton untuk .28.274 KK (selama Juni-Juli) dan 625.480 ton untuk 31.270KK (oktober-nopember)
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)			karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga alokasi anggaran untuk cadangan pangan ditiadakan	untuk mengatasi kekurangan cadangan pangan pemerintah, Pada tahun 2025, terdapat alokasi beras bantuan pangan dari Pemerintah Pusat sejumlah 568.480 ton untuk .28.274 KK (selama Juni-Juli) dan 625.480 ton untuk 31.270KK (oktober-nopember)
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	100%	100%		
				Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang				
				Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 Dok	1 Dok		
				Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)				
				Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Lap	1 Lap		
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)				
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100%	100%		
				Kegiatan Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	100%	100%		
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan (Angka)				
				Sub Kegiatan Penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dok	1 Dok		
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan (Angka)				
				Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten /kota	100%	100%		
				Persentase penanganan kerawanan pangan (%)				
				Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan dan Gizi kabupaten /kota	12 Lap	12 Lap		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)				
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100%	100%		
				Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar daerah kab/kota	100%	100%		
				Persentase Pengawasan Keamanan Pangan				
				Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Lap	13 Lap		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Jumlah laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	30 Jenis		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	1 Paket		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	4 Unit		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Unit	3 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	11 Unit		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				
				Pemeilharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2026.

4. Urusan Pertanahan

Untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang berkualitas dan komprehensif. Pembangunan pertanahan diarahkan pada peningkatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan, penyusunan dokumen perencanaan pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, dokumen yang menjadi hasil dari perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup; survey social ekonomi, kelayakan lokasi, analisa biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, serta studi lain yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dianggarkan melalui DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Sikka sejak Tahun 2021-2025 sesuai indikator yang ingin dicapai yakni:

a. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan adalah ukuran yang menunjukan tingkat capaian proses pembayaran kompensasi kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah yang terdampak kegiatan pembangunan. Persentase ini menggambarkan perbadingan antara jumlah bidang tanah yang telah diselesaikan proses ganti rugi dan santunannya dengan total bidang tanah yang direncanakan untuk dibebaskan. Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaiannya sebesar 100% sedangkan tahun 2025 mencapai 0,54 %. Hal ini menunjukan bahwa selama tahun 2025 tidak ada penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan karena ketiadaan Penilai Apraisal sehingga pembebasan lahan tidak dapat dilanjutkan ke pembayaran ganti rugi.

b. Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan

Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan adalah jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan berbanding konflik pertanahan yang dilaporkan. Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan di Kabupaten Sikka selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan Tahun 2023 dari 5 Kasus hanya 3 kasus yang terselesaikan atau sebesar 60% yakni HGU Nanghale, Kasus tanah masyarakat di Desa Takaplager Kecamatan Nita dan Kasus tanah SMAN Restorasi Doreng Desa Wolonterang Kecamatan Doreng. Pada Tahun 2024 dari 3 kasus hanya 2 kasus yang diselesaikan atau sebesar 66,66% yakni HGU Nangahale, HPL Kolisia, Embung Geomembran-Habi. Sedangkan untuk tahun 2025 dari 3 kasus hanya 1 kasus yang diselesaikan atau sebesar 33,33 % yakni HGU Nangahale sedangkan Embung Geomembran-Habi belum diselesaikan karena tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi seperti surat kesepakatan antara pemda dengan pemilik lahan. Selanjutnya HPL Kolisia secara kewenangan oleh Dinas Nakertrans karena peruntukan lahan tersebut untuk relokasi warga masyarakat palue korban bencana gunung api Rokatenda.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Persentase perselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100	33,33		
				Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	3	1		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**	**Terwujudnya Tertib administrasi Pertanahan**	**Indikator Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan**	**100%**	**16,94%**		
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**100%**	**33,33%**		
				Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**33,33%**		
				Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kasus	1 Kasus	2 kasus pertanahan yang belum terselesaikan yakni Embung Geomembran-Habi karena tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi dan HPL Kolisia secara kewenangan oleh Dinas Nakertrans karena peruntukan lahan tersebut untuk relokasi warga masyarakat palue korban bencana gunung api Rokatenda	Perlu dianggarkan kembali dan koordinasi lebih lanjut kepada pemilik lahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Indikator Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	**3 Kasus**	**1 Kasus**		
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**100%**	**0**		
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**0**		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	Proses telah mulai dilaksanakan (sosialisasi, rapat bersama, survei lokasi) namun Pembebasan lahan tidak dapat dilanjutkan ke Pembayaran Ganti Rugi karena Ketiadaan Penilai Apraisal. Direncanakan Penyelesaian Masalah Tanah (pembebasan lahan) di Desa Rubit, 2 SD di Tanawawo.	Perlu Penagganggaran kembali dan telah di koordinasikan dengan 2 kepala desa

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2026

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada koordinasi upaya perlindungandan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pengendalian kerusakan lingkungan hidupdan peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Kinerja pembangunan lingkungan hidup dapat dicermati melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian indikator:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

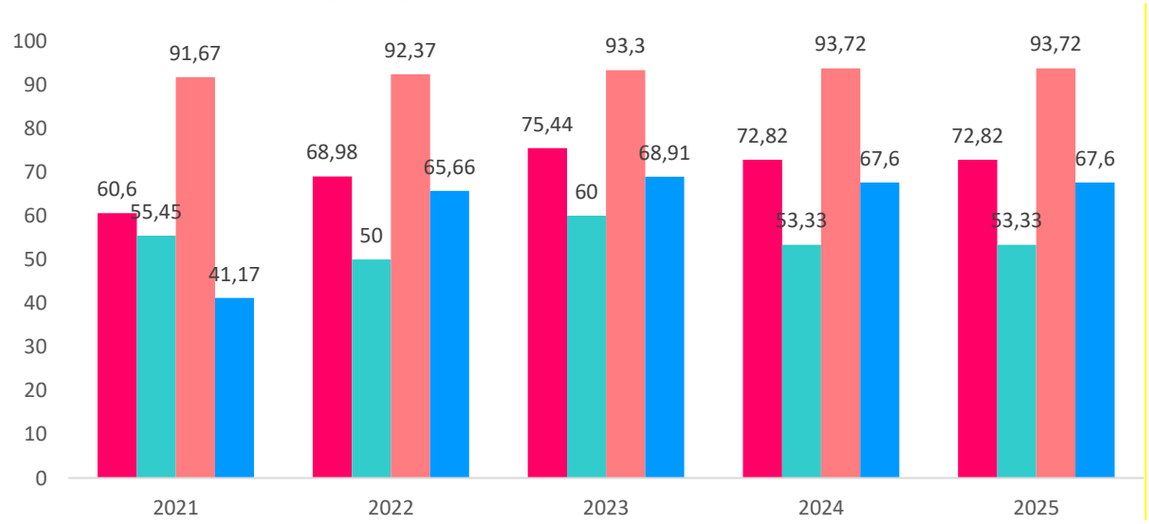

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 sebesar 60,60 dan pada Tahun 2022 sebesar 68,98 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 75,44 dan Tahun 2024 sebesar 72,82. Untuk Tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,66% dengan indeks kualitas air sebesar 77,50 %, Indeks Kualitas Udara sebesar 84,97 % dan Indeks Tutupan Lahan sebesar 78,13%.

b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kotabaik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikro klimat maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Sikka yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 18 taman termasuk lapangan dan makam dengan luas 6 Ha atau 58.158 m² dengan berbebagai jenis vegetasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Data Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sikka
Yang Dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	NAMA TAMAN	JENIS RTH/ FUNGSI	LOKASI	LUAS RTH (Eksisting)		JENIS TANAMAN YANG ADA DI LOKASI
				m²	Ha	
1	Taman Adi Sucipto	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Waioti Jl. Adi Sucipto	7.046 m²	0.7	Pohon Glodok Tabebuya Kuning Cemara papua Palem Putri Lidah Mertua Bougenvile
2	Taman Tugu Selamat Datang	Jalur Hijau Land Mark	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Nangameting Jl. Ahmad Yani	390 m²	0.039	Bogenfile Lidah mertua Agave Kembang Palem Purti Cimeng/Beringin Asoka Pucuk Merah Karamunting Pandan Bali
3	Taman Lapangan Kota Baru	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Ahmad Yani	640 m²	0.064	Bunga Kana Agrave merah Pohon Nimba Kahktus Bogenfile Kersen (1)
4	Taman Depan SCC	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Ahmad Yani	360 m²	0.036	3 Pucuk Merah Tabebuya Palem Putri Agave Merah Lidah Mertua Melati Andong Merah Pohon Kelapa Sawit Kembang Sepatu Eforbia Karamunting Agave Kembang
5	Taman Halte Kantor Pos	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Ahmad Yani	120 m²	0.012	Pandan Hijau Palem Putri Bunga Merah Bogenfile Andong Merah
6	Taman Teka Iku	Taman Kota Land Mark	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Gajah Mada	800 m²	0.08	2 pohon Ansono Glodok Pinang Putri Pohon Sikat Botol Kimberli Kelapa Bali Lidah Mertua Pandan Bali Pucuk Merah Karamunting Pangkas Kuning Cemara Kipas
7	Taman Pasar Tingkat	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Ahmad Yani	50 m2 Kota Baru	0.005	Palem Putri Palem Hijau Pandan Hijau
8	Taman Monumen Tsunami	Taman Kota	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Jl. Don Thomas Jl. Raja Centis Jl. Moa Toda	9.600 m²	0.96	Cemara Udang Cemara papua Kelapa Bali Tabebuya Ketapang kencana Anting Putih Pinang Kuning Palem Bregu Palem ekor Tupai Palem merah Bogenfile Glodok Pohon Rita Suklen

NO	NAMA TAMAN	JENIS RTH/ FUNGSI	LOKASI	LUAS RTH (Eksisting)		JENIS TANAMAN YANG ADA DI LOKASI
				m²	Ha	
9. 10. 11.	Taman Lingkar Luar Taman Lingkar Luar Jalur Timur (Brai) Taman Lingkar Luar Jalur Tengah (Nusra) Taman Lingkar Luar Jalur Barat (Karmel)	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Timur Kelurahan Kota Baru Desa Lepolima Kecamatan Alok Kelurahan Madawat Jalur Lingkar Luar	5.947.m2 Kota Baru	0.6	Palem Putri Palem ekor Tupai Pucuk Merah Bogenfile
12.	Pemakaman Umum	Pemakaman	Kecamatan Alok Timur			Pohon Kamboja
	Iligetang		Kelurahan Beru			Pohon Tuak
13.	Pemakaman Umum	Pemakaman	Kecamatan Kewapante			Pohon Kamboja
	Geliting		Desa Geliting			Pohon Tuak
14.	Taman Doa Kristus Raja	Taman Kota	Kecamatan Alok Kelurahan Kota Uneng Jl. Mgr. Soegiyopranoto	6.726 m2 Kota Uneng	0.7	Glodok Bogenfile Flanboyan Pangkas Kuning Lidah Mertua Pohon Tanjung Pandan Bali
15.	Hutan Jati Kantor Bupati	Rimba Kota	Kecamatan Alok Jalan El-Tari Kelurahan Kota Uneng			Pohon Jati
16.	Taman Jl.Eltari	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Kelurahan Kota Uneng Kelurahan Madawat Jl. El-Tari	7.644 m²	0.8	Pinang Putri Cemara papua Bogenfile Lidah Mertua Karamunting Pandan Bali
17.	Taman Jl .Anggrek	Jalur Hijau	Kecamatan Alok Kelurahan Madawat Jl. Anggrek	175 m2	0.0175	Pucuk Merah Pangkas Kuning
18.	Taman Jl. Wairklau R.S.Dr.T.C Hillers Maumere		Kecamatan Alok Kelurahan Madawat Jl. Wairklau			Agave Kembang Pangkas Kuning Melati karamunting Lidah Mertua
			TOTAL	**58158 m²**	**± 6 Ha**	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2026

c. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.26
Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2021-2025

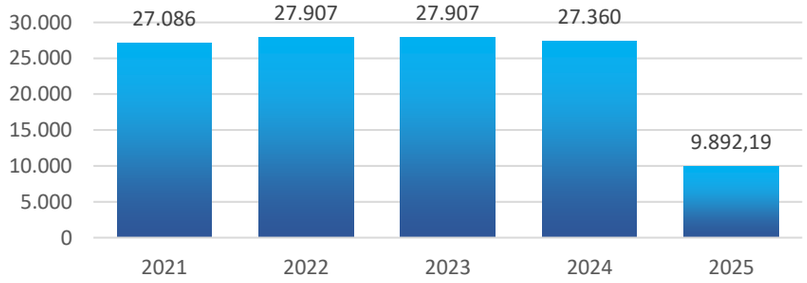

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2021 sebanyak 27.086 ton, pada Tahun 2022 sebanyak 27.907 ton dan Tahun 2023 sebanyak 27.907 ton. Untuk Tahun 2024 sebanyak 27.360 ton dan Tahun 2025 9.892,19 ton. Hal ini dikarenakan 3 mobil dump truk mengalami kerusakan dan sejumlah tenaga kebersihan yang lolos PPPK tahap 2 optimalisasi dan ditempatkan di instansi lain sehingga tidak menjalankan tugas rutin sebagaimana mestinya.

d. Jumlah Sarana Prasana Persampahan

Jumlah Sarana Prasana Persampahan yang digunakan untuk mengangkut sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari :

- Dump Truck : 10 Unit (kondisi baik 3 unit, rusak berat 7 unit)
- Amroll : 6 Unit (kondisi baik 2 unit, rusak berat 4 unit)
- PickUp : 1 Unit (kondisi baik)
- Motor Roda 3 : 7 Unit (kondisi baik 5 unit, rusak berat 2 unit)
- Gerobak Sampah : 4 Unit (kondisi baik 2 unit, rusak berat 2 unit)
- Exavator : 1 Unit (kondisi rusak ringan)
- Doozer : 1 Unit (kondisi rusak ringan)
- Container : 37 Unit (kondisi baik 29 unit, rusak berat 8 unit)
- TPS : 20 TPS terdiri dari :
  - 1 TPS Paduwau
  - 1 TPS Alfamart Kangae
  - 1 TPS Pertamina
  - 1 TPS TKK Ferari School
  - 2 TPS Nara
  - 1 TPS depan HM
  - 1 TPS depan Gudang Garam
  - 1 TPS depan Hotel Sylvia
  - 3 TPS Kampung Kabor
  - 1 TPS SMPK Frater Maumere
  - 1 TPS Bintang Pub
  - 1 TPS Pasar Senja Wairotang
  - 2 TPS Wairotang
  - 2 TPS Koramil Kota
  - 1 TPS Roxy Swalayan

TPA :1 TPA Wairii

Untuk mencapai Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	1		
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) mencapai	67,62	78,13		
				Indeks Kualitas Udara	93,73	84,97		
				Indeks Kualitas Air	62,48	77,50		
				Total volume sampah	9.928,38	9.892,19		
				Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota	12	72		
				Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	25	22		
				Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	60	19		
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***	***73,91***	***80,66***		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung	***0,5***	***0***	Data perhitungan DDT yang ada, diambil dari data DDT KLHS RPJMD yang rentang waktunya adalah 5 tahun dan bukan berasal dari kegiatan rutin harian/ bulanan perangkat daerah yang dapat ditentukan capaianya setiap trimester/tahunnya . KLHS RPJMD pun belum dipantau pelaksanaanya sehingga belum dapat diperolah nilai capaiannya.	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	***78,5***	**78,20**	Nilai SAKIP masih menggunakan nilai hasil evaluasi tahun 2024, untuk tahun 2025 belum dilakukan evaluasi oleh Inspketora. Target 2025 ditetapkan lebih besar dari capaian 2024 sehingga perhitungan kinerja tidak sampai 100% atau belum mencapai target nilai 78,50	DLH berupaya meningkatkan nilai SAKIP tahun 2025 dengan melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Inspektorat.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja dalam pelayanan Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**100%**		
				Indikator Program : *Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)*				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	490	490		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Paket	23 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Unit	38 Unit		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	22 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit		
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100%**	**100%**		
				Indikator Program : *Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti*	**85**			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**	Penetapan Target terlalu rendah, tidak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Keterangan : Target 2025 12 rekomendasi, realisasi 72 rekomendasi.	Penetapan Target Tahunan minimal menyesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	12 Dokumen	72 Dokumen		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	**100%**	**100%**	Penurunan Indeks Kualitas Udara dikarenakan adanya penambahan parameter barudan terjadinya pemaparan tahap I	
				Indikator Program : *Indeks Kualitas Air* *Indeks Kualitas Udara*	*62,48* *93,73*	*77,50* *84,97*		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							akibat letusan gunung berapi Lewotobi	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	**100%**	**100%**		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Dokumen	14 Dokumen	Pengujian masih dikirim ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi NTT. DLH Kab hanya melakukan pengambilan sampel di lapangan	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	60 Laporan	61 Laporan		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	**100%**	**100%**	Realisasi 9,31% RTH merupakan luasan kawasan RTH perkotaan berbanding dengan luas perkotaan Maumere. Belum 100% mencapai target 9,40% dikarenakan fasilitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengelolaan RTH belum memadai. Idealnya disetiap	
				Indikator Program : *Persentase RTH*	**9,40**	**9,31**		
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	29,47 Ha	29,47 Ha		
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	4 Unit	4 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							titik RTH terdapat 1 sumber air untuk kebutuhan penyiraman. Adapun perhitungan baik target maupun realisasi meliputi RTH publik yang dikelola Pemda Sikka dan tidak termasuk RTH privat.	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**100%**	**100%**		
				Indikator Program : *Persentase Limbah B3 yang terkelola*	**100%**	**100%**		
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100**	**100**		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**100%**	**100%**	Terhadap indikator program yaitu ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	
				Indikator Program : *Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota(%)*	69	18,84%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun kegiatan pengawasan dilakukan terhadap 86 usaha dan/atau kegiatan. Dari jumlah 86 tersebut, terdapat 33 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin dan 53 usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki ijin. Dari 33 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin tersebut, 13 diantaranya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui taat dan sisanya sejumlah 18 masuk kategori tidak taat, 1 tidak beroperasi, dan 1 belum beroperasi. Ketaatan yang rendah dikarenakan badan usaha belum memiliki ijin usaha	
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55 Badan Usaha	86 Badan Usaha		
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN	**100%**	**90,91%**	Penetapan target program berupa Persentase	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya, dengan target sampai akhir periode renstra sebesar 100% dengan jumlah 12 Kelompok Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% dari 12 kelompok tersebut yaitu sebanyak 6 kelompok.	
				Indikator Program : *Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya*	**50,00**	**50,00**		
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100 %**	**90,91%**	Pendampingan tehadap 1 KPSA di Puho-Desa Iligai-Kecamatan Lela yang merupakan Pokir dai Ibu Linda tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi. Selain itu juga terdapat 1 KPSA Desa Natarmage yng setelah mengikuti kegiatan sosialisasi bahkan telah memiliki SK Tim namun ditengah	DLH melalui Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk berkomunikasi dengan KPSA Desa Natarmage namun KPSA yang bersangkutan secara tegas menyatakan tidak siap. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	11 Dokumen	9 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							jalan mengundurkan diri dikarenakan tidak siap akibat pembibitan yang terlambat dilakukan	telah disiapkan untuk KPSA tersebut dialihkan ke 3 KPSA lainnya yang terlibat dalam kegiatan ini.
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	6	6		
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**100%**	**100%**		
				Indikator Program : *Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*	**100%**	**100%**		
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	25 Pengaduan	22 Pengaduan		
				Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Sanksi	51 Sanksi		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**100%**	**71,48%**	Hasil perhitungan nilai IKPS Tahun 2025 untuk Kabupaten Sikka belum muncul dalam aplikasi SIPSN karena belum divalidasi	DLH berupaya melengkapi sejumlah data dan dokumen yang menjadi catatan dari pihak provinsi dan kementerian dalam SIPSN sehingga dapat divalidasi dan nilai IKPS dapat segera diperoleh
				Indikator Program : *Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah*	**70**	**0**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Sampah	**100%**	**71,48%**		
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8 Kelompok	4 Kelompok		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit		
				Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolahan Sampah di Instalasi Pengelolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15.350,40 Ton	9.892,19 Ton	Banyak penumpukan sampah di tempat penampungan yang disediakan 3 mobil dump truck mengalamai kerusakan sehingga pengangkutan sampah menjadi terhambat Banyak tenaga kebersihan yang lolos PPPK tahap 2 optimalisasi dan ditempatkan di instansi lain sehingga tidak menjalankan tugas rutin sebagaimana mestinya	DLH berupaya menambah ritasi pengangkutan sampah untuk menangani timbulan sampah DLH menggabungkan shift pagi dan shift siang untuk memaksimalkan pengangkutan sampah Adanya Surat Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.800/871/2025 tanggal 17 November 2025 untuk pemanggilan kembali para PPPK tersebut untuk kembali bertugas di DLH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2025

6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan diarahkan pada terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 tercermin melalui indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang menggambarkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kualitas pelayanan administrasi, serta efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung perencanaan dan pelayanan publik.

a. Indeks Pelayanan Publik

Pada Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 2,60 dan terealisasi sebesar 2,49, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pemenuhan standar pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana.

b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dihasilkan

Pada Tahun 2025, jumlah inovasi pelayanan publik yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) inovasi dan terealisasi sebanyak 2 (dua) inovasi, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam mendorong pengembangan inovasi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi

Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi ditargetkan sebesar 3,35 dan terealisasi sebesar 3,29, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama pada kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan layanan.

d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 84,82 dan terealisasi sebesar 85,28, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah akan terus memperkuat implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, serta penguatan budaya kinerja di lingkungan perangkat daerah.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil tidak dapat dilaksanakan seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat	Melaksanakan peningkatan kapasitas melalui keikutsertaan dalam webinar dan sosialisasi secara daring serta memanfaatkan modul, petunjuk teknis, dan surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil melalui kanal resmi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	3,5%	3,24%		
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	40,80%	45,11%		
				Perekaman KTP elektronik	100%	98,13%		
				Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	1 Mitra	2 Mitra		
				Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (Angka)	99,12%	98,81%		
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan		
				Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk				
				Persentase Data Pendaftaran Penduduk Yang Tertata Dan Tervalidasi	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	7 Dokumen	7 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
				Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Diselesaikan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan		
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100%	100%		
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%		
				Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	55,75%	52,16%		
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	87,4%	92,9%		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%		
				Pelayanan Pencatatan Sipil				
				Kegiatan Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Diselesaikan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen	6 Dokumen		
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	6 Layanan	6 Layanan		
				Sub Kegiatan Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1.150 Dokumen	1.150 Dokumen		
				Kegiatan Penyelengaraan Pencatatan Sipil				
				Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Diselesaikan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	2 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan di Bidang Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	56 Laporan	56 Laporan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan sipil	6 Laporan	6 Laporan		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	1 OPD	11 OPD		
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%		
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				
				Persentase Perangkat Daerah Dan Instansi Yang Memanfaatkan Database Kependudukan	100&	67,86%		
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	6 Dokumen		
				Sub Kegiatan Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Disediakan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengolahaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Yang Dilaksanakan	100%	36,76%		
				Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuidukan	62 Laporan	25 Laporan		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan	6 Laporan	-		
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Jumlah data profil kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				
				Persentase Dokumen Profil Kependudukan Yang Disusun Dan Dipublikasikan	100	100		
				Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	2 Dokumen	2 Dokumen		
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,82	85,28		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	99,90%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan	100%	100%		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100%	99,40%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	691 Paket	691 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600 Paket	438 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25637 Paket	25637 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	15 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	1 Unit		

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada pengembangan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki melalui peningkatan partisipasi sosial yang dapat dilihat dari indikator :

a. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan proritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama 5 (lima) Tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Perkembangan Indeks Desa Membangunan
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

Status IDM	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	2024	2025
Desa Sangat Tertinggal	13	2	10	5	0
Desa Tertinggal	63	45	47	46	26
Desa Berkembang	57	79	95	82	81
Desa Maju	14	21	26	38	63
Desa Mandiri	0	0	3	10	11
Jumlah	**147**	**147**	**181**	**181**	**181**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perkembagan Desa di Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 sebagai berikut : Desa Sangat Tertinggal 5 Desa, Desa Tertinggal 46 Desa, Desa Berkembang 82 Desa, Desa Maju 38 Desa dan Desa Mandiri 10 Desa sedangkan pada Tahun 2025 Desa Sangat Tertinggal 0 Desa, Desa Tertinggal 26 Desa, Desa Berkembang 81 Desa, Desa Maju 63 Desa dan Desa Mandiri 11 Desa.

b. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan Tahun 2025 yaitu 194 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 181 BPD.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
				Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	32	26		
				Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	1	15		
				Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	76	29		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	18	33		
				Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	18	33		
				Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	181	181		
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**89.10%**		
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	**100%**	**100%**		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	36		
				Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	**100%**	**100%**		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	-		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	49		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6		
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	**100%**	**100%**		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2		
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	**100%**	**85%**		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	10		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	**100%**	**49%**		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	3	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	6	6		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/dierhabilitasi.	2	-		
				PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI TERKAIT PENATAAN DESA	**100%**	**99,84%**		
				Persentase Capaian Penyelenggaraan Penataan Desa	**100%**	**99,84%**		
				Jumlah Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	19	18	Terdapat 19 calon desa yang menjadi usulan masyarakat dan telah diverifikasi lapangan oleh tim dan hasilnya terdapat 1 calon desa persiapan yang ditolak oleh warga.	Tim tidak merekomendasikan 1 calon desa menjadi desa persiapan dan diupayakan untuk diusulkan di tahun berikutnya.
				PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI KEGIATAN ATAU PROGRAM KERJASAMA	**100%**	**99,98%**		
				Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	**100%**	**99,98%**		
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota.	100	99,98		
				PERSENTASE CAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG DILAKSANAKAN	**100%**	**99,98%**		
				Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**100%**	**99,98%**		
				Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di fasilitasi	181	181		
				Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	3	2	Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 3 produk hukum desa yaitu Produk hukum penataan desa, produk hukum pilkades dan produk hukum siskeudes online namun tidak	Terkait produk hukum penataan desa, DPMD Kab. Sikka telah membuat telahaan staf untuk penyediaan anggaran operasional desa persiapan, terkait produk hukum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dapat terealisasi karena tidak tersedia anggaran untuk operasional desa persiapan, kurangnya anggaran akibat efisien keuangan daerah dan belum terbitnya peraturan pelaksana dari UU No.3 Tahun 2024.	pilkades, DPMD telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri dan DPMD Provinsi NTT dalam rangka percepatan pelaksanaan pilkades dengan hasilnya telah dijawab dengan surat kemendagri yang menyatakan Kabupaten Sikka dapat No. 100.3/6682/BPD tanggal 19 desember 2025 hal Tanggapan atas Permohonan Ijin Melaksanakan Pilkades Tahun 2025 di Kabupaten Sikka. terkait dengan produk hukum Siskeudes online, DPMD Kab. Sikka telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKP Provinsi NTT.
				Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	362	362		
				Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang difasilitasi	362	362		
				Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa		0		
				Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	132	60		
				PERSENTASE CAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	**100%**	**60%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DILAKSANAKAN				
				Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	**100%**	**60%**		
				Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi	30			
				Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	23	12		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, 2026.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan keluarga berencana diarahkan pada pengendalian penduduk peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan peran serta masyarakat dalam ber-KB. Keluarga berencana merupakan instrument yang dapat mengendalikan penduduk sebuah wilayah. Capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dicermati melalui :

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 Tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.27
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

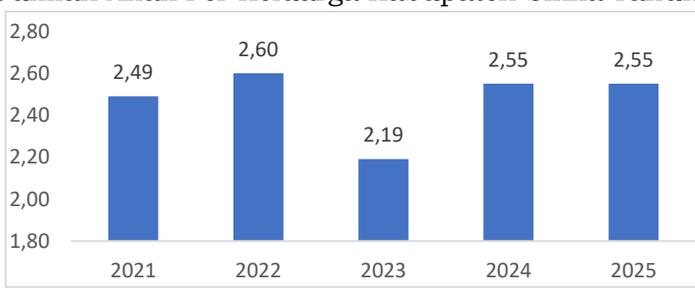

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2021 sejumlah 2,49 dan pada Tahun 2022 sejumlah 2,60 sedangkan pada Tahun 2023 sejumlah 2,19 dan Tahun 2024 sebesar 2,55. Untuk Tahun 2025 sejumlah 2,55.

b. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.28
Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

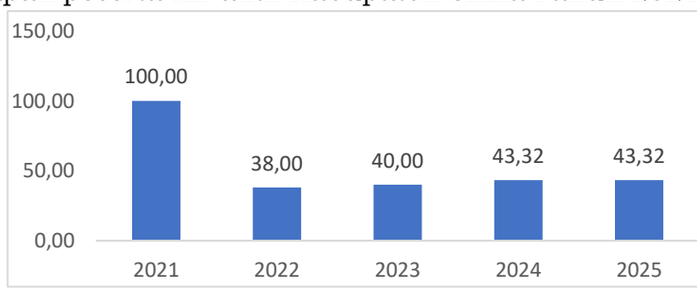

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 100, Tahun 2022 sebanyak 38, Tahun 2023 sebanyak 40 dan Tahun 2024 sebanyak 43,32. Sedangkan untuk Tahun 2025 43,32.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 didukung dengan Program dan Kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA**	**Terwujudnya keluarga berkualitas**	**Indeks Ketahanan Keluarga**	**65,65**	**61,63**	Pengendalian dan Pertumbuhan Penduduk masih rendah	Optimalisasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
							Pemberdayaan dan Peren serta Masyarakat dalam pembinaan KB masih rendah	Peningkatan Kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
							Pemberdayaan dan Perenserta Masyarakat dalam dalam mewujudkan Kesejahteraan Keluarga masih rendah	Optimalisasi pelaksanaan promosi dan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana)
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**100%**	**100%**		
				Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 Thn	23,1%	24,0%		
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,17%	2,19%		
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Lokasi Pendataan Pengelolaan Data dan Informasi KB				
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**100%**	**100%**		
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	45,11%	39,29%		
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Neet)	25,54%	39,45%		
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**100%**	**100%**		
				Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB				
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan budaya Lokal yang dilaksanakan				
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21 Organisasi	21 Organisasi		
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**100%**	**100%**		
				PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK Cakupan PPKBD/Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan KKBPK				
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	640 orang	640 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pelayanan KB				
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya				
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3811 orang	3811 orang		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 unit	10 unit		
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**100%**	**100%**		
				Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	30,5%	97,89%		
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**100%**	**100%**		
				Cakupan Peserta Akseptor KB Baru				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2026.

9. Urusan Perhubungan

Pembangunan perhubungan dan transportasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan jaringan pelayanan inter dan antar moda angkutan terutama pelayanan moda transportasi pada kantong-kantong produksi perdesaan, dengan capaian indikator :

a. Jumlah Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.29

Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Tahun 2021 - 2025

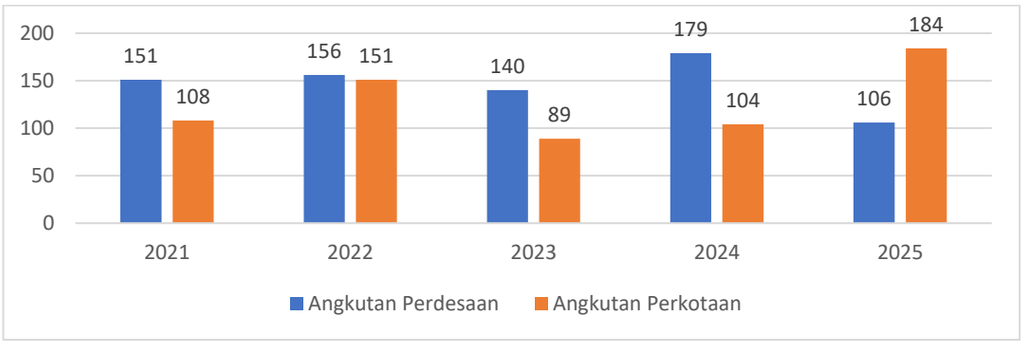

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan Umum yang melayani Perkotaan Tahun 2021 sebanyak 108 unit, Tahun 2022 sebanyak 151 unit, Tahun 2023 sebanyak 89 unit dan Tahun 2024 sebanyak 104 unit. Sedangkan Tahun 2025 sebanyak 106 unit. Untuk angkutan umum yang melayani wilayah Pedesaan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebanyak 151 unit dan Tahun 2022 sebanyak 156 unit, Tahun 2023 sebanyak 140 unit dan Tahun 2024 sebanyak 179 unit. Sedangkan untuk Tahun 2025 184 unit.

b. Rasio Ijin Trayek

Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalamprovinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.30

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sikka Tahun 2021 - 2025

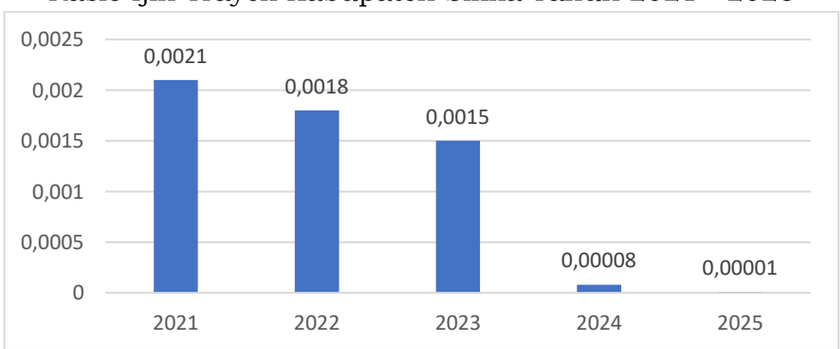

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka mengalami penurunan dari Tahun 2021 – 2024 yakni Tahun Tahun 2021 sebesar

0,00021, Tahun 2022 sebesar 0,00018, Tahun 2023 sebesar 0,00015 sedangkan Tahun 2024 sebesar 0,00008. Untuk Tahun 2025 sebesar 0,00001.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan danpengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum selama Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.31
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2025

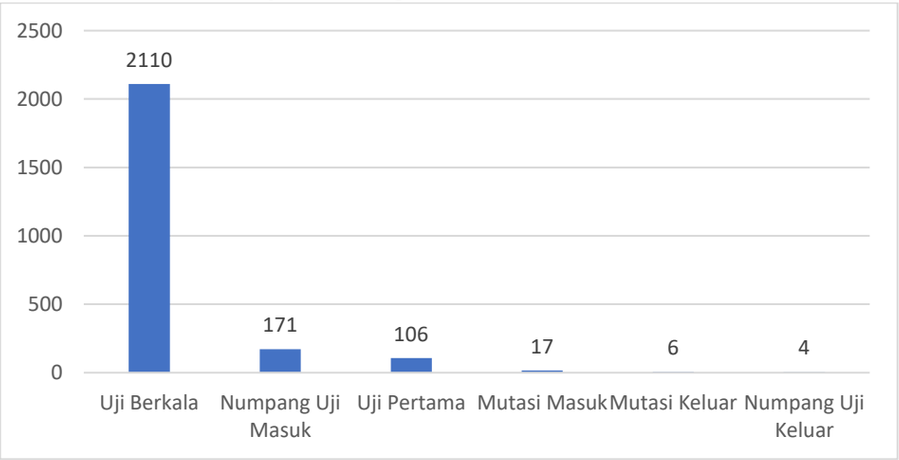

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas. dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 bahwa Uji Berkala dilakukan pada 2110 unit armada, Numpang Uji Masuk dilakukan pada 171 unit Armada, Uji Pertama di lakukan pada 106 unit armada , Mutasi Masuk terhadap 17 unit armada , Mutasi Keluar dilakukan pada 6 unit armada, dan Numpang Uji Keluar dilakukan pada 4 unit armada

Grafik 3.32
Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2025

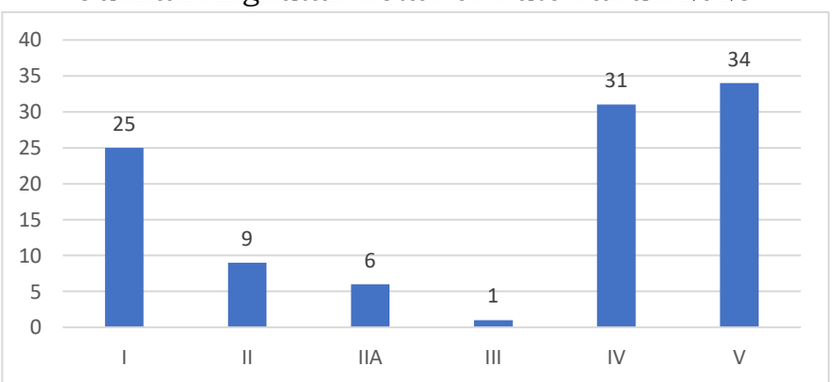

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026.

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 jumlah kendaraan yang melayani rute masing-masing Lin tidak sama yakni Lin I jumlah armada yang

melewati rute sebanyak 25 unit, Lin II sebanyak 9 unit, Lin II A sebanyak 6 unit, Lin III sebanyak 1 unit, Lin IV sebanyak 31 Unit dan Lin V sebanyak 34 unit

Grafik 3.33
Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2025

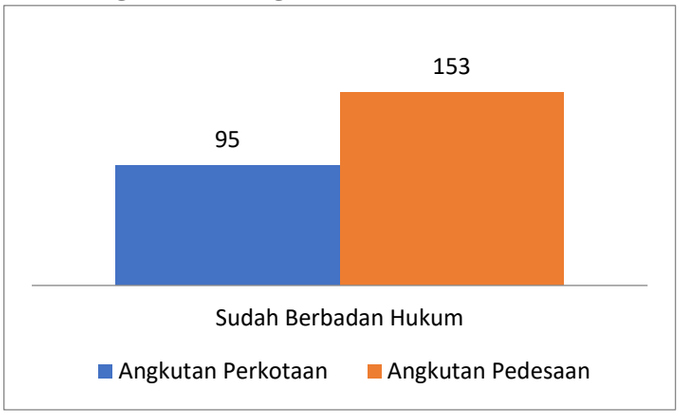

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026.

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Angkutan kota yang telah berbadan hukum pada Tahun 2025 sebanyak 95 unit dari jumlah kendaraan 106 unit, Sedangkan angkutan pedesaan yang telah berbadan hukum sebanyak 153 unit dari 184 angkutan pedesaan yang ada.

d. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaran Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, pengetokan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan. Selama Tahun 2025 Lamanya pengujian kendaraan bermotor telah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Nomor : Dishub.551.2.21/15/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

e. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian. Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bandara Udara	1	1	1	1	**1**
2	Terminal Angkutan Darat	2	2	2	2	**2**
3	Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	5	5	5	5	**5**
4	Tambatan Perahu	11	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2025 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, terminal angkutan darat sebanyak 2 unit, dermaga/pelabuhan penyeberangan 5 unit dan tambatan perahu sebanyak 11 unit.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Perhubungan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	42,85	50		
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	62,58	73,87		
				Terlaksananya pelayanan uji berkala	43,38	48,28		
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	50,13	59,71		
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**DINAS PERHUBUNGAN**	**Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja perangkat daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**65,79**	**80,50**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**100%**	**95,57**	Efisiensi Anggaran	Seluruh Proses Pelaksanaan Kegiatan Kinerja dan Keuangan dapat diatasi dan berjalan sebagaiaman mestinya
				Perencanaan,pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	560 orang/bulan	560 orang/bulan		
				Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	1 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	70 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Pengadaan Mebel	26 unit	26 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyedi Jasa Surat Menyurat	40 laporan	40 laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**75%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	13		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	1	tidak konsisten dalam pelaksanaan (hanya terealisasi sebanyak 1 unit karena ada perubahan perbaikan peralatan mesin)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	71,41	73,97		
				Konektivitas Darat	0,94	0,96		
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	50,13	56,45		
				Konektivitas Penyeberangan	0,43	0,22		
				PROGRAM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%	97%		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	100%	77%		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40 unit	35 unit	Keterlambatan Proses lelang PJU Kurangnya pengedalian (anggaran ada pengurangan tetapi tdk disertai dengan penyesuaian target kinerja)	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.389 unit	920 unit	Keterlambatan Proses lelang PJU, Kekurangan tenaga untuk memperbaiki lampu sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**100%**	**100%**		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 unit	2 unit		
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24 laporan	24 laporan		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**100%**	**100%**		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 unit	9 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	**100%**	**100%**		
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	6 laporan	6 laporan		
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**100%**	**100%**		
				Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan pemantuan sistem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	1 laporan		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan		
				Konektivitas Laut (Penyeberangan)				
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**100%**	**100%**		
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2026.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada pembinaan, pengawasan sarana dan prasarana komunikasi informatika. Pemerintah Kabupaten Sikka juga memberikan layanan gratis internet (Hotspot) sebanyak 12 titik dengan VSAT penguat sinyal terdapat di 97 titik. Berikut 12 titik Hotspot yang terdapat di Kabupaten Sikka:

Tabel 3.27

Titik Hotspot di Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO.	LOKASI	LAYANAN	BANDWITCH
1.	Kantor Suara Sikka	WMS	20 Mbps
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka	WMS	20 Mbps
3.	Toko Ban Sebelah Utara Patung Selamat Datang	WMS	20 Mbps
4.	Kios Foto Copy Sebelah Kantor DP2KBP3A Kabupaten Sikka	WMS	20 Mbps
5.	Kantor Pengurus Taman Tsunami	WMS	20 Mbps
6.	Rumah Paroki Gereja Misir	WMS	20 Mbps
7.	Show Room Mobil Bento	WMS	20 Mbps
8.	Paroki St. Thomas Morus	WMS	20 Mbps
9.	Paroki Waioti	WMS	20 Mbps
10	Kios Kefen	WMS	20 Mbps
11.	Seminari Bunda Segala Bangsa	WMS	20 Mbps
12	Terminal Lokaria	WMS	20 Mbps

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

Tabel 3.28

Lokasi Pembangunan Internet Satelit (VSAT) untuk Pelayanan Fasilitas Publik di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Kecamatan	Lokasi
1	Kecamatan Alok	SMP Negeri Pemana
		Kantor Desa Gunung Sari
		SMA Katolik Caritas
		SMP Swasta Katholik Maria Kanisia
		SMP Satap Sukun
2	Kecamatan Alok Timur	Kantor Desa Kojadoi
		Pustu Plus Kojagete
		SDI Pasir Putih
		Kantor Desa Watugong
		Pos AU Maumere
		Puskesmas Teluk Maumere
3	Kecamatan Alok Barat	SMP Negeri 3 Maumere
		Kantor BPP Alok Barat
		Pustu Wolomarang
		MIN Sikka
4	Kecamatan Bola	SD Katolik Gedo
		SD Inpres Ian
		Polsek Bola
		Sanggar Doka Tawa Tana
5	Kecamatan Hewokloang	SD Inpres Wolomapa
		Kantor BPP Hewokloang
		SDK Watuwitir
		SMPN Maget Legar

No.	Kecamatan	Lokasi
		Kantor Desa Rubit
		Kantor Desa Munerana
6	Kecamatan Kangae	SD Katolik Higetegera
		Kantor Desa Tanaduen
		SDI Weko
7	Kecamatan Kewapante	Kantor Desa Namangkewa
		SDI Habihogor
8	Kecamatan Koting	Kantor BPP Koting
		SDI Diler Koting C
		SDI Wutik
		Kantor Desa Koting C
9	Kecamatan Lela	SD Katolik 015 Lela II
		SDK St. Thomas Nanga
		Kantor Desa Kolidetung
		Kantor Desa Watutedang
		Puskesmas Nanga
		Kantor Desa Iligai
		Kantor Desa Du
		Kantor Desa Korowuwu
10	Kecamatan Magepanda	Kantor BPP Magepanda
		SMP Negeri Reroroja
		SDK 066 Magepanda
		Kantor Desa Kolisia B
		SDI 19 Magepanda
		Kantor Desa Magepanda
11	Kecamatan Mego	Kantor Desa Ndai Mbere
		SDK Lekebai
		Kantor Desa Dobo
		Kantor Desa Korobhera
		Kantor Desa Dobo Nua Puu
12	Kecamatan Nelle	Kantor Desa Nelle Lorang
		SMP Katolik St. Yohanes Nelle
13	Kecamatan Nita	SD Inpres Hagarahu
		SDK Riit
		Kantor Desa Ladogahar
14	Kecamatan Paga	Kantor BPP Paga
		Kantor Desa Wolodhesa
15	Kecamatan Palue	Kantor Camat Palue
		SD Katolik Nitung Palue
		Kantor Desa Maluriwu
		Puskesmas Palue
16	Kecamatan Talibura	SD Inpres LXX Habiratin
		UPT Puskesmas Watubaing
		SDK Hikong
		Kantor Desa Hikong
		Polindes
		BUMDes

No.	Kecamatan	Lokasi
		Pustu
		Koramil 1603-02 Talibura
		SDK 130 Tanjung Darat
		Kantor Desa Darat Pantai
		SMP Muhammadyah Darat Pantai
		Kantor Desa Baokremot
		Kantor Desa Henga
		Perpustakaan Desa
		MIS MU AL FATTAH Nangahale
17	Kecamatan Tanawawo	SDK Wolofeo
		SDK Katolik 024 Woloara
		SDN Wolorea
		SDK Ratekombo
		SDN Gaikiu
18	Kecamatan Waiblama	SDK 038 Pruda
		SD Inpres Enakter
19	Kecamatan Waigete	Kantor Desa Wairterang
		Kantor Desa Runut
		Kantor Desa Hoder
		Kantor Desa Nangatobong
		Kantor Desa Egon
		SDI Ahuwair
		SMP St. Roberto Aibura
		SMPN 3 Waigete
20	Kecamatan Doreng	SMAN Habibola
		SMPK Salib Suci
		SMPN Maget kegar
		SDI Habibola

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan pada Tahun 2024 terdapat 20 kecamatan yang mendapatkan Internet Satelit (VSAT) untuk Pelayanan Fasilitas Publik sedangkan ada 1 kecamatan yakni Kecamatan Mapitara yang belum ada pembangunan Internet Satelit (VSAT) untuk Pelayanan Fasilitas Publik.

Terdapat 155 titik Tower BTS di Kabupaten Sikka dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.29

Data Tower BTS Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
1	ALOK TIMUR	NANGAMETING	JL. TEKA IKU, RT/RW: 035/011 (SAMPING SDI MANUNAI) NANGAMETING	NANGAMETING	2010	TELKOMSEL	42 M	SST	1
2	ALOK	KOTA UNENG	JL. KOLIADUK, KOTA UNENG, KEC. ALOK (BELAKANG SMP YAPENRAIS)	PERUMNAS MAUMERE 2	2011	TELKOMSEL & XL AXIATA	72 M	SST	1
3	WAIGETE	WAIRTERANG	DUSUN WODONG, DS. WAIRTERANG, KEC. WAIGETE	TALIBURA 2	2011	TELKOMSEL & XL AXIATA	72 M	SST	1
4	KANGAE	HABI	CAND A, RT/RW: 008/003 DS. HABI LANGIR, KEC. KANGAE	MAUMERE 5 (EX MAUMERE 2)	2011	TELKOMSEL	30 M	SST	1
5	ALOK	KOTA UNENG	JL. LITBANG, RT/RW: 004/009 KOTA UNENG, ALOK	WAIRKLAU	2013	TELKOMSEL	62 M	SST	1
6	ALOK	KOTA UNENG	JL. SINDE KABOR/ PELABUHAN KOTA UNENG, ALOK	PELABUHAN MAUMERE	2013	TELKOMSEL	62 M	SST	1
7	KANGAE	HABI	JL. NAIROA - LOKARIA, HABI, KANGAE	HABI	2013	TELKOMSEL	42 M	SST	1
8	KEWAPANTE	KOPONG	DESA KOPONG KEC. KEWAPANTE	KOPONG (MME 046)	2013	TELKOMSEL	72 M	SST	1
9	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	NAMANGJAWA, RT.005 RW.003 DS. NAMANGKEWA, KEC. KEWAPANTE	GELITING (MME 045)	2013	TELKOMSEL	72 M	SST	1
10	LELA	HEPANG	NAPUNGLITI, RT/RW: 005/002, HEPANG, LELA	WOROPAUD	2013	TELKOMSEL	72 M	SST	1
11	ALOK BARAT	WAILITI	JL. MAGE ULAR BAWANG, RT/RW: 002/002 KEL. WAILITI, KEC. ALOK BARAT	MAUMERE 6	2013	TELKOMSEL & XL AXIATA	72 M	SST	1
12	BOLA	IPIR	KP. WOLONBIHET, JL. WOLOARA / UMAUTA, RT/RW: 012/006, DS. IPIR, KEC. BOLA	BOLA 3	2013	TELKOMSEL	72 M	SST	1
13	NITA	LUSITADA	DESA LUSITADA, RT/RW: 002/007, KEC. NITA	NELLE 2	2013	TELKOMSEL & XL AXIATA	72 M	SST	1
14	WAIGETE	HODER	DUSUN LUAH, RT/RW: 017/008, DS. HODER, KEC. WAIGETE	MAUMERE 8 TBG	2013	TELKOMSEL & XL AXIATA	72 M	SST	1
15	ALOK	PEMANA	DUSUN MELATI, RT 019 RW 009, DS. PEMANA, KEC. ALOK	POMANA	2014	TELKOMSEL & INDOSAT	72 M	SST	1
16	KANGAE	WATUMILOK	JL. WAIPARE - BOLA, RT/RW: 011/005, WATUMILOK, KANGAE	KEWAPANTE	2014	INDOSAT	72 M	SST	1
17	ALOK	KOTA UNENG	JL. KIMANG BULENG, RT/RW: 003/005 (SAMPING SMPK FRATERAN MAUMERE)	PERUMNAS MAUMERE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
18	ALOK	KOTA UNENG	JL. MGR SOEGYOPRONOTO, NO.1 KOTA UNENG, ALOK	PELABUHAN MAUMERE 2	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
19	ALOK	MADAWAT	KOMPLEKS MISIR RT/RW: 001/009, MADAWAT, ALOK	BANTENG MAUMERE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
20	ALOK BARAT	WOLOMARANG	JL. DIPONEGORO, RT/RW: 018/005 (SAMPING KUBUR WOLOMARANG)	MAUMERE III	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
21	ALOK BARAT	WOLOMARANG	ARAH MAKAM WOLOMARANG, RT: 003, ALOK BARAT	WOLOMARANG	2014	INDOSAT	72 M	SST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
22	ALOK TIMUR	BERU	JL. SOEKARNA HATTA, RT/RW: 004/004	MAUMERE MW	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
23	ALOK TIMUR	KOJADOI	LE WOLONG, KOJA BESAR RT06, RW03 DESA KOJA DOI, ALOK TIMUR	PULAU DOI	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
24	ALOK TIMUR	KOTA BARU	JL. SOEKARNA HATTA NO. 14 / PLASA TELKOM, KOTA BARU	MAUMERE	2014	TELKOMSEL	32 M	SST	1
25	ALOK TIMUR	NANGAMETING	JL. DUA TORU, RT/RW: 016/004 NANGAMETING, ALOK TIMUR	PEMDA MAUMERE	2014	TELKOMSEL	42 M	SST	1
26	ALOK TIMUR	NANGAMETING	JL. BERINGIN, RT/RW: 023/002 NANGAMETING, ALOK TIMUR	MAUMERE 6	2014	TELKOMSEL	32 M	SST	1
27	ALOK TIMUR	NANGAMETING	JL. DUA TORU KUBURAN ILIGETANG, NANGAMETING, ALOK TIMUR	V-MAUMERE	2014	INDOSAT	72 M	SST	1
28	ALOK TIMUR	WAIROTANG	JL. KESEKUIT, RT/RW: 008/003 WAIROTANG, ALOK TIMUR	SIKKA FM 3G	2014	TELKOMSEL	52 M	SST	1
29	DORENG	NENBURA	HEBAR, RT012 RW004 DS. NENBURA, KEC. DORENG	DORENG I	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
30	KANGAE	WATUMILOK	DUSAN WAIPARE, WATUMILOK, KEC. KANGAE	MAUMERE II	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
31	MAGEPANDA	KOLISIA	JL. RAYA MAUMERE - MAGEPANDA, RT/RW: 01/02 DESA KOLISIA	NANGARASONG	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
32	NELLE	NELLE WUTUNG	DUSUN KEONG BULU, RT: 017, NELLE WUTUNG, NELLE	NELLE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
33	NITA	RIIT	PUNCAK KIMBUL, DS. RIIT, KEC. NITA	KIMANG BULENG	2014	TELKOMSEL	92 M	SST	1
34	PAGA	PAGA	KALIWAJO DN. AEBUBU, RT.020/RW.010 , PAGA	TANAWAWO	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
35	PAGA	WOLOWIRO	DUSUN WOLOWIRO, RT/RW: 001/002, KEC. PAGA	WOLOWIRO	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
36	PALUE	RERUWAIRERE	BUKIT TIRAMANA DESA RERUWAIRERE, KEC. PALUE	UWA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
37	WAIGETE	WAIBLELER	JL. LARANTUKA - MAUMERE RT/RW: 012/006 WAIBLELER	HODER	2014	TELKOMSEL	82 M	SST	1
38	BOLA	WOLONWALU	RT/RW: 003/002, WOLONWALU, KEC. BOLA	REPEATER BOLA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
39	LELA	LELA	RT/RW: 006/003 (RUWOLONG) KEC. LELA	LELA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
40	TALIBURA	NEBE	DUSUN LALANGKLELER, RT/RW: 012/006, NEBE, TALIBURA	NEBE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
41	NITA	NITA	JL. MANUWAIT, DUSUN NITA LALAT RT/RW: 007/004 (SAMPING SMP KIMBUL) KEC. NITA	NITA	2014	INDOSAT	55 M	SST	1
42	ALOK BARAT	WURING	JL. NANGAHURE RT/RW: 001/001, WURING, ALOK BARAT	NANGAHURE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
43	MAGEPANDA	MAGEPANDA	MAGEPANDA RT/RW: 017/006 KANTOR CAMAT MAGEPANDA	MAGEPANDA	2014	TELKOMSEL	80 M	SST	1
44	MEGO	DOBO NUA PUU	DUSUN WOLOMOTONG, RT/RW: 006/006, DOBO NUA PUU, MEGO	MEGO	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
45	NITA	NITA	RT/RW: 006/003 (BELAKANG SDK NITA 1) KEC. NITA	NITA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
46	PAGA	PAGA	DUSUN MAULOO TIMUR (MBOTU WAKE) RT/RW: 003/002 KEC. PAGA	PAGA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
47	TALIBURA	WATUBAING	WATUBAING, RT/RW: 004/003, KEC. TALIBURA	TALIBURA	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
48	WAIGETE	EGON	RT/RW: 010/004 (BELAKANG KANTOR CAMAT WAIGETE)	WAIGETE	2014	TELKOMSEL	72 M	SST	1
49	KOTING	KOTING B	KOJA GETE, RT/RW : 03/02 DS. KOTING B, KEC. KOTING	NELLE II	2015	TELKOMSEL	72 M	SST	1
50	ALOK	NANGALIMANG	JL. KOLOMBEKE, RT/RW: 011/004 NANGALIMANG, ALOK	MALURIWU MAUMERE NANGALIMANG	2015	TELKOMSEL & XL AXIATA	52 M	SST	1
51	ALOK	MADAWAT	JL. WAIRKLAU, RT/RW: 004/008 MADAWAT, KEC. ALOK	NANGALIMANG	2016	TELKOMSEL & XL AXIATA	42 M	SST	1
52	ALOK TIMUR	BERU	JL. DUA TORU, RT/RW: 004/005 KUBURAN ILIGETANG, ALOK TIMUR	BERU MAUMERE	2016	TELKOMSEL	52 M	SST	1
53	HEWOKLOANG	BAOMEKOT	BAOMEKOT RT/RW: 002/002, HEWOKLOANG	AIBURA	2016	TELKOMSEL	52 M	SST	1
54	ALOK	KOTA UNENG	JL. EL TARI, RT/RW: 002/003 KOTA UNENG, KEC. ALOK	WAIRKLAU DMT	2016	TELKOMSEL	42 M	SST	1
55	ALOK	KOTA UNENG	JL. DON JUAN, RT/RW: 002/003 KOTA UNENG, KEC. ALOK	FRATERAN MAUMERE	2016	TELKOMSEL & XL AXIATA	42 M	SST	1
56	ALOK	MADAWAT	JL. WAIRKLAU, RT/RW: 004/007 MADAWAT, ALOK	MAUMERE 70	2016	TELKOMSEL & XL AXIATA	24 M	MONOPOLE	1
57	NELLE	NELLE	JL. MOAN SUBUH SADIPUN, DUSUN ENAK, RT/RW: 004/001	SITE FLORES POI 30 / MALURIMME (NELLE)	2016	TELKOMSEL	52 M	SST	1
58	NELLE	NELLE WUTUNG	JL. DEPAN GEREJA DUSUN KODE, RT/RW: 001/001, DS. NELLE WUTUNG, KEC. NELLE	SMP KATOLIK BUNGA FATIMA	2016	TELKOMSEL & XL AXIATA	52 M	SST	1
59	TALIBURA	DARAT PANTAI	BLATAT, RT/RW: 006/003 DARAT PANTAI, TALIBURA	SPLIT Talibura - 2	2016	TELKOMSEL	72 M	SST	1
60	ALOK	KABOR	JL. NONG MEAK, RT. 005/RW. 003 KABOR,ALOK	GAJAH MADA MAUMERE	2017	TELKOMSEL	30 M	MONOPOLE	1
61	ALOK BARAT	WOLOMARANAG	NAPUNG LANGIR RT01/RW01 WOLOMARANG, ALOK BARAT	KOTA UNENG ALOK	2017	TELKOMSEL	30 M	MONOPOLE	1
62	ALOK TIMUR	WAIOTI	JL. ADISUCIPTO, RT.023/RW.007 KEL. WAIOTI, KEC. ALOK TIMUR	BANDARA FRANS SEDA	2017	TELKOMSEL	20 M	MONOPOLE	1
63	ALOK	MADAWAT	JL. GAJAH MADA, RT. 005/RW. 006 KEL. MADAWAT, KEC. ALOK	HOTEL SILVIA MAUMERE	2017	TELKOMSEL	12 M	MONOPOLE	1
64	ALOK TIMUR	WAIOTI	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW: 003/014 KAMPUS IKIP MUHAMADIYAH	WAIOTI MAUMERE	2017	TELKOMSEL	12 M	SST	1
65	ALOK	PEMANA	DUSUN MELATI, RT 019 RW 009, DS. PEMANA, KEC. ALOK	POMANA	2017	XL AXIATA	72 M	SST	1
66	ALOK BARAT	WOLOMARANG	JL. DIPONEGORO, RT/RW: 025/005, KEL WOLOMARANG	WORING ALOK	2017	XL AXIATA	50 M	SST	1
67	ALOK TIMUR	BERU	JL. DUA TORU, RT/RW: 005/005 KUBURAN ILIGETANG, ALOK TIMUR	MAUMERE DATA	2017	XL AXIATA	50 M	SST	1
68	ALOK TIMUR	KOTA BARU	JL. DUSUN BATARANG, RT/RW: 017/004, KOTA BARU, ALOK TIMUR	UNENG ALOK SIKKA	2017	XL AXIATA	50 M	SST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
69	ALOK TIMUR	WAIOTI	JL. JENDRAL SUDIRMAN, RT/RW: 020/006, WAIOTI, ALOK TIMUR	MAUMERE AIRPORT	2017	XL AXIATA	30 M	SST	1
70	KANGAE	HABI	DUSUN WAIRHABI JL. NAIROA - LOKARIA, RT/RW: 011/004 KANGAE	HABI ALOK	2017	XL AXIATA	32 M	SST	1
71	KEWAPANTE	KOPONG	DUSUN NITA KLOANG, RT/RW: 004/002, KOPONG, KEWAPANTE	KOPONG KEWAPANTE	2017	XL AXIATA	70 M	SST	1
72	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	NAMANGKEWA RT/RW: 003/002 KEWAPANTE	GELITING KEWAPANTE	2017	XL AXIATA	50 M	SST	1
73	KOTING	KOTING D	JL. GEHAK LAU, RT/RW: 017/006 DS. KOTING D, KEC. KOTING	KOTING MAUMERE	2017	XL AXIATA	70 M	SST	1
74	ALOK	NANGALIMANG	JL. KOLOMBEKE NO. 42, RT/RW: 007/003, NANGALIMANG, ALOK	NANGALIMANG ALOK	2017	TELKOMSEL	20 M	MONOPOLE	1
75	ALOK TIMUR	KOTA BARU	KOTA BARU RT/RW: 019/004 KOTA BARU, ALOK TIMUR	KOTA BARU ALOK TIMUR	2017	TELKOMSEL	20 M	MONOPOLE	1
76	ALOK TIMUR	KOTA BARU	JL. DON THOMAS NO.25, RT/RW: 005/001 KOTA BARU, ALOK TIMUR	NANGALIMANG	2018	TELKOMSEL	30 M	MONOPOLE	1
77	KEWAPANTE	UMAGERA	GETANG, RT/RW: 002/001 UMAGERA, KEWAPANTE	TANADUEN	2018	TELKOMSEL	42 M	SST	1
78	MAGEPANDA	REROROJA	DUSUN DULI, RT/RW: 015/005 REROROJA, MAGEPANDA	REROROJA	2018	TELKOMSEL	42 M	SST	1
79	TALIBURA	NANGAHALE	NANGAHALE RT/RW: 013/004 KEC. TALIBURA	NANGAHALE	2018	TELKOMSEL	42 M	GUY MAST	1
80	KANGAE	BLATATIN	DUSUN BELI, DS. BLATATATIN KEC. KANGAE	API POGON	2018	TELKOMSEL	42 M	GUY MAST	1
81	WAIGETE	RUNUT	RT/RW: 015/007, RUNUT WAIGETE	RUNUT	2018	TELKOMSEL	30 M	GUY MAST	1
82	WAIBLAMA	PRUDA	PRUDA RT/RW: 001/001, WAIBLAMA	PRUDA	2018	TELKOMSEL	30 M	GUY MAST	1
83	WAIBLAMA	TANARAWA	WOLOMETANG, RT/RW: 006/003 TANARAWA, WAIBLAMA	TANARAWA	2018	TELKOMSEL	30 M	GUY MAST	1
84	MAPITARA	HEBING	DUSUN WATUBELER, RT/RW: 008/004, HEBING, MAPITARA	HEBING	2018	TELKOMSEL	30 M	GUY MAST	1
85	KEWAPANTE	WATUMILOK	WAIPARE, RT/RW: 12/06, WATUMILOK, KEWAPANTE	KEWAPANTE	2019	XL AXIATA	52 M	SST	1
86	NITA	NITA	DUSAN BAO LORAN, RT/RW: 022/006, KEC. NITA	SMPN 1 NITA	2019	XL AXIATA	50 M	SST	1
87	NITA	TAKAPLAGER	DUSUN GURU RT008/RW004 DS. TAKAPLAGER, KEC. NITA	TAKAPLAGER	2020	TELKOMSEL	42 M	GUY MAST	1
88	TALIBURA	WAILAMUNG	DUSUN BAOKREMOT, DESA WAILAMUNG, KECAMATAN TALIBURA	WAILAMUNG	2020	TELKOMSEL	32 M	GUY MAST	1
89	ALOK BARAT	HEWULI	DUSUN NAGAHURE RT013 RW004 HEWULI, KEC. ALOK BARAT	HEWULI ALOK	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
90	LELA	LELA	DUSUN LELA RT009/RW005, KEC. LELA	LELA AXL	2021	XL AXIATA	62 M	SST	1
91	MAGEPANDA	KOLISIA	JL. TRANS MAUMERE-MAGEPANDA RT022 RW006 WATURIA, KOLISIA	WATURIA UTARA	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
92	NITA	TAKAPLAGER	JL. ARAH NILO (MENTE) RT008 RW004 DUSUN GURU, TAKEPLAGER, NITA	KOTING	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
93	NITA	TILANG	JL. TRANS MAUMERE-ENDE, DUSUN TILANG RT012 RW004 NITA	TILANG NITA	2021	TELKOMSEL & XL AXIATA	52 M	SST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
94	WAIGETE	HODER	JL. TRANS MAUMERE-LARANTUKA, MOKO RT003 RW002,HODER, WAIGETE	MAULARAN	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
95	WAIGETE	WAIBLELER	NANGAHALEDOI, RT/RW.004/002 WAIBLELER, WAIGETE	HABIHERET	2021	TELKOMSEL & XL AXIATA	52 M	SST	1
96	WAIGETE	EGON	DUSUN NATARGERAN RT/RW.020/005, EGON, WAIGETE	WAIGETE	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
97	MEGO	DOBO	DUSUN RI'IPUA RT/RW.005/003 DOBO, MEGO	RI'IPUA	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
98	MEGO	NIRANGKLIUNG	DUSUN GUHI NANGABLO, RT14 RW04 DESA NIRANGKLIUNG, KEC. MEGO	DOBOMEGO	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
99	LELA	HEPANG	DUSUN NAPUNGLITI RT02 RW01 DESA HEPANG, KEC. LELA	WOROPAUD	2021	XL AXIATA	52 M	SST	1
100	PAGA	MAULOO	DUSUN MBENGU, RT 01 RW 01 MAULOO, PAGA	MAULOO	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
101	WAIBLAMA	TUA BAO	TUA BAO, RT 07 RW 04 WAIBLAMA	TUA BAO	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
102	TANA WAWO	BU UTARA	BU UTARA, RT 005 RW 004, TANA WAWO	BU UTARA	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
103	PAGA	MASEBEWA	MASEBEWA, RT 02 RW 01 PAGA	MASEBEWA	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
104	WAIGETE	RUNUT	HOLAK, RT 18 RW 06, RUNUT, WAIGETE	RUNUT	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
105	MEGO	KOWI	DUSUN NABE, RT. 001 RW. 001, KOWI, MEGO	MEGOKOWI	2021	TELKOMSEL	52 M	SST	1
106	MAPITARA	EGON GAHAR	LERE, RT/RW.001/001, DS. EGON GAHAR, KEC. MAPITARA	EGON GAHAR	2021	XL AXIATA	42 M	GUY MAST	1
107	DORENG	WAIHAWA	RT/RW.06/03, DS. WAIHAWA, KEC. DORENG	WAIHAWA	2021	XL AXIATA	42 M	GUY MAST	1
108	MAPITARA	NATAKOLI	RT/RW.07/03, DS. NATAKOLI, KEC. MAPITARA	NATAKOLI	2021	XL AXIATA	42 M	GUY MAST	1
109	NITA	LADOGAHAR	JL. KIMANG BULENG NATAWULU, RT 009 RW 003 KEC. NITA	LADOGAHAR	2021	XL AXIATA	40 M	SST	1
110	TANA WAWO	RENGGARASI	FAIPANDA RT005 RW004, RENGGARASI, TANAWAWO	RENGGARASI TANAWAWO	2021	TELKOMSEL	72 M	SST	1
111	TALIBURA	HIKONG	NATAR GAHAR, RT 013/ RW 04, HIKONG, TALIBURA	KRINGA	2021	TELKOMSEL	72 M	SST	1
112	WAIBLAMA	ILINMEDO	URULEDU RT.07/RW.04, ILINMEDO, WAIBLAMA	ILIN MEDO WAIBLAMA	2021	TELKOMSEL	72 M	SST	1
113	WAIBLAMA	WERANG	WERANG RT.011/RW.05, WAIBLAMA	WERANG WAIBLAMA	2021	TELKOMSEL	72 M	SST	1
114	LELA	SIKKA	JL. DESA SIKKA , DUSUN SIKKA, RT. 11/ RW. 02, KEC. LELA	GEREJA SIKKA SELATAN	2021	TELKOMSEL	42 M	SST	1
115	DORENG	KLOANGPOPOT	RT002 RW001 DESA KLOANGPOPOT, KEC. DORENG	KLOANGPOPOT	2022	XL AXIATA	72 M	SST	1
116	DORENG	WATUMERAK	DUSUN BORA RT001 RW002 DESA WATUMERAK, KEC. DORENG	WATU MERAK	2022	XL AXIATA	42 M	SST	1
117	DORENG	WOLON TERANG	DUSUN EWA RT004/RW002, DESA WOLON TERANG, KEC. DORENG	WOLON TERANG	2022	XL AXIATA	42 M	SST	1
118	MEGO	NAPU GERA	AEREA RT002 RW002 DUSUN AUPASA, DESA NAPU GERE, KEC. MEGO	NAPU GERA	2022	XL AXIATA	42 M	SST	1
119	TANAWAWO	POMA	DUSUN RATEGILI RT001/RW007 DESA POMA, KEC. TANAWAWO	POMA	2022	XL AXIATA	52 M	SST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
120	MEGO	LIAKUTU	DUSUN NUAMBALU RT. 001 RW. 001 DESA LIAKUTU KECAMATAN MEGO	LIAKUTU	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
121	PAGA	LENANDARETA	NIOGARA RT006 RW003 DESA LENANDARETA, KECAMATAN PAGA	LENANDARETA	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
122	PALUE	KESOKOJA	DUSUN NATAWATU RT. 010 RW. 003 KESOKOJA, PALUE	PALUE KESOKOJA	2022	TELKOMSEL	72 M	SST	1
123	PALUE	LIDI	NGANGEKABE RT002 RW 001 DESA LIDI, KEC. PALUE	LIDI	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
124	PALUE	NITUNGLEA	JLN. RUDOLFUS RIBA, RT05 RW03 DESA NITUNGLEA, KEC. PALUE	NITUNGLEA	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
125	PALUE	RERUWAIRERE	DUSUN MUDEMI RT007 RW003 DESA RERUWAIRERE, KECAMATAN PALUE	RERUWAIRERE	2022	TELKOMSEL	62 M	SST	1
126	PALUE	TUANGGEO	JLN. LAKINDORA RT004 RW 002 DESA TUANGGEO, KEC. PALUE	TUANGGEO	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
127	TALIBURA	DARAT GUNUNG	RT014 RW005 DESA DARAT GUNUNG, KECAMATAN TALIBURA	DARAT GUNUNG	2022	TELKOMSEL	72 M	SST	1
128	TALIBURA	LEWOMADA	DUSUN BOKANG RT007 RW001 DESA LEWOMADA, KECAMATAN TALIBURA	LEWOMADA	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
129	TANAWAWO	BU SELATAN	WOLOARA, RT.001 RW.003 DESA BU SELATAN, KEC. TANAWAWO	BU SELATAN	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
130	TANAWAWO	BU WATUWETI	FUNGA, RT008 RW003 DESA WATUWETI, KECAMATAN TANA WAWO	BU WATUWETI	2022	TELKOMSEL	42 M	SST	1
131	TANAWAWO	DETUBINGA	RT.002, RW.002 DESA DETUBINGA, KEC. TANAWAWO	DETUBINGA	2022	TELKOMSEL	52 M	SST	1
132	WAIBLAMA	NATARMAGE	HELANG RT010 RW005 DESA NATARMAGE, KECAMATAN WAIBLAMA	NATARMAGE	2022	TELKOMSEL	72 M	SST	1
133	ALOK TIMUR	WATUGONG	DUSUN NATAWERU RT017 RW006 DESA WATUGONG KEC. ALOK TIMUR	WATUGONG	2022	XL AXIATA	55 M	SST	1
134	DORENG	NENBURA	BOGIT RT009 RW017 DUSUN HEPANG, DESA NENBURA, KEC. DORENG	NENBURA	2022	XL AXIATA	42 M	GUY MAST	1
135	MAGEPANDA	DONE	DUSUN LADUBEWA RT009 RW 004 DESA DONE, KEC. MAGEPANDA	DONE	2022	XL AXIATA	41 M	GUY MAST	1
136	DORENG	WOGALIRIT	LORONG WAIDAHI RT010 RW005 DUSUN WAIDAHI, DESA WOGALIRIT, KEC. DORENG	WOGALIRIT	2022	XL AXIATA	60 M	SST	1
137	MEGO	BHERA	DUSUN LEKABAI RT01 RW01 DESA BHERE, KEC. MEGO	BHERA	2022	INDOSAT	40 M	SST	1
138	MEGO	GERA	DUSUN RATEGOMA RT06 RW05 DESA GERA, KEC. MEGO	GERA	2022	INDOSAT	40 M	SST	1
139	MEGO	PARABUBU	DUSUN WOLOAU RT04 RW03 DESA PARABUBU, KEC. MEGO	PARABUBU	2022	INDOSAT	40 M	SST	1
140	PAGA	WOLOGERA	DUSUN WOLOONE RT01 RW01 DESA WOLOREGA, KEC. PAGA	WOLOGERA	2022	INDOSAT	40 M	SST	1
141	MEGO	WOLODHESA	DUSUN WOLOSAGA, RT 002, RW 001 DESA WOLODHESA KEC.MEGO	WOLODHESA	2022	TELKOMSEL	32M	GUY MAST	1

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMBANGUNA TOWER	SITE NAME	TAHUN PEMBANGUNAN	OPERATOR	TINGGI MENARA	JENIS MENARA	UNIT
142	WAIGETE	WATUDIRAN	DUSUN KALIWAIR, RT 006, RW 003, DESA WATUDIRAN KEC. WAIGETE	WATUDIRAN	2022	TELKOMSEL	32 M	GUY MAST	1
143	TANAWAWO	TUWA	DUSUN NUALAKO, RT 101, RW 004 DESA TUWA KEC.TANAWAWO	TUWA	2022	TELKOMSEL	32M	GUY MAST	1
144	WAIBLAMA	ILINMEDO	KAPELA SDI ENAKTER	ILINMEDO	2022	TELKOMSEL	32 M	GUY MAST	1
145	MAPITARA	HALE	DUSUN NAPUNKONTAS RT 010, RW 004 DESA HALE KECAMATAN MAPITARA	HALE	2022	TELKOMSEL	32 M	GUY MAST	1
146	ALOK	SEMPARONG	DUSUN SUKUN RT.RW.06/03, DESA SEMPARONG, KEC. ALOK	SEMPARONG	2023	INDOSAT	40 M	SST	1
147	ALOK TIMUR	KOJAGETE	DUSUN NANGA, RT 003 RW 001, DESA KOJAGETE, KEC. ALOK TIMUR	KOJAGETE	2023	INDOSAT	40 M	SST	1
148	ALOK TIMUR	PARUMAAN	KAMPUNG TERANG, DESA PERUMAAN, KEC. ALOK TIMUR	PARUMAAN	2023	INDOSAT	40 M	SST	1
149	TALIBURA	WATUBAING	DUSUN BAO LING RT/RW.09/03 DESA WATUBAING, KEC.TALIBURA	TALIBURA	2023	INDOSAT	70 M	SST	1
150	PAGA	MBENGU	DUSUN MAULO'O TIMUR RT/RW.001/001 DESA MBENGU, KEC.PAGA	MBENGU	2023	INDOSAT	70 M	SST	1
151	LELA	LELA	DUSUN RUWOLONG RT/RW.007/004 DESA LELA, KEC. LELA	LELA	2023	INDOSAT	70 M	SST	1
152	WAIGETE	HODER	Watuoa RT005 RW003 Desa Hoder, Kec. Waigete	MAULARAN	2024	TELKOMSEL	32 M	SST	1
153	KANGAE	TANADUEN	Kp. Blatat RT012,RW008 Tanaduen Kec. Kangae	TANADUEN	2024	TELKOMSEL	72 M	SST	1
154	TALIBURA	NANGAHALE	DUSUN UTANWAIR RT 02, RW 01 DESA NANGAHALE KEC. TALIBURA	NANGAHALE	2025	TELKOMSEL	42 M	SST	1
155	WAIGETE	POGON	DUSUN BELI DESA BLATATATIN	API-POGON	2025	TELKOMSEL	42 M	SST	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

Selain itu terdapat 23 titik Blank Spot di Kabupaten Sikka Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Data Blank Spot Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Jumlah	Total
1	Alok	Desa Gunung Sari	1	1
2	Bola	Desa Hokor	1	1
3	Lela	Desa Iligai	1	1
4	Mego	Desa Napugera	1	2
		Desa NdaimBere	1	
6	Nita	Desa Tadalado	1	2
		Desa Nirangkliung	1	
8	Talibura	Desa Henga	1	3
		Desa Ojang	1	
		Desa Baokremot	1	
9	Tanawawo	Desa Bu Nua Pu'u	1	3
		Desa Loke	1	
		Desa Tuwa	1	
10	Waiblama	Desa Watumoning	1	3
		Desa Tanarawa	1	
		Desa Pruda	1	
11	Waigete	Desa Egon Gahar	1	3
		Desa Aibura	1	
		Desa Watudiran	1	
12	Kangae	Desa Teka Iku	1	1
13	Doreng	Nenbura	1	1
14	Mapitara	Hale	1	
		Natakoli	1	2
Jumlah				23

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**Indeks SPBE**	**2,5**	**2,13**	47 indikator penilaian : masih terdapat nilai rendah dari aspek tata kelola SPBE, manajemen SPBE	
			Meningkatnya kapasitas akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**86,73**	**87,76**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**100%**	**100%**		
				Indikator Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420	420		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dok	8 Dok		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dok	15 Dok		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	3 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**67,86%**	**70,37%**		
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100%**	**100%**		
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	**78,35%**	**78,54%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	**3,33**	**2,06**		
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Relasi Media	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				
				Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	10 Komunitas	10 Komunitas		
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	1 Permohonan	1 Permohonan		
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				
				Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Media	5 Media		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis				
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				
				Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	15 Orang	15 Orang		
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**100%**	**100%**		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**60%**	**68,63%**		
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	**100%**	**100%**		
				Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				
				Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	13 Aplikasi	13 Aplikasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				
				Nilai SPBE Komponen Keamanan	**0,20**	**0,33**		
			Meningkatnya keamanan informasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100%**	**100%**	Menunggu Finalisasi Perbub tentang tanda tangan elektronik	Melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum atas Finalisasi Perbup
				Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	**0,26**	**0,29**		
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**70%**	**100%**		
				Presentase Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah				
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 OPD	51 OPD		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

11. Urusan Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Capaian Kinerja Statistik Tahun 2025 dapat dilihat dari indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 ada 51 Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Data Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Dinas Sosial
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Dinas Perikanan
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Dinas Pertanian
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
25	Inspektorat Daerah
26	Sekretariat DPRD
27	Sekretariat Daerah
28	Dinas Ketahanan Pangan
29	RSUD dr. T. C. Hillers Maumere
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Kecamatan Alok
32	Kecamatan Alok Barat
33	Kecamatan Alok Timur

No.	Perangkat Daerah
34	Kecamatan Bola
35	Kecamatan Doreng
36	Kecamatan Hewokloang
37	Kecamatan Kangae
38	Kecamatan Kewapante
39	Kecamatan Koting
40	Kecamatan Lela
41	Kecamatan Magepanda
42	Kecamatan Mapitara
43	Kecamatan Mego
44	Kecamatan Nelle
45	Kecamatan Nita
46	Kecamatan Paga
47	Kecamatan Palue
48	Kecamatan Tana Wawo
49	Kecamatan Talibura
50	Kecamatan Waiblama
51	Kecamatan Waigete

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Statistik Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**Terwujudnya layanan statsitik yang akurat dan handal**	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**2,84**	**2,84**		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**100%**	**100%**		
				Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	**100%**	**100%**		
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**100%**	**100%**		
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
				Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	42 Orang	42 Orang		
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				
				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				
				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	100%		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, 2026.

12. Urusan Koperasi dan UMKM

Pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha dan permodalan bagi koperasi dan UMKM guna mengembangkan dan memperkuat sektor riil masyarakat. Capaian kinerja dapat dilihat dari Jumlah Koperasi dan UMKM Terkurasi :

- Koperasi sehat sebanyak 17 koperasi dari jumlah 30 Koperasi di Kabupaten Sikka.
- Jumlah UMKM Terkurasi di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 5.007 UMKM.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Koperasi dan UKM Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
			Meningkatnya kontribusi KUMKM terhadap perekonomian daerah melalui penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	3,7	4,35		
				Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset (Unit)	51	130		
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100%	100%		
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota (Unit Usaha)				
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	40 Koperasi	40 Kopeari		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha				
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
				Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha				
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Koperasi	12 Koperasi		
				Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)				
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100%	100%		
				Persentase Koperasi Aktif (%)				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)				
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	100 Koperasi	100 Koperasi		
				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100%	100%		
				Persentase Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten atau Kota	100%	100%		
				Persentase Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				
				Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	194 Koperasi	194 Koperasi		
				Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100%	100%		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Unit)				
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%		
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)				
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha		
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)				
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha		
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)				
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensidan Pengembangan Usaha Mikro	281 Unit Usaha	281Unit Usaha		
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)				
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha		
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)				
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)				
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100%	100%		
				Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing (Angka)				
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	73%	73%		
				Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)				
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	170 Unit Usaha	110 Unit Usaha		
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)				
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha		
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)				

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka, 2026.

13. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi kerja sama dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yang dapat dilihat dari Capaian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional terealisasi sebesar Rp. 1.189.981.643.258 yang bersumber dari 4427 perusahaan yang menanamkan modal di Kabupaten Sikka dan nilai investasi penanaman modal asing sebesar Rp. 1.000.000.000 yang bersumber dari 1 perusahaan asing yang menanamkan modal di Kabupaten Sikka.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
				Presentase Peningkatan Investasi	5	-56		
				Kegiatan pameran penanaman modal	0	0		
				PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	1		
				Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	80	38		
				Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	4	4		
				Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	0		
				Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	1		
				Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	80	38		
				Laporan realisasi penanaman modal	1	1		
				Konsultasi perizinan penanaman modal	50	26		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**88%**		
				Pesentase Peningkatan Pelayanan urusan Pemerintaha Daerah Kabupate/Kota (%)				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**0%**		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	0		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
				Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara Peralatan Mesin Lainnya				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya.				
				Kegiatan Penataan Organisasi	**0%**	**0%**		
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0		
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**100%**	**100%**		
				Presentase Peningkatan Investasi				
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)				
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dok	5 Dok		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)				
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**100%**	**100%**		
				Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi				
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)				
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok		
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**100%**	**129%**		
				Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)				
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**129%**		
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)				
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2250 pelaku usaha	1340 pelaku usaha		
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)				
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6 pelaku usaha	12 pelaku usaha		
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)				
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**100%**	**100%**		
				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)				
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)				
				Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha		
				jumlah kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)				
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**100%**	**100%**		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama / Prog/ Keg/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)				
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)				
				Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dok	3 Dok		
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, 2026.

14. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada pembinaan dan pemasyarakatan olah raga masyarakat, yang dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.34
Pemuda Pelopor Kabupaten Sikka Tahun 2021 - 2025

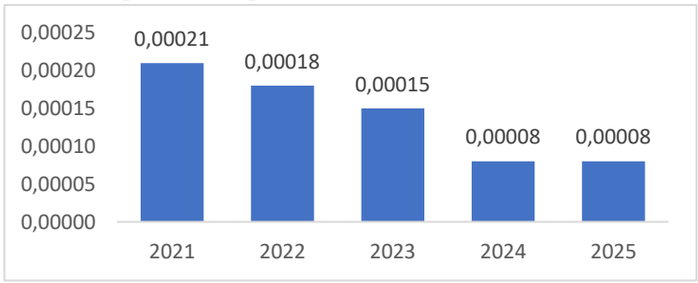

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

Sedangkan perolehan jumlah penghargaan prestasi di bidang olahraga di Kabupaten Sikka periode 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.35
Perolehan Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga
Tahun 2021 - 2025

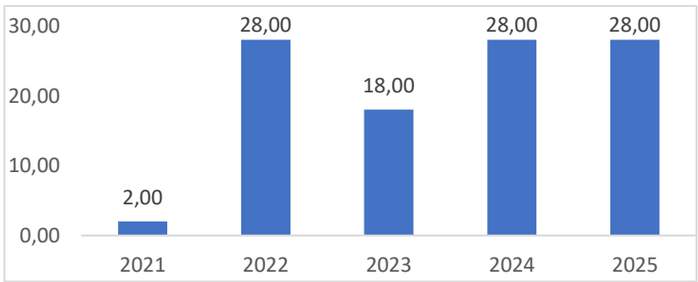

Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2026

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga**	**Indeks Pembangunan Pemuda Daerah (Indeks)**	**58**	**58**		
			Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	**1**	**1**		
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100%**	**83%**		
			Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga (%)	71%	75%		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**50%**		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2 Unit	1 Unit		
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan		
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	48 Penghargaan	48 Penghargaan		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**100%**	**100%**		
			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	28 Orang	28 Orang		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**100%**	**100%**		
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan				
			Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	100%	100%		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**100%**	**100%**		
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2026.

15. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan keragaman nilai dan kekayaan budaya.

Tabel 3.37
Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Alok	Lero Bekor	Kota Uneng
2	Alok	Blutuk Lunung Ha	Kabor
3	Alok	Sadang Bui	Kota Uneng
4	Alok	Bekor Bliran	Thomas Morus
5	Alok	Hogor Hini	Kampung Garam
6	Alok	Lunung Kunung	SDI Maumere
7	Alok	Lamalino	Kojadoi
8	Alok	SDI Wairklau	Wairklau
9	Alok	Nian Tana	Kelurahan Madawat
10	Alok	Sigo Siang	SMP Bunda Segala Bangsa
11	Alok	SDI Madawat	Madawat
12	Alok	Sinar Kayu Rangka	Desa Gunung Sari
13	Alok	Semparong	Desa Semparong
14	Alok	Sinar Tani	Kelurahan Nangalimang
15	Alok	Napun Hoba	Kelurahan Nangalimang
16	Alok Barat	Benza	Waidoko
17	Alok Barat	Cogo Sanda	Hewuli
18	Alok Barat	Cua Kabe	Hewuli
19	Alok Barat	Songgo Mori	Palue
20	Alok Barat	Sanggar Desa Lidi	Palue Desa Lidi
21	Alok Barat	Sanggar Desa Lado Laka	Palue
22	Alok Timur	Kibo Libok	Kesokuit
23	Alok Timur	Uwun Kloda	SMP Yapenthom II
24	Alok Timur	Sanggar SMPK Vifi	SMPK Vifi
25	Alok Timur	SD Contoh	SD Contoh
26	Alok Timur	SDK Maria Ferari	SDK Ferari
27	Alok Timur	SMPN I Maumere	Kelurahan Nangameting
28	Alok Timur	Moreska	Watugong
29	Alok Timur	Mikael Brai	Watugong
30	Alok Timur	Remaja Mesjid AT. Tagwa	Beru
31	Alok Timur	Baka Likat	SDI Nangameting
32	Alok Timur	Warna 12	Kelurahan nangameting
33	Nita	Mawarane	Nita Tebuk
34	Nita	Rudun Blutuk Lero Bekor	Nita Tebuk
35	Nita	Lala Along	Nirangkliung
36	Nita	Wolon Guut	Nirangkliung
37	Nita	Bao Lero Wulang	Nirangkliung
38	Nita	Orkestra Satu Sikka	Nita
39	Nita	Lado Gahar	Lado Gahar
40	Nita	Nilo Indah	Wuliwutik
41	Nita	Lepo Lorun	Desa Nita
42	Nita	Jero Ni	Desa Nirangkliung
43	Nita	Dubi Bui Hagong Nawang	Desa Nita
44	Paga	Begu Lagu	Wolowiro
45	Paga	Tembu Tana Sula Nuwa	Wolowiro
46	Paga	Rawi Ria	Mbengu- Maulo'o
47	Paga	Nusa Koka	Paga

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
48	Paga	Oro Wolo	Paga
49	Mego	Lodo Fao	Feondari Desa Wolodhesa
50	Lela	Jiro Jaro	Desa Lela
51	Lela	Watu Tedang	Desa Watu Tedang
52	Lela	Suka Maju	Desa Lela
53	Lela	Wuwu Tere	Wukur
54	Lela	Nona Wini	Desa Sikka
55	Lela	Soka Toja	Desa Lela
56	Lela	Kumak Bura	Desa Du
57	Lela	Puan Pliti	Desa Iligai
58	Koting	Sora Raga Regut	Desa Koting D
59	Nelle	Hibir Priti	Desa Nele Wutung
60	Nelle	Sora Dendang	Desa Nele Lorang
61	Nelle	Aurau	Desa Nele Barat
62	Nelle	Orkes Getaran Rimba	Desa Nele Barat
63	Kangae	Seka Dendang	Watuliwung
64	Kangae	Nibon Naitawa	Watuliwung
65	Kangae	Skala Langir	Blatatatin
66	Kangae	Blatatatin	Desa Blatatatin
67	Kangae	Manu Mekeng	Meken Detun
68	Kewapante	Jong Dobo	Desa Ian Tena
69	Kewapante	Wair Koja Menik Meteng	Desa Wairkoja
70	Kewapante	Namang Djawa	Desa Namangkewa
71	Kewapante	Bunga Kelan	Desa Kopong
72	Kewapante	Bang Boler	Desa Waiara
73	Kewapante	Fortes	Desa Waiara
74	Kewapante	Tawa Tana	Desa Waiara
75	Hewokloang	Bliran Sina	Desa Wairkoja
76	Hewokloang	Wolomapa	Desa Wolomapa
77	Hewokloang	Heo Puat Tawa Tana	Desa Heo Puat
78	Hewokloang	Wini Li'in	Desa Hewokloang
79	Hewokloang	Depo Hagong Munerana	Desa Munerana
80	Hewokloang	Mugen Ledun	Desa Munerana
81	Bola	Pesa Lin Tuna Peni	Desa Uma Uta
82	Bola	Raga Dara	Desa Hokor
83	Bola	Doka tawa Tana	Desa Uma Uta
84	Bola	Watu Kebar	Desa Ipir
85	Bola	Gawi Mai Lembah Sunyi	Desa Bola
86	Bola	Geke Gole	Desa Bola
87	Talibura	Gong Ilin Puan	Desa Darat Gunung
88	Talibura	Kroa Soa	Desa Hikong
89	Talibura	Bekol Ekan Gere	Desa Wailamung
90	Waigete	Bunga Nukak	Desa Pogon
91	Waigete	PGRI Egon	Desa Wairbleler
92	Waigete	Runut Puhun	Desa Runut
93	Waigete	Gong Gaging Bintang Timur	Desa Wairbleler
94	Waigete	Watu Jajin	Desa Aibura
95	Waigete	Rotan Sese	Desa Wolomapa
96	Palue	Cua Kabe	Desa Kesokoja
97	Palue	Songgo Mori	Desa Reruwairere
98	Palue	Desa Lidi	Desa Lidi
99	Palue	Lado Laka	Desa Maluriwu
100	Palue	Roa Rero	Nitung Lea

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
101	Palue	Roki Role	Roki Role
102	Palue	Tuanggeo	Desa Tuanggeo
103	Palue	Lado Laka II	Desa Ladolaka
104	Doreng	Dala Elat	Desa Kloangpopot
105	Doreng	Jogo Bekor	Desa Wolon Terang
106	Doreng	Jong Sawu Kolit	Kloangpopot
107	Magepanda	Magendero	Magepanda
108	Magepanda	Sinar Watu Klong	Nangarasong
109	Mapitara	Mapitara	Desa Egon
110	Tanawawo	Moa Kolo	Wolofeo Desa Ranggarasi
111	Waiblama	Eba Lewa	Desa Ilin Medo

Sumber : Dokumen RIPPARDA Kabupaten Sikka, 2026.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3	10		
				Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	21	21		
				Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	20	108		
				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	2	8		
				Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	2		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100%	99,44%		
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) Persentase Karya Budaya yang Dilestarikan				
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%		
			Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Persentase Karya Budaya yang Dilestarikan				
			Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Obyek	2 Obyek		
			Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-			
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	88,89%		
			Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola				
			Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4 Obyek	4 Obyek		
			Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	5 Laporan	4 Laporan		
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100%	100%		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Pembentukan tim ahli cagar budaya Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Peyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Persentase cagar budaya yang ditetapkan				
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	100%		
				Persentase Cagar Budaya yang Dikelola				
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	15 Obyek	15 Obyek		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	99,24		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10	10		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum				
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan				
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Kurangnya sarana prasana seperti laptop dan printer	Adanya penambahan anggaran terkait belanja laptop dan printer
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit	Mobil Dinas mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga membutuhkan biaya tambahan yang besar untuk pemeliharaan kendaraan Dinas	Penambahan anggaran pada pemeliharaan kendaraan dan atau pengadaan kendaraan dinas yang baru
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Pembatasan Anggaran sehingga anggaran yang disediakan untuk rehab toilet tidak digunakan	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2026.

16. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada pengembangan minat dan budaya baca dengan sasaran pelayanan perpustakaan keliling, dengan capain indikator sebagai berikut :

a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 501 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

Tabel 3.39
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1.	Perpustakaan Umum	1
2.	Perpustakaan Khusus	5
3.	Perpustakaan SD	315
4.	Perpustakaan SMP	84
5.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	50
6.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	6
7.	Perpustakaan SMA	40
	Jumlah	**501**

Sumber : Dinas Perpustakaan *dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2026.*

b. Rasio Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Rasio Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio P

erpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebesar 14, 5.

c. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.36
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

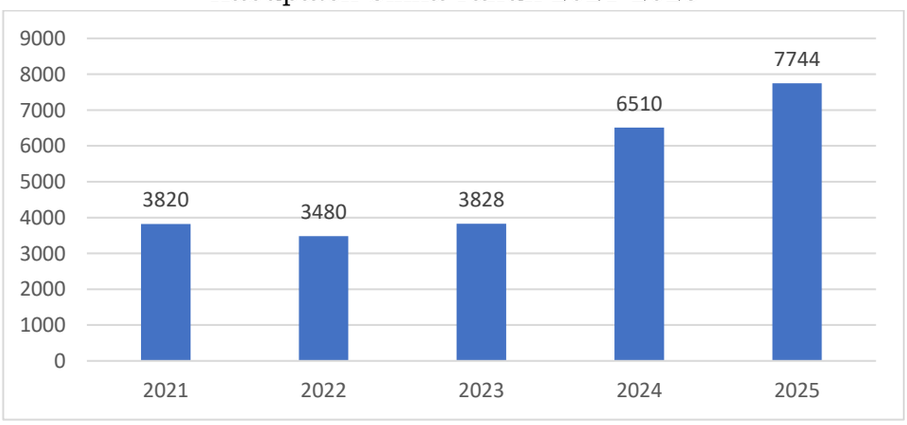

Sumber *: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2026.*

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka adalah Tahun 2021 sebanyak 3.820 pengunjung, Tahun 2022 sebanyak 3.480 pengunjung dan Tahun 2023 pengunjung sebanyak 3.828 sedangan pada Tahun 2024 sebanyak 6.510 pengunjung. Dan untuk Tahun 2025 7.744.

d. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 18.743 Judul Buku dan 26.979 eksemplar.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Perpustakaan Tahun 2025 didukung dengan programdan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatkan Literasi Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**51,61**	**1,48**	Belum ada nilai IPLM (menunggu rilis dari Perpusnas RI pada Tgl 30 Januari 2026) dan TGM/TKM karena Ada perubahan dimensi, variabel dan indikator dalam perhiungan IPLM dan TGM/TKM	Melakukan Konsultasi langsung dengan pihak Perpusnas terkait perhitungan IPLM dan TGM/TKM yang baru dan menunggu rilis dari Perpustakaan Nasional terkait IPLM dan TGM/TKM Tahun 2025
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	**65,53**	**58,43**		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**100%**	**58,72%**		
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**99,80%**	Pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga berdampak pada pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23 Perpustakaan	23 Perpustakaan		Melakukan pendampingan terhadap tenaga perpustakaan untuk pengisian IPLM dan TGM/TKM
			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	8 Perpustakaan	2 Perpustakaan		
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang		Melakukan Rapat pembahasan terhadap pengelolaan keuangan SKPD yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, dan Bendahara serta Analis Keuangan
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	3 Dokumen	2 Dokumen		
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	4000 Ekssemplar	4000 Ekssemplar		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	4 Layanan Perpustakaan	3 Layanan Perpustakaan		

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	17,65%		
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	9 Perpustakaan	9 Perpustakaan		
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	850 Orang	118 Orang	Pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga berdampak pada pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	42 Lokus	32 Lokus	Terkendala kendaraan operasional yang digunakan oleh Kepala Dinas (Secara fungsi kendaraan dinas tersebut berfungsi sebagai kendaraan perpustakaan keliling)	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, 2026.

17. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.37
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Tahun 2021-2025

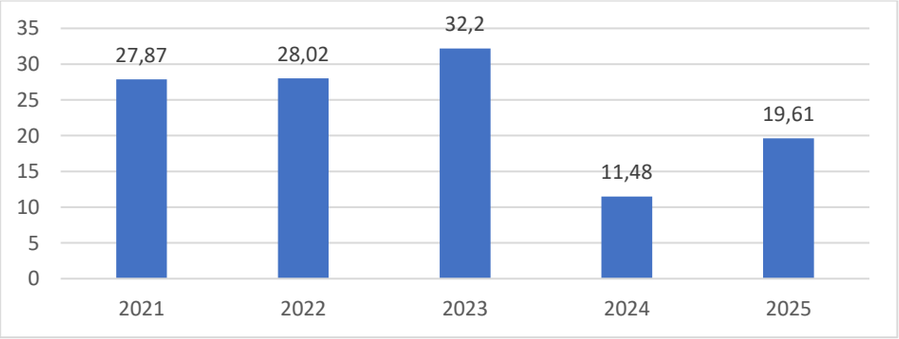

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 27,87%, pada Tahun 2022 sebanyak 28,02% dan Tahun 2023 sebanyak 32,20% sedangkan Tahun 2024 sebanyak 11,48%. Dan Tahun 2025 sebanyak 19,61%.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**28,86**	**22,80**	Kurangnya kesadaran PD terhadap pentingnya pengelolaan arsip dan Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pegelolaan arsip dalam (SRIKANDI)	Melakukan pelatihan dan bimtek secara berkala untuk pengelola Arsip PD dan pendampingan bagi pengelola arsip perangkat daerah dalam pengelolaan SRIKANDI
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	49,41		
				Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	100	50		
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**100%**	**88,89**		
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	30 Berkas	30 Berkas		
				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	30 Berkas	30 Berkas	Kompetensi SDM Pengelola Arsip pada PD yakni pengelola arsip PD tidak memiliki latar belakang Pendidikan kearsipan	
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Laporan	17 Laporan		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2	**2**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**100%**	**66,67**		
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	2 Laporan	Pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga berdampak pada pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal (peserta bimtek sudah 2 tahun berturut-turut dikeluarkan dari kegiatan bimtek dikarenakan terlambat membayar biaya kontribusi peserta)	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**100%**	**83,33**		
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**100%**	**100%**		
				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50 Berkas	50 Berkas		
				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50 Arsip	50 Arsip		
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**100%**	**66,67**		
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	2 Daftar	Kesiapan SDM pengelola arsip Perangkat daerah (Disperindag) berhalangan karena ada kegiatan lain	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50	**72,55**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**100%**	**84,76**		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	2 Paket		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**23,81%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 unit	0	Pemeliharaan PC, Lap Top dan printer tidak terealisasi terkendala tata kelola keungan yang belum optimal	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, 2026.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Pelaksanaan urusan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pengembangan perikanan tangkap maupun budi daya yang didukung oleh investasi dan pendampingan serta penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya dan kesadaran manusia tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Hasil yang dicapai dapat dilihat dari:

a. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 25.000 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.987 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 890 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1.802 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.42

Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Status Nelayan	Jumlah RTP
1.	Nelayan Penuh	1.987
2.	Nelayan Sambilan Utama	890
3.	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4.	Buruh Nelayan	1.802
	Jumlah	**5.085**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing,jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43

Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan Tahun 2025

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1.	Pukat Pantai	**97**
2.	Pukat Cincing/Purse seine	**203**
3.	Jaring Insang tetap	**461**
4.	Jaring Isang hanyut	**981**
5.	Bagan	**172**
6.	Longline	**3**
7.	Rawai Dasar	**83**
8.	Huhate / Pole and Line	**67**
9.	Pancing / Hand Line	**9.329**
10.	Bubu	**16**
11.	Panah	**40**
12.	Jala Tebar	**130**
	Jumlah	**12.560**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: perahu papan kecil, perahu papan sedang, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Kapal Motor < 5 GT sebanyak 475 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44

Jenis Armada Yang Digunakan Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Jenis Armada	Jumlah (Unit)
1.	Perahu papan kecil sampan fibre glass < 5 M	373
2.	Perahu Papan Sedang/sampan fiberglass >5 M	305
3.	Motor Tempel < 5 GT	88

No	Jenis Armada	Jumlah (Unit)
4.	Motor Tempel 5-10 GT	-
5.	Motor Tempel 10-20 GT	-
6.	Kapal Motor < 5 GT	475
7.	Kapal Motor 5-10 GT	102
8.	Kapal Motor 10-20 GT	10
9.	Kapal Motor 20-30 GT	67
10	Kapal Motor 30-50 GT	1
	Jumlah	1.423

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Denpasar, Makasar, Labuhan Bajo, Bima, Lombok, Kupang, Kendari, Sidoarjo, Malang, Pekalongan, Larantuka, Batam, Singapura, Gresik dan Korea Selatan. Jenis ikan maupun non ikan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Jenis Komoditi Yang Dikirim Keluar Wilayah Kabupaten Sikka

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH (KG)	DAERAH TUJUAN
1	Tuna Loin	165.028	Denpasar, Surabaya, Jakarta, Kupang
2	Tuna	1.179	Surabaya, Singapura
3	Baby Tuna	93.300	Jakarta, Surabaya
4	Yellowfin Tuna	11.000	Pati
5	Lobster	3.089	Jakarta, Denpasar
6	Tenggiri	4.344	Makasar, Surabaya
7	Kerapu	8.941	Makasar,Semarang, Surabaya, Jakarta
8	Sunuk	1.705	Makasar
9	Cumi/Sotong	11.507	Makasar, Rembang, Surabaya, Jakarta
10	Sori (kering)	10.500	Kupang
11	Kakatua	7.649	Makasar, Semarang, Rembang, Jakarta
12	Udang Ronggeng	3.895	Jakarta, Kupang
13	Ikan Hias	485	Denpasar
14	Cakalang	465.001	Surabaya, Jakarta, Kupang
15	Siput	4.000	Semarang
16	Ikan Asap	61	Jakarta, Kupang
17	Ikan Gabus	13	Makasar
18	Ikan Jaket	400	Rembang
19	Tongkol/Deho	103.000	Jakarta, Lamongan
20	Gurita	168.355	Banyuwangi, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Jakarta, Bekasi, Kupang
21	Kakap	9.320	Jakarta
22	Layang	82.000	Jakarta
23	Ikan Meka	3.000	Jakarta
24	Layur	10.000	Jakarta
25	Kepiting Bakau	50	Surabaya
26	Ikan Waho	6.000	Jakarta
27	Ikan Anggoli	3.000	Jakarta
JUMLAH		**1.176.822**	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

b. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat

pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.38
Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

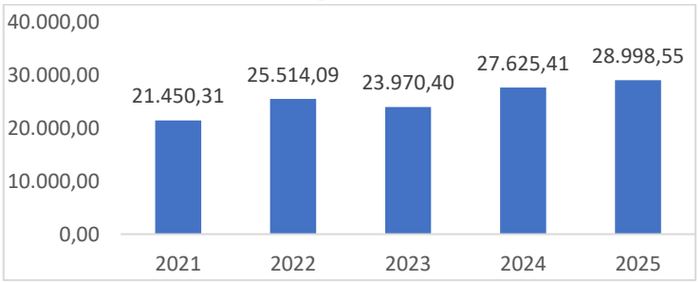

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebanyak 21.450,31 ton, Tahun 2022 sebanyak 25.514,09 dan turun pada Tahun 2023 menjadi 23.970,40 ton sedangkan Tahun 2024 sebanyak 27.625,41. Untuk Tahun 2025 sebanyak 28.998,55 ton.

Tabel 3.46
Produksi perikanan Tangkap Kabupaten Sikka

No	Tahun	Produksi Penangkapan (Ton)	
		Target	Capaian
1.	2019	19.123.56	19.674.93
2.	2020	20.079,22	20.924,93
3.	2021	21.083,18	21.450,31
4.	2022	22.137,33	25.514,09
5.	2023	23.244,20	23.970,48
6.	2024	26.151,54	27.625,41
7.	2025	29.973,60	28,998,55

Sumber : Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2025

c. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2021- 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.39
Konsumsi Ikan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

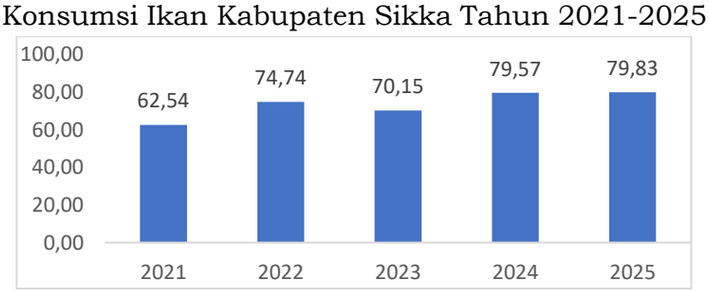

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebanyak 62,54 kg/kapita/Tahun dan Tahun 2022 sebanyak

74,74 kg/kapita/Tahun sedangkan Tahun 2023 sebanyak 70,15 kg/kapita/Tahun sedangkan Tahun 2024 sebanyak 79,57 kg/kapita/ Tahun. Dan untuk Tahun 2025 sebanyak 79,83.

Tabel 3.47
Konsumsi ikan penduduk Kabupaten Sikka

No	Tahun	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun		Keterangan
		Target	Capaian	
1.	2018	44,00	51,27	• Konsumsi ikan penduduk Kab. Sikka tahun 2025 rata-rata sebesar 79,83 kg/kapita/tahun (artinya dari segi kebutuhan protein ikani mencukupi) • Target konsumsi Ikan nasional adalah 62,5 kg/kapita/tahun
2.	2019	52,50	59,19	
3.	2020	53,45	61,73	
4.	2021	54,75	62,54	
5.	2022	55,25	74,74	
6.	2023	56,25	70,15	
7.	2024	76,61	79,57	
8.	2025	84,75	79,83	

d. Pendapatan Nelayan

Pendapatan Nelayan Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.48
Pendapatan Nelayan Kabupaten Sikka

No	**Tahun**	**Pendapatan Nelayan (Rp)**	
		Target	**Capaian**
1	2021	14.750.000	14.775.744
2	2022	15.500.000	19.083.980
3	2023	16.250.000	14.157.940
4	2024	19.561.082	20.138.456
5	2025	20.050.109	20.655.606

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan nelayan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar Rp14.775.744, Tahun 2022 sebesar Rp19.083.980, Tahun 2023 Rp14.157.940, Tahun 2024 sebesar Rp20.138.456 dan pada Tahun 2025 sebesar 20.655.606.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.49

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	
		DINAS PERIKANAN	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan					
				Pertumbuhan Pendapatan Nelayan	2,25%	2,57%		
				Pertumbuhan Pendapatan Pembudidaya Ikan	0,20%	0,17%		
				Total Produksi Perikanan	29.974,23 Ton / Tahun	28.998,55 Ton / Tahun		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.974,23 Ton / Tahun	28.998,55 Ton / Tahun	-	-
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	29.974,23	28.998,55		
				Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan verifikasi usaha (RTP)	130 RTP	409 RTP		
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	150 Orang	150 Orang	-	-
				Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	150 Orang	150 Orang	-	-
				Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya				
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,63 Ton	0 Ton	mengalami Efisiensi anggaran	tetap melaksanakan kegiatan pembinaan
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	0 kelompok	0 kelompok		
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				
				Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	0 Kelompok	0 Kelompok		
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas				
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	84,75 Kg / kapita / tahun	79,83 Kg / kapita / tahun	-	-
				Angka konsumsi ikan				
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12 ton	28.998,55 ton	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 ton	28.998,55 ton	-	-
				Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Nilai SAKIP	92,51	92,01		
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	85,63%	-	-
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah laporan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perikanan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	-	-
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	-	-
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
				Sub KegiatanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	7 Unit	-	-
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	3 Unit	-	-
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2026.

2. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan penyediaan sarana prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis; bimbingan pada kelompok usaha dan kelompok sadar wisata di sekitar objek wisata guna meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada wisatawan dengan capaian indikator sebagai berikut:

a. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata yang dapat didilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50

Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Pantai Koka	Pantai Koka di pesisir selatan Kabupaten Sikka, Pulau Flores, kerap dijuluki The Dream Beach atau pantai impian, Pantai ini memiliki keunikan karena memiliki bentuk garis pantai yang melengkung. Memiliki pasir putih dan air lautnya hijau tosca
2.	Pantai Paga	Pantai paga merupakan Pantai pasir putih dengan suasana kapal-kapal nelayan, Satu keunikan dari Pantai ini adalah keberadaan 'Ikan Se', bentuknya seperti ikan teri. Ikan Se yang sudah diawetkan dengan garam disebut 'Wogi'.
3.	Tebing Watu Ngesu	"Hidden paradise", sekumpulan batu berlapis bercorak gradasi kehijauan yang terbentuk secara natural. Ada yg berukuran kecil maupun besar yang dikelilingi pasir putih. Ada permukaan seperti lantai berwarna hijau juga dari batu tersebut. Tebing Watu Ngesu ini merupakan objek warisan geologi Kabupaten Sikka.
4.	Air Terjun Lia Niki	Keunikan air terjun ini berada dalam dinding batu yang kokoh bisa untuk berenang dan melakukan cliff jumping
5.	Batu Kekar Kolom Bhera	Batu kekar merupakan sekumpulan batu berlapis yang sisi-sisinya tidak mengalami pergerakan. Batu kekar ini merupakan objek warisan geologi Kabupaten Sikka.
7.	Air Terjun Murusobe	Dalam bahasa Lio, Muru berarti terjun dan Sobe berarti lurus seperti bambu. Nama ini menggambarkan air terjun yang tinggi dan lurus seperti bambu. Murusobe terdapat dua air terjun yang bersebelahan, dengan ketinggian sekitar 100 meter. Itu sebabnya, Murusobe lebih dikenal dengan wisata air terjun kembar.
8.	Jembatan Alam Wukur	Jembatan alam bukan buatan manusia, warga lokal menyebutnya dgn jembatan batu. Material jembatan tersusun dari pasir dan batu, membentuk sebuah kerangka batu mirip jembatan dengan air laut yang tergenang di bawah rongga batu. Jembatan ini terdiri dari dua bagian namun memiliki satu poros jalan yang sama dari dua sisinya, tempat pengunjung bisa menyeberang. Ketinggian jembatan batu itu sekitar 3 meter dan lebar 7 m.
9.	Pantai Hira Hotak	Wilayah pantai Selatan, saat kondisi air laut surut masyarakat dapat melakukan aktivitas mencari hasil laut seperti ikan, kerang laut, dan rumput laut untuk dikonsumsi dan bisa mienyaksikan indahnya matahari terbit dari arah pantai Bola dan Matahari terbenam dari arah pantai Paga.
10.	Pantai Bangboler	Pantai ini bisa untuk bersantai menikmati pemandangan pantai selatan dan memiliki Spot foto (fotografi) dan bisa untuk menikmati sunset
11.	Tanjung Watu Krus	Deretan batu karang yang menjulang di pesisir pantai selatan desa Bola sejak dahulu hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja oleh masyarakat, sejak 2016, batu-batu karang cadas tersebut mulai ditata dengan menyusun tanah di atasnya lalu dipadatkan sehingga bisa ditanami aneka bunga dan pepohonan. Tanah dari tebing bukit di bagian belakang batu karang pun dikeruk untuk menjadi rata sehingga bisa dibangun pondok-pondok yang dipergunakan sebagai tempat wisata.
12.	Pantai Ipir	Pantai ini bisa untuk menyaksikan keindahan laut biru dengan gulungan ombak ciri khas pantai Selatan, bentang pasir hitam di pesisir pantai Selatan Sikka, vegetasi pohon kelapa dan pandan laut di

No	Jenis Data	Keterangan
		sepanjang bibir pantai, Pantai ini tidak bisa untuk mandi dan berenang karena ombaknya yang ganas
14.	Watu Melur	Merupakan sebuah tebing yang memiliki litologi berupa batuan vulkanik, menjadi daya tarik bentang alam dari kejauhan. Objek ini merupakan daya tarik geowisata
15.	Pantai Doreng	Keindahan Pantai Doreng ini tak lepas dari perpaduan pasir putih berpadu batu karang yang membentang sepanjang 4 km, pemandangan pasir putih ini berpadu dengan laut biru, dan pepohonan rindang di sekitar pantai, Suasana pantai yang rindang vegetasi, Kuliner lokal dan kerajinan tangan, bisa juga untuk swafoto (fotografi)
16.	Goa Keytimu	
17.	Batu Alam Ogor Paret	Ogor Paret disusun oleh batuan vulkanik di atas dan batu gamping di bagian bawahnya. Terdapat pelapukan Honeycomb di batuan granodiorit yang menjadi ciri khas dari situs ini. Honeycomb weathering alias pelapukan sarang lebah adalah proses alam yang menghasilkan bentukan alam berupa batuan berongga-rongga yang teratur dan berdekatan di bagian permukaannya sehingga menyerupai sarang lebah. Daya tarik wisata Ogor Paret: a. Pemandangan alam sekitar objek b. Objek geowisata sebagai laboratorium riset
18.	Goa Lahar Teitimu	Goa dengan batuan penyusun berupa lahar dari letusan gunungapi. Goa ini sebagai objek geowisata, juga merupakan laboratorium alam untuk riset
19.	Air Terjun Tigen	Terletak wilayah bagian selatan Gunungapi Egon. Air terjun yang berada di belantara lereng Gunung Egon sangat indah dan memukau. Selain Air Terjun Tigen, tidak jauh dari situ terdapat sebuah air terjun Watu Api dan air terjun Lago Toter yang tingginya kurang lebih 50 meter dan bertingkat. Air terjun Tigen memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter dan kembar. Desiran butiran bening menyerupai kristal menyambut setiap pengunjung. Keindahan belantara yang diselingi dengan kicauan burung burung yang bercengkrama di atas dahan, membuat kesan mendalam bagi setiap pengunjung.
20.	Pantai Tana Dua	Pantai ini bisa digunakan untuk bersantai menikmati pemandangan alam pantai, berenang / mandi-mandi, camping dengan mendirikan tenda
21.	Pantai Hia	Pantai ini menyuguhkan keunikan tiga warna, yaitu pasir putih, hitam dan merah jambu, hamparan pasir dengan kolam air payau yang cukup besar, dikelilingi oleh Hutan Sentigi dan bakau, air laut yang bersih cocok menjadi spot snorkeling, dapat menikmati biota laut, bersantai menikmati pemandangan alam pantai, berenang / mandi-mandi, camping dengan mendirikan tenda
22.	Air Terjun Kembar	Air terjun ini memiliki 3 (tiga) level tingkatan, dan tingkat terakhir (tingkat ke-3) terdapat air terjun kembar (*twin waterfalls*), bisa untuk mandi-mandi, menikmati pemandangan alam sekitar air terjun dan camping dengan mendirikan tenda
23.	Pantai Wailamung	Pantai berpasir putih lembut kecoklatan, susur pantai sepanjang 6 km, pantai Wailamung merupakan kawasan teluk yang tenang dari gelombang, berenang/bermain air, keunikan lain di Pantai Wailamung terdapat aliran sungai kecil membelah pantai dan bermuara di lautan, pemandangan alam laut lepas dengan udara yang segar dan bersih, berburu sunset dan swafoto, dikelilingi pohon kelapa, waru dan ketapang
26.	Pantai Wairterang	Pantai ini menawarkan kedamaian bagi mereka yang mencari ketenangan dan ingin menjauh dari keramaian kota, wisatawan bisa menyelam (diving), snorkel, berenang, bersantai menikmati pemandangan sembari kuliner, dari pantai ini bisa melihat matahari terbenam (sunrise), satu daya tarik di objek ini ialah vegetasi pohon yang rindang di pesisir pantai menambah kesejukan pantai.
27.	Air Terjun Tunaohok	Pengunjung akan menikmati pemandangan yang indah membuat hati damai. Pengunjung langsung menyaksikan percikan air yang berjatuhan dari ketinggian 15 meter, pengunjung bisa berenang di kolam air jatuh, suasana alam dan pepohonan di sekitar objek, objek

No	Jenis Data	Keterangan
		ini cocok untuk mencari ketenangan hati karena jauh dari keramaian didukung suasana alam yang sejuk.
29.	Air Panas Blidit	Mandi air panas dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit, kolam air panas masih sangat alami dan bersih, suasana alam dan pepohonan di sekitar objek, objek ini cocok untuk mencari ketenangan hati karena jauh dari keramaian didukung suasana alam yang sejuk, cocok untuk fotografi
30	Wisata Alam Egon	Lokasi wisata ini dikembangkan sekitar 25 ha, lokasi pengembangan wisata alam Egon terletak di Andalan, dimana tempat itu adalah titik awal tracking menuju kawah Gunungapi Egon, *Tracking/Hiking*, suasana alam dan pepohonan di sekitar objek, objek ini cocok untuk mencari ketenangan hati didukung suasana alam yang sejuk, tempat camping/berkemah, cocok untuk fotografi
31.	Gunung api Egon	Gunung ini memiliki tinggi 1.703 m dari permukaan laut. Egon kembali aktif pada 2006 setelah vakum selama 75 Tahun. Egon tercatat meletus dahsyat pada 1925. Gunung Egon yang menyimpan bukti letusan dahsyat yang pernah terjadi, dengan adanya sebuah kawah luas menganga lebar yang menimbulkan rasa takjub bagi siapapun yang melihatnya. Mengutip dari laman *Gunung Bagging*, Minggu, 17 Desember 2023, Egon adalah gunung berapi yang sangat aktif dan merupakan salah satu pendakian paling populer di Flores.
32.	Air Terjun Meang Miak	Air terjun tersembunyi di Hutan Lindung Gunungapi Egon, keunikan memiliki 15 jembatan bambu estetik, air terjun dengan ketinggian 25 meter, suasana alam sepanjang jalur jalur air terjun dengan pemandangan hutan lindung, tempat camping/berkemah, cocok untuk fotografi (spot foto)
33.	Goa alam Patiahu	Goa batu alam
34.	Pantai Patiahu	Pantai Patiahu terletak di Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekitar 30 kilometer ke arah timur Kota Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sikka. Pantai ini salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sikka yang belum populer dan jarang dieksplor oleh wisatawan lokal. Pada hal lokasinya sangat dekat dengan jalur lintas utara Trans Flores
35.	Pantai Cassa Bonelly Resort	Pantai berpasir coklat yang ada di Kecamatan Waigete, terdapat cafe Casa Bonely dan pemandangan sunset yang indah
36.	Pantai Waiara	Pantai berpasir coklat dan banyak bebatuan
37.	Pantai Krokowolon	Menikmati indahnya pasir putih bersih dan pesona pohon Ketapang, cocok sebagai tempat rekreasi keluarga karena lokasinya dekat Kota Maumere, pantai Krokowolon biasanya sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun nasional serta mancanegara, cocok untuk bermain air/berenang karena ombaknya tidak terlalu besar, cocok untuk fotografi (spot foto), kawasan cukup luas sehingga bisa digunakan sebagai tempat camping dan outbound, spot sunset yang indah
38.	Pantai Wairhubing	Menikmati indahnya pantai pasir hitam halus sepanjang 1 km dan pesona pohon kelapa, cocok sebagai tempat rekreasi keluarga dengan pemandangan Laut Flores serta kapal-kapal yang bersandar di dermaga karena lokasinya dekat Kota Maumere, pantai ini biasanya sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal, cocok untuk bermain air/berenang karena ombaknya tidak terlalu besar, spot fotografi untuk medsos (fb, instagram, tiktok) objek favorit masyarakat Maumere karena dekat
39.	Pantai Galilea Bolawolon	Pantai berpasir putih yang ada di daerah Bolawolon Kecamatan Kewapante
40.	Pantai Uwa	Pantai berpasir hitam yang ada dipulau Palue
41.	Hutan Mangrove Reroroja	Menikmati pesona hutan mangrove seluas 60an ha dari susur jembatan kayu sepanjang 500 meter. Kawasan ini merupakan hutan mangrove terluas di NTT, berburu spot foto (hunting foto), belajar seputar mangrove (pembibitan, penanaman dan perawatan) sebagai objek edu ecotourism/edukasi menanam mangrove, hutan mangrove ini menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan di Kab. Sikka, di dalam kawasan Mangrove terdapat danau untuk memelihara ikan bandeng

No	Jenis Data	Keterangan
42.	Pantai Reruwairere	Pantai berpasir hitam hitam yang ada di Pulau Palue
43.	Gunungapi Rokatenda	Gunung api aktif yang ada di Pulau Palue
44.	Pantai Tanjung Kajuwulu	Keindahan panorama bebukitan dan lautan. Waktu yang tepat untuk menikmati keindahan dari Kajuwulu adalah saat terbit dan terbenam matahari, spot fotografi untuk medsos (fb, instagram, tiktok), suasana perbukitan yang ditumbuhi rumput-rumput menghijau, Tanjung Kajuwulu atau bisa dikenal dengan Bukit Salib Kolisia dan tangga seribu, di puncak bukit tanjung ini terdapat sebuah patung salib berukuran besar atau disebut sebagai Taman Eden, tempat di mana para kaum Nasrani melakukan kegiatan rohani. Patung salib tersebut berwarna putih dan terletak di atas bukit dengan latar belakang indah yaitu pemandangan pantai dan laut biru.
45.	Pantai Waturia	Pantai berpasar hitam yang ada di kecamatan Magepanda
46.	Pantai Ndete	Pantai berpasir kecoklatan berlatar belakang perbukitan yang indah sepanjang 2 km, pantai termasuk dalam wilayah Mangrove Reroroja Baba Akong, berburu spot foto (hunting foto) terdapat hutan mangrove yang ditanam oleh Baba Akong, spot camping dengan tenda
47.	Pulau Anano	Pulau tak berpenghuni berpasir putih halus memiliki bentang alam yang indah, cocok untuk mandi-mandi/berenang, atraksi wisata yang bisa dilakukan: diving, snorkel, bersantai di pasir, berfoto, dayung kayak, volly pantai, menikmati sunset dan sunrise, gradasi lautnya dengan perpaduan jernihnya air laut yang berwarna hijau toska dan pasir putih, onggokan terumbu karang hingga biota laut yang memanjakan mata.
48.	Danau Semparong	Lebar danau sekitar 150 m berbentuk huruf L memanjang ke barat diapit kedua bukit. Untuk menjangkau danau pengunjung harus melewati sisi barat danau, itupun saat musim panas dimana air danau akan menyusut sehingga menyisakan daratan selebar sekitar 10 m sepanjang sekitar 50 m. Jika musim hujan air danau akan penuh hingga ketinggian 3 m sehingga pengunjung tidak bisa melewati pesisirnya. Danau ini berada sebuah bukit sebelah timur Pulau Sukun, termasuk danau air laut/asin, setiap Tahun pada bulan November atau Januari selalu dibuat ritual adat di pesisir danau untuk menghormati leluhur dan penjaga danau. Ritual dilakukan dengan menyembelih kambing dan ayam serta menyuguhkan telur ayam, sirih pinang dan beras merah, putih dan hitam. Ritual ini dinamakan *Tiang Tewo* bermakna memberi makan atau *Beli Gea* sebagai penghargaan bagi leluhur dan penunggu danau agar tidak mengganggu warga dan pengunjung, danau ini sangat keramat sehingga belum ada warga yang berenang disini.
49.	Pantai Kita	Pantai berpasir putih halus, cocok untuk mandi-mandi/berenang, dikelilingi oleh pohon kelapa dan ketapang menambah kesejukan pantai, lokasi untuk bersantai dengan keluarga, dekat dengan Kota Maumere
50.	Pantai Pintar Asia	Pantai berpasir putih kecoklatan, cocok untuk mandi-mandi/berenang, dikelilingi oleh pohon kelapa, ketapang dan pohon Waru menambah kesejukan pantai, lokasi untuk bersantai dengan keluarga, dekat dengan Kota Maumere Satu-satunya pantai dengan fasilitas lengkap
51.	Pasir Timbul Taka Mbo Minang	Wisata Taka Mbo Minang, Pasir yang timbul ditengah laut
52.	Pantai Nangahure	Wisata pantai yang ada di wilayah Nangahure dengan pemandangan para nelayan yang sibuk untuk turun melaut
53.	Pantai Mini	Atraksi wisata yang bisa dilakukan: diving, snorkel, bersantai di pasir, berfoto, dayung kayak, volly pantai, menikmati sunset dan sunrise. Kawasan pantai tergolong bersih. Atraksi wisata lain yang dikembangkan di Desa Wisata Koja Doi adalah budaya, kuliner dan kerajinan. Tenunan sarung khas Buton masih ditemukan di kampung ini.

No	Jenis Data	Keterangan
54.	Bukit Purba	Bukit itu terbentuk dari timbunan batu yang berukuran cukup besar dengan tinggi sekitar 50 meter lebih, badan bukit itu dipenuhi dengan batu yang umumnya berwarna hitam, ada juga sejumlah pohon yang tumbuh di sekitarnya, di puncak bukit Batu Purba, pengunjung dapat melihat ke laut lepas sekitaran pulau Kojadoi, rumah-rumah warga Desa Kojadoi yang atapnya diberi cat berwarna-warni, wisatawan juga menikmati keindahan jembatan batu atau jembatan asmara yang membentang menghubungkan Desa Kojadoi dan Pulau Koja Besar
55.	Pulau Babi	Pulau Babi merupakan Kawasan taman laut sebagai kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam (TWA). Atraksi yang dapat dilakukan di pulau ini, yaitu diving, snorkel, memancing, dan fotografi bawah laut. Pulau ini tenggelam pada waktu gempa bumi dan tsunami di Pulau Flores bagian timur pada Tahun 1992. Pulau ini dihuni dari Masyarakat suku Bajo sekitar 30 KK. Seiring berjalannya waktu, terumbu karang dan biota laut di Teluk Maumere tepatnya di lokasi patahan gempa bumi dan tsunami tersebut mulai tumbuh kembali. Pulau Babi dan Pulau Pangabatang menjadi daya tarik wisata unggulan yang menjadi paket kunjungan wisatawan mancanegara.
56.	Pulau Dambila	Pulau ini seluas 497,73 ha merupakan Kawasan konservasi dengan fungsi Taman Wisata Alam (TWA). Atraksi yang dapat dilakukan di pulau ini, yaitu diving, snorkel, memancing, dan fotografi bawah laut
57.	Pulau Pangabatang	Pulau Pangabatang merupakan pulau kecil seluas 700 m^2 terletak di Kawasan Teluk Maumere, pulau ini membentuk penghalang alami terhadap air masuk keluar teluk, yaitu karang. Hal tersebut menyebabkan, perairan Teluk Maumere sangat tenang, pulau kecil tersebut menyimpan kekayaan alam bawah laut yang melengkapi keindahan gugusan Teluk Maumere, air lautnya berwarna biru toska yang jernih, sehingga biota laut dapat terlihat dengan jelas, aktivitas yang dapat dilakukan: snorkeling dan diving, serta dapat melihat ragam ikan-ikan di sela-sela karang. Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah melihat keindahan sunset.

Sumber:Dokumen RIPPARDA Kabupaten Sikka, 2024

b. Potensi Wisata Budaya

Potensi wisata budaya yang dapat didilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.51
Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Kubur Tua Nuabari	Menguburkan jenazah dalam batu alam adalah tradisi masyarakat Nuabari dan menjadi warisan yang terus hidup dan dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh warga. Batu alam diyakini sebagai satu-satunya media yang mampu melindungi mereka saat menuju alam baka. Kampung di lereng Gunung Lena Ndareta itu, saat ini, dihuni 708 orang. Mereka bekerja sebagai petani, dengan komoditas utama padi lahan kering, serta tanaman penyangga antara lain kakao, cengkeh, kemiri, kelapa, mangga, dan nangka. Daya tarik utama: kuburan tua, tradisi kubur batu di Nuabari memiliki hubungan kaitan dengan kehidupan manusia Flores di Liang Bua, dan Lia Nggalang di Kabupaten Manggarai, NTT, Nuabari adalah sebuah kampung di desa Lenandeta. Karena terletak di atas sebuah bukit, Nuabari laksana berada di atas sebuah wadah. Biasanya kuburan batu ini diletakan persis di halaman depan rumah tinggal keluarga, Kubur Batu Nuabari sebagaimana tradisi, anggota keluarga yang meninggal akan dimakamkan dalam sebuah batu yang dipahat dengan tangan.
2.	Gereja Tua St. Ignatius Loyola	Gereja Santo Ignatius Loyola dibangun oleh arsitek yang sama dengan bangunan Gereja Katedral di DKI Jakarta. Gereja tersebut telah menjadi salah satu bangunan cagar budaya nasional yang sarat bernilai sejarah, bangunan rumah ibadah itu masih berdiri kokoh dan tetap menjalankan fungsinya untuk melayani umat Kristiani

No.	Jenis Data	Keterangan
		mengadakan peribadatan, hingga hari ini. Pengaruh budaya Eropa dipadukan dengan budaya setempat sangat terlihat jelas pada gaya arsitektur bangunan itu. Gereja itu juga kerap didatangi turis domestik dan mancanegara sebagai obyek wisata religius. Gereja Tua Sikka dibangun oleh pastor berkebangsaan Portugis, JF Engbers D'armanddaville pada 1893, dibantu oleh Raja Sikka Joseph Mbako Ximenes da Silva. Bangunan gereja ini merupakan hasil rancangan Pastor Antonius Dijkmans, arsitek yang juga ikut mendesain Gereja Katedral Jakarta. Gereja ini memiliki halaman muka yang cukup luas dan tepat di sayap kanan bangunan utama terdapat gedung Pastoran Santo Ignatius Loyola Sikka. Di sayap kanan dan kiri gereja terdapat kompleks pemakaman raja-raja dan pastor Sikka. Gereja tua di Sikka ini kini telah menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Flores, khususnya di Kabupaten Sikka. Keberadaan gereja berusia ratusan Tahun tersebut perlu terus dilestarikan, mengingat pentingnya nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.
3.	Sanctuarium Wisung Fatima Lela	Taman doa ini sebagai salah satu destinasi wisata ziarah, setelah 70 Tahun, pada 13 Oktober 2014, Wisung Fatima Lela dinobatkan menjadi 'Sanctuarium' atau tempat kudus untuk menyampaikan ujud doa. Acara penobatan dilakukan melalui perayaan Misa Kudus yang dipimpin oleh Uskup Maumere, Mgr. Kherubim Pareira, SVD
4.	Jejak Tapak Kaki Raksasa Lae Ripa	Jejak Tapak Kaki memiliki panjang 50 cm dan lebar 24 cm merupakan satu satunya yang ada di Kabupaten Sikka. Lokasi ini memiliki view yang indah dikelilingi batu raksasa dan air sungai yang mengalir jernih
5.	Batu Salib Watu Krus	Ternyata bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kakinya di pantai Selatan Maumere tepatnya di Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka. Hal itu ditandai dengan adanya Watu Krus (Batu Salib) yang berada tepat di Bola, Pantai Selatan Maumere. Hingga kini, Watu Krus itu masih berdiri kokoh meski selalu diterjang ombak. Masyarakat Desa Bola pun menjaga dan merawat Watu Krus dengan baik. Watu Krus tersebut dipercaya merupakan jejak dan peninggalan suci dari Bangsa Portugis di tempat, Wisata ziarah/sejarah awal mula masuknya Bangsa Portugis di Bola, Kab. Sikka, Watu Krus merupakan tempat berdoa dan meminta hujan jika terjadi kemarau panjang hingga saat ini, masyarakat Bola terus merawat dan menjaga keberadaan Watu Krus (Batu Salib) itu.
6.	Goa Maria Watu Soking	Merupakan salah satu objek wisata Rohani terbaru setelah Sanctuarium Fatima Lelah dan BSB Nilo. Objek ini masuk dalam wilayah gerejawi Paroki Kenaikan Kristus Watubala, letak goa ini di tepi kawasan hutan lindung dikelilingi pohon-pohon rindang dan menyejukkan. Watusoking berada di ketinggian sekitar 150 mdpl itu, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan Teluk Maumere dengan gugusan pulau-pulaunya nan menawan, di antara batu-batu cadas yg dililit akar-akar pohon besar itu, arca Santa Bunda Maria dari Nazareth berdiri anggun, memandang teduh, mengulurkan kasih keibuan dan pertolongan abadi kawasan ini merupakan tempat yang dulunya keramat itu menjadi sakral: menjadi tempat ziarah umat Keuskupan Maumere, dengan nama tempat ziarah Maria dari Nazaret Watusikong.

No.	Jenis Data	Keterangan
7.	Jong Dobo	Jong Dobo merupakan miniatur kapal berukuran kecil yang berada di Dusun Dobo, Desa Iantena. Jong Dobo sendiri dalam Bahasa Sikka, Maumere, terdiri dari dua suku kata. “Jong” berarti kapal, sedangkan “Dobo” adalah nama perkampungan, tempat disimpannya perahu tersebut. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya “Perahu di Kampung Dobo”. Berdasarkan cerita lisan 'Kleten Latar', mitos “Jong Dobo” ini berawal dari kutukan setelah sebuah kapal asing yang melintas wilayah Flores melanggar perjanjian. Perjanjian itu adalah sebuah imbauan agar segera meninggalkan 'Kampung Dobo' sebelum fajar menyingsing. Namun, perjanjian ini tak diindahkan dan akhirnya kapal tersebut terkena kutukan menjadi miniatur kecil dalam bentuk tembaga yang memiliki panjang 60 sentimeter, tinggi 12 sentimeter dan lebar 25 sentimeter. Pada miniatur Jong Dobo, terdapat 12 pendayung, enam di sisi kanan dan enam di kiri. Didalamnya terdapat empat sosok penari perempuan, bersebelahan dengan ayam dan gong
8.	Regalia Kerajaan Kangae	Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Sikka didirikan di atas pilar-pilar bekas tiga kerajaan utama, yaitu Kerajaan Sikka, Kerajaan Nita, dan Kerajaan Kangae (Aradae). Berbeda dengan Kerajaan Sikka dan Nita yang cukup familiar, nama Kerajaan Kangae (Aradae) jarang disebut dalam bentangan sejarah Kabupaten Sikka. Bukti-bukti kerajaan Kangae hingga kini masih tersisa diantaranya cerita-cerita dan tradisi lisan yang dikenal dengan istilah *Du’aMo’an Latung Lawang*, beberapa regalia (pakaian) kerajaan, reruntuhan istana, serta peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang masih tersisa, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pemerintah kolonial Belanda, para misionaris, maupun para tetua dari bekas Kerajaan Sikka. Menurut penulis-penulis lokal Kangae dan Sikka, Kerajaan Kangae (Aradae) berasal dari *Lepo Gete Bemu Aja* (Rumah Bemu Aja). Satu versi kisah menyebutkan bahwa Bemu-Aja merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Wolon *Meken Detun.* Namun, lebih umum diceritakan bahwa Bemu Aja merupakan nama dari seorang pria pendatang yang berasal dari Ternate (Bonerate). Bemu Aja kemudian menikah dengan Du’a Lehan Ganu Ledan, atau Du’a Gurun Meran yang juga disapa sebagai Du’a Legur Rewu, keturunan dari *Moa Puan Tana Puan Tawa Tana.*
9.	Taman Replika Betlehem	Situs wisata rohani bagi umat Katolik di Kab. Sikka, setiap Tahunnya, tepat pada peringatan Bulan Maria, yakni pada Bulan Mei dan bulan, situs wisata rohani ini ramai dikunjungi oleh ribuan peziarah umat Keuskupan Maumere maupun para pengunjung umumnya yang datang dari berbagai daerah di Pulau Flores maupun dari luar Provinsi NTT berjarak 300 meter dari Pintu Gerbang, kita akan disambut oleh bangunan kedua yakni sebuah Patung besar bertekstur kasar dan berwarna keabuan setinggi kurang lebih 2 meter yang disebut sebagai Patung Yohanes Pembaptis di Padang Gurun, tak jauh dari lokasi patung pertama, kita akan menemukan patung kedua yakni patung berwajah perempuan yang saling berhadapan yang disebut dengan Patung Maria Mengunjungi Elisabeth yang bersebelahan juga dengan Gereja Yohanes Pembaptis. Gereja dengan arsitektur kubah ini belum selesai pembangunannya, kurang lebih 100 meter setelahnya, anda akan menjumpai Patung Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel yang dibangun saling bersisian dengan Rumah Retret. Tak seberapa jauh dari Rumah Retret, anda akan menemukan hamparan parkiran
10.	Museum Bikon Blewut	Museum Bikon Blewut merupakan museum terbesar dan terlengkap se Provinsi NTT. Koleksi museum ini beragam, dari zaman batu hingga modern, nama museum berasal dari kata Bikon yang berarti Lampau dan Blewut yang artinya Rusak, sehingga Bikon Blewut diartikan sebagai sisa-sisa peninggalan masa lampau. Segala kekayaan nilai budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi-koleksi museum merupakan hasil karya akademisi dan arkeolog dari para misionaris SVD pertama asal Belanda, yaitu Dr. Verhoeven SVD dkk, serta para imam SVD, museum ini menyimpan beberapa koleksi alat-alat kebudayaan dari era paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, hingga zaman perunggu. Selain koleksi alat-

No.	Jenis Data	Keterangan
		alat kebudayaan, museum ini juga menyimpan fosil fauna dan flora dan koleksi seni budaya masyarakat Flores dan NTT pada era kontemporer, koleksi di Museum Bikon Blewut dikumpulkan mulai Tahun 1965 oleh Pater Verhoeven, misionaris Ordo SVD yang memiliki minat di bidang etnologi, linguistik, dan antropologi budaya setempat. Usaha pengumpulan koleksi kemudian dilanjutkan oleh Pater Piet Petu pada Tahun 80-an dan kemudian menjadi kepala museum dari Tahun 1983 sampai 1999. Adapun koleksi museum yang dipamerkan adalah fosil gajah purba Flores yang ditemukan pada Tahun 1922 saat gempa di wilayah Watulemang, Kabupaten Sikka yang diperkirakan berusia 80 ribu sampai dengan 300 ribu Tahun lalu. Juga terdapat gading dan gigi gajah yang berasal dari Werang, Kecamatan Waiblama. Selain itu, terdapat pula rangka utuh tikus purba dan ular. Koleksi lainnya adalah peralatan makan dan perkakas rumah tangga dongson Flores dan dari zaman batu, senjata tradisional serta lukisan. Kemudian juga terdapat koleksi uang kertas dan koin dari beberapa negara dan zaman. Lalu terdapat juga fosil manusia purba Flores (Homo floresiensis) yang ditemukan pada pada Tahun 2002 di Gua Liang Bua, Pulau Flores.
11.	Patung Maria Bunda Segala Bangsa Nilo	Patung dan Taman Doa Bunda Maria Segala Bangsa ini diresmikan pada Tahun 2005 dan menjadi salah satu lokasi wisata religi di Maumere yang banyak dikunjungi peziarah dari sejumlah daerah dan mancanegara, Bukit Nilo dikenal sebagai salah satu tempat wisata religi yang bisa dikunjungi, khususnya umat Katolik di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Udara di Bukit Nilo terasa sejuk karena letaknya di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dari tempat ini, pengunjung juga bisa melihat keindahan Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka di Bukit Nilo terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa setinggi 28 meter sehingga hampir setiap akhir pekan umat Katolik dari berbagai daerah datang untuk berziarah. "Suasana di Bukit Nilo sangat tenang. Sehingga kita bisa berdoa dengan khusyuk, selepas berziarah, pengunjung juga bisa menyempatkan diri untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. Apalagi lokasinya terbilang Instagramable, salah satunya berkat aneka tanaman
12.	Patung Kritus Raja	Patung Kristus Raja, selalu ramai dikunjungi khususnya oleh umat Katolik. Kadang ada yang datang sendiri, berpasangan, dan berziarah bersama keluarga. Mereka tidak hanya datang untuk berdoa tetapi juga bertamasya. Mengisi waktu liburan bersama keluarga, meski berada di pusat kota Maumere, tempat ini sangat bersih dan terawat. Di sekeliling patung ditanami berbagai jenis tanaman hias, seperti bunga, pinang, dan beberapa jenis tanaman lain. tepat bawah kaki patung itu tertera tanda tangan Paus Yohanes Paulus II, pemimpin umat Katolik dunia yang sudah meninggal. Dari penuturan warga, patung Kristus Raja sempat rusak akibat perang dunia II. Kemudian pada Tahun 1989 diperbaiki. Patung ini diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II saat datang ke Maumere, patung Kristus Raja dipercaya sebagai pelindung saat tsunami melanda Maumere pada 1992 silam. Warga Maumere percaya bahwa peristiwa itu benar adanya, masyarakat percaya akan mukjizat patung ini, konon, saat tsunami 1992 Patung Kristus Raja berputar menghadap ke laut, seakan mengisyaratkan kepada warga dan nelayan bahwa bahaya besar akan terjadi. Menurutnya, keberadaan patung itu mengingatkan mereka akan peristiwa yang kelam yang terjadi pada 30 silam. Keberadaan patung ini sebagai pengingat tsunami dahsyat, ini menjadi isyarat agar selalu berjaga-jaga.

Sumber : Dokumen RIPPARDA Kabupaten Sikka, 2024

c. Wisata Bahari

Wisata Bahari yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3.52
Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau danbentangan pantai pasir putih

Sumber : Dokumen RIPPARDA Kabupaten Sikka, 2024

d. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.40
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

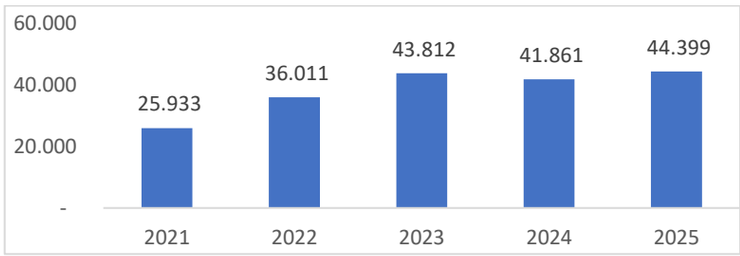

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebanyak 25.933 wisatawan, Tahun 2022 sebanyak 36.011 wisatawan dan pada Tahun 2023 sebanyak 43.812 wisatawan. Untuk Tahun 2024 sebanyak 41.861 wisatawan dan Tahun 2025 sebanyak 44.399 wisatawan.

e. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara disuatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.41
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

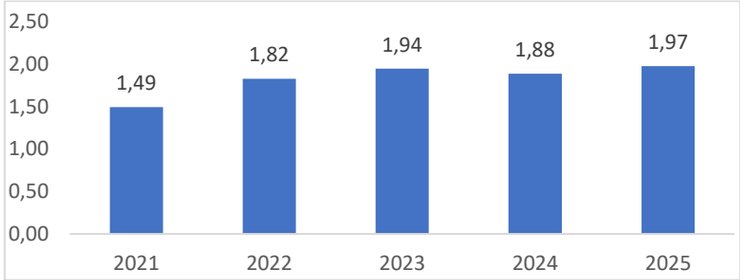

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Tahun 2021 selama 1,49 hari, pada Tahun 2022 naik menjadi 1,82 hari dan pada Tahun 2023 menjadi 1.94 hari sedangkan pada Tahun 2024 ada penurunan

jumlah menjadi 1,88 hari dan pada Tahun 2025 selama 1,97 hari.

f. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi Sektor Pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.42
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum Terhadap PDRB
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

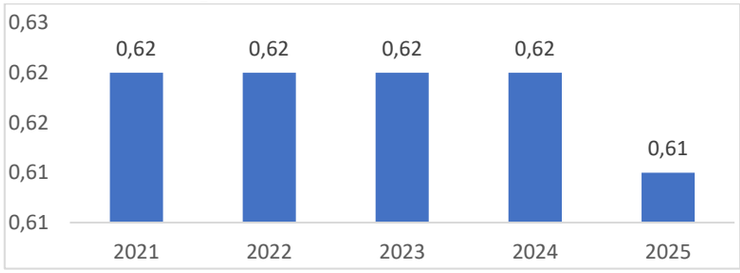

Sumber : Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Akomodasi dan makan minum Terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 0,62 dan Tahun 2024 sebesar 0,62. Untuk Tahun 2025 sebesar 0,61.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pariwisata Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.53

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2	1		
				Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	30	74,48		
				Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	6	76		
				Jumlah entitas pengelolaan destinasi	10	12		
				Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	35	23		
				Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	45	45		
				Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	139	194		
				Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4.601	6.376		
			Terwujudnya Berkebudayaan Maju	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**66,5**	**40,27**	Pelaku budaya belum memanfaatkan profesinya untuk meningkatkan perekonomian, Komunitas/ pelaku seni belum melaporkan kegiatan yang dijalankan ke dinas sebagai pembina, Kegiatan pembinaan kepada pelaku seni dan budaya masih terbatas, Masih banyak warisan budaya yang belum diakui karena kurangnya kajian	Mengoptimalkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seluruh obyek pemajuan kebudayaan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dan usulan, Kurangnya misi kebudayaan ke luar daerah untuk ketahanan budaya/diplomasi budaya, Kurangnya dukungan ruang ekpresi bagi para seniman, Karya-karya yang dimiliki belum di dokumentasikan dalam bentuk buku, Keterbatasan buku tentang budaya, Rendahnya minat baca masyarakat terkait informasi budaya.	
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,25			
			Jumlah entitas pengelolaan destinasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100%	59,26%		
				• Jumlah entitas pengelolaan destinasi • Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata • Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota • Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan • Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan Persentase pertumbuhan rata-rata lama tinggal				
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-		
				• **Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikelola**				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kab/Kota	-	-		
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	-	-		
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-		
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**100%**	**77,28%**		
				Persentase Destinasi Wisata yang Dikelola				
				Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	14 Lokasi	12 Lokasi		
				Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	1 Unit	-		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	4 Laporan	3 Laporan		
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Persentase Dokumen Hasil Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha	348 Usaha Pariwisata	348 Usaha Pariwisata		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota				
			Jumlah wisatawan mancanegara	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**100%**	**100%**		
			Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	• **Jumlah entitas pengelolaan destinasi** • **Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata** • **Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota** • **Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan** • **Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan** **Persentase pertumbuhan rata-rata lama tinggal**				
			Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**		
			Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	• **Persentase Pengembangan Jaringan dan Metode Pemasaran Pariwisata**				
			Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Jumlah industri pariwisata daerah yang	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri **Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota**	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	5 Promosi	Keterbatasan anggaran untuk pembayaran jasa Hosting dan Maintenance Aplikasi Jelajah Maumere	• Penambahan anggaran pembayaran jasa hosting Penambahan anggaran maintenace untuk update penambahan fitur pada aplikasi pariwisata dan website jelajah maumere
			Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**100%**	**76,48%**		
				• **Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi** • **Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan** • **Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat** **Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi**				•
			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	**Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100%**	**100%**		
			Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	• **Persentase pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	90 Orang	90 Orang		
			Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	600 Orang	600 Orang		
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**100%**	**10%**		
				Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				
				Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang	25 Orang		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2026.

3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian diarahkan pada pembinaan sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/ perkebunan/ peternakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Capaian pelaksanaan Urusan Pertanian yang dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dan indikator program sebagai berikut:

a. Produksi Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.43
Data Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka
Tahun 2021-2025

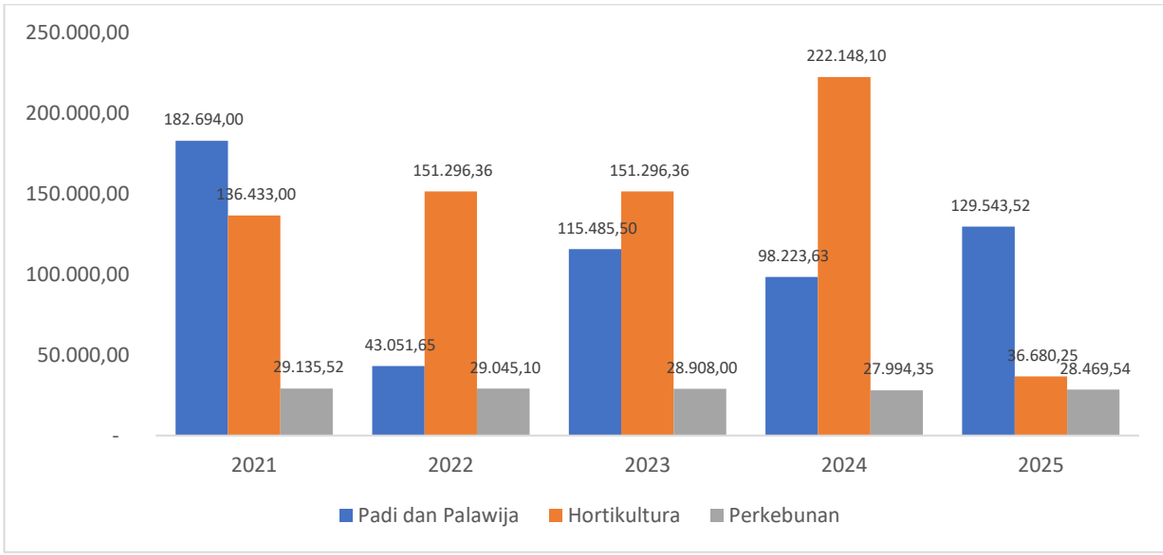

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

- Produksi Padi dan Palawija Pada Tahun 2021 sebanyak 143.313,71 ton, Tahun 2022 sebanyak 182.693,77 ton, Tahun 2023 sebanyak 115.485,50 ton sedangkan pada Tahun 2024 sebanyak 98.223,63 ton. Dan Pada Tahun 2025 sebanyak 129.543,52 ton
- Produksi Hortikultura pada Tahun 2021 sebanyak ton sebesar 163.747,43 ton, Tahun 2022 sebanyak 136.433,23 ton dan Tahun 2023 sebanyak 151.296,36 ton sedangkan Tahun 2024 sebanyak 199.810,81 ton. Dan Pada Tahun 2025 sebanyak 36.680,25 ton
- Produksi Perkebunan pada Tahun 2021 sebanyak 29.045,10 ton dan Tahun 2022 sebanyak 28.908,23 ton. Untuk Tahun 2023 sebanyak 28.883,27 Ton sedangkan Tahun 2024 sebanyak 28.994,35 ton. Dan Pada Tahun 2025 sebanyak 28.469,54 ton

b. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.44
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

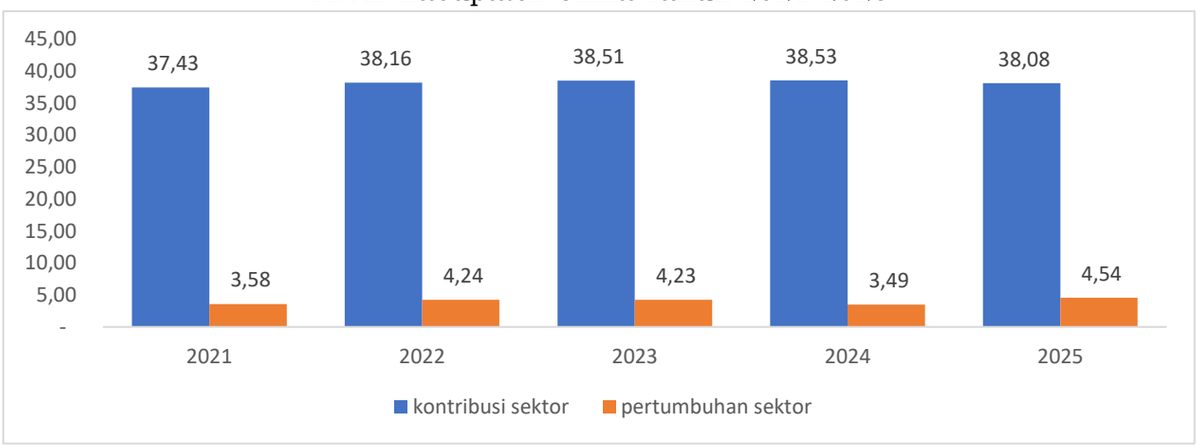

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Kontribusi Sektor Pertanian merupakan gabungan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 37,43%, Tahun 2022 sebesar 38,16% dan Tahun 2023 sebesar 38,51%. Untuk Tahun 2024 sebesar 38,53% dan Tahun 2025 sebesar 38,08% Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 3,58%, Tahun 2022 sebesar 4,24 dan Tahun 2023 sebesar 4,23%. Untuk Tahun 2024 sebesar 3,49% dan Tahun 2025 sebesar 4,54.

c. Jumlah Kelompok Tani Binaan

Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 2437 kelompok.

Grafik 3.45
Data Jumlah Kelompok Tani Yang Dikukuhkan Tahun 2025

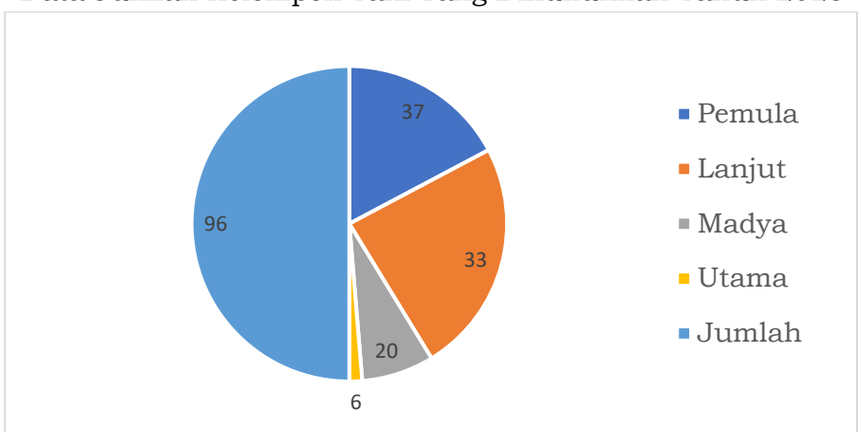

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, 2026.

Jumlah kelompok tani yang di kukuhkan di Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebanyak 37 kelompok kelas Pemula, 33 kelompok kelas Lanjut 20 kelompok kelas Madya dan 6 kelompok kelas Utama, secara keseluruhan berjumlah 96 kelompok tani binaan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

d. Jumlah Produksi Peternakan

Untuk sub sektor Peternakan Tahun 2021 berjumlah 560.726 ekor yang terdiri dari ternak besar 20.510 ekor, ternak kecil 130.920 ekor dan ternak ungags 409.296, tahun 2022 berjumlah 791347 ekor, yang terdiri dari ternak besar 24,64 ekor, ternak kecil 133,604 ekor, ternak ungags 633,379 ekor, pada Tahun 2023 berjumlah 500.985 ekor yang terdiri dari ternak besar 25.328 ekor, ternak kecil 138.975 ekor, ternak ungags 336.684 ekor, pada Tahun 2024 berjumlah 582.270ekor yang terdiri dari ternak besar 29.816 ekor, ternak kecil 163.216 ekor, ternak ungags 389.238 ekor dan pada Tahun 2025 berjumlah 952.748 ekor yang terdiri dari ternak besar 31.647 ekor, ternak kecil 208.801 ekor dan ternak unggas 835.959 ekor jenis ternak dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.46
Data Peternakan Tahun 2021-2025

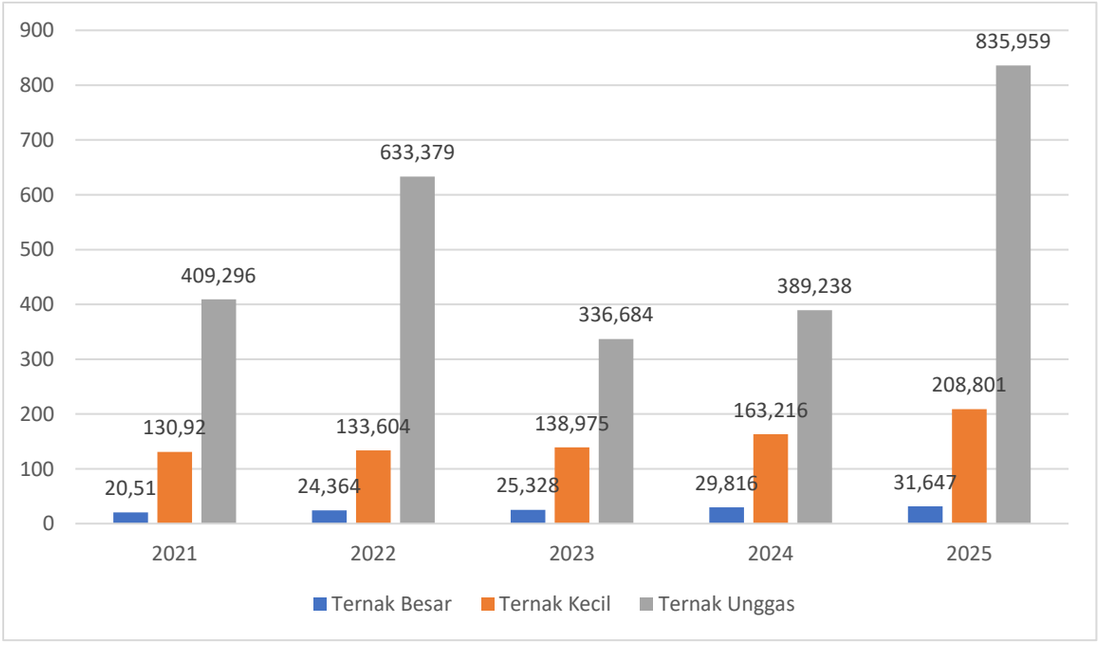

Untuk mencapai indikator kinerja Pertanian didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**DINAS PERTANIAN**	**Meningkatnya kesejahteraan petani**	**Indeks Kesejahteraan Petani**	**38,37%**	**37,87**		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pertanian dan sarana prasarana pertanian guna pendampingan yang intensif terhadap sumber daya pertanian;
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**90,25**	**86,25**		1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi pertanian; Menyusun dan melaksanakan regulasi pertanian guna meningkatkan produksi pertanian
				Produktivitas tanaman pangan	3,75	**4**		2.
				Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	**1**	**0,41**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100 %**	**100 %**		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100 %**	**100 %**		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**100 %**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.948 Orang/bulan	3948 Orang/bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100 %**	**85**		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	2 Paket	1 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	7 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**	**100 %**		
				Pengadaan Meubel	9 Paket	9 Paket		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	7 Unit	7 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**	**100 %**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**	**95,45**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	28 Unit		
				Pemeilharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16 Unit	14 Unit		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**100 %**	**100 %**		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**100 %**	**100 %**		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	7 Laporan	7 Laporan	1. Masih tingginya serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura 2. Masih terbatasnya kompetensi POPT 3. Cakupan pelayanan POPT meliputi wilayah kecamatan sehingga menyebabkan terbatasnya jangkauan pelayanan POPT kepada kelompok tani	1. POPT secara intensif melakukan pengamatan tetap dan pengamatan keliling dan memberikan rekomendasi pengendalian terhadap

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Masih kurangnya tenaga POPT	serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura 2. Melakukan refreshing materi pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit dominan oleh POPT senior bagi POPT yang masih baru 3. Menciptakan inovasi konsultasi online tentang hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura melalui WhatsApp yakni Ruang Ha_Nya bagi petani dan juga masyarakat secara luas Mengusulkan penerimaan tenaga POPT baik CPNS maupun P3K dalam penyusunan kebutuhan jabatan berdasarkan peta jabatan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	4. 1. Belum tepatnya jadwal tanam komoditi hortikultura pengendali inflasi	4. Melakukan percepatan pengadaan sarana produksi agar dapat didistribusikan ke kelompok tani penerima sesuai dengan rencana tanam
							2. Belum optimalnya pengelolaan kebun dinas karena terbatasnya tenaga kebun dinas sebagai akibat dari penempatan sebagai P3K pada jabatan/dinas lain	Melakukan optimalisasi pemanfaatan tenaga kebun dinas yang masih ada dan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi tenaga kerja
							Perkebunan :	
							1. Jumlah tanaman kelapa, jambu mete di Kebun Dinas Likonggete sudah tua/rusak menyebabkan produksinya sangat rendah;	Melakukan peremajaan kembali tanaman tua/rusak pada kebun dinas likonggete untuk tanaman kelapa dan jambu mete untuk meningkatkan PAD

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							2. Terlambatnya proses pengadaan benih tembakau	Percepatan pengadaan benih tembakau pada awal tahun
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**100 %**	**83,33%**		
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	1. Belum optimalnya pengelolaan Unit usaha Peternakan milik dinas karena terbatasnya tenaga sebagai akibat dari penempatan sebagai PPPK pada jabatan/dinas lain	Melakukan optimalisasi pemanfaatan tenaga yang masih ada dan mengupayakan pengembalian tenaga yang sudah keluar dari Dinas Pertanian
							2. Kegiatan yang bersumber dari DAU Block Grant (BG) tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan kas tidak mencukupi dari alokasi DAU BG, PAD, maupun Dana Bagi Hasil (DBH)	Meningkatkan penerimaan PAD dan mengusulkan kegiatan dimaksud melalui sumber pembiayaan lain, dalam hal ini APBN
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	1. Tidak kooperatifnya petani pemilik pohon induk tunggal alpukat Ledan Puan sehingga menghambat pelaksanaan duplikat pohon induk tunggal	Melakukan perubahan mekanisme penetapan calon pohon induk alpukat Ledan Puan melalui proses determinasi pohon induk dengan pengujian DNA dan PCR calon pohon induk di

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								laboratorium Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Depok
							2. Terancam punahnya pohon induk alpukat Ledan Puan	Melakukan kelanjutan proses determinasi calon pohon induk di tahun - tahun mendatang
							3. Calon kebun sumber benih lada dan vanili milik petani tidak memenuhi syarat teknis untuk dilakukan penilaian oleh Tim Pemulia Tanaman dari Kementerian Pertanian RI dan BRIN	Peningkatan intensitas pendampingan calon kebun benih lada dan vanili
							4. Kegiatan yang bersumber dari DAU Block Grant (BG) tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan kas tidak mencukupi dari alokasi DAU BG, PAD, maupun Dana Bagi Hasil (DBH)	Meningkatkan penerimaan PAD dan mengusulkan kegiatan dimaksud melalui sumber pembiayaan lain, dalam hal ini APBN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**100 %**	**100 %**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengembangan Prasarana Pertanian	**100 %**	**100 %**		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	Kegiatan yang bersumber dari DAU Block Grant (BG) tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan kas tidak mencukupi dari alokasi DAU BG, PAD, maupun Dana Bagi Hasil (DBH)	Meningkatkan penerimaan PAD dan mengusulkan kegiatan dimaksud melalui sumber pembiayaan lain, dalam hal ini APBN
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**100 %**	**100 %**		
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100 %**	**100 %**		
				Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	21 Wilayah	21 Wilayah	Masih terbatasnya jumlah vaksin rabies	Efektivitas penggunaan vaksin pada wilayah desa/kelurahan yang sudah terkonfirmasi positif rabies
								Memaksimalkan KIE (komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
								Menggalakkan vaksinasi rabies secara mandiri
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21 Laporan	21 Laporan	Masih terbatasnya logistik kesehatan hewan	Melakukan prioritas pelayanan pada wilayah endemik penyakit hewan dan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								membangun komunikasi dengan peternak untuk menyiapkan logistik kesehatan hewan secara mandiri
								Penambahan logistik kesehatan hewan (obat hewan, vaksin, alat dan bahan laboratorium veteriner, alat bahan RPH-R) melalui berbagai sumber pendanaan baik DAU kabupaten, provinsi maupun dana pemerintah pusat
							Masih terbatasnya jumlah petugas medik veteriner dan paramedik veteriner	Mengusulkan penerimaan petugas medik veteriner dan paramedik veteriner baik CPNS maupun P3K dalam penyusunan kebutuhan jabatan berdasarkan peta jabatan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**100 %**	**98,5 %**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**100 %**	**98,5 %**		
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.000 Unit	1.910 Unit	1. Manajemen kelembagaan Kelompok Tani tidak sesuai dengan fungsi Kelompok Tani	Peningkatan kapasitas Petani dan Kelembgaan Petani melalui kegiatan pelatihan, kursus tani, BIMTEK, dan Sekolah Lapang
							2. Belum lengkapnya persyaratan teknis dan administrasi kelompok tani	Peningkatan intensitas pendampingan kelompok tani
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	-	-
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	460 Orang	460 Orang	-	-

4. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan diarahkan pada peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dan pengembangan pasar dalam rangka kelancaran distribusi barang/produk. Capaian pelaksanaan Urusan Perdagangan yang dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran dan indikator program sebagai berikut : (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.47

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

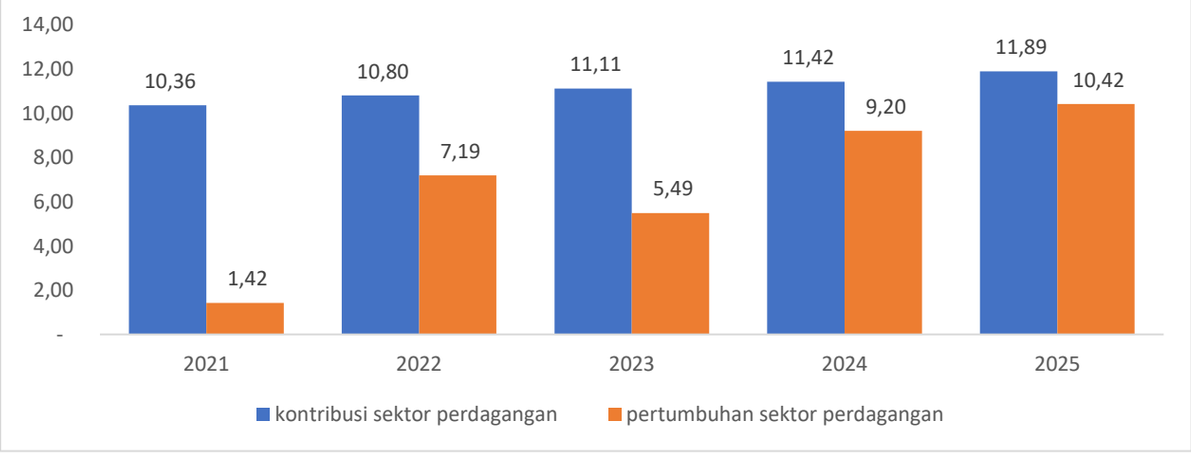

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka,2026

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar 10,36% dan Tahun 2022 sebesar 10,80, Tahun 2023 sebesar 11,11 sedangkan Tahun 2024 sebesar 11,42 dan untuk Tahun 2025 sebesar 11,89 Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor Terhadap PDRB Tahun 2021 menjadi 1,42% , Tahun 2022 sebesar 7,19%, pada Tahun 2023 menjadi 5,49 % sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 9,20% dan untuk Tahun 2025 sebesar 10,42.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Perdagangan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**Meningkatnya nilai tambah ekonomi melalui penguatan sistem perdagangan yang terintegrasi dan berbasis produk lokal**	**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**	12,47			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**100%**	**138%**		
				Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)				
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**100%**	**100%**		
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)				
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)				
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**100%**	**100%**		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)				
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)				
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTIN	**100%**	**100%**		
				Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)				
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan		
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)				
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan		
				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)				
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**100%**	**100%**		
				Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)				
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	**100%**	**100%**		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)				
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	12 Unit	12 Unit		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)				
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50 Orang	50 Orang		
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100%**	**100%**		
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen		
				Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	175		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)				
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Paket	60 Paket		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Paket	60 Paket		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit				

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sikka, 2026.

5. Urusan Perindustrian

Pelaksanaan urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitasi industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya/potensi lokal. Capaian pelaksanaan Urusan Perindustrian yaitu Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.48
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

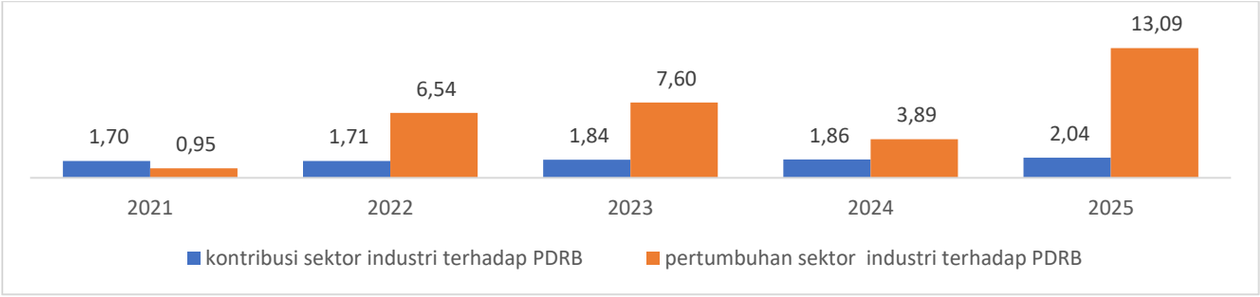

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 1,70% , Tahun 2022 sebesar 1,71% dan Tahun 2023 sebesar 1,84% sedangkan untuk Tahun 2024 sebesar 1,86% dan Tahun 2025 sebesar 2,04 Untuk Pertumbuhan Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 sebesar 0,95% , Tahun 2022 sebesar 6,54%, Tahun 2023 menjadi 7,60 % sedangkan Tahun 2024 sebesar 3,89% dan Tahun 2025 sebesar 13,09%.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.56

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
				Persentase Ijin Usaha Industri IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	15	5		
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	**Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah melaluipenguatan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar berbasis potensi lokal**					
				Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	51	130		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**100%**	**100%**		
				Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)				
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**100%**	**100%**		
				Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)				
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemberdayaan Industridan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)				

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sikka, 2026.

6. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi lokal. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sikka tidak ada pengiriman Warga Transmigrasi.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Transmigrasi Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2025

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**						
			Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan wilayah baru transmigrasi	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**100%**	**20%**	Sudah memiliki dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Namun Belum terekspose	Tingkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat untuk proses ekspose dokumen RKT.
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**20%**		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan		

3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan diarahkan pada terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui optimalisasi peran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 tercermin melalui indikator kinerja pada Sekretariat Daerah, yang menggambarkan efektivitas koordinasi perangkat daerah, kualitas perumusan kebijakan, peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, serta dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Indeks Kebijakan Publik
   Pada Tahun 2025, Indeks Kebijakan Publik ditargetkan sebesar 2,75 dan terealisasi sebesar 2,63, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemanfaatan data dan analisis kebijakan, partisipasi pemangku kepentingan, serta penguatan monitoring dan evaluasi kebijakan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas kebijakan daerah pada tahun berikutnya.
b. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah
   Pada Tahun 2025, Tingkat Kematangan Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 32,60 dan terealisasi sebesar 27,73, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola dan kapasitas organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek perencanaan, manajemen risiko, pengendalian internal, serta integrasi sistem kerja. Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta pembinaan dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan tingkat kematangan perangkat daerah.
c. Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
   Pada Tahun 2025, Nilai LPPD ditargetkan sebesar 3 dan terealisasi sebesar 3, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai dengan indikator dan parameter evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ke depan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas penyusunan LPPD melalui penguatan koordinasi, peningkatan akurasi data dan pelaporan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 86 dan terealisasi sebesar 85, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada pada kategori kinerja yang baik. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan cukup optimal, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis hasil, konsistensi pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya.
e. Indeks Reformasi Hukum
   Pada Tahun 2025, Indeks Reformasi Hukum ditargetkan sebesar 96,46 dan terealisasi sebesar 98,46, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel. Ke depan, penguatan reformasi hukum akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan regulasi, penguatan harmonisasi dan evaluasi peraturan, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Persentase Capaian Aksi HAM

Pada Tahun 2025, Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) ditargetkan sebesar 43,00% dan terealisasi sebesar 55,00%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan HAM melalui pelaksanaan Rencana Aksi HAM, termasuk pemenuhan indikator pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kebijakan yang berperspektif HAM. Upaya ini akan terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemantauan pelaksanaan aksi HAM secara berkelanjutan.

Selain Sekretariat Daerah, pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan juga didukung oleh kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2025 mencerminkan efektivitas dukungan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2025, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ditargetkan sebesar 40 dan terealisasi sebesar 74,12, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan telah berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan melalui penguatan profesionalitas aparatur, ketepatan dan kecepatan layanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

b. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Pada Tahun 2025, Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Pada Tahun 2025, Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun N ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Ranperda yang direncanakan pada Tahun 2025 dapat diselesaikan dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan produk hukum daerah

d. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada **Tahun 2025**, Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ditargetkan sebesar **100%** dan terealisasi sebesar **100%**, sehingga capaian kinerja **sesuai dengan target yang ditetapkan**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh agenda dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sesuai rencana, serta mencerminkan fungsi pengawasan yang berjalan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 84,40 dan terealisasi sebesar 82,36, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis hasil, konsistensi

pengukuran indikator kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja. Upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan nilai SAKIP pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.58

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1. SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya efektivitas koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan	100,00%	105,56%		
				BAGIAN ORGANISASI				
				Kegiatan Penataan Organisasi				
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Struktur Organisasi Yang Sesuai Ketentuan dan Kebutuhan Daerah	100,00%	105,56%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran	100,00%	100,00%		
				Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan	100,00%	108,33%		
				Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan	100,00%	100,00%		
				BAGIAN PEMERINTAHAN				
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				
				Persentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
				Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi dan Ditindaklanjuti	100,00%	108,33%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	13 Dokumen		
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
				Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0		
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	82,65%	20,25%		
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,50%	42,00%		
				Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100,00%	20,90%		
				Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu	100,00%	100,00%		
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah	100,00%	100,00%		
				Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)	100,00%	100,00%		
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%		
				BAGIAN PEREKONOMIAN				
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Penambahan Anggaran di Perubahan APBD sebesar Rp. 200.000.000,- untuk penyusunan	Mengusulkan kembali anggaran penyusunan Ranperda investasi Bank NTT dan Perumda Air Minum
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	2 buah RanPerda Investasi pada Bank NTT dan Perumda Air Minum Wair Puan tetapi dengan keterbatasan waktu sehingga anggaran tidak bisa terserap	Wair Puan pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan perencanaan waktu yang lebih memadai, sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara optimal.
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
				Persentase Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25 Dokumen	25 Dokumen		
				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
				Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	3 Dokumen	3 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen		
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	91,23%		
				Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar	100,00%	90,48%		
				Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%	100,00%		
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel	100,00%	100,00		
				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	66,67%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	2 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	75,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	11 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	7 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				Persentase Pemenuhan Dukungan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 orang	4 orang		
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
				Persentase Kegiatan Pimpinan Yang Terlayani Sesuai Ketentuan Protokol dan Standar Pelayanan	100,00%	91,67%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	10 Laporan		
				BAGIAN PEMERINTAHAN				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit		
				Kegiatan Penataan Organisasi				
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Struktur Organisasi Yang Sesuai Ketentuan dan Kebutuhan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	93,10%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit		
				BAGIAN PEREKONOMIAN				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Paket	12 Paket		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100.00%	58,33%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	1 Unit	1 Unit Kendaraan Roda 2 Kondisi Rusak Berat	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	4 Unit		
				BAGIAN HUKUM				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan	100,00%	-		
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkann Tugas dan Fungsi	5 Orang	-		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	20,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	-		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	5 Unit	-		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	-		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				BAGIAN ORGANISASI				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	129,41%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	20 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	22,22%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	2 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13 Laporan	13 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Laporan	5 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	8 Unit		
				BAGIAN UMUM				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	51,61%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Paket	15 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172 Unit	172 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Laporan	18 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit	22 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				Persentase Pemenuhan Dukungan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket		
				Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
				Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Paket	5 Paket		
				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	3 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Paket	3 Paket		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit		
				BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/Bulan	126 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	7 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	85,71%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit		
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
				Persentase Pemenuhan Dukungan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang		
			3. Meningkatnya kualitas sistem dan praktik hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemudahan akses hukum bagi masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100,00%	152,02%		
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	100,00%	152,02%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	618 Dokumen	938 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	6 Kasus		
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20 Dokumen	35 Dokumen		
		2. SEKRETARIAT DPRD	1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			1. Belum optimalnya konsistensi pelaksanaan jadwal dan rencana kerja DPRD sebagaimana telah ditetapkan.	1. Meningkatkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai jadwal dan rencana kerja DPRD.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00%	100,00%	2. Belum optimalnya konsistensi dalam perencanaan usulan Pokok Pikiran (POKIR) DPRD sehingga masih terjadi perubahan usulan.	2. Melakukan penguatan koordinasi dan perencanaan usulan Pokok Pikiran DPRD agar lebih terstruktur dan terintegrasi.
				Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	100,00%	100,00%	3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, khususnya perangkat komputer/laptop, dalam menunjang pelaksanaan tugas.	3. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
				Persentase Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD Yang Sesuai Ketentuan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				
				Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang		
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
				Persentase Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	70 Laporan	70 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	105 Dokumen		
			2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	89,34%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	63 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	4,05%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71 Unit	0 Unit		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	35 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit		
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
				Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				
				Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140 Laporan	140 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 Paket	3 Paket		

Sumber : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2026

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas, konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2025 dapat diukur melalui indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), yang mencerminkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada Tahun 2025, nilai SAKIP ditargetkan pada kategori B dan terealisasi pada kategori B, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka telah berjalan dengan baik, ditandai dengan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang efektif dan akuntabel. Ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, peningkatan monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan pelaporan kinerja guna mendorong peningkatan nilai SAKIP ke kategori yang lebih tinggi.

b. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja ditargetkan sebesar 18,5 dan terealisasi sebesar 16,61, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek ketepatan penetapan indikator kinerja, kualitas data dukung, serta konsistensi pelaporan capaian kinerja. Ke depan, akan dilakukan penyempurnaan indikator yang lebih terukur dan relevan, peningkatan validitas data, serta penguatan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.

c. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja ditargetkan sebesar 9,5 dan terealisasi sebesar 9,42, sehingga capaian kinerja hampir mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan dan penyampaian laporan kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek ketepatan waktu, konsistensi penyajian data, serta kedalaman analisis capaian kinerja. Upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja secara lebih komprehensif dan informatif.

d. Indeks Kualitas Perencanaan

Pada Tahun 2025, Indeks Kualitas Perencanaan ditargetkan sebesar 92,5 dan terealisasi sebesar 93,47, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah telah berjalan sangat baik, ditandai dengan konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah akan terus menjaga kualitas perencanaan melalui penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta penyelarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah.

e. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pada Tahun 2025, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) ditargetkan sebesar 78,5 dan terealisasi sebesar 63,51, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek perencanaan dan penganggaran yang efektif, kualitas pelaksanaan anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan penguatan tata kelola keuangan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran guna meningkatkan nilai IPKD pada tahun berikutnya.

f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 93,75 dan terealisasi sebesar 93,75, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah telah berjalan sangat baik, dengan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui pembinaan dan evaluasi berkelanjutan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.59

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
	PERENCANAAN			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100,00 %	100,00 %		
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
				Persentase Dokumen Perencanaan Dan Pendanaan Yang Disusun	100,00 %	100,00 %		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara		
				Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	582 Usulan	582 Usulan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
				Persentase Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku		
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
				Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Yang Dimonitor Dan Dievaluasi Secara Berkala	100,00%	100,00%	Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah masih rendah	Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Sikka di tahun 2025 dengan melibatkan BPKAD, Bapenda, Inpektorat,
				Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama seluruh pimpinan perangkat daerah secara rutin setiap triwulan dengan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan maupun kinerja anggaran
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Secara Optimal	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	100,00%		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%		
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
				Persentase Program Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Terkoordinasi Dan Selaras Dengan Dokumen Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	9 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16 Laporan	16 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	9 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 Dokumen	28 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Laporan	18 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32 Laporan	32 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Laporan	18 Laporan		
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
				Persentase Program Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Yang Terkoordinasi Dan Selaras Dengan Dokumen Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	24 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21 Laporan	21 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	85 Laporan	85 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	21 Laporan	21 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11 Laporan	11 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan		
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
				Persentase Program Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Terkoordinasi Dan Selaras Dengan Dokumen Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	18 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15 Laporan	15 Laporan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25 Laporan	25 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	15 Laporan	15 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66 Dokumen	66 Dokumen		
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63 Laporan	63 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	105 Laporan	105 Laporan		
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	63 Laporan	63 Laporan		
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas, riset dan inovasi daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100	1100		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100, 00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 Paket	8 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	15 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	110,5%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Unit	21 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lapran	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87 Unit	87 Unit		

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, 2026

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Capaian urusan keuangan dapat dilihat dari persentase penyerapan anggaran sebesar 89,99%.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.60
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
				Manajemen Aset	Ya	Ya		
				Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	100	100		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	0,57	0,64		
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	0,53	0,53		
	KEUANGAN	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka**	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	100%	100%	1. Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang masih rendah	Telah dilakukan Desk Penyusunan Laporan Keuangan Daerah bersamaan dengan Desk LKPJ, LAKIP, LPPD pada tanggal 26 Januari sampai dengan 27 Januari 2026 sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor Bapperida.100.1.7/39/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 perihal Desk Data LKPJ, LPPD, LAKIP, LKPD dan E-Wali Data
					11594 Dok	11594 Dok	2. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset daerah masih rendah	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	222 Dok	222 Dok		
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok	2 Dok		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	50 Dok	50 Dok		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50 Dok	50 Dok		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	50 Dok	50 Dok		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50 Dok	50 Dok		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok		
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dok	2 Dok		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Keg	12 Keg		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	11350 Dok	11350 Dok		
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	950 Dokumen	950 Dokumen		
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9500 Dokumen	9500 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	900 Dok	900 Dok		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	22 Dok	22 Dok		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Dok	18 Dok		
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dok	3 Dok		
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok		
			Meningkatnya kinerja Pengelolaan BMD Perangkat Daerah	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	% Realisasi	100 Realisasi		
					282 Dok	282 Dok		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	282 Dok	282 Dok		
				Penyusunan Standar Harga	2 Dok	2 Dok		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Dok	5 Dok		
				Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Dok	70 Dok		
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202 Dok	202 Dok		
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	99%		
					395	390		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Dok	21 Dok		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln	12 Bln		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok	12 Dok		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 100	0 100		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	0 Orang		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bln	12 bln		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Kali	86 Kali		
				Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	133,33%		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	8 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Surat	108 Surat		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Item	12 Item		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88,89%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 Unit	14 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	17 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit		
		Badan Pendapatan Daerah	**Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**100%**		
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	**100%**	**100%**		
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	11 dokumen	11 dokumen		
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 laporan	9 laporan		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16 unit	16 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan		
				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan		
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300 OP	300 OP		
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	12 laporan		
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan		
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang	59 orang		
				Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 orang	8 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	8 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59 paket	59 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33 paket	33 paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Pengadaan Mebel	25 paket	25 paket		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 unit	18 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN PROG/ KEG/ SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 unit	39 unit		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		

Sumber : BPKAD dan BAPENDA Kabupaten Sikka, 2026.

3. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian diarahakan pada peningkatan kualitas SDM aparatur. Capaian urusan kepegawaian dapat dilihat dari jumlah mutasi sebanyak 33 SK dan promosi ASN sebanyak 20 SK. Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.61

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	**Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**5,48**	**4,37**		
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**23,11**	**37,8**		
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**28,33**	**43**		
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**100%**	**82,00%**		
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan		
				Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**146,11%**	penetapan target menyesuaikan dengan realisasi tahun lalu dan sistem kepegawaian yang ada	
				Sub Kegiatan Pemulangan yang Pensiun	193 Orang	282 Orang		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**100**	**96,00%**		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3 bulan	3 bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	2 paket	2 paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	2 paket	2 paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	5 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**83,33%**		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	5 unit		
				Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintah	**100%**	**64,29%**		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas OPerasional atau Lapangan	6 Unit	5 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	4 Unit	2 Unit		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	4 Unit	2 Unit		
				Program Kepegawaian Daerah	**100%**	**103,26%**		
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	2 Dok	2 Dok		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok		
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	1500 dokumen		
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**100%**	**93,88%**		
				Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan	46 Orang	43 Orang		
				Sub Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dok	3 Dok		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**100%**	**227,91%**		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40 Orang	95 Orang		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	3 Laporan	3 Laporan		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**100%**	**100%**		
				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**100%**	**100%**		
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah,JPTP, Kepimpinan,dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok		

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka, 2026

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan diarahkan pada peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti. Capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan Tahun 2025 dapat diukur melalui indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), yang mencerminkan kualitas dan pemanfaatan hasil kajian/riset, penguatan ekosistem inovasi daerah, serta kontribusi riset dan inovasi dalam mendukung perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.

a. Indeks Inovasi Daerah

Pada Tahun 2025, Indeks Inovasi Daerah ditargetkan sebesar 36,73 dan terealisasi sebesar 49,35, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja inovasi daerah, baik dari aspek kebijakan inovasi, dukungan kelembagaan, maupun jumlah dan kualitas inovasi yang dilaporkan. Hasil tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

b. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah

Pada Tahun 2025, Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penyelesaian permasalahan strategis daerah telah didukung oleh kajian dan analisis berbasis data (evidence-based), sehingga proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan menjadi lebih terukur, objektif, dan akuntabel.

c. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

Pada Tahun 2025, Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja

sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh produk inovasi yang dihasilkan telah dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kajian dan riset daerah, mendorong pengembangan inovasi, serta memperkuat pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Realisasi program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan-Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	10	15		
				Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	3	3		
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100,00%	100,00%		
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
				Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
				Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kependudukan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah				
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
				Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
				Persentase Inovasi Daerah Yang Diimplementasikan Dan Memberikan Manfaat	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan		

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Capaian kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2025 tercermin melalui indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yang menggambarkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mendukung akuntabilitas dan integritas kinerja pemerintahan.

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

   Pada Tahun 2025, nilai SAKIP ditargetkan pada kategori B dan terealisasi pada kategori B, sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, ditandai dengan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang cukup efektif dan akuntabel. Ke depan, upaya peningkatan kualitas SAKIP akan terus dilakukan guna mendorong perbaikan berkelanjutan menuju kategori yang lebih tinggi.

b. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ditargetkan sebesar 14,00 dan terealisasi sebesar 13,97, sehingga capaian kinerja hampir mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek kualitas reviu, ketepatan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.
c. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B
   Pada Tahun 2025, persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP kategori B ditargetkan sebesar 72,98% dan terealisasi sebesar 78,43%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja pada perangkat daerah, serta semakin banyak instansi yang mampu memenuhi standar akuntabilitas kinerja pada kategori baik. Upaya pembinaan, evaluasi, dan pendampingan akan terus dilakukan guna mendorong peningkatan kualitas SAKIP menuju kategori yang lebih tinggi.
d. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
   Pada Tahun 2025, Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada level 3 (Terintegrasi/Integrated), namun terealisasi pada level 2 (Infrastructure). Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah memiliki infrastruktur dan proses dasar yang memadai, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis risiko secara menyeluruh. Untuk mencapai level 3, diperlukan penguatan pada aspek manajemen risiko, peningkatan kualitas audit berbasis risiko, penguatan kompetensi auditor, serta integrasi pengawasan dengan sistem pengendalian intern pemerintah secara lebih komprehensif.
e. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
   Pada Tahun 2025, Maturitas SPIP ditargetkan berada pada level 3 (Terdefinisi), namun terealisasi pada level 2 (Berkembang). Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern telah berjalan dan terdokumentasi, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten dalam seluruh proses manajemen pemerintahan. Untuk mencapai level 3, diperlukan penguatan implementasi manajemen risiko, peningkatan efektivitas pengendalian pada setiap perangkat daerah, penguatan peran pimpinan dalam pengendalian intern, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan.
f. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
   Pada Tahun 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 35,92%, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK masih perlu dipercepat. Pemerintah daerah akan melakukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan komitmen pimpinan dalam penyelesaian rekomendasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan persentase tindak lanjut pada tahun berikutnya.
g. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 81,25 dan terealisasi sebesar 83,15, sehingga capaian

kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, khususnya dalam penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, peningkatan kualitas audit, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Realisasi program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.63

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pengawasan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	1. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1. Masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, pengawasan APIP, dan pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas oleh perangkat daerah, mencerminkan rendahnya komitmen pimpinan serta lemahnya mekanisme pengendalian dan pemantauan tindak lanjut. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia APIP serta belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan mandatory spending berdampak pada belum optimalnya kualitas dan cakupan pengawasan. 3. Penilaian risiko masih bersifat administratif,	1. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada perangkat daerah. 2. Melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia APIP secara bertahap, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta mendorong pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mendorong implementasi manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam proses bisnis pemerintahan daerah, memperkuat lingkungan
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
				Persentase Kegiatan Pengawasan Internal Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	83 Laporan	83 Laporan		
				Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	4 Laporan		
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	13 Laporan	13 Laporan		
				Sub Kegiatan Pengawasan Desa	24 Laporan	24 Laporan		
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	26 Dokumen	160 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			register risiko belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses bisnis, serta kegiatan pengendalian belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pengendalian intern. 4. Sasaran dan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan belum disusun secara lintas perangkat daerah, sehingga belum optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. 5. Hasil evaluasi kinerja dan pengawasan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perbaikan proses bisnis, penyesuaian strategi, serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja.	pengendalian, serta meningkatkan kualitas kegiatan pengendalian untuk mencegah terjadinya temuan berulang. 4. Menyempurnakan perencanaan dan penjenjangan kinerja dengan indikator dan target yang berorientasi hasil (outcome), memenuhi kriteria SMART, serta disusun secara lintas perangkat daerah. 5. Memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan proses bisnis, peningkatan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
				Persentase Penugasan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI				
				Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
				Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Yang Disusun Dan Difasilitasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi		
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				
				Persentase Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	212 Dokumen	212 Dokumen		
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			pelayanan Inspektorat Daerah					
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44/14 Orang/Bulan	44/14 Orang/Bulan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	314 Orang	314 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	7 Unit	7 Unit		
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	12 Unit	12 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2026

3.1.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Pelaksanaan unsur kewilayahan diarahkan pada peningkatan administrasi pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.64

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	UNSUR KEWILAYAHAN							
		KECAMATAN ALOK	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	62,36	Dari hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan AlokTahun 2025 masih belum Lengkap menyelesaiakan dokumen SOP/Laporan Monev setiap Seksi dan belum melakukan Publikasi Dokumen SAKIP Tahun 2024 Kuantitas dan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan masih kurang Ketersediaan sarana dan prasaran penunjang seperti Personal Komputer, laptop dan printer	Upaya mengatasi permasalahan ini, Kecamatan Alok melengkapi dokumen SAKIP yang direkomendasikan dan telah berkoordinasi dengan Kominfo Kabupaten Sikka guna Publikasi Dokumen yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka pada Website resmi Pemerintah Daerah www.sikkakab.go.id/ transparansi. Memaksimalkan SDM ASN yang ada di Kecamatan Alok, guna optimalisasi Pelayanan Kepada masyarakat Perlu dilakukan penambahan Sarana Prasarana pendukung penunjang computer, laptop dan printer
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	616 Orang/bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen		
				Kec.Alok	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kel.Madawat	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kel. Kabor	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kel. Nangalimang	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kel Kota Uneng	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket		
				Kec.Alok	1 Paket	1 Paket		
				Kel.Madawat	7 Paket	7 Paket		
				Kel. Kabor				
				Kel. Nangalimang	1 Paket	1 Paket		
				Kel Kota Uneng	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	8 Paket		
				Kec.Alok	4 Paket	4 Paket		
				Kel.Madawat	1 Paket	1 Paket		
				Kel. Kabor	1 Paket	1 Paket		
				Kel. Nangalimang	1 Paket	1 Paket		
				Kel Kota Uneng	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket		
				Kec.Alok	1 Paket	1 Paket		
				Kel.Madawat	1 Paket	1 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kel. Kabor	1 Paket	1 Paket		
				Kel. Nangalimang	1 Paket	1 Paket		
				Kel Kota Uneng	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket		
				Kec.Alok	1 Paket	1 Paket		
				Kel.Madawat	1 Paket	1 Paket		
				Kel. Kabor	1 Paket	1 Paket		
				Kel. Nangalimang	1 Paket	1 Paket		
				Kel Kota Uneng	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit		
				Kec.Alok				
				Kel.Madawat	1 Unit	1 Unit		
				Kel. Kabor	2 Unit	2 Unit		
				Kel. Nangalimang	2 Unit	2 Unit		
				Kel Kota Uneng	0	0		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		
				Kec.Alok	1 Unit	1 Unit		
				Kel.Kabor	0	0		
				Pengadaan Mebel	79 Unit	79 Unit		
					79 Unit	79 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	60 Laporan		
				Kec.Alok	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel.Madawat	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel. Kabor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel. Nangalimang	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel Kota Uneng	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42 Laporan	42 Laporan		
				Kec.Alok	6 Laporan	6 Laporan		
				Kel.Madawat	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel. Kabor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel. Nangalimang	6 Laporan	6 Laporan		
				Kel Kota Uneng	6 Laporan	6 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit		
				Kec.Alok	4 Unit	4 Unit		
				Kel.Madawat	3 Unit	3 Unit		
				Kel. Kabor	1 Unit	1 Unit		
				Kel. Nangalimang	3 Unit	3 Unit		
				Kel Kota Uneng	1 Unit	1 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	19 Unit		
				Kec.Alok	4 Unit	4 Unit		
				Kel.Madawat	5 Unit	5 Unit		
				Kel. Kabor	5 Unit	5 Unit		
				Kel. Nangalimang	0	0		
				Kel Kota Uneng	5 Unit	5 Unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Alok	76,61	83		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36 Laporan	36 Laporan		
				Kec.Alok	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel.Madawat	12 Laporan	12 Laporan		
				Kel.Kabor	12 Laporan	12 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan		
				Kel.Madawat	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kel.Kabor				
				Kel.Nangalimang	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		
				Kel.Kota Uneng	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 unit	13 unit		
				Kel.Madawat	2 unit	2 unit		
				Kel.Kabor	6 unit	6 unit		
				Kel.Nangalimang	4 unit	4 unit		
				Kel.Kota uneng	1 unit	1 unit		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 Pokmas/ Ormas	46 Pokmas/ Ormas		
				Kel.Madawat	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas		
				Kel.Kabor	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas		
				Kel.Nangalimang	10 Pokmas/ Ormas	10 Pokmas/ Ormas		
				Kel.Kota uneng	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas		
				Evaluasi Kelurahan	10 Laporan	10 Laporan		
				Kel.Madawat	0			
				Kel.Kabor	10 Laporan	10 Laporan		
				Kel.Nangalimang	0			
				Kel.Kota uneng	0			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Kec. Alok	2 Dokumen	2 Dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
		KECAMATAN ALOK BARAT		Administrasi Pemerintahan		-		
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	12 dok		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dok	12 dok		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	532 orang/ bulan	532 orang/ bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	120 Unit	120 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	29 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72 Laporan	72 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22 Lembaga Masyarakat	22 Lembaga Masyarakat		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Masyarakat	40 Lembaga Masyarakat		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	47 Unit	47 Unit		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48 Pokmas /Ormas	48 Pokmas /Ormas		
				Evaluasi Kelurahan	48 Laporan	48 Laporan		
		KECAMATAN ALOK TIMUR	Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan.	2,6	0,88	Tahun pertama penilaian oleh bagian Organisasi sehingga banyak kompoenen penialaian yang belum bisa diisi dengan benar (Indeks Pelayanan Publik)	dipelajari komponen yang tersedia agar diisi dalam suevey pelayanan yang akan datang juga terdapat bnyak komponen sarana dan layanan umum yang belum tersedia di kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga masyarakat	8 Lembaga masyarakat		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga masyarakat	8 Lembaga masyarakat		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	27 unit	27 unit		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas/ Ormas	11 Pokmas/ Ormas		
				Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Laporan	1 Laporan		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Laporan	2 Laporan		
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00	82,85		
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	614 Orang/bln	614 Orang/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Laporan	13 Laporan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	25 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	14 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 unit	34 unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit		
		KECAMATAN BOLA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ 14 Bulan	15 Orang/ 14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket		
				Penyediaan Bahan Material	5 paket	5 paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%		
				Belanja Modal Mebel	1 Unit	1 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasioal atau Lapangan	5 Unit	5 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi bangunan gedung kantor atau bangunan lainya	1 Unit	1 Unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 LK	5 LK		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	12 laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	8 dokumen		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	8 dokumen		
		KECAMATAN DORENG	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	60			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	75%		
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ 14 Bulan	14 Orang/ 14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	3		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1650 paket	1650 paket		
				Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah				
				Pengadaan mebel	100 unit	100 unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	50%	Pengadaan Printer dan Laptop tidak dilaksanakan karena pengajuan terlambat	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	-	Tersedia untuk 3 unit laptop dan 1 unit Komputer tidak dilaksanakan karena terlambat pengajuan	
				Rehabilitasi gedung kantor .bangunan lainnya	1 unit	-	Tersedia untuk rehab atap kantor camat, tidak dilaksanakan karena pengajuan terlambat	
			Meningkatkan Pelayanan Publik di kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	2,6			
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	76,61			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	9 lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan Di Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	12 dokumen	12 dokumen		
				SAKIP	70,39	64,85		
		KECAMATAN HEWOKLOANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	75%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,13%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	1 unit	3 unit lainnya rusak berat (printer 2 unit, 2 unit laptop, anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi)	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 org	14 org		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%		
				Pengadaan Mebel	3 unit	-	Tidak dapat di belanjakan karena tidak dapat melengkapi berkas untuk pengadaan	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	-	Tidak dapat di belanjakan karena tidak dapat melengkapi berkas untuk pengadaan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 dokumen	14 dokumen		
		KECAMATAN KANGAE	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	95,93%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan		
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ 14 Bulan	18 Orang/ 14 Bulan		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	8 paket	8 paket		
				Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 paket	9 paket		
				Penyediaan bahan Logistik kantor	20 paket	20 paket		
				Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket		
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	4 unit	4 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	2 Unit	2 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi bangunan gedung kantor atau bangunan lainya	1 Unit	1 Unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	9 LK	9 LK		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	9 laporan	9 laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecmatan	9 dokumen	9 dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemerintah desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 dokumen	9 dokumen		
				Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 dokumen	9 dokumen		
		KECAMATAN KEWAPANTE		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen		
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	19 Orang		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan bahan Logistik kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Meubeler	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	4 unit	4 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pebinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen	5 Dokumen		
		KECAMATAN KOTING	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	96,67%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	224 org/bln	224 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	83,33%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	8 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit		
				Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	83,33%	Minimya Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kecamatan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Kecamatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	83,33%		
				Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	83,33%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	Minimnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	0	Belum Optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor di Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	0		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen		
		KECAMATAN LELA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	228 orang/bulan		
				pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	7 Paket	7 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik kantor	6 Paket	6 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainya	1 Unit	1 Unit		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat	12 Laporan	12 Laporan		
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan pihak swasta	100%	100%		
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	7 Laporan	7 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	22,22		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	22,22		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Lembaga	9 Lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Peyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemerintah desa	-	-		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Laporan	12 Laporan		
				Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	-		
		KECAMATAN MAGEPANDA	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	62	62		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	96,33%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168 org/bln	168 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50%		
				Pengadaan Mebel	1 unit	-	Terdapat target pengadaan 1 unit Kursi Plastik tetapi rencana seharusnya pengadaan sebanyak 12 buah atau 1 lusin. Tidak dapat dilaksanakan karena kendala proses pengadaan barang dan jasa	
				Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	2 unit	2 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	4 unit	Terdapat target pemeliharaan untuk 1 unit Kendaraan rua empat, 4 unit kendaraan roda dua. Terdapat 1 unit kendaraan roda dua yang rusak berat.	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	4 unit		
			Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	76,61	0		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 laporan	12 laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8 lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	12 laporan	12 laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 laporan	9 laporan		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 laporan	9 laporan		
		KECAMATAN MAPITARA	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55,4			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154 org/bln	154 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	100%	80%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	4 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	6 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit		
				Rehabilitas gedung kantor bangunan lainnya	1 unit	1 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	65			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga	4 lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen		
		KECAMATAN NELLE	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabikitas Anggaran serta Kinerja Perakat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,5			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaalisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154 org/bln	154 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	50 unit	50 unit		
				Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona1 atau Lapangan	3 unit	3 unit		
				Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan/Rehabolitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	76,61			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				Peningkatan Efektifits di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				Pelaksanaan Urussan Pemrintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Urusan Pemrintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	10 lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitaasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	5 dokumen	5 dokumen		
		KECAMATAN NITA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Peragkat Daerah (Angka)	61,7			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen		
				Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/bln	14 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 laporan	15 laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 dokumen	15 dokumen		
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi dengan Peragkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	2 dokumen		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	3 laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	3 Lembaga		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	5%		
				Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 dokumen	15 dokumen		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 dokumen	15 dokumen		
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 dokumen	-	Tidak dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan Tahun 2026
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 dokumen	-	Tidak terealisasi karena kendala Administrasi dan proses yang lambat di pengelola keuangan	Akan dilakukan proses persecaptan administrasi dan koordinasi dengan pengelola keuangan untuk realisasi anggaran di periode berikutnya
				Fasiliatsi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 dokumen	-	Tidak terealisasi karena kendala Administrasi dan proses yang lambat di pengelola keuangan	Akan dilakukan proses persecaptan administrasi dan koordinasi dengan pengelola keuangan untuk realisasi anggaran di periode berikutnya
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 dokumen	-	Tidak terealisasi karena kendala Administrasi dan proses yang lambat di pengelola keuangan	Akan dilakukan proses persecaptan administrasi dan koordinasi dengan pengelola keuangan untuk realisasi anggaran di periode berikutnya
		KECAMATAN PAGA	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	83,33%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	13 Orang		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan		
				Pengadaan barang Milik Daerah Program penunjang urusana Pemerintah Daerah	100%	-		
				Pengadaan Mebel	1 paket	-	Tidak terlaksananya Belanja Pengadaan Mebel	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit		
			Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 bulan	12 bulan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	1 kegiatan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 kegiatan	5 kegiatan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100%	50%		
				Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	50%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen		
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Kegiatan	-	Tidak adanya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Definitif di Tahun 2025	
		KECAMATAN PALUE	Meningkatnya Kapasitas dan	Nilai SAKIP Kecamatan Palue	42,40	40,61		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	85,33%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	238 org/bln	238 org/bln		
				Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	80%		
				Penyediaan Konponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	-	Keterlambatan SPj sehingga penyerapan anggaran mengalami keterlambatan. Mengalami kendala pada proses pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	5 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan	22 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	60%		
				Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	3 unit	karena tidak bisa menemukan penyedia barang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	-	karena mengalami keterlambatan dalan pengelolaan Keuangan (Spj)	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	-	Kurang adanya penyedia yang bersedia mengadakan bahan bangunan dan konstruksi ke Kec.Palue disebabkan jarak yang jauh dan harus menempuh perjalanan laut Belum ada kecocokan harga antara harga di DPA dan harga yang diminta Penyedia Penyedia yang bersedia belum terdaftar pada e-catalog dan belum memiliki syarat-syarat sebagai penyedia barang instansi pemerintah	
			Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	76,61	77,11		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	75%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	87,5%		
				Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	3 dokumen	mengalami keterlambatan dalam pengelolaan Keuangan (Spj)	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	87,5%	mengalami keterlambatan dalam pengelolaan Keuangan (Spj)	
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 dokumen	3 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan		
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	50%		
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	4 dokumen	2 dokumen	mengalami keterlambatan dalan pengelolaan Keuangan (Spj)	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	66,67%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	66,67%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 laporan	4 laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	5 dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	8 dokumen		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen	8 dokumen		
		KECAMATAN TALIBURA	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan	66,50	65,12		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 dokumen	12 dokumen		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan ole Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%		
				Peningkatan Efektifits Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	20 Lembaga		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	20 dokumen	20 dokumen		
			Meningkatnya Kapisitas dan akuntabikitas Anggaran serta Kinerja Perakat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55	54,25		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	238 org/bln	238 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 dokumen	20 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	5 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	73 unit	73 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	6 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit		
		KECAMATAN TANA WAWO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	13 Orang		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lainnya	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	5 Laporan	5 Laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembagunan di Desa	12 Laporan	12 Laporan		
		KECAMATAN WAIBLAMA	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,80	79,66		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ 14 Bulan	15 Orang/ 14 Bulan		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	6 Orang/ 12 Bulan	6 Orang/ 12 Bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 Laporan	51 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket		
				Pengadaan Peralatan dam Mesin Lainnya	2 Paket	2 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 laporan/ 2 orang	6 Laporan/ 2 Orang		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto dan Bangunan Gedung Lainnya	1 Unit	1 Unit		
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,61	76,61		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 Laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen (1Kegiatan)	1 Dokumen (1Kegiatan)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen (1Kegiatan)	1 Dokumen (1Kegiatan)		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen (7 Desa)	7 Dokumen (7 Desa)		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	7 Dokumen (7 Desa)	7 Dokumen (7 Desa)		
		KECAMATAN WAIGETE	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Waigete	62,35			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168 org/bln	168 org/bln		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	6 paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3 unit		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit		
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	76,61	77,28		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	12 laporan	12 laporan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	1 laporan		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	1 laporan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	100%	100%		
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 dokumen	11 dokumen		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaangunaan Asset Desa	11 dokumen	11 dokumen		
		KECAMATAN MEGO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%		
				Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	10 Dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ 14 Bulan	18 Orang/ 14 Bulan		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Orang/ 12 Bulan	4 Orang/ 12 Bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
				Belanja Bahan Kantor \kertas dan Cover	3 Paket	3 Paket		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7090 lembar	7090 lembar		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang/ 1 Paket	2 Oarang/ 1 Paket		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	8 unit	8 Unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / PROG/ KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan degan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait	12 laporan	12 Laporan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Urusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 desa	12 desa		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%		
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinana di Kecamatan	12 Desa	12 Desa		

Sumber : 21 Kecamatan, 2026

3.1.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang diarahkan pada peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, penguatan stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan politik yang demokratis dan kondusif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, fasilitasi partisipasi politik masyarakat, penguatan deteksi dini dan kewaspadaan nasional, serta peningkatan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah.

a. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Pada Tahun 2025, Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebesar 68 dan terealisasi sebesar 68,60, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sikka relatif kondusif serta penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat berjalan dengan baik.

b. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
   Pada Tahun 2025, Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan ditargetkan sebesar 88,24% dan terealisasi sebesar 92,31%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan preventif, mediasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sikka.
c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka ditargetkan sebesar 73,50 dan terealisasi sebesar 84,80, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Ke depan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kualitas manajemen kinerja guna mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mencapai indikator kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik, pelaksanaannya didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketenteraman daerah. Realisasi program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			Tantangan digitalisasi juga memengaruhi, di mana nilai Pancasila rentan terhadap disinformasi di era AI dan Partisipasi masyarakat masih rendah.	Fokus pada kegiatan masif seperti penataran dan sosialisasi untuk PNS, pelajar, dan tokoh agama.
				Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84,00%	90%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Tantangan digitalisasi juga memengaruhi, di mana disinformasi merusak pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda dan Generasi Z rentan pergaulan bebas dan	Implementasi strategi seperti edukasi digital untuk hindari dampak negatif teknologi, serta dialog kebangsaan untuk Gen Z

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							globalisasi, yang melemahkan nilai Pancasila.	
				Persentase Kebijakan Teknis Dan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100,00%	100,00%	Tantangan digitalisasi juga memengaruhi, di mana nilai Pancasila rentan terhadap disinformasi di era AI dan Di tengah turbulensi global, ideologi Pancasila menghadapi ancaman radikalisme dan polarisasi.	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Orang	20 Orang	Tantangan digitalisasi juga memengaruhi, di mana nilai Pancasila rentan terhadap disinformasi di era AI.	Dialog kebangsaan dengan DPR RI membahas penguatan di era digital.
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga	50 Keluarga	Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, dengan belum membentuk Duta Pancasila, Pelaksanaan tugas Duta, Pembinaan terhadap Duta, Pembinaan Purna Paskibraka dan Pembentukan aktifitas kepaskibrakaan. menyebabkan program paskibraka tidak berjalan secara utuh menurut amanat regulasi Perpres 51 tahun 2022 ttg Program Paskibraka pasal 4.	meningkatkan kecerdasan karakter berbasis Pancasila. Dialog kebangsaan dengan DPR membahas penguatan di era digital.
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	70 Orang	70 Orang		Memberikan relaksasi anggaran kepada program Paskibraka melalui keputusan Bupati.
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN				

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	83,00%	100,00%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
				Persentase Kebijakan Teknis Dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Masih kurangnya kegiatan peningkatan terhadap pengetahuan Politik dan kehidupan berdemokrasi	Perlu adanya peningkatan kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat terkhusus pemilih pemula
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36 Orang	36 Orang	1. Pelaporan dan penyerahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik masih belum sesuai ketentuan waktu atau melebihi masa pelaporan. 2. Masih ada pengelola keuangan yang belum	Perlu ada bimtek secara masif kepada para pengelola keuangan mengingat apabila ada perubahan kepengurusan partai berubah pula pengelola keuangan

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							komunikatif dan slow respon apabila dalam dokumen pengajuan terdapat kekeliruan atau perlu perbaikan dokumen serta apabila kebutuhan data yang dibutuhkan pemerintah	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	97,55%	97,60%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdata Dan Terfasilitasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang	1. Kurangnya koordinasi antar lembaga: dan lembaga terkait lainnya. 2. Kurangnya sumber daya; sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ormas. 3. Kurangnya pengawasan yang menyebabkan ormas tidak sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.	1. Meningkatkan koordinasi. 2. Peningkatan sumber daya: dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, untuk pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ormas. 3. Mediasi sengketa: Melakukan mediasi sengketa antar ormas untuk menyelesaikan konflik. 4. Pengawasan yang efektif: Melakukan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana atau kegiatan ormas yang tidak sesuai dengan tujuan.

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								5. Peningkatan kemampuan ormas: melalui pendidikan dan peltihan bagi pengurus ormas. 6. Mengadakan Evaluasi.
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95,25%	98,35%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
				Persentase Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100,00%	100,00%		
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1. Kurangnya data dan informasi: Kurangnya data dan informasi tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah dapat menyebabkan program kerja yang tidak efektif. 2. Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program kerja dapat menyebabkan program kerja yang tidak sesuai	1. Pengumpulan data dan informasi oleh sumber daya yang berkwalitas. 2. Meningkatkan Pertisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan koordinasi. 4. Menyediakan sumber daya yang berkwalitas

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta dapat menyebabkan program kerja yang tidak terintegrasi. 4. Kurangnya sumber daya: Kurangnya sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat menyebabkan program kerja yang tidak efektif. 5. Kurangnya pengawasan.	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	85,25%	85%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
				Persentase Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Yang Dilaksanakan	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	86 Orang	86 Orang	1. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak aparat keamanan termasuk sinergi kegiatan,	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak aparat keamanan termasuk sinergi

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			personil dan perjalanan dinas. 2. Belum optimalnya pemahaman tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab serta pembagian kerja yang sangat bersifat administrasi semata karena terbatasnya jumlah dana yang tidak dialokasikan secara khusus dan akibat pemotongan anggaran menyebabkan banyak kejadian aktual yang tidak dapat dimonitor dengan baik. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.	kegiatan, personil dan perjalanan dinas. 2. Meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab serta mengupayakan penyediaan anggaran melalui DPRD Kabupaten Sikka untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang. 3. Mengupayakan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
			2. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%		
				Kegiatan Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100,00%	100,00%		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	SDM Aparatur yang kurang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas	Keterbatasan SDM yang ada, maka untuk mencapai target kinerja OPD dilakukan optimalisasi SDM yang saat ini bertugas dengan membentuk tim kerja untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab OPD.
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1. Kurangnya program peningkatan kapasitas SDM aparatur 2. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas, antara lain kondisi gedung kantor, terbatasnya jumlah kendaraan dinas, sarana kerja berupa laptop kurang mendukung	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan bimtek terkait dengan tugas dan fungsi 2. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan.
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan		
				Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terealisasi	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 Laporan	12 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100,00%	100,00%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Unit	1 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, 2026.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Adapun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.66

Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
1	Penyusunan Dokumen RPJMD Kab. Sikka Tahun 2025-2029	Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Sikka Tahun 2025-2029	Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029)
2	Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kab. Sikka Tahun 2025-2029	Perbup Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 - 2030
3	Penetapan nama-nama keluarga miskin penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan	Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 392/HK/2025 tanggal 19 Agustus 2025	Pemutakhiran data keluarga miskin dengan nama dan alamat agar intervensi program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran 2. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
4	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Sikka Tahun 2026	Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026	Mewujudkan sinergisitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah
5	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Sikka Tahun 2025	Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025	Menyesuaikan rencana program kegiatan pembangunan daerah dan anggaran untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya
	DINAS PARIWISATA		
6	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024	Penentuan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sikka
7	Pokok pikiran Kebudayaan Daerah	Keputusan Bupati Sikka Nomor 240 / HK / 2024 tentang pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Sikka	Inventarisasi karya budaya dari 10 obyek pemajuan kebudayaan, sdm dan lembaga
	DINAS PERIKANAN		
8	Fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk perikanan dan Pembangunan Infrastruktur dan Sistem Distribusi Terintegrasi	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	perencanaan dan pembangunan kawasan perikanan di wilayah perariran utara dan selatan Kabupaten Sikka
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
9	Membangun basis data dan kebijakan untuk mendukung sistem digitalisasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	1. Masalah : Fragmentasi Data yang Menghambat Kebijakan Publik Berbasis Data, Kualitas Data yang Belum Konsisten, Perubahan Regulasi dan Tantangan Privasi, Kesenjangan SDM dan Infrastruktur untuk Mengelola Kebijakan Berbasis Data 2. Penyelesaian : Interoperabilitas dan Tata Kelola Data Nasional, Penerapan Open Data yang Aman dan Bertahap, Penguatan Sistem Privasi dan Etika Data, Membangun Kapasitas Data di Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
10	Menguatkan ekosistem perdagangan dan pemberdayaan koperasi, UMKM, dan IKM untuk meningkatkan daya saing, kemandirian ekonomi lokal, serta keberlanjutan usaha	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. Tujuan Utama Penguatan Ekosistem Meningkatkan Daya Saing: Memastikan produk lokal memiliki nilai tambah, kualitas, dan kreativitas yang mampu bersaing di pasar modern maupun global, Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal: Mengurangi ketergantungan pada produk impor dan modal luar dengan memberdayakan potensi ekonomi daerah (produk khas, bahan baku lokal, tenaga kerja setempat), Keberlanjutan Usaha (Sustainability): Menciptakan UMKM/IKM yang tidak hanya tumbuh sesaat, tetapi mampu beradaptasi, inovatif, dan ramah lingkungan (adopsi bisnis hijau) 2. Masalah yang Diselesaikan (Tantangan UMKM/IKM) Penguatan ekosistem bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah berikut: • Keterbatasan Modal dan Akses Keuangan: Kesulitan mendapatkan pembiayaan formal (bank/KUR) yang menyebabkan terhambatnya skala usaha. • Rendahnya Kualitas SDM dan Manajemen: Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, administrasi, dan strategi bisnis profesional. • Inovasi dan Teknologi Rendah: Rendahnya adopsi teknologi digital dalam produksi (efisiensi) maupun pemasaran (e-commerce/digitalisasi), serta kurangnya konsistensi kualitas produk. • Akses Pasar Terbatas: Kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah saing dengan produk impor. Administrasi dan Legalitas: Keterbatasan dalam kepemilikan izin, sertifikasi (Halal/BPOM), dan pengelolaan perpajakan.
11	Mengembangkan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kegiatan usaha di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM secara terpadu, inklusif, dan berkelanjutan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara terpadu, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada penyelesaian masalah fundamental seperti minimnya modal, keterbatasan teknologi, dan distribusi yang tidak merata. 1. Tujuan Pengembangan Sarana & Prasarana • Meningkatkan Daya Saing & Produktivitas: Memodernisasi alat produksi (termasuk teknologi) agar UMKM mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. • Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Memastikan akses permodalan dan sarana usaha menjangkau UMKM di daerah, termasuk kelompok perempuan dan UMKM kecil. • Keberlanjutan Usaha (Sustainable): Mendorong praktik usaha ramah lingkungan dan bersertifikasi (SDGs). • Efisiensi Rantai Pasok: Mengatasi kendala distribusi dan mempermudah akses pasar melalui sarana perdagangan yang lebih baik. 2. Masalah yang Diselesaikan • Keterbatasan Modal & Teknologi: Banyak UMKM yang masih menggunakan cara manual dan kesulitan permodalan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			• Kurangnya Inovasi & Manajemen: Lemahnya kemampuan manajerial, administrasi, dan inovasi produk. • Distribusi dan Akses Pasar Terbatas: Kesulitan dalam memasarkan barang dan menjangkau pasar yang lebih luas. • Ketimpangan Akses: UMKM di wilayah non-metropolitan seringkali belum tersentuh teknologi modern. 3. Kebijakan Pendukung Peningkatan Kegiatan Usaha • Digitalisasi UMKM & Pelatihan: Pelatihan intensif teknologi modern, pembukuan digital, dan e-commerce untuk efisiensi usaha. • Fasilitasi Sarana dan Prasarana: Pengadaan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), peralatan inkubator, dan peralatan kemasan. • Program "UMKM Bersertifikat SDGs": Target sertifikasi untuk keberlanjutan usaha. • Kemudahan Akses Pembiayaan: Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan akses modal yang lebih mudah. • Kemitraan Strategis: Mendorong kolaborasi antara UMKM dan usaha besar/BUMN.
12	Penguatan kebijakan pemerintah, SDM, produk, serta sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025	Penguatan kebijakan pemerintah, SDM, produk, serta sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perdagangan, perindustrian, dan UMKM. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah struktural dan operasional, seperti minimnya akses teknologi, keterbatasan modal, serta rendahnya literasi digital dan kemampuan manajemen pelaku usaha 1. Penguatan Kebijakan Pemerintah Masalah yang Diselesaikan: Ketidakpastian regulasi, prosedur birokrasi yang rumit, ketimpangan informasi, dan minimnya perlindungan hukum bagi UMKM. Tujuan: Menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempermudah legalitas usaha (PIRT, Halal, NIB), dan mengoptimalkan peran UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) Masalah yang Diselesaikan: Keterbatasan kemampuan manajemen, rendahnya keterampilan digital, dan minimnya inovasi produk. Tujuan: Meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan literasi digital pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar global 3. Penguatan Produk Masalah yang Diselesaikan: Rendahnya nilai tambah produk, standar kualitas yang tidak konsisten, kemasan kurang menarik, dan minimnya sertifikasi. Tujuan: Meningkatkan kualitas, inovasi, standardisasi, dan daya saing produk lokal (Gernas BBI) agar berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. 4. Penguatan Sarana dan Prasarana Masalah yang Diselesaikan: Terbatasnya akses alat produksi modern,

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			infrastruktur logistik yang kurang memadai, dan kurangnya sarana pemasaran. Tujuan: Mempercepat proses produksi, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah distribusi dan pemasaran (termasuk akses e-commerce)
13	Pemantapan kebijakan dan inovasi produk serta penguatan kualitas SDM aparatur untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, dan UMKM secara berkelanjutan		Pemantapan kebijakan, inovasi produk, dan penguatan kualitas SDM aparatur bertujuan untuk menciptakan ekosistem sektor perdagangan, perindustrian, dan UMKM yang kompetitif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah rendahnya daya saing, keterbatasan adopsi teknologi, dan lambatnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Berikut adalah rincian tujuan dan masalah yang diselesaikan: 1. Tujuan Utama Pemantapan Kebijakan & Inovasi Produk Peningkatan Daya Saing: Mengubah produk UMKM agar tidak hanya bersaing di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar global melalui sertifikasi, inovasi, dan nilai tambah. Adopsi Teknologi dan Digitalisasi: Mempercepat transformasi UMKM ke platform digital (marketplace, QRIS) untuk efisiensi usaha dan memperluas jangkauan pemasaran. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Mendorong UMKM menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan sertifikasi usaha (target 100.000 UMKM tersertifikasi pada 2025). Sinkronisasi Kebijakan: Memastikan kebijakan pusat dan daerah sejalan untuk mempermudah birokrasi bagi UMKM. 2. Tujuan Penguatan Kualitas SDM Aparatur *Peningkatan Kompetensi: * Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pendampingan teknis (manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital) kepada pelaku UMKM. *Efisiensi Pelayanan: * Menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi untuk membantu operasional UMKM. Proaktif dan Inovatif: Aparatur diharapkan mampu merumuskan strategi inovatif (kebijakan afirmatif) yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pasar dan pelaku UMKM. 3. Masalah yang Diselesaikan (GAP) Rendahnya Daya Saing Produk: Produk UMKM sering kalah saing karena kurang inovasi, pengemasan kurang menarik, dan kualitas tidak standar. Literasi Digital Rendah: Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi pemasaran digital dan manajemen keuangan. Birokrasi yang Belum Optimal: Masih adanya hambatan administratif dan kebijakan yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi industri 4. Kualitas Pendampingan: Kurangnya kapasitas aparatur dalam memberikan bimbingan teknis yang berkualitas dan berkelanjutan.
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
14	Mengoptimalkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan SDM Instruktur sehinnga terciptanya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Memberikan pelatihan dan bantuan usaha kepada pencari kerja
15	**DINAS KETAHANAN PANGAN**		
	Membangun dasar-dasar pengembangan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Sikka
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA		
16	Peningkatan layanan adminduk yang berkualitas melalui SIAK untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan pelayanan yang inovatif	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan untuk standarisasi dokumen dan data kependudukan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan SIAK. 2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya) secara merata dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA		
17	Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan penyusunan serta penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Keputusan Bupati Sikka Nomor 9/HK/2025 Tentang Tim Reaksi Cepat Darurat Bencana Kabupaten Sikka Tahun 2025	Penanganan penanggulangan bencana pada masa darurat bencana dilaksanakan dengan baik dan terorganisir oleh TRC dengan berpedoman pada SOP Penanganan Darurat Bencana
	SEKRETARIAT DAERAH		
18	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Reformasi Birokrasi)	- Penerapan SPBE (Digitalisasi administrasi & Tanda Tangan Elektronik); - Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) internal	Menciptakan birokrasi yang ramping, lincah (agile), efisien waktu/biaya serta meningkatkan kualitas output kerja.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
19	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Sinkronisasi perencanaan (Renja) dan penganggaran (APBD)	Memastikan anggaran memiliki manfaat nyata, mencegah program mubazir dan mempertahankan/meningkatkan Opini WTP.
		- Optimalisasi SAKIP (Result-based budgeting)	
		- Pengetatan pengawasan internal dan penataan aset	
20	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur (ASN)	- Implementasi Sistem Merit (kualifikasi, kompetensi dan kinerja)	Memastikan penempatan pejabat bebas faktor subjektif dan distribusi beban kerja pegawai merata serta proporsional.
		- Penyusunan ANJAB dan ABK yang akurat	
21	Harmonisasi Kebijakan dan Legalitas Hukum	- Evaluasi/penghapusan Perda/Perbup yang menghambat investasi	Meminimalkan risiko hukum, mencegah tumpang tindih aturan dan menjamin kepastian regulasi.
		- Pelibatan Bagian Hukum sejak awal perencanaan program	
22	Penguatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan	- Pemantauan berkala (mingguan/bulanan) proyek strategis	Memastikan program pembangunan selesai tepat waktu, tidak mangkrak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
		- Identifikasi potensi kendala (lahan/cuaca) sejak dini	

Sumber : Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, 2026.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

Uraian mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2025. Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap Rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun 2024 dituangkan dalam format seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.67 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	**Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu memanfaatkan gedung ex Puskesmas Wolomarang untuk digunakan sebagai rumah aman atau tempat penampungan/ perawatan yang layak bagi ODGJ agar para ODGJ	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa Gedung eks Puskesmas Wolomarang yang berlokasi di kelurahan Wolomarang, saat ini difungsikan untuk pelayanan kesehatan umum dan Kesehatan Ibu dan	Memastikan hak asasi manusia dan kesehatan jiwa ODGJ terpenuhi.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dapat dirawat dengan baik sehingga jika sudah sembuh dapat dikembalikan ke Masyarakat	Anak untuk masyarakat di wilayah Waidoko, Wolomarang, dan Wuring. Tenaga kesehatan yang bertugas tetap untuk pelayanan kesehatan terdiri dari 2 orang perawat, dan 3 orang bidan. Terkait tempat Perawatan bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) : - Pemerintah daerah bersama pihak Rumah Sakit St. Elisabeth Lela melalui rapat koordinasi kesehatan jiwa tingkat Kabupaten Sikka, pada saat Launching Pembentukkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TPKJM) Tkt.Kab.Sikka, tanggal 12 Februari 2024, di Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, sudah bersepakat untuk RS St.Elisabeth Lela menyediakan bangsal perawatan khusus untuk pasien dengan Gangguan Jiwa yang membutuhkan perawatan nginap karena penyakit penyerta dan kondisi gangguan jiwa berat. - Telah dikirimkan proposal pengalihan status RS St. Elisabeth Lela menjadi Rumah Sakit Jiwa yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	
b.	Pemerintah segera melakukan koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk mengurus izin operasi insinerator yang berada di Puskesmas Waigete agar segera dapat digunakan;	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengurusan ijin Insenerator Waigete dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan monitoring pengelolaan limbah Fasyankes termasuk monitoring pemanfaatan Incenerator pada Puskesmas Waigete bulan April 2025 dengan rekomendasi yang dikeluarkan bahwa insenerator Puskesmas Waigete Tidak layak untuk dioperasikan karena tidak memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.	Mencegah penyebaran penyakit infeksius, mengurangi volume limbah, serta melindungi kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar
c.	Pemerintah segera menyelesaikan pengalihan status dari Pustu ke puskesmas rawat jalan dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya agar tidak menghambat proses pelayanan Kesehatan bagI Masyarakat;	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa terkait Peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas telah mendapatkan ijin Operasional dari Kementerian Kesehatan untuk Puskesmas Wualadu dan Puskesmas Kojagete sedangkan terkait pemenuhan fasilitas pendukung sesuai standar telah diusulkan ke Kementerian Kesehatan.	Pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	d. Pemerintah harus lebih serius memperhatikan ketersediaan obat- obatan dan alat Kesehatan di semua puskesmas di Wilayah Kabupaten Sikka	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa perencanaan ketersediaan obat telah dilakukan dengan baik melalui beberapa sumber dana antara lain : DAU, DBHCHT , bagi hasil pajak pokok obat-obat yang tidak bisa dipenuhi melalui DAK non fisik (obat-obat diluar fornas dan obat-obat diluar daftar obat RKO kemenkes). Disamping itu, telah dilakukan bimbingan bagi puskesmas untuk perencanaan RKO 2026, agar perencanaan pengadaan obat JKN puskesmas untuk melengkapi kekurangan obat GFK lebih tepat dan benar.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
	e. Pemerintah segera merekonstruksi Puskesmas Kringa Kecamatan Talibura akibat letusan gunung api Lewotobi agar pelayanan Kesehatan dapat terlaksana dengan baik	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa Puskesmas Boganatar yag ada di Desa Kringa Kecamatan Talibura akan dibangun sesuai Prototipe Terbaru Kementerian pada Tahun Anggaran 2026 melalui sumber dana DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2026	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, aman, dan nyaman bagi Masyarakat.
	f. Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai stake holder sebagai upaya penanganan AIDS di Kabupaten Sikka,melihat data penyebaran AIDS di wilayah Kabupaten Sikka cukup tinggi	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk penanganan AIDS di Kabupaten Sikka antara lain :	Menurunkan angka kasus baru HIV, menurunkan tingkat kematian akibat AIDS, dan mengurangi stigma/diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV) guna mencapai target "3 Zero 2030" (zero infeksi baru, zero kematian, zero diskriminasi)
		- Bersama stake Holder Melaksanakan kegiatan pemetaan populasi kunci	
		- Agar seluruh stake holder dapat membantu Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, edukasi dan kampanye bagi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan, pencegahan dan dukungan terhadap ODHA	
		- Bersama stake holder melaksanakan Screening HIV AIDS secara dini bagi seluruh komponen masyarakat yang berusia diatas 15 tahun baik di kelompak masyarakat, perkantoran maupun sekolah (Belum semua dilakukan screening berhubung logistik Terbatas)	
		- Peningkatan akses layanan screening, pengobatan & peningkatan stok logistik baik obat ARV maupun Logistik RDT HIV	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Bersama stake holder terkait membantu pelayanan bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan agar dapat melakukan screening atau pemeriksaan serta segera mendapat pengobatan	
		- Bersama Membuat surat penegasan bagi pemilik tempat hiburan malam agar semua ladies atau Notifikasi wajib melakukan screening HIV AIDS setiap 3 bulan (menunggu pembahasan saat Rakor)	
		- Melaksanakan rapat koordinasi Bersama seluruh stake Holder untuk menyamakan pemikiran dan tindakan terkait dalam upaya penanggulangan dan pencegahan mencegah penyakit HIV AIDS (belum dilaksanakan).	
	g. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan sekolah - sekolah dan para pasanga usia nikah untuk melakukan screening HIV AIDS sehingga dapat mencegah penyebaran AIDS yang angkanya semakin tinggi. holder sebagai Upaya penanganan AIDS di Kabupaten Sikka,melihat data penyebaran AIDS di wilayah Kabupaten Sikka cukup tinggi	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa selama ini telah dilakukan sosialisasi dan kerjasama dengan sekolah – sekolah dan para pasangan usia nikah untuk melakukan screening HIV AIDS antara lain :	Menurunkan angka kasus baru HIV, menurunkan tingkat kematian akibat AIDS, dan mengurangi stigma/diskriminasi terhadap Orang dengan HIV (ODHIV) guna mencapai target "3 Zero 2030" (zero infeksi baru, zero kematian, zero diskriminasi)
		- Dilakukan screening di sekolah – sekolah & Perguruan Tinggi yang berusia diatas 15 tahun (belum semua dilakukan screening karena keterbatasan logistik)	
		- Kegiatan Pemeriksaan atau Screening HIV bagi Calon Pengantin	
	h. Pemerintah perlu mengatur jam operasional pelayanan di puskesmas agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara efisien, dengan mempedomani Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang Kesehatan. Pelayanan cepat dan tanggap perlu dilakukan dalam melayani masyarakat yang sedang sakit atau dalam kondisi kritis dengan tidakmengabaikan prosedur ataupun aturan yang berlaku, tetapi tidak juga terkesan masa bodoh apalagi pembiaran sampai pada harus kehilangan nyawa	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas telah dilakukan sesuai peraturan Bupati tentang Jam Kerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, khusus untuk Puskesmas Rawat Jalan, sedangkan untuk Layanan Rawat Inap Umum dan Rawat Inap Bersalin pelayanan kesehatan dilakukan selama 24 Jam.	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan dasar agar mudah dijangkau masyarakat, memberikan kepastian proses, serta memastikan keselamatan pasien
	i. Pemerintah perlu menambahkan 5 Dokter Umum pada Puskesmas Paga. Puskesmas Koting, Puskesmas Kopeta Puskesmas Kojagete dan	Terkait hal ini, Pemerintah dapat menjawab bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan upaya dengan membuka formasi PNS Penerimaan tenaga Dokter	Pemerataan jangkauan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	PuskesmasWualadu yang sampai saat ini belum ada dokter	untuk 5 dokter. Dan upaya lain yang dilakukan terkait kebutuhan dokter adalah :	terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil.
		- Terkait kebutuhan Dokter untuk Puskesmas Koting dan Puskesmas Paga, sudah terpenuhi melalui Program Dokter Nusantara Sehat	
		- Terkait Dokter di Puskesmas Kopeta sudah terpenuhi melalui formasi CPNS 2025	
		- Puskesmas Wualadu dan Puskesmas Kojagete sedang diupayakan melalui Program Nusantara Sehat	
2.	**RSUD dr. T. C. Hillers Maumere**		
	a. Pemerintah segera membayar jasa Covid -19 tahun 2020-2021 bagi para tenaga Kesehatan, besaran jasa Covid-19 pada lampiran Rancangan Perbub drsampaikan secara transparan kepada semua penerima jasa covid-19, dengan berbagai perhitungannya;	Untuk Pembayaran Jasa Covid -19 RSUD dr. T. C. Hillers Maumere telah melakukan Rekapan Nama-Nama Penerima Jasa Covid-19 dalam Keputusan Direktur RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor RSUD / SK / 66 / VIII / 2025 tentang Penetapan Nama Karyawan Pemerima Jasa Layanan Pasien Corona Virus Disease 2019	Terealiasinya Pembayaran jasa Covid-19 Tahun 2020 - 2021 pada Tanggal 27 Agustus 2025 dengan nilai sebesar Rp. 8.020.063.969
	b. Pemerintah harus segera menyelesaikan tunggakan pembayaran SKTM tahun 2023 dan 2024 sesuai, dengan aturan perundangan yang berlaku	- RSUD dr. T. C. Hillers Maumere telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tentang Percepat pengklaiman Pembayaran SKTM Tahun 2023 dan Tahun 2024	Terealiasinya Pengajuan klaim SKTM
		- RSUD dr. T. C. Hillers Maumere telah melakukan Klaim untuk Bulan Mei Tahun 2023 tanggal 13 Agustus 2025 sebesar Rp. 1.123.315.135,31 hasil Verifikasi dari oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebesar Rp.1.122.947.789,31 Jumlah terbayar Rp.531.897.409,59 selisih yang belum terbayar Rp.591.050.379,72	Terealisasi pembayaran SKTM Bulan Mei Tahun 2023 sesuai besaran anggaran yang diajukan
		- RSUD dr. T. C. Hillers Maumere telah melakukan Klaim untuk Bulan Juni, Juli dan terakhir pada Bulan Agustus Tahun 2023 tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp. 807.881.160,86 dan sampai saat ini belum diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Jumlah total klaim SKTM tahun 2023 yang sudah diajukan dan belum dibayar dan diverifikasi sebesar Rp. 2.493.811.480,95	Terealisasi pembayaran SKTM Bulan Juni, Juli dan Agustus Tahun 2023 sesuai besaran anggaran yang diajukan
	c. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere segera memanfaatkan Gedung IGD Lantai 3 sesuai dengan pemanfaatannya	Sesuai dengan peruntukan Gedung IGD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dimana gedung lantai 2 dipergunakan untuk Ruang PPI dan Aula pertemuan sudah dimanfaatkan saat ini	Tersedianya Ruang PPI dan Aula pertemuan di lantai 2

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Untuk Gedung Lantai 3 RSD di pergunakan untuk Ruang Operasi belum siap digunakan karena RSUD dr. T.C. Hillers masih kekuranagan tenaga Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan untuk Reuang Operasi
3.	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan peningkatan kompetens, guru dan tenaga kependidikan melalui Upaya pengembangan inovasi pembelajaran, pelatihan dan pengembangan talenta serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimbingan teknis dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Kompetensi Kodig dan Kecerdasan artifisial serta pembelajaran mendalam	Masih Tingginya Jumlah Kepala sekolah belum memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala Sekolah serta masih terbaatas jumlah guru memperoleh kesempatan Pendidika dan Pelatihan pengembangan Metode dan strategi [embelajaran berpusat pada Pesertadidik (Koding/ Kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam)_
		Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pembinaan Kelembagaan, Dukungan pendamping Supervisi dan Evaluasi Layanan pendidikan	Belum optimalnya Kemampuan Manajemen Sekolah dalam pelaksanaan Tata kelola Sekolah denga dukunghan Difigitalisasi Sekolah/ Pemanfaat IT dalam Pengelolaan Manjemen dan Pembelajaran
		Meningkatkan kesempatan peningkatan profesi Guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru	Belum optimalnya Komptensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendukung pemenuhan standar pelayanan Pendidikan
	b. Pemerintah harus melakukan monitoring dan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang fisik bangunan serta prasarana pendukungnya sudah tidak layak digunakan, agar dapat perbaiki dan diperuntukan sesuai dengan penggunaannya secara baik;	Peningkatan Bantuan teknis Pemtakiran Data Pokok Pendidikas di setiap satuan Pendidikan dan Penguatan sistim kloordinasi pemenuhan syarat akses program Revitalisasi Nasional	Tingkat Kualitas dan kuntitas standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum O(ptimal yang dipengaruhi juga ketersediaan Data pokok pendidikan belum maksimal
	c. Pemerintah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki Fasilitas Pendidikan yang rusak akibat letusan gunung api lewotobi, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah	Peningkatan Bantuan teknis Pemtakiran Data Pokok Pendidikas di setiap satuan Pendidikan dan Penguatan sistim kloordinasi pemenuhan syarat akses program Revitalisasi Nasional	Tingkat Kualitas dan kuntitas standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum Optimal yang dipengaruhi juga ketersediaan Data pokok pendidikan belum maksimal
	d. Pemerintah harus selalu mengevaluasi kinerja para Guru agar mutu Pendidikan dapat lebih baik	Meningkatkan kerjasama dan sistim Koordinasi Penyelenggaraan PAUDdalam Pemenuhan Standar Pelayanan dan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan PAUD	Masih rendahnya dukungan Pemenuhan standar Peenegelolaan PAUD terutama PAUD Non Formal yang

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			diselenggartakan Oleh Masyarakat dan Pemerintah Wilayah Desa
			Terdapat PAUD Nonformal yang tidak aktif karena kekurangan siswa / peserta didik
			Keterbatasan SDM Pengawas
	e. Dalam kaitan dengan target dan realisasi program pengelolaan Pendidikan, pemerintah diharapkan dapat memenuhi aspek keadilan dan tidak ada kesenjangan/disparitas terhadap Pembangunan sekolah-sekolah di Kabupaten Sikka agar pembangunannya dapat dlrasakan merata d1 seluruh wilayah Kabupaten Sikka;	Pelaksanaan Kerjasama dengan Stake holder dan Pemerintah Wilaya untuk Konffirmasi keberadaan Anak Tidak Sekolah dan Pengembalian ke sekolah Formal / Non Formal	Masih tingginya Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) belum terkonfirmasi dan belum terlaksananya Advokasi serta upaya pengembaliaan Anak Usia Sekolah yang Tidak ke Sekolah Formal dan Non Formal
	f. Pemenntah perlu melakukan kanan ataupun riset terkait masih rendahnya kualitas Pendidikan di Kabupaten Sikka untuk mengatahui persoalan mendasar terkait perkembangan pendidikan di Kabupaten Sikka. Pendidikan itu harus membebaskan dan tidak terpenjara oleh kepentingan apapun.	Pelaksanaan Kerjasama dengan Stake holder dan Pemerintah Wilayah untuk Konffirmasi keberadaan Anak Tidak Sekolah dan Pengembalian ke sekolah Formal / Non Formal	Angka Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah masih Tinggi
4.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan proyek Konstruksi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku	Untuk setiap paket pekerjaan, Pemerintah melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi baik oleh Konsultan Pengawas maupun oleh Tim Teknis internal Pemerintah	
	b. Pemerintah perlu menyiapkan alokasi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan	Untuk Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, namun tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Tetapi sudah dianggarkan kembali untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Tahun 2026	
	c. Pemerintah perlu memperhatikan mutu Aspal hotmix yang digunakan pada pekerjaan perkerasan jalan sehingga kualitas pekerjaan jalan menjadi lebih baik	Terkait mutu aspal hotmix, pada setiap pelaksaan pekerjaan sudah tertuang dalam kontrak untuk dilakukan pengujian material, uji hampar dan core drill yang dilakukan di Kabupaten Sikka dan uji ekstrasi aspal di Kupang. Pemerintah berupaya untuk mengadakan alat uji aspal yang memadai agar semua pengujian bisa dilakukan di Kabupaten Sikka guna memastikan mutu aspal hotmix yang berkualitas	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	d. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pembangunan ruas jalan dan pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari dana PEN	Untuk Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk penanganan ruas jalan dan air minum bersih, namun tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Tetapi sudah dianggarkan kembali untuk penanganan ruas jalan dan air minum bersih di tahun 2026	
	e. Pemerintah perlu melakukan perhitungan pembebasan lahan disertai biaya-biaya lainnya	Pemerintah konsisten untuk melakukan survey awal di lokasi pekerjaan untuk memastikan tidak adanya permasalahan tanah untuk kepentingan pembebasan lahan. Terkait pembiayaan untuk pelaksanaan pembebasan lahan menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5.	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap semua program kegiatan yang bersumber dari APBN maupun dari APBD yang berkonsentrasi sesuai dengan kewenangan desentralisasi, dan dekonsentrasi di Bidang Perumahan. Kawasan Perrnukirnan dan Pertanahan dapat dilaksanakan seuai dengan perencanaan	Pemerintah selalu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBN ataupun APBD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat baik untuk kualitas pembangunannya maupun penerima manfaat. Dan pemerintah sudah melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, dan akan mengoptimalkan pengawasan pada kesempatan berikutnya baik secara mutu kuantitas dan kualitas.	Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap seluruh program kegiatan dan menjamin pelaksananaannya serta serta memastikan kualitas pembangunan dan ketepatan sasaran penerima manfaat
	b. Pemerintah perlu melakukan Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin agar tidak mubasir dan kualitas harus bahan dan bangunannya	Memang pada tahun sebelum 2026 (2025 ke bawah) bantuan stimulant rumah layak huni bagi masyarakat miskin belum optimal, karena memang sasaran program kegiatan dimaksud adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang harus memiliki swadaya. Kondisi mubazir yang terjadi karena ketiadaan swadaya dari penerima manfaat untuk membangun/meningkatkan kualitasnya. Sementara untuk mengontrol kualitas bantuan bahan bangunan yang diberikan kepada penerima manfaat pemerintah telah melaksanakan pengawasan sesuai spek dan mutu yang diberikan, yang akan kami lebih optimalkan pada program kegiatan selanjutnya. Pada saat ini pemerintah melaksanakan bantuan rumah layak huni terfokus pada masyarakat miskin yang termasuk dalam desil 1,2,3 dan 4 dalam DTSEN.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan stimulan Rumah Layak Huni agar tepat sasaran dan mematikan kualitas bahan dan hasil pembangunan rumah serta seleksi dan verifikasi penerima manfaat juga komitmen swadaya dari penerima manfaat
6.	**Dinas Sosial Kabupaten Sikka**		

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	a. Pemerintah perlu melakukan percepatan Pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dengan mengumpulkan data profil sosial ekonomi seluruh keluarga dan individu untuk mengurangi bias dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran	Pemerintah (Dinas Sosial) telah melakukan Verifikasi dan Validasi dan Pembaharuan DTSEN sebanyak 34.814 KK/106.172 Jiwa di 41 Desa/Kelurahan, 14 Kecamatan	Perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memperoleh data yang valid dan akurat.
	b. Kedepan Pemerintah perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan masalah sosial masyarakat di Kabupaten Sikka	Telah dialokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial Masyarakat tetapi tidak semua tertangani karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah	Untuk mengoptimalkan penanganan masalah sosial melalui program dan kegiatan yang berjalan secara efektif
	c. Pemerintah perlu memperhatikan kembali kendaraan dinas operasionat pada Dinas Sosial yang sudah kurang layak digunakan agar tidak menghambat proses pelayanan sosial Masyarakat	Telah diusulkan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas yang baru tetapi kemampuan keuangan daerah terbatas	Untuk mendukung mobilisasi dan operasional yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sosial kepada masyarakat
7.	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu terus melakukan intervensi lanjutan terhadap bantuan yang telah diberikan sehinga dapat dilihat sejauh mana perkembangan atau dampak dari pemberian bantuan tersebut agar dapat meningkatkan cakupan penenma manfaat ataupun dengan memperbaiki sasaran penerima manfaat serta mengakselerasi pembangunan basis data UMKM yang terintegrasi	Pemerintah Akan melakukan monitoring, pendataan ulang dan pembinaan terhadap penerima bantuan sehingga dapat meningkatkan cakupan penerima manfaat ataupun dengan memperbaiki sasaran penerima manfaat serta mengakselerasi pembangunan basis data UMKM yang terintegrasi;	untuk memastikan bantuan tepat sasaran (validasi data), meningkatkan efektivitas dampak bantuan dalam meningkatkan taraf hidup/usaha penerima, serta mewujudkan basis data UMKM yang terintegrasi dan akurat untuk kebijakan berkelanjutan
	b. Pemeritah perlu melakukan pemberdayaan terhadap tenaga kerja dan memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan bagi para pencari kerja;	Telah Dilaksanakan Sesuai arahan atau rekomendasi DPRD	meningkatkan keterampilan (skill), pengetahuan, dan produktivitas agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini bertujuan mengurangi pengangguran, menciptakan kemandirian ekonomi, membentuk wirausaha baru, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi teknis
	c. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan sosialisasi kerja antar negara (AKAN)terkait informasi perekrutan ketenagakerjaan agar dapat mengurangi masalah ketenagakerjaan di luar daerah	Disnakertrans Akan meningkatkan Sosialisasi Ke Desa desa tentang prosedur penempatan tenaga kerja AKAD dan AKAN	memberikan pemahaman menyeluruh tentang perlindungan jaminan sosial dan prosedur resmi, guna meminimalisir risiko kerja, mencegah eksploitasi, dan menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ini meningkatkan keamanan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	d. Pemerintah pertu memastikan semua tenaga kerja yang berada di perusahaan atau di tempat kerja lainnya agar bekeria sesuai dengan kontrak yang tandatangani/disepakati, untuk menghindari pemutusan kerja secara sepihak atau hal lain yang tidak diinginkan	Disnakertrans Akan meningkatkan Sosialisasi Ke perusahaan perusahaan terkait berbagai peraturan ketenagakerjaan	menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin produktivitas. Hal ini mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sewenang-wenang dan menghindari perselisihan hubungan industrial yang tidak diinginkan
8.	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah harus lebih serius menggali potensi, wisata yang ada d, Kabupaten Sikka agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	Pemerintah Kabupaten Sikka siap untuk lebih maksimal menggali semua potensi penerimaan di sektor pariwisata untuk mendukung peningkatan penerimaan PAD	Mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dan pihak desa terhadap potensi-potensi yang telah dikembagkan tetapi dinas mengalami beberapa kendala salah satunya biaya insentif untuk juru pungut
	b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka harus bekerja sama dengan dinas terkait lainnya untuk melakukan koordinasi di Kementerian PUPR agar mendapatkan anggaran untuk pekerjaan jalan khususnya jalan ke destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Sikka dengan mengajukan proposal dari Pemkab Sikka	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sikka siap berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan atau instansi terkait lainnya untuk menjalin komunikasi, jaringan dan koordinasi dgn Kementerian PUPR atau Kementerian terkait guna memperoleh bantuan dan atau dukungan anggaran untuk pembangunan sarana transportasi jln menuju daerah destinasi wisata.	Dinas telah melakukan koordinasi salah satunya mengenai akses jalan masuk ruas jalan watublapi ke desa wisata umauta dengan dinas pupr dan juga dinas sudah berkoordinasi dengan boplbf dan telah ditindaklanjuti melalui pembiayaan luar negeri
	c. Mendukung Festival Jelajah Maumere agar menjadi program rutin tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka	Pemerintah berterima kasih kepada DPRD Sikka atas dukungan terhadap event Festival Jelajah Maumere (FJM) utk dijadikan sbg event tetap tahunan, dan pemerintah siap utk selalu menyukseskannya	Dinas telah menyelenggarakan festival jelajah maumere selama 3 (tiga) tahun secara rutin dan selalu berupaya memberikan perubahan tiap tahunnya
9.	**Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu melakukan strategi dalam mengatasi Ketahanan Pangan daerah serta meniarrun ketersediaan dan kualitas pangan di Kabupaten Sikka	Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan untuk meningkatkan Produksi Pertanian (Dinas Pertanian). Menjaga Stabilisasi Pasokan Pangan (beras) dari luar daerah, karena sebagian besar pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masih mengandalkan pasokan dari luar. Perlu menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasi dengan cepat masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat lainnya dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat.	untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Sikka
	b. Pemerintah perlu melakukan pengendalian resiko pangan dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan lahan	Terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) dan meningkatkan partisipasi petani milenial adalah	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) dan meningkatkan partisipasi petani milenial	menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian atau kewenangan Dinas Pertanian.	
10	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka**		
	a. Dinas harus berinovasi untuk menarik minat masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada terkhusus dalam hal gemar membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melakukan kegiatan Lomba Bertutur, Lomba Video Konten Literasi dan pelayanan perpustkaaan keliling untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.	Melakukan Konsultasi langsung dengan pihak Perpusnas terkait perhitungan IPLM dan TGM/TKM yang baru dan menunggu rilis dari Perpustakaan Nasional terkait IPLM dan TGM/TKM Tahun 2025
	b. Dinas harus lebih meningkatkan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kabupaten Sikka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melakukan Pembinaan terhadap tenaga perpustakaan baik tenaga perpustakaan Sekolah maupun perpustakaan desa/kelurahan	Melakukan Rapat pembahasan terhadap pengelolaan keuangan SKPD yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, dan Bendahara serta Analis Keuangan
	c. Dinas Perlu memperhatikan peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan anggaran yang ada	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan	
	d. Dinas perlu memperhatikan pengadaan-pengadaan buku yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melakukan pengadaan buku sebanyak 514 judul untuk menambah koleksi buku yang ada diperpustakaan.	Melakukan pendampingan terhadap tenaga perpustakaan untuk pengisian IPLM dan TGM/TKM
	e. Dinas perlu meningkatkan dan membudayakan wisata literasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pernah melakukan kegiatan pelayanan perpustakaan dipasar akhir pekan monumen Tsunami pada Ttahun 2023 dan ditahun 2026 akan menggalakan lagi pelayanan perpustakaan setiap akhir pekan pada acara CFN	
11	**Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah harus terus memaksimalkan potensi penerimanan untuk meningkatkan PAD serta perlu melakukan inovasi untuk mencegah kebocoran Retribusi Parkir	Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi daerah serta melakukan inovasi pengelolaan retribusi parkir untuk mencegah kebocoran.	Meningkatnya Retribusi Parkir
	b. Pemerintah perlu menertibkan petugas parkir dan dilengkapi dengan atribut Juru Parkir	Pemerintah akan menata dan menertibkan petugas parkir agar lebih tertib serta memastikan mereka dilengkapi dengan atribut resmi juru parkir, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih jelas, aman, dan transparan.	Petugas Parkir melaksanakan tugas dan Fungsinya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
	c. Pemerintah perlu melakukan penataan terminal untuk pangkalan Travel	Pemerintah berkomitmen melakukan penataan terminal sesuai fungsnyai. Melakukan penertipan terhadap travel serta menentukan lokasi pangkalan travel agar lebih tertib, teratur, dan mendukung kelancaran pelayanan transportasi bagi masyarakat.	Tertatanya Lokasi Pangkalan travel sesuai aturan yang belaku

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	d. Pemerintah perlu menata kembali trayek angkutan umum.	Pemerintah berkomitmen menata kembali trayek angkutan umum agar lebih teratur, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan transportasi dapat berjalan lancar dan tertib.	Terlaksananya Pelayanan Transportasi bagi Masyarakat Secara baik, teratur dan sesuai Kebutuhan.
12	**Dinas Pertanian Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah cepat untuk bisa meminimalisir penyebaran virus atau penyakit ternak yang semakin banyak di Kabupaten Sikka	Terhadap kondisi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebagai institusi yang membidangi kesehatan hewan ini akan tetap memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki untuk meminimalisir kondisi tersebut dengan strategi : 1. Melalui upaya promotif dengan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) melalui pendekatan perorangan, kelompok tani ternak, tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan komponen terkait lainnya; 2. upaya preventif dengan melakukan surveilans penyakit hewan menular, melakukan pengujian laboratorium terhadap specimen (khususnya rabies), melakukan vaksinasi di daerah tertular, juga membuat pemetaan wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terkonfirmasi penyakit hewan menular untuk dapat diambil langkah teknis operasional; 3. Melalui upaya koordinatif dengan semua komponen/stake holder terkait sehingga informasi terkait kesehatan hewan dapat diikuti bersama, membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat khususnya untuk dapat mengakses logistik kesehatan hewan; 4. Melalui upaya proaktif dengan memaksimalkan peran dan fungsi petugas kesehatan hewan yang bertugas di wilayah kecamatan.	Kondisi penyebaran virus atau penyakit ternak sudah diambil langkah-langkah pencegahan agar dampak negatif terhadap ternak dapat diminimalisir, contoh adalah pencegahan terhadap wabah virus ASF yang menyerang ternak babi. Saat ini telah tersedia vaksin untuk mencegah penyebaran virus ASF dan untuk di Kabupaten Sikka, telah dilakukan vaksinasi terhadap ternak babi. Sehingga diharapkan ternak babi terlindungi dari wabah ASF.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b. Pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Untuk memudahkan petani mengakses pupuk bersubsidi	Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sikka telah melakukan koordinasi dengan BUMDES, Koperasi Desa Merah Putih dan juga pihak swasta lainnya yang bergerak di bidang pertanian, untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi antara lain UD Jaya Seribu Kecamatan Magepanda dan UD Sentral Blawuk Kecamatan Talibura yang bergerak sebagai pengecer pupuk kurang lebih selama 5 tahun.	Tujuan dari kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah untuk memberikan layanan cepat kepada petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
	c. Pemerintah segera mengalihkan anggaran pengadaan ternak babi ke pengadaan ternak ayam	Untuk saat ini pengalihan anggaran pengadaan ternak ternak babi ke pengadaan ternak ayam masih belum perlu dilakukan mengingat : 1. Dalam kurun waktu 3 tahun dari 2023-2025 terjadi penurunan kasus serangan ASF pada ternak babi di wilayah Kabupaten Sikka, ; 2. Telah tersedia vaksin ASF; 3. Ternak babi memiliki nilai ekonomis tinggi dan selalu digunakan untuk urusan adat dan budaya serta memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat; 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan biosecurity dalam pemeliharaan ternak babi cukup tinggi sehingga mampu menekan kasus kematian ternak babi.	Saat ini pengadaan ternak babi sudah berangsur membaik dan terbuka kesempatan kepada penyedia jasa untuk pengadaan ternak babi dari masyarakat. Adapun tujuan dari pengadaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya peternak babi di wilayah Kabupaten Sikka.
	d. Pemerintah segera merumuskan target indeks dari hasil pertanian melalui RPJMD Kabupaten Sikka yang berdampak pada peningkatan PAD	Pemerintah telah merumuskan target Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan dalam RPJMD 2025-2029 dan Indeks Kesejahteraan Petani dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.	Tujuan daripada penetapan target pertumbuhan sektor pertanian, Indeks Ketahanan Pangan, dan Indeks Kesejahteraan Petani adalah amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
	e. Pemerintah segera melakukan perbaikan fasilitas sarana produksi pertanian sehingga dapat beroperasi guna menunjang PAD	Dalam rangka peningkatan PAD Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sarana produksi pertanian berupa : 1. Pengadaan sejumlah alat dan mesin pertanian seperti hand tractor, rice transplanter,cultivator,mesin pompa air listrik,	Tujuan dari perbaikan sarana produksi pertanian adalah untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Sikka dalam rangka meningkatkan pendapatan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pengadaan benih padi dan jagung bersertifikat di kebun dinas; 2. Peremajaan tanaman kelapa dan jambu mente di kebun dinas Likonggete; 3. Pengadaan suku cadang alat dan mesin pertanian; 4. Mengoptimalisasi layanan Rumah Potong Hewan (RPH); 5. Meningkatkan layanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan laboratorium veteriner. 6. Pengadaan alat dan kelengkapan laboratorium Inseminasi Buatan (IB) ternak babi jantan pemacek, induk babi siap kawin, pengembangan usaha ternak kambing di Kebun Dinas Fata Magepanda, dan pembangunan instalasi ternak sapi di kebun dinas Ogolidi.	daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
13	**Dinas Perikanan Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu segera merencanakan dan menyiapkan alokasi, anggaran untuk Pembangunan kawasan ekonomi, perikanan di Bebeng Kecamatan Alok Barat dan di Nangahale Kecamatan Talibura dalam suatu rantai bisnis perikanan	a. Pemerintah telah menyusun dokumen perencanaan untuk pembangunan kawasan ekonomi perikanan Bebeng Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat b. Proposal Pembangunan Kawasan Ekonomi Perikanan sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	untuk meningkatkan dan mempercepatkan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara umum dan kesejahteraan ekonomi nelayan secara khusus
	b. Pemerintah perlu melakukan koordinasl dengan Dinas Perikanan Provinsi NIT untuk dapat membuka Kantor Cabang/Unit di Kabupaten Sikka guna mempercepat proses penerbitan ijin berlayar bagi para nelayan	Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan Surat Pj. Bupati Sikka Nomor : Diskan.523/40/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk bisa dilakukan langsung di Kabupaten Sikka	untuk mendekatkan pelayan pengurusan izin berlayar bagi kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	c. Pemerintah perlu melakukan inovasi, pengembangan sektor perikan di wilayah Selatan Kabupaten Sikka yang berpotensi, demi menunjang pendapatan daerah dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat	Pengembangan sektor perikanan di wilayah selatan menjadi perhatian pemerintah, dimana TA. 2026 dialokasikan anggaran untuk pembangunan pabrik es di wilayah Kecamatan Bola.	untuk pengembangan pembangunan sektor perikanan di wilayah selatan dan menunjang penambahan pendapatan asli daerah
14	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka**		
	a. Dinas perlu memperhatikan dan menindak lanjut, daerah-daerah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi	Dinas Kominfo sudah melakukan koordinasi dan mengirimkan proposal ke Kementerian Kominfo berkaitan dengan daerah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi (Daerah Blank Spot)	Terlaksananya pembangunan menara telekomunikasi bagi daerah blank spot yang ada di wilayah kabupaten sikka
	b. Dinas perlu melakukan pengendalian terhadap publikasi di media sosial agar terhindar dari postingan yang mengandung unsur ujaran kebenc,an. info hoak. bully dan konten negatif lainnya	Dinas kominfo sudah melakukan pemangilan, pembinaan dan peringatan terhadap pihak tertentu yang mempublikasi unsur ujaran kebencian. info hoak. bully dan konten negatif lainnya dan kedepannya Dinas Kominfo mengirimkan SDM untuk mengikuti Pelatihan guna penanganan Siber Security	Terlaksananya interaksi yang sehat, aman dan produktif serta melindungi pengguna dari dampak negatif seperti informasi hoaks dan konten provokatif dalam penggunaan media sosial
	c. Dinas perlu memberikan pembinaan terhadap Group-Group medsos yang meresahkan masyarakat		
	d. Dinas perlu membentuk patroli medsos yang bertugas memantau pergerakan konten di media sosial		
	e. Dinas perlu memberi peringatan terhadap Konten Kreator yang tidak sesuai dengan adat/ budaya dan kesopanan	Sudah terbentuk Tim Patroli Medsos (Pihak Polres, Kejaksaan, Kodim, Kesbangpol dan Pol PP)	Sebagai tim pengawasan/pemantauan atas pempublikasian konten - konten yang bersifat negatif (ujaran kebencian. info hoak. bully dan konten negatif lainnya)
	f. Dinas perlu melakukan sosialisasi literasi digital	Dinas sudah melakukan sosialisasi literasi digital (cakap bermedia dan UU ITE) di sekolah- sekolah dan kelompok masyarakat	Agar seluruh pengguna media sosial cakap bermedia dan memahami UU ITE
15	**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka**		
	a. Pemenntah segera menutup semua tempat penambangan galian C yang trdak memiliki ijin. Seperti di Kelurahan Nangalimang, di Kecamatan Wargete dan dr Bendungan Nangagete di Desa Watuonok Kecamatan Talibura serta di Desa Nelle Lorang Kecamatan Nelle	- Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penghentian atau penutupan sementara aktivitas penambangan kepada sejumlah pengusaha yang melakukan penambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Nangagete yang berlokasi di Desa Watu Omok - KecamatanTalibura. Penambangan dapat dilanjutkan kembali apabila para pengusaha tambang telah memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP).	- Menertibkan aktivitas penambangan sesuai regulasi dan kewenangan sehingga seluruh aktivitas penambangan memiliki ijin dan beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan - Meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Ijin Usaha Penambangan (IUP)Penambangan Galian C di wilayah Kecamatan Waigete yang dimiliki oleh 2 pengusaha yaitu PT.NTJ yang IUP berlaku sampai dengan tahun 2029, sedangkan untuk CV. Kompak Indah, saat ini sedang berproses untuk pengajuan perpanjangan IUP. - Penambangan Galian C yang tidak memiliki IUP di Kelurahan Nangalimang khususnya di Kali Nangalimang telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat penutupan dan penghentian usaha penambangan dan pantauan ke lokasi tidak ditemukan lagi adanya aktivitas penambangan di wilayah tersebut sesuai ketentuan dalam RTRW. - Terhadap 2 pengusaha penambang Galian C yang tidak memiliki IUP di Desa Nelle Lorang – Kecamatan Nelle berada dibawah pengawasan inspektur tambang Kementerian ESDM sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan terhadap 2 pengusaha yang telah memiliki IUP ekplorasi kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan inspektur tambang Dirjen Minerba Kementrian ESDM.	- Menguatkan koordinasi antar tingkat pemerintah terkait pengawasan aktivitas penambangan khususnya yang belum berijin
	b. Pemenntah segera melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT terkait ijin usaha penambangan (IUP) Galian C sesuai dengan kewenangannya dan melakukan kajian pemetaan lokasinya	Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukaan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehubungan dengan AMDAL dan IUP, sedangkan kewenangan dan kajian lingkungan menjadi kewenangan provinsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk IUP eksplorasi menjadi kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
	c. Dinas Lingkungan Hidup segera berkoordinasi dengan PDAM agar tagihan air digabungkan dengan luran Sampah bagi masyarakat yang menggunakan langganan angkut sampah	Terhadap saran Dewan yang terhormat akan menjadi perhatian pemerintah untuk mendesain teknis pelaksanaannya mengingat tidak semua warga/pelanggan PDAM yang mendapatkan layanan penanganan sampah begitu pun sebaliknya.	Mewujudkan sistem layanan yang terintegrasi dan efektif.
16	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka**		
	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera bersurat kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan	Terhadap pengelolaan BUMDES yang bermasalah, Dinas PMD Kabupaten Sikka telah melakukan pembinaan melalui monitoring dan evaluasi	terhadap pengelolaan tetap dillakukan monev dan audit

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dan keberadaan Bumdes di Wilayah Kabupaten Sikka agar tujuan pembentukan Bumdes tersebut dapat terlaksana dengan baik terutama untuk peningkatan PADes	sedangkan audit terinci oleh inspektorat tetapi DPMD belum bersurat.	
b.	Pemenntah perlu melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap program/ kegiatan Pemenntahan Desa melalui Dana Oesa sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Terhadap saran tersebut, DPMD telah menindaklanjuti dengan melakukan monitoring evaluasi dan pendampingan secara berkala.	pelaksanaan program/kegiatan pemerintah desa
c.	Pemerintah segera melakukan kordinasi dengan Kementrian Desa, KemenkumHam dan Biro Hukum Provinsi NTT terkait Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka Pilkades serentak Tahun 2025	Karena Peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ada, DPMD menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kemendagri dan Pemerintah Provinsi NTT terkait pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2026 terkait pilkades serentak DPMD telah menindaklanjuti dengan bersurat: surat Bupati Sikka Nomor DPMD.140/235/XII/2025 tgl 2 Desember 2025 Hal melaksanakan pilkades Tahun 2026. Surat Kemendagri No: 100.3/6682/BPD, tgl 19 Desember 2025, Hal tanggapan atas Permohonan ijin pemilihan kepala desa Tahun 2025 di Kabupaten Sikka.	pelaksanaan pilkades merujuk lepada aturan yang berlaku
d.	Pemerintah diharapkan berkoordinasi dengan lnspektorat Kabupaten Srkka terkait proses pencalonan Kepala Desa yang melibatkan Kepala Desa penode sebelumnya agar diaudit sehingga layak mengikuti proses Pilkades serentak tahun 2025	Terhadap saran ini DPMD telah berkoordinasi dengan inspektorat Kabupaten Sikka dan menindaklanjutinya dengan mewajibkan mantan kepala Desa yang mau mencalonkan lagi untuk melampirkan rekomendasi bebas temuan dari inspektorat.	pencalonan mantan kepala desa pada pilkades yang akan dilaksanakan
e.	Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Pejabat Kepala Desa secara berkala untuk memastikan kinerja yang efektif dan efisien,evaluas, perlu dilakukan agar dapat membantu meningkatkan akuntabilitas,mengidentifikas, kelemahan dan memperbaiki kinerja kerja	Terhadap saran ini DPMD telah melakukan evaluasi kinerja penjabat kepala desa dan telah menindaklanjuti dengan monev.	kinerja penjabat kepala desa
f.	Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan perangkatnya terkait perencanaan pembangunan di tingkat desa yang harus melibatkan masyarakat secara aktif ,partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan,sehingga dapat memastikan pembangunan desa memenuhi	Terhadap saran ini DPMD telah melakukan advokasi terhadap pemerintahan Desa tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan tingkat baik dalam Musdes maupun dalam Musrenbangdes serta melaksanakan asistensi untuk memastikan usulan masyarakat masuk dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.	partisipasi masyarakat terhadap semua proses perencanaan di desa

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	kebutuhan masyarakat.mendorong kemajuan berkelanjutan, memperbaiki pelayanan dasar di tingkat desa dan memastikan tidak ada warga masyarakat yang pembentukan Bumdes tersebut dapat d1laksanakan dengan baik terutama untuk peningkatan PADes		
17	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka**		
	a. Dinas perlu melakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten Sikka terkait mutasi Penduduk dari Desa lnduk ke Desa Pemekaran agar dapat dilakukan pelayanan E - KTP	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan DPMD Kabupaten Sikka terkait penetapan dan perkembangan desa pemekaran, termasuk kejelasan wilayah administrasi serta data penduduk yang mengalami mutasi. 2. Melakukan inventarisasi dan verifikasi data penduduk yang berpindah dari desa induk ke desa pemekaran sebagai dasar penyesuaian data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	Menjamin kepastian status administrasi kependudukan penduduk sehingga seluruh penduduk wajib KTP dapat memperoleh pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, tindak lanjut ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan akurasi data kependudukan, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa pemekaran Kabupaten Sikka.
	b. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan camat - camat se- Kabupaten Sikka agar rutin mengirimkan laporan bulanan data kependudukan, hal ini perlu dilakukan secara berkala agar validasi data tetap dapat dilakukan dengan baik	1. Melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan dengan seluruh camat se-Kabupaten Sikka untuk menyepakati mekanisme, format, dan jadwal penyampaian laporan bulanan data kependudukan. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu serta kualitas laporan data kependudukan yang disampaikan oleh kecamatan.	Menjamin tersedianya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan tervalidasi melalui penyampaian laporan bulanan secara rutin oleh seluruh kecamatan. Dengan koordinasi dan pelaporan yang berkelanjutan, proses validasi dan pemutakhiran data kependudukan dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung tertib administrasi kependudukan serta efektivitas perencanaan dan pelayanan publik di Kabupaten Sikka.
18	**Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**		
	a. lnspektorat Kabupaten Sikka segera melakukan audit terhadap kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya, sebelum dilaksanakan Pilkades serentak tahun 2025	Pelaksanaan audit terhadap Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya telah dilaksanakan terhadap 97 desa pada periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Sisa desa yang belum diaudit akan dilaksanakan pada Tahun 2026.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan berjalan sesuai

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	b. lnspektorat Kabupeten Sikka segera mengaudit pengelolaan dana Bumdes di semua Desa di wilayah Kabupaten Sikka	Audit atas pengelolaan BUMDes menjadi perhatian dan akan dilaksanakan melalui Program Pengawasan Tahunan (PPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026.	Memastikan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sikka dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian desa.
	c. Tim TP-TGR diharapkan lebih proaktif untuk melakukan penanganan penyelesaian terhadap berbagai temuan inspektorat dalam kaitam dengan tuntutan ganti rugi	Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) Kabupaten Sikka telah melaksanakan sidang bersama para pihak pelaku kerugian keuangan negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP, Pemerintah Kabupaten Sikka juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sikka berdasarkan PKS Nomor: Insp.700/58/II/2025 dan Nomor: B-3/N.3.15/GS/02/2025 tanggal 21 Februari 2025.	Memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka**		
	a. BPKAD Kabupaten Sikka segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk penyelesaian Perbup tentang Jasa Tenaga Covid-19 yang belum dibayarkan	telah melakukan koordinasi ke Dinas kesehatan Kab.Sikka dan Pihak RS.TC. Hilers Maumere dan Raelisasi Pembayaran Jasa Covid pada tanggal 27 Agustus 2025 melalui Rekening BLUD RS Tc.Hilers.	Kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan yang masih rendah dan
	b. Pemenntah harus memanfaatkan lahan Pemda yang ada agar digunakan untuk berbagai hal yang dapat menunjang pendapatan daerah	telah dilakuakn pemetaan kembali Lahan Milik PEMDA Sikka sesuai letak Objek.	Tingkat Kepatuhan pengelolaan Aset Daerah masih rendah
20	**Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu menyiapkan ruang rehabilitasi atau pusat pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak	Pemerintah telah menyiapkan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) untuk korban kekerasan Perempuan dan Anak	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
	b. Dinas perlu melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Rumah Sakit dan lembaga terkait untuk memberikan layanan konseling dan medis bagi korban kekerasan	Koordinasi Lintas Sektor dengan berbagai stakeholders dalam memberikan konseling dan medias bagi korban kekerasan	Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan
	c. Dinas perlu melakukan sosialisasi terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja,pelayanan kontrasepsi dan pernbinaan		Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pembangunan yg Berprespektif Anak

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	tumbuh kembang anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak		
21	**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu mengevaluasi, penyerapan belanja pada Dinas sesuai dengan kewenangandalam pelaksanaan pengelolaan pasar, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi serta peningkatan PAD melalui pungutan I retnbusi	Terkait dengan penyerapan Belanja maka, tahun 2025 terserap 79,22%, beberapa kegiatan yang tidak terlaksa disebabkan karena : Waktu pelaksanakan kegian tender yang sangat singkat karena ada perubahan sistim tender pada,Adanya pembatasan GU/TU	Seluruh Proses Pelaksanaan Kegiatan Kinerja dan Keuangan dapat diatasi dan berjalan sebagaiaman mestinya
	b. Pemenntah perlu memanfaatkan lahan kosong di belakang Pasar Alok untuk diJadikan tempat parkir kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah	Sedangkan terkait PAD secara persentase mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 76% meningkat menjadi 80,96% di tahun 2025	
	c. Pemenntah dan DPRD serta Pihak Koperasi Plea Puli, segera melakukan diskusi bersama dengan Kementerian Koperasi terkait permasalahan yang ada pada Koperasi Plea Puli	Penataan Manajemen Pengelolaan Sampah, Penyempurnaan Penataan Kios dan Pasar,Penataan Kembali Para Petugas Pasar	
	d. Pemerintah perlu menata kembali lapak-lapak yang ada di Pasar Alok agar dapat dimantaatkan demi peningkatan pendapatan daerah	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi meliputi Pelatihan Pengurus Kopersai Merah Putih dam Pendampingan Pengelolaan Koperasi pada Pengurus dan Pengawas	
		Terkait Rumah Kemasan bangunan rumah merupakan milik Pemda Sikka yang di bangun dari dana DID Tahun 2023, Sarana dan Prasarana Rumah kemasan meupakan barang milik daerah , Plea Puli sebagai Pengelola berdasarkan Kontrak Kerja bersama Kabupaten Sikka	
		Untuk pemanfaatan lahan kosong di pasar Alok dapat dijelaskan bahwa saat ini, sudah ada Peraturan Bupati Sikka Tahun 2023 yang mengatur tempat tersebut dijadikan lahan Parkir, yang pengelolaannya oleh pengelola pasar alok. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut karena masih tahap Sosialisasi	
		Sudah dan sedang dilakukan penataan Pasar Alok, Pasar Maumere dan Pasar Wair Koja, meliputi pergantian Pengelola Pasar Alok dan Pasar Maumere	
22	**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka**		
	a. Perlu adanya rapat bersama dengan OPO pengelola PAD terkait permasalahan dan kendala dalam mengelola PAD agar mendapatkan solusi	Badan Pendapatan Daerah telah melakukan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah pengelola PAD setiap triwulan	Untuk koordinasi dan mengevaluasi penerimaan PAD setiap triwulan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	terkait reahsas, PAD yang selalu tidak mencapai target yang disepakai		
	b. Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sikka segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Sikka terkait pajak mineral non logam terhadap beberapa bangunan seperti Alfa Mart dan Indo Maret yang dibangun agar dapat ditetapkan sebagai wajib pajak	Terkait Pajak Minerba, Badan Pendapatan Daerah tidak melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR. Tetapi Badan Pendapatan Daerah menetapkan Alfamart dan Indomaret sebagai Wajib Pajak PBBP2, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.	Peningkatan PAD
	c. Badan Pendapatan Oaerah Kabupaten Sikka harus meningkatkan kembali kinerja dalam pengelolaan PAD	Badan Pendapatan Daerah telah melakukan peningkatan PAD melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi.	Peningkatan PAD
23	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka**		
	Pemerintah perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang lebih Intensif terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah untuk memastikan bahwa semua pembangunan dan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan	Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Sikka di tahun 2025 dengan melibatkan BPKAD, Bapenda, Inpektorat, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama seluruh pimpinan perangkat daerah secara rutin setiap triwulan dengan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan maupun kinerja anggaran	Mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk menemukan permasalahan dan rekomendasi solusi atas permasalahan yang dihadapi
24	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka**		
	a. Pernenntah segera mengajukan Perda tentang Perubahan BPBD agar status BPBD terdata secara resmi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memiliki kedudukan dan wewenang lebih luas dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah	Sudah dilakukan koordinasi dengan bagian organisasi setda kabupaten sikka untuk pembentukan tim penyusun RanPerda pembentukan BPBD	Melakukan penyusunan RanPerda pembentuakan BPBD berdasarkan Pemendagri Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Pemenntah perlu menyiapkan data Bencana yang akurat dan mutakhir untuk membantu penanggulangan bencana termasuk perencanaan. penqarnbuan keputusan. dan rehabilitas1 secara baik dan tepat	Telah disiapkan data bencana dan dilaporkan melalui pusdalop, TRC dan laporan rutin kepada Bupati	Kesimpangsiuran data teratasi dan penanganan terhadap korban bencana lebih optimal
	c. Pemenntah perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait status bencana Nasional bagi Masyarakat Kabupaten Sikka yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi seh,ngga mendapatkan penanganan dan oiperhankan sama seperti masyarakat Kabupeten Flores Timur	Pemerintah daerah telah melakukan kooridnasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan terhadap masyarakat kabupaten sikka korban terdampak bencana erupsi gunung lewotobi laki-laki dan telah memperoleh berbagai perhatian dan penanganan. Untuk status bencana nasional belum dapat ditetapkan dengan pertimbangan belum terpenuhinya	Masyarakat korban terdampak erupsi gunung api lewotobi laki-laki terpenuhi kebutuhan pada masa darurat bencana dan upayah pemenuhan terhadap penanganan pasca bencana

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		persayaratan penetapan status bencana nasional dan pertimbangan keamanan negara	
25	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah segera membuat Laporan Pertanggunjawaban pengembalian sisa Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Melakukan koordinasi kepada instansi penerima hibah Pilkada melalui komunikasi dan surat resmi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Pilkada	Diperolehnya laporan pertanggung jawaban serta informasi terkait sisa dana hibah Pilkada yang telah dikembalikan ke rekening daerah /negara oleh instansi penerima hibah
	b. Kedepan Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah anggaran untuk kegiatan Paskibraka dan Pemberantasan Narkoba dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba serta dampaknya terhadap Masyarakat	Melakukan koordinasi dengan BAPPERIDA terkait Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Kegiatan Pembentukan Paskibraka telah dianggarkan dalam DPA Tahun 2025 dan telah dilaksanakan. Sedangkan sosialisasi narkoba belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Peningkatan pembinaan generasi muda melalui kegiatan Paskibraka serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	c. Pemerintah perlu selalu melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka penanganan isu - lsu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat	Melakukan koordinasi bersama TNI, Polri, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Penanganan Konflik Sosial, dan Tim Pemantauan Orang Asing	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani konflik horizontal di Kelurahan Kota Baru, Desa Pemana, Kecamatan Hewokloang, serta konflik lahan HGU
26	**Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah harus meninjau kembali terkait beberapa OPD yang harus dirampingkan dan digabungkan agar dapat bekerja secara optimal	Melakukan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) serta menyusun naskah akademik terkait penggabungan atau pemisahan OPD.	Menciptakan struktur organisasi yang miskin struktur namun kaya fungsi (efisiensi birokrasi) dan optimalisasi kinerja dinas teknis.
	b. Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap beberapa dinas harus dilakukan merger (penggabungan) seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedangkan Dinas Peternakan dapat berdiri sendiri		
27	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sikka**		
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sikka perlu lebih menmgkatkan lagi kinerja yang sudah ada	Menyusun SOP terkait pelayanan pimpinan dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan kehumasan/ protokoler.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan citra positif pimpinan daerah di mata publik.
28	**Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap program dan kegiatan BUMD Wairpuan sehingga kedepan dapat berkontribusi terhadap PAD	Melakukan audit kinerja secara berkala pada BUMD Wairpuan dan memperketat pengawasan lapangan terhadap pangkalan/agen minyak tanah.	Meningkatkan kontribusi PAD dari sektor BUMD dan menjamin ketersediaan serta harga eceran

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	b. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen minyak tanah agar pendistnbusiannya tepat sasaran		tertinggi (HET) minyak tanah di masyarakat.
29	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah harus selektif, cepat dan efektif dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dalam proses pengerjaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah	Mengoptimalkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) lebih awal dan mewajibkan seluruh PPK menggunakan E-Katalog untuk semua komoditas yang tersedia	Mempercepat penyerapan anggaran, mencegah keterlambatan proyek dan menjamin transparansi serta akuntabilitas pengadaan.
	b. Semua proses pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
30	**Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sikka**		
	Pemerintah segera menindak lanjuti pekerjaan-pekerjaan proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan atau yang bermasalah	Melakukan audit lapangan dan memberikan teguran serta sanksi (denda/putus kontrak) kepada kontraktor yang bekerja tidak sesuai spesifikasi.	Menjamin kualitas fisik bangunan infrastruktur agar memiliki masa pakai yang lama dan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
31	**Bagian Perencanaan Setda Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu segera memperbaiki semua fasilitas yang ada pada Gedung SCC serta penataan taman yang baik agar dapat menank peminat untuk menyewa	Terkait Pengelolaan SCC, penerimaan sewa ditangani Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, sedangkan fasilitas ditangani Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka	Penataan tata kelola dan peningkatan efektivitas pengelolaan Gedung SCC
	b. Pemerintah perlu merencanakan untuk pembangunan Aula lainnya yang berlokasi di sekitar Gedung SCC agar dapat menunjang pendapatan daerah	Promosi pemanfaatan Gedung SCC melalui brosur dan media sosial	Meningkatkan minat masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah
	c. Pemerintah perlu meninjau kembali terkait pengelolaan Gedung SCC apakah diserahkan ke pihak ketiga atau segera di BLUD kan agar dapat rnenunjang pendapatan daerah	Kondisi gedung memerlukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana, namun belum dapat dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil	Perbaikan sarana prasarana guna mendukung optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan PAD
	d. Pemerintah harus menempatkan tenaga teknis khusus untuk mengurus fasilitas yang ada di gedung SCC agar fasilitas yang ada dapat terawat dengan baik	Mengusulkan penempatan tenaga PPPK Paruh Waktu untuk pengelolaan fasilitas dan keamanan	Menjaga dan merawat fasilitas Gedung SCC agar tetap berfungsi optimal
32	**Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sikka**		
	Pemerintah segera melakukan pendataan untuk rumah yang belum memiliki meteran dan Jaringan listriknya sesuai dengan nama dan alamat dan tingkat dusun agar dapat terakomodir dengan baik.	Koordinasi dengan para Kepala Desa dan PLN untuk verifikasi data *by name by address* warga yang belum memiliki akses listrik mandiri.	Mewujudkan pemerataan akses energi listrik bagi masyarakat kurang mampu di tingkat dusun.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
33	**Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka**		
	a. Pemerintah perlu menganggarkan pengadaan tenda jadi yang lebih baik untuk menunjang pendapatan daerah	Mengalokasikan anggaran pengadaan aset (tenda) pada APBD berikutnya dan memperbaiki sistem pencatatan kartu inventaris barang (KIB) kendaraan dinas.	Menjadi pertimbangan untuk menambah sumber pendapatan daerah (sewa tenda) dan mencegah penyalahgunaan serta kerusakan aset kendaraan operasional milik negara.
	b. Perlu pengawasan yang lebih baik dalam hal pengelolaan Kendaraan Dinas operasional yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka		
34	**BKDPSDM Kabupaten Sikka**		
	a. BKDPSDM Kabupaten Sikka perlu memperhatikan peningkatan kompetensi kapasitas Tenaga Guru dan Nakes	Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Guru wajib meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan profesionalisme berkelanjutan, seperti pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang relevan dan selama ini tenaga guru telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek serta Lembaga-lembaga Pendidikan lainnya. Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan melalui peningkatan Pendidikan (tubel meninggalkan tugas/tubel tidak meninggalkan tugas), bimtek/workshop yg diadakan Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan dan Lembaga Kesehatan Lain.	Tujuan peningkatan kompetensi kapasitas Tenaga Guru dan Nakes - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan - Meningkatkan profesionalisme dan kinerja - Meningkatkan kepercayaan Masyarakat - Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
	b. BKDPSDM Kabupaten Sikka harus selektif terkait dalam memberikan rekomendasi untuk Pendidikan lanjutan Dokter Specialis sehingga tidak terjadi tumpang tindih disesuaikan dengan kebutuhan daerah bukan keinginan pribadi bersangkutan	Pemberian Tugas Belajar bagi dokter spesialis dilaksanakan melalui rapat Tim Penilai Kinerja dengan memperhatikan peta kebutuhan dan Peta jabatan tenaga Dokter Spesial pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere	Pemberian Tugas Belajar dengan mempertimbangkan peta kebutuhan akan menghindarkan permasalahan pada saat pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dokter spesiali.
	c. Terkait para Dokter dan Dokter Specialis serta ASN yang mendapatkan tugas/ijin belajar, baik pendidikannya dibiayai oleh PemdaINegara ataupun melalui, beasiswa harus dibuatkan kontrak kerja dan diikat dengan Akta Notaris sehingga ada kekuatan hukum	Sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2025 untuk ASN yang mendapatkan tugas belajar wajib membuat perjanjian mengabdi yang diikat dengan akte notaris.	Pembuatan Kontrak Kerja dapat menghindarkan ASN untuk one prestasi dengan kewajiban mengabdi di Kabupaten Sikka sesuai ketentuan yang berlaku.
	d. Pemerintah perlu mendorong pemberian beasiswa Dokter Specialis Anastes, untuk Dokter-Dokter yang merupakan putra putn Kabupaten Sikka.	Pada tahun 2026 APBD BKPSDMD Kabupaten Sikka tidak memiliki anggaran untuk pemberian tugas belajar dokter spesialis, sedangkan beasiswa LPDP maupun kemenkes belum ada informasi terkait pemberian untuk pemberian tugas belajar dokter spesialis anestesi. Namun tahun ini ada pengajuan dari putra daerah yang menyampaikan permohonan tugas belajar biaya mandiri an. dr. Thom Lodovik Steviano Da Lopez/ 199111222025061003 untuk melanjutkan Pendidikan	Tersedianya dokter spesialis anestesi.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dokter Spesialis Program Studi Anestesioligi dan Terapi Intensif di Universitas Lambung Mangkurat. SK Tugas Belajar sementara dalam proses.	
e.	BKDPSDM Kabupaten Sikka perlu membuat kajian dan pembiayaan terkait Diklat Pimpinan ASN Untuk menduduki Jabatan Eselon telah mengikuti Diktat Pim	BKPSDMD setiap tahun telah menyusun telaahan staf dari tahun 2023 untuk penambahan anggaran ditujukan ke DPRD, Bupati Sikka, BKPKAD dan BAPPERIDA, pada tahun 2025 terealisasi penambahan anggaran utk diklat PKA 4 org dan PKN 4 org, untuk tahun 2026 hanya bisa dianggarkan untuk peserta PKA sebanyak 2 orang.	Memperolah pejabat structural yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kompetensi manajerial, karakter dan perilaku yang baik dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
f.	Penempatan Jabatan perlu menyesuaikan dengan mekanisme dan aturan kepegawaian	Proses mutasi/rotasi/promosi telah mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan kepegawaian, telah melalui rapat pertimban tim penilai kinerja dan telah memperoleh persetujuan teknis dari BKN.	setiap penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepegawaian agar mencegah terjadinya mal administrasi dan pelanggaran aturan dan meminimalizir terjadinya unsur subyektifitas.

3.4 Capaian Indikator KInerja Utama Kabupaten

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68
Data Target dan Realisasi IKU Kabupaten Sikka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,1	70,65
2	Pendapatan Per Kapita	Rp	19.322.000	21.140s.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,95	5,04
4	Indeks Rasio Gini	Indeks	0,236	0,323
5	Indeks Kriminalitas	Indeks	90	80
6	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,25	4,54
7	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,3	10,13
8	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4	13,09
9	Angka Kemiskinan	Angka	11,51	11,25
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,48	74,64
11	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,6	2,9
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,5	2,13
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,78	9,39
14	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68	68,41
15	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/ Orang/ Bulan	9,463	9,219
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,47	16,17
17	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,4	10,42
18	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,72	61,8
19	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	1,6	-1,78
20	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,35	68,75
21	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81	180,09
22	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	55	52,65
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,91	80,66
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	36,73	49,35

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2026

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan

4.2 Hambatan/Permasalahan dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

4.3 Upaya Penyelesaian

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 pada Urusan Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2025 dengan pelaksanaan operasionalnya pada bidang :

4.1.1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. Kegiatan Bantuan Benih Jagung Hibrida seluas 51 Ha

Kegiatan Lumbung Jagung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Direktorat Perbenihan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan benih jagung hibrida varietas Nusa 1 sebanyak 765 kg yang disalurkan ke 12 kelompok tani yang tersebar di 5 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani /Calon Lokasi (CPCL)
- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian benih jagung ke kelompok penerima.
- Pelaporan luas tambah tanam oleh admin Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.9.2/312/IX/2025 tanggal 4 September 2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Jagung Lumbung Jagung di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan benih jagung terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%.

B. Kegiatan Bantuan Benih Jagung Hibrida seluas 50 Ha

Kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan yang bersumber dari Direktorat Perbenihan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan benih jagung hibrida varietas Nusa 1 sebanyak 750 kg yang disalurkan ke 20 kelompok tani yang tersebar di 2 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)

- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian benih jagung ke kelompok penerima.
- Pelaporan luas tambah tanam oleh admin Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.9.2/332/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Jagung Kegiatan Senator DPD Peduli Pangan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan benih jagung terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%.

C. Kegiatan Bantuan Benih Jagung Hibrida seluas 1.500 Ha yang bersumber dari Direktorat Perbenihan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan benih jagung hibrida varietas Jafran 1 sebanyak 22.500 kg yang disalurkan ke 201 kelompok tani yang tersebar di 21 Kecamatan.
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :
Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)

- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian benih jagung ke kelompok penerima.
- Pelaporan luas tambah tanam oleh admin Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.9/303/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Jagung Kegiatan Reguler di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan benih jagung terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%.

D. Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang bersumber dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui fasilitasi 6 (enam) bantuan yang disalurkan ke 15 (lima belas) kelompok tani yang tersebar di 3 (tiga) desa pada 2 (dua) kecamatan.
Skema kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai berikut :

a. Paket Pekarangan, dengan fasilitasi bantuan berupa :
   - Bantuan tanaman cabai dalam polybag sebanyak 6.750 polibag terdiri dari tanaman cabai keriting sebanyak 2.700 polybag dan cabai rawit 4.050 polybag
   - Bantuan bibit pisang dalam polybag sebanyak 900 polybag
b. Paket Demplot, dengan fasilitasi bantuan berupa :
   - Benih sayuran, pilihan paket 2 yakni buncis sebanyak 7.500 gram, jagung manis sebanyak 3.750 gram, kangkung sebanyak 15.000 gram, caisim sebanyak 1.500 gram, tomat sebanyak 75 gram dan kacang panjang sebanyak 7.500 gram
   - Sarana pengendalian OPT sebanyak 15 paket terdiri dari insektisida nabati, fungisida nabati, sprayer, tricoderma SP untuk sayuran dan tricoderma SP untuk pisang

- Sarana produksi lainnya sebanyak 15 paket terdiri atas pupuk organik sebanyak 3.000 kg dan pembenah tanah sebanyak 75 kg
- Stek ubi jalar sebanyak 9.300 stek

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL) Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
- Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian bibit dan sarana produksi lain ke kelompok penerima.
- Pelaksanaan bimbingan teknis P2B bagi kelompok tani penerima kegiatan P2B yang dilaksanakan di desa Langir kecamatan Kangae.
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : I.PPK.4/SK.14/VI/2025 tentang Penerima Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pekarangan Hortikultura Tahap I Tahun Anggaran 2025. Rincian penerima manfaat kegiatan P2B terlampir.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 95% disebabkan karena bantuan stek ubi jalar tidak direalisasikan karena mengalami kendala pada proses sertifikasi bibit.

E. Bantuan benih padi mendukung kegiatan Optimalisasi Lahan Sawah Non Rawah seluas 581 Ha yang bersumber dari Direktorat Perbenihan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan benih padi sawah varietas Inpari 32 sebanyak 14.525 kg yang disalurkan ke 34 kelompok tani yang tersebar di 5 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)
- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian benih padi ke kelompok penerima.
- Pelaporan luas tambah tanam oleh admin Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.9.2/302/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Padi Lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan benih padi terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%

F. Bantuan benih padi seluas 1.553 Ha yang bersumber dari Direktorat Perbenihan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan benih padi sawah varietas Ciherang sebanyak 38.825 kg yang disalurkan ke 155 kelompok tani yang tersebar di 8 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)
- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan benih oleh PBT dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B)
- Pendistribusian benih padi ke kelompok penerima.
- Pelaporan luas tambah tanam oleh admin Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/276/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.188.48/96/II/2025 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Padi Sawah Reguler di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan benih padi terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%.

G. Bantuan Pestisida mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 sebanyak 581 Liter yang bersumber dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan insektisida merk Triactive 500 SL sebanyak 518 liter yang disalurkan ke 34 kelompok tani yang tersebar di 5 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)
- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan insektisida oleh tim teknis
- Pendistribusian benih padi ke kelompok penerima.
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.9.2/353/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Berupa Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Tanam Padi di Lokasi Optimalisasi Lahan Tahun 2025 di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan pestisda terlampir.

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%.

H. Bantuan Alat dan Mesin Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang bersumber dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan Power Threaser sebanyak 10 unit yang disalurkan ke 8 kelompok tani yang tersebar di 5 Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- Identifikasi Calon Petani / Calon Lokasi (CPCL)
- Pengusulan CPCL ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Verifikasi CPCL oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
- Pengusulan CPCL terverifikasi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pemeriksaan power threaser oleh tim teknis
- Pendistribusian power threaser ke kelompok penerima.
- Pendampingan dan monitoring

Penerima manfaat kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Nomor : Distan.500.6.8/240/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Rincian penerima manfaat kegiatan bantuan power threaser terlampir. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%

4.1.2. Bidang Perkebunan

Pelaksanaan urusan Pertanian pada bidang pertanian yang dibiayai dari :

A. APBD Provinsi

Kegiatan Pengembangan Cengkeh Seluas 40 Ha yang berasal dari Dana DBH-CHT

Bantuan Sarana produksi berupa benih cengkeh bersertifikat dan berlabel siap salur sebanyak 5.000 anakan dan Pupuk NPK sebanyak 2.500 kg.

Grafik 4.1.
Sebaran Lokasi Pengembangan Cengkeh

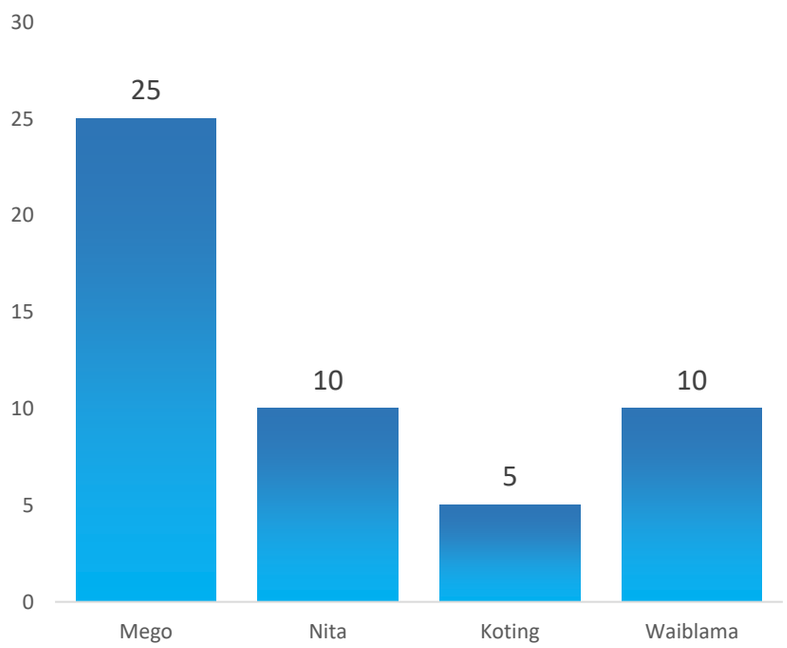

B. APBN- ABT

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatannya sebagai berikut :

1. **Kegiatan Peremajaan Kakao seluas 50 Ha**

   Bantuan Sarana produksi berupa benih kakao bersertifikat dan berlabel siap salur sebanyak 50.000 anakan

Grafik 4.2.
Sebaran Lokasi peremajaan kakao

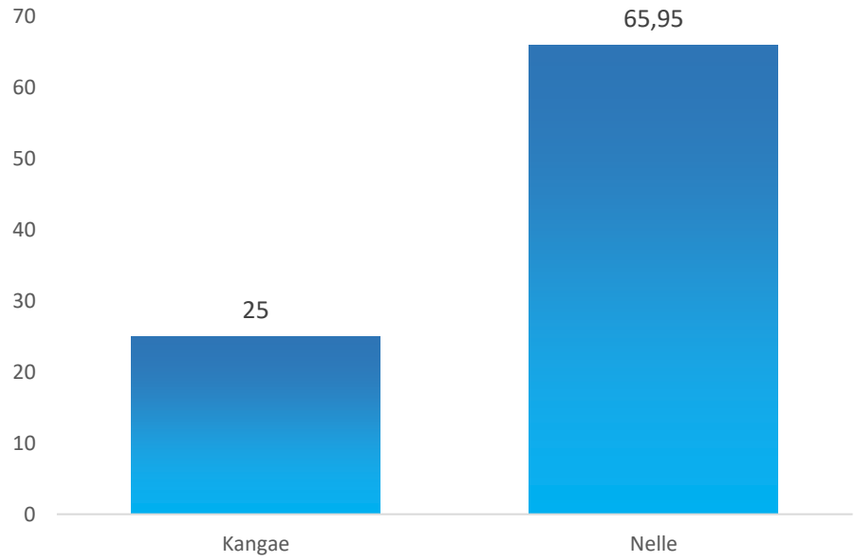

2. Kegiatan Peremajaan Jambu Mete seluas 350 Ha

- Bantuan Sarana produksi berupa benih jambu mete bersertifikat dan berlabel siap salur sebanyak 38.500 anakan, dengan 110 anakan/per Ha
- Bantuan pupuk organik padat sebanyak 175 ton, dengan kebutuhan perha sebanyak 500 kg
- Bantuan HOK untuk pekebun sebesar Rp. 504.000.000 dengan HOK per Ha sebesar Rp. 1.440.000

Grafik 4.3.
Sebaran Lokasi peremajaan jambu mete

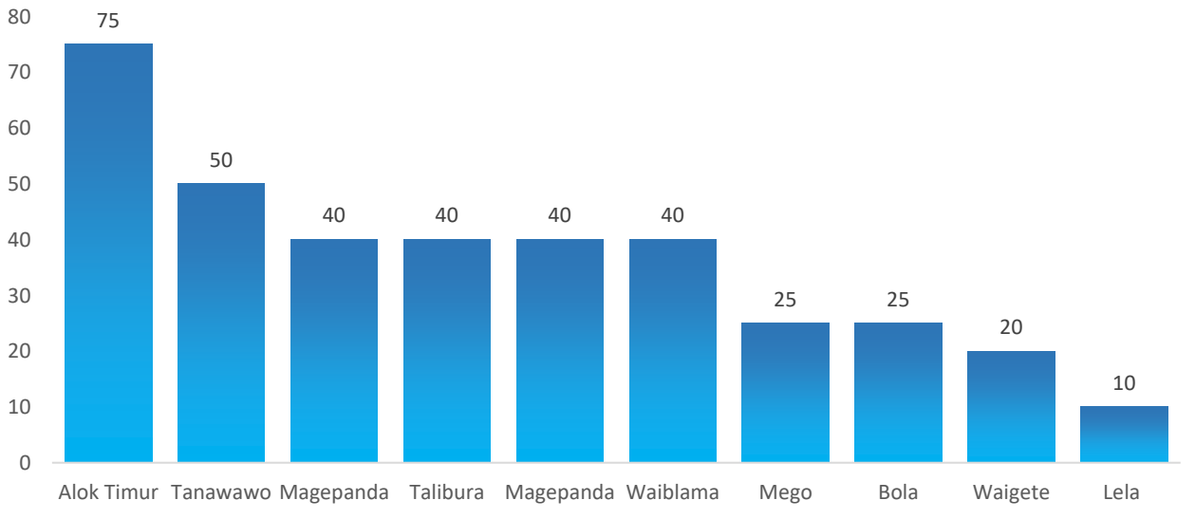

3. Kegiatan Peluasan Pala seluas 500 Ha.

- Bantuan Sarana produksi berupa benih pala bersertifikat dan berlabel siap salur sebanyak 60.000 anakan, dengan 120 anakan per Ha
- Bantuan pupuk organik tepung sebanyak 160 Ton, dengan kebutuhan perha 320 kg
- Bantuan HOK untuk pekebun sebesar Rp. 800.000.000 dengan HOK per Ha sebesar Rp. 1.600.000

Grafik 4.4.
Sebaran Lokasi Perluasan Pala

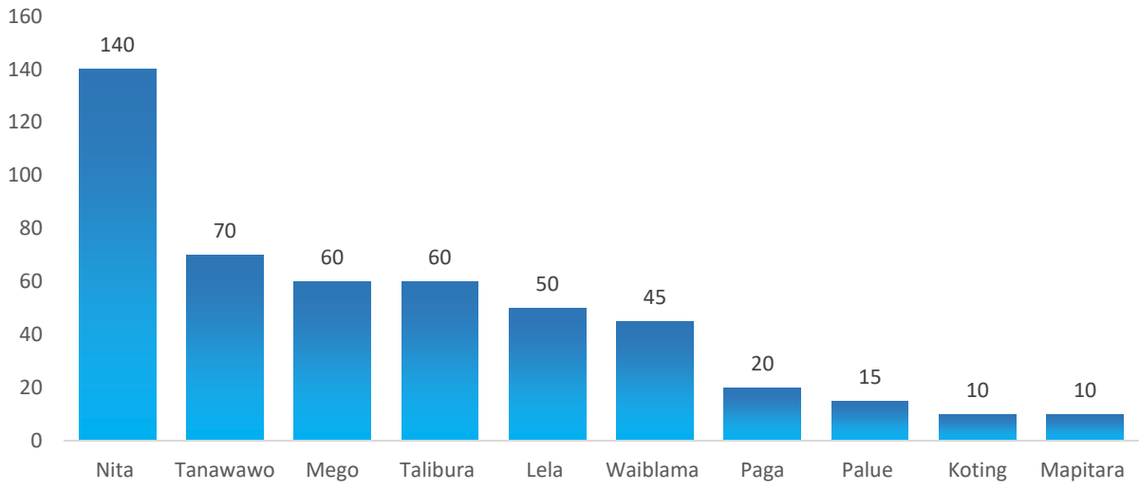

4. **Kegiatan Pengembangan Tusip Padi Gogo di lahan Perkebunan seluas 1.624 Ha**
   - Bantuan Sarana produksi berupa benih padi bersertifikat dan berlabel siap salur sebanyak 32.480 kg, Herbisida (Amcomin 865 SL) 1.624 liter dan Insektisida (Pinalty) sebanyak 1.624 botol @ 400ml per ha

Grafik 4.5.
Sebaran Lokasi Tusip Padi Gogo

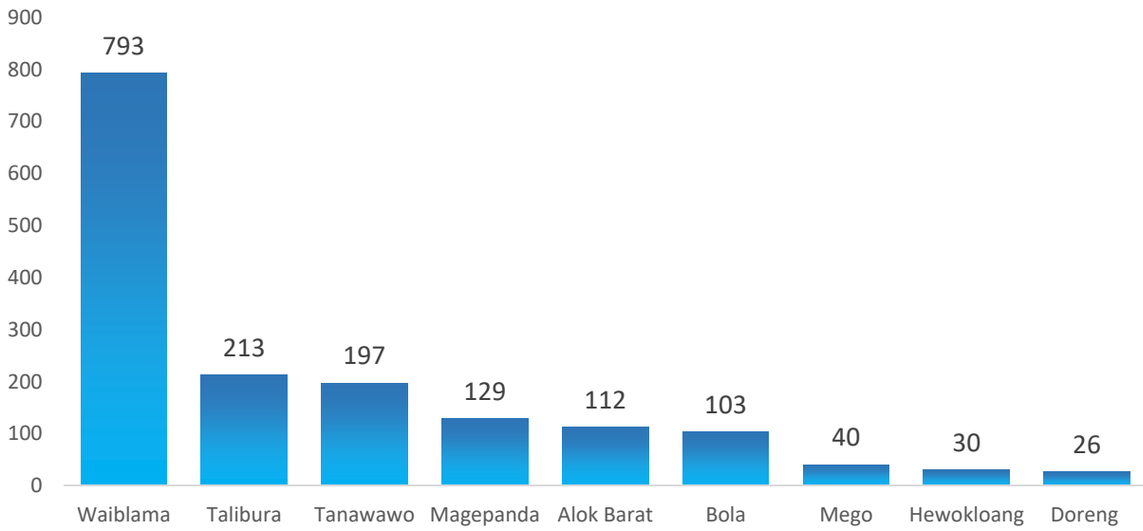

C. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Perkebunan yang bersumber dari dana APBD II, APBD I dan APBN adalah sebagai berikut :

1) Rapat Persiapan

Rapat persiapan kegiatan adalah pertemuan koordinasi untuk membahas, merencanakan, dan menyelaraskan semua aspek teknis serta non-teknis sebelum suatu kegiatan dimulai, memastikan pemahaman bersama, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, lancar, dan sesuai tujuan.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan pada awal tahun yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan dihadir seluruh staf perkebunan.

2) **Penyusunan Juknis Kegiatan**
Penyusunan Juknis (Petunjuk Teknis) kegiatan adalah proses pembuatan dokumen panduan rinci yang berisi langkah - langkah operasional, jadwal, perlengkapan, dan tugas pelaksana untuk memastikan suatu program atau acara berjalan efektif, seragam, dan sesuai tujuan, menjembatani antara kebijakan umum (Juklak) dengan implementasi lapangan. Proses penyusunan juknis kegiatan dimulai pada bulan pebruari 2025.

3) **Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten**
Rapat koordinasi kegiatan tingkat kabupaten adalah pertemuan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk menyelaraskan program, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membahas masalah, dan merencanakan langkah strategis bersama agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif, sinergis, serta mencapai tujuan yang sama. Kegiatan Rapat koordinasi ini di hadiri oleh Para Penyuluh Pertanian dan Koordinator Penyuluh, Para Kepala Bidang, dan Kepala Dinas. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

4) **Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi**
Identifikasi CPCL adalah proses pendataan, dan verifikasi lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai petani potensial dan lokasi lahan pertanian yang tersedia guna memastikan program bantuan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran. Kegiatan CPCL dilaksanakan pada Awal bulan Pebruari meliputi kegiatan peremajaan kakao, dan Tusip padi gogo, sedangkan ABT Peluasan Pala dan Jambu Mete dilakukan pada awal bulan Juli berdasarkan usulan dari kelompok tani.

5) **Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi**
Berdasarkan usulan CPCL dari kelompok tani dan penyuluh pertanian dan kemudian dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan selanjutnya Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten. Penetapan CPCL dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025 baik yang bersumber dari dana Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

6) **Sosialisasi Kegiatan**
untuk menyebarluaskan informasi dan mempersiapkan para pemangku kepentingan terkait rencana, manfaat, dan pelaksanaan program tersebut. Hal ini mencakup berbagai tujuan spesifik, antara lain membangun dukungan, transparansi, partisipasi, dan sinkronisasi program kegiatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan disetiap kelompok tani penerima kegiatan oleh Petugas Kabupaten dan Kecamatan yang bersumber dari dana APBD II, APBD I dan APBN pada bulan Mei s/d Nopember 2025.

7) **Pembukaan Rekening Kelompok**
Pembukaan rekening kelompok tani penerima bantuan perluasan pala dan peremajaan jambu mete untuk alokasi bantuan operasional pekebun (HOK) yang di transfer ke rekening kelompok tani masing-masing sesuai luas lahan. Kegiatan operasional pekebun (HOK) untuk pengajiran, pembuatan lubang tanam peremajaan jambu mete dan pembukaan lahan untuk perluasan pala. Pembukaan rekening kelompok mulai dilakukan pada bulan Oktober tahun 2025 di Bank Rakyat Indonesia Unit Pahlawan Maumere oleh ketua dan bendahara kelompok tani.

8) **Persiapan Lahan**
Tahapan persiapan lahan budidaya tanaman meliputi pembersihan lahan/land clearing dari vegetasi dan sisa tanaman, dilanjutkan pengolahan tanah untuk menggemburkan, memperbaiki struktur, dan aerasi tanah, serta

pemupukan dasar (pupuk organik dan anorganik, pengapuran jika perlu) untuk meningkatkan kesuburan sebelum penanaman bibit. Kegiatan persiapan lahan dilakukan oleh petani/kelompok tani dimusim kemarau pada bulan Oktober – Nopember 2025.

9) Pengajiran

Pengajiran lahan pertanian adalah proses penentuan titik tanam menggunakan ajir (tongkat penanda) dari bahan kayu lirik/lamtoro untuk membuat barisan tanaman lurus, rapi, dan teratur sesuai jarak tanam ideal untuk tanaman tahunan dan bertujuan mempermudah letak titik pembuatan lubang tanam sesuai ukuran. Kegiatan pengajiran lahan untuk tanaman tahunan dimulai pada bulan Nopember- Desember 2025 dan diberikan dana operasional pekebun berupa HOK per Ha sebesar 1 HOK sesuai luasan lahan dari masing-masing kelompok tani khususnya kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) peremajaan jambu mete yang bersumber dari Dana APBN.

10) Pembuatan Lubang Tanam

Pembuatan lubang tanam tanaman tahunan adalah menggali lubang dengan ukuran standar minmal 40x40x40 cm hingga 60x60x60 cm (tergantung jenis tanah dan tanaman), idealnya 2-4 minggu sebelum tanam, dengan tujuan untuk memudahkan pertumbuhan akar kuat, aerasi, dan pencampuran pupuk organik. Prosesnya melibatkan pembersihan lahan, penentuan lokasi sesuai jarak tanam (seringkali mengikuti kontur pada lahan miring), penggalian, dan pengisian dengan campuran tanah subur serta bahan organik untuk meningkatkan kesuburan dan retensi air. Kegiatan pembuatan lubang tanam untuk tanaman tahunan dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok dimulai pada bulan Nopember-Desember 2025 dan diberikan dana operasional pekebun berupa HOK per Ha sebesar 16 HOK kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) perluasan pala, sedangkan peremajaan jambu mete HOK per Ha sebesar 15 HOK yang bersumber dari Dana APBN. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Nopember – Desember 2025.

11) Pengadaan Sarana Produksi

Proses pengadaan sarana produksi berupa benih, pupuk dan pestisida melalui pihak ketiga secara kontraktual sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk menjamin ketersediaan pasokan benih berkualitas tinggi secara stabil dan tepat waktu, yang bermanfaat bagi petani dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.

12) Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran bantuan pemerintah ke lokasi kegiatan merujuk pada proses distribusi bantuan berupa benih, pupuk dan pestisida dari pemerintah melalui Pihak Ketiga kepada penerima manfaat atau lokasi kegiatan yang dituju. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan aspek penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif untuk mendukung capaian pelaksanaan program kegiatan.

a) Penyaluran bantuan pemerintah dari APBD Kabupaten meliputi :
   - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Kegiatan Pengembangan Pala) seluas 18 Ha dengan jumlah benih pala yang telah disertifikasi siap salur sebanyak 1.794 anakan didistribuskan ke 5 (lima) kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.
   - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (Kegiatan Pengembangan Cengkeh) seluas 10 Ha sebanyak 1100 anakan yang telah disertifikasi siap salur didistribusikan ke 2

(dua) kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.

b) Penyaluran bantuan pemerintah dari APBD Provinsi (DBH-CHT) meliputi : Kegiatan Pengembangan Cengkeh seluas 50 Ha, dengan jumlah benih sebanyak 5.000 anakan yang telah disertifikasi siap salur dan Pupuk NPK sebanyak 2.500 kg dan didistribusikan di 7 kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.

c) Penyaluran bantuan pemerintah dari APBN meliputi :

- Kegiatan Peremajaan Kakao seluas 50 Ha
  Jumlah benih kakao MCC02 sebanyak 50.000 anakan yang telah disertifikasi siap salur didistribusikan ke 11 kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.
- Kegiatan Peremajaan Jambu Mete seluas 350 Ha
  Jumlah benih jambu mete MPF 1 sebanyak 38.500 anakan yang telah disertifikasi siap salur dan Pupuk organik padat sebanyak 175 ton, didistribusikan ke 25 kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.
- Kegiatan Perluasan Pala 500 Ha
  Jumlah benih pala unggul lokal sikka sebanyak 60.000 anakan yang telah disertifikasi siap salur dan Pupuk organik padat sebanyak 160 ton, didistribusikan ke 48 kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.
- Kegiatan Tusip Padi gogo 1.624 Ha.
  Jumlah benih padi gogo varietas unggul sebanyak 32.480 kg yang telah disertifikasi siap salur, Herbisida sebanyak 1.624 liter dan Insektisida sebanyak 1.624 botol @400ml didistribusikan ke 139 kelompok sasaran oleh Pihak Ketiga dalam keadaan lengkap. Realisasinya 100 %.
  Penyaluran sarana produksi tanaman semusim dan tahunan Perkebunan dilakukan pada awal bulan Nopember – Desember 2025 sampai dengan awal Januari 2026 di setiap lokasi kelompok tani dan dikawal oleh petugas kabupaten dan kecamatan untuk menjamin kelengkapan sarana produksi sesuai alokasi kegiatan.
- Penanaman
  Penanaman benih adalah proses menanam benih dalam bentuk benih padi gogo, anakan kakao, pala, cengkeh dan jambu mete ke lahan tanam, memerlukan kondisi iklim tropis lembap dengan tanah subur dan cahaya matahari cukup.
  Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, dan perawatan seperti penyiangan dan pemupukan untuk memastikan pohon tumbuh optimal dan menghasilkan buah bernilai ekonomis tinggi. Kegiatan penanaman dilakukan pada awal bulan Desember 2025 - Januari 2026 dengan kondisi curah hujan sudah mulai normal.
- Monitoring dan Pendampingan
  Monitoring dan pendampingan pelaksanaan kegiatan adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi serta menyelesaikan hambatan yang mungkin muncul dan memberikan bimbingan, saran, atau bantuan teknis kepada pelaksana kegiatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2025 – Januari 2026 di setiap lokasi kegiatan.

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Masih tingginya serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.
- Masih terbatasnya kompetensi POPT.

- Cakupan pelayanan POPT meliputi wilayah kecamatan sehingga menyebabkan terbatasnya jangkauan pelayanan POPT kepada kelompok tani
- Masih kurangnya tenaga POPT
- Belum tepatnya jadwal tanam komoditi hortikultura pengendali inflasi
- Belum optimalnya pengelolaan kebun dinas karena terbatasnya tenaga kebun dinas sebagai akibat dari penempatan sebagai P3K pada jabatan/dinas lain
- Tidak kooperatifnya petani pemilik pohon induk tunggal alpukat Ledan Puan sehingga menghambat pelaksanaan duplikat pohon induk Tunggal
- Terancam punahnya pohon induk alpukat Ledan Puan
- Belum konsistennya jadwal tanam yang sudah disusun oleh manager kebun dinas dengan realisasi tanam di kebun dinas.
- Pemasaran benih padi dan jagung produksi kebun dinas yang tidak stabil.
- Masih ada calon benih padi yang tidak lulus uji laboratorium.
- Belum tertibnya pelaporan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

2) Bidang Perkebunan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Data Poktan di SIMLUHTAN tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, baik dari segi identitas petani maupun luasan/lokasi lahan.
- Beberapa anggota kelompok tani kurang memahami teknik yang benar untuk menentukan jarak tanam (pengajiran) yang optimal, yang dipengaruhi oleh jenis tanaman, jenis tanah, dan tujuan budidaya
- Penyaluran sarana produksi tidak tepat waktu sesuai jadwal tanam disetiap lokasi kegiatan.
- Dana operasional pekebun (HOK) kegiatan perluasan pala yang belum di transfer ke rekening 4 (empat) kelompok tani sampai akhir tahun 2025.
- Dana operasional pekebun (HOK) kegiatan peremajaan jambu mete yang belum di transfer ke rekening 25 (duapuluh lima) kelompok tani sampai akhir tahun 2025.

4.3 Upaya Penyelesaian

1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- POPT secara intensif melakukan pengamatan tetap dan pengamatan keliling dan memberikan rekomendasi pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura
- Melakukan refreshing materi pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit dominan oleh POPT senior bagi POPT yang masih baru
- Menciptakan inovasi konsultasi online tentang hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura melalui WhatsApp yakni Ruang Ha_Nya bagi petani dan juga masyarakat secara luas
- Mengusulkan penerimaan tenaga POPT baik CPNS maupun P3K dalam penyusunan kebutuhan jabatan berdasarkan peta jabatan
- Melakukan percepatan pengadaan sarana produksi agar dapat didistribusikan ke kelompok tani penerima sesuai dengan rencana tanam
- Melakukan optimalisasi pemanfaatan tenaga kebun dinas yang masih ada dan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi tenaga kerja
- Melakukan perubahan mekanisme penetapan calon pohon induk alpukat Ledan Puan melalui proses determinasi pohon induk dengan pengujian DNA dan PCR calon pohon induk di laboratorium Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Depok
- Melakukan kelanjutan proses determinasi calon pohon induk di tahun - tahun mendatang

- Meningkatkan penerimaan PAD dan mengusulkan kegiatan dimaksud melalui sumber pembiayaan lain, dalam hal ini APBN
- Menyusun jadwal tanam masing – masing kebun dinas dan melakukan konsolidasi dengan manajer dan tenaga kebun.
- Meningkatkan pendampingan ke 3 kebun dinas.
- Aktif membagikan informasi dan penawaran kepada calon pembeli benih padi dan jagung.
- Melakukan koordinasi intens dengan Pengawas Benih Tanaman dalam hal pendampingan proses sertifikasi benih.
- Melakukan monitoring dan rapat secara berkala dengan POPT untuk membahas pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.
- Menertibkan pelaporan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura oleh admin LTT dan admin SIPDPS.

2) Bidang Perkebunan

- Petugas penyuluh membantu pengurus Poktan memasukkan data baru atau memperbaiki data lama di aplikasi SIMLUHTAN, baik data identitas anggota maupun informasi luasan lahan dan memverifikasi dan memvalidasi data masukan PPL sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.
- Perlu dibuat area percontohan (demplot) di mana berbagai jarak tanam diaplikasikan pada jenis tanaman dan tanah yang relevan agar bisa dipahami oleh petani.
- Membangun sistem pelaporan dan evaluasi yang berkala dan transparan, sehingga setiap kegiatan dapat dipantau, dan hambatan dapat segera teridentifikasi.
- Merealisasikan kembali alokasi pengadaan benih pala melalui sumber dana yang sama atau lainnya pada tahun berikutnya.
- Pengalokasian kembali dana operasional pekebun (HOK) oleh kementerian pertanian dan di transfer ke rekening kelompok tani.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah serta menggambarkan keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan serta tindaklanjut rekomendasi DPRD Tahun 2024. LKPJ ini merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Sikka mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergitas, kerjasama, kerja keras dan partisipasi dari seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dan seluruh komponen masyarakat yang telah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Pada sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan. Berbagai permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah berharap agar LKPJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendapatkan rekomendasi, dan catatan-catatan strategis, kritis serta koreksi untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan di Kabupaten Sikka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan berkat bagi kita semua.

Maumere, 6 Maret 2026

Bupati Sikka,

Juventus Prima Yoris Kago

Lampiran LKPJ Bupati Sikka Tahun 2025

REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI BELANJA MENURUT PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	389.209.328.869	396.023.177.402	101,75
1,0001	**SMP NEGERI 1 MAUMERE**	**14.000.500**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.000.500	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.200.500	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.078.800	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	740.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.570.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1,0002	**SMP NEGERI 2 MAUMERE**	**12.191.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.191.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.391.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1,0004	**SMP NEGERI 4 MAUMERE**	**6.896.400**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.896.400	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.696.400	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.016.400	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.080.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.600.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.200.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000	-	-
1,0005	**SMP NEGERI 1 NITA**	**10.491.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1,0006	**SMP NEGERI 2 NITA**	**10.959.712**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.959.712	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.559.700	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.068.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.012	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.012	-	-
1,0007	**SMP NEGERI 1 TALIBURA**	**16.132.900**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.132.900	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.332.900	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.271.200	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1,0008	**SMP NEGERI 2 TALIBURA**	**10.742.117**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.742.117	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.320.100	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	828.400	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.422.017	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.422.017	-	-
1,0009	**SMP NEGERI 1 KEWAPANTE**	**12.060.100**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.060.100	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.260.100	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.988.800	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.260.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0010	**SMP NEGERI 1 PAGA**	**10.491.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0011	**SMP NEGERI 2 PAGA**	**11.081.046**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.081.046	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.989.746	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.989.746	-	-
1.0012	**SMP NEGERI 1 MEGO**	**9.611.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.611.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.611.300	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.0013	**SMP NEGERI 1 LELA**	**13.061.137**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.061.137	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.661.300	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.399.837	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.399.837	-	-
1.0014	**SMP NEGERI 1 BOLA**	**9.823.760**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.823.760	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.826.100	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.134.800	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.997.660	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.997.660	-	-
1.0015	**SMP NEGERI 2 BOLA**	**11.291.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.291.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.200.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.200.000	-	-
1.0016	**SMP NEGERI 2 MEGO**	**12.000.200**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.000.200	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.896.200	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.681.400	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	523.500	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.104.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.104.000	-	-
1.0017	**SMP NEGERI 3 PAGA**	**6.917.518**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.917.518	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.080.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.837.518	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.837.518	-	-
1.0018	**SMP NEGERI 1 WAIGETE**	**11.693.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.693.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.191.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.502.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.502.000	-	-
1.0019	**SMP NEGERI 1 PALUE**	**9.190.640**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.190.640	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.792.500	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.101.200	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.398.140	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.398.140	-	-
1.0020	**SMP NEGERI KEWAPANTE**	**15.936.500**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.936.500	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.136.500	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.124.800	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0021	**SMP NEGERI ALOK TIMUR**	**15.127.500**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.127.500	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.327.500	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.590.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.526.200	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0022	**SMP NEGERI 2 WAIGETE**	**8.082.510**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.082.510	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.391.210	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.391.210	-	-
1.0023	**SMP NEGERI RERO ROJA**	**10.491.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0024	**SMP NEGERI MAPITARA**	**11.641.700**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.641.700	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.891.700	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.750.000	-	-
1.0025	**SMP NEGERI NUBA ARAT**	**10.491.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0026	**SMP NEGERI PRUDA**	**8.351.400**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.351.400	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.351.400	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.790.600	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.360.800	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.0027	**SMP NEGERI ALOK**	**11.211.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.211.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.411.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0028	**SMP NEGERI PIGANG**	**12.891.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.891.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0030	**SMP NEGERI HEBAR**	**10.491.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0031	**SMP NEGERI HAMAR**	**10.688.616**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.688.616	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.597.316	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.597.316	-	-
1.0032	**SMP NEGERI WERANG**	**11.954.500**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.954.500	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.380.500	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	307.400	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	581.400	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.574.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.574.000	-	-
1.0034	**SMP NEGERI 43 WOLOMOTONG**	**11.071.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.071.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.271.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	580.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.0035	**SMP NEGERI 44 ST PETRUS KLOANGPOPOT**	**10.378.046**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.378.046	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.385.100	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	385.200	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	788.600	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.992.946	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.992.946	-	-
1.0036	**SMP NEGERI 3 WAIGETE**	**9.733.900**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.733.900	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.109.900	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.429.900	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.624.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.624.000	-	-
1.0037	**SMP NEGERI TANAH MERAH**	**9.250.400**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.250.400	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.450.400	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	916.700	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	932.400	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	921.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0038	**SMP NEGERI HENGA**	**11.587.199**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.587.199	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.387.200	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	995.900	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.199.999	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.199.999	-	-
1.0039	**SMP NEGERI PEMANA**	**13.513.200**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.513.200	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.713.200	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	230.600	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.453.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.649.600	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.380.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0040	**SMP NEGERI SATAP PAGA**	**11.069.100**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.069.100	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.389.100	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.800	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.680.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.680.000	-	-
1.0041	**SMP NEGERI SATAP BLORO**	**11.443.189**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.443.189	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.691.100	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	999.800	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.752.089	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.752.089	-	-
1.0042	**SMP NEGERI SATAP WARA**	**11.358.819**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.358.819	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.267.519	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.267.519	-	-
1.0043	**SMP NEGERI SATAP SUKUN**	**13.266.800**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.266.800	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.196.700	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.146.700	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.600.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.070.100	-	-
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.070.100	-	-
1.0045	**SMP NEGERI SATAP MORO**	**9.831.704**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.831.704	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.613.600	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.483.600	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.218.104	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.218.104	-	-
1.0046	**SMP NEGERI 46 NANGAHALE**	**7.697.245**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.697.245	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.298.700	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.618.700	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.398.545	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.398.545	-	-
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**388.686.460.311**	**396.023.177.402**	**101,89**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	294.614.439.247	305.340.270.990	103,64
1.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.198.300	31.461.300	92,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.288.000	8.838.000	95,16
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.579.700	2.084.200	80,79
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.129.700	2.914.500	93,12
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.582.100	12.455.200	91,70
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.618.800	5.169.400	92,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	294.188.347.193	304.973.704.453	103,67
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294.068.395.193	304.860.744.453	103,67
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.952.000	112.960.000	94,17
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.103.800	37.959.400	90,16
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.603.800	25.639.400	86,61
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000	12.320.000	98,56
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.105.400	128.812.476	86,39
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.036.900	3.031.500	99,82
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.067.500	31.989.200	99,76
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.070.000	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.908.000	11.400.000	81,97
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.848.000	31.338.317	98,40
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.175.000	51.053.459	99,76
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.953.154	130.368.919	85,23
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	57.616.000	47.138.250	81,81
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.337.154	83.230.669	87,30
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.731.400	37.964.442	79,54
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.731.400	37.964.442	79,54
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93.963.611.764	90.635.587.912	96,46
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	54.480.636.079	52.127.423.736	95,68
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	160.690.000	158.550.000	98,67
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	999.789.900	999.398.880	99,96
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	447.663.500	433.488.900	96,83
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	267.932.000	265.637.000	99,14
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.690.368.500	2.689.423.548	99,96
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	19.152.400	16.232.508	84,75

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.410.385.889	3.376.122.904	99,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	73.541.000	44.512.100	60,53
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	535.126.300	533.100.000	99,62
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.787.073.840	33.724.174.840	99,81
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.746.200	18.000.000	96,02
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	94.026.400	90.215.760	95,95
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	74.305.700	71.955.000	96,84
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	131.627.600	95.823.710	72,80
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30.230.000	22.179.964	73,37
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.024.000	37.680.000	85,59
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	25.072.600	18.250.000	72,79
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	617.781.700	612.201.700	99,10
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	635.928.800	603.970.000	94,97
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	147.700.600	136.307.184	92,29
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	71.667.000	54.754.000	76,40
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.740.848.250	7.677.402.981	99,18
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.456.953.900	448.042.757	18,24
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.651.924.324	29.259.005.251	98,67
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.466.840.000	1.414.541.000	96,43
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	421.080.000	417.319.000	99,11
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	172.360.000	172.051.000	99,82
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	448.472.400	447.036.200	99,68
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	813.794.700	810.164.419	99,55
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	16.150.000	15.995.000	99,04
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.711.040.238	1.698.903.442	99,29
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.537.000	28.650.000	49,79
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	11.950.700	11.600.000	97,07
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.827.008.826	19.786.531.290	99,80
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.449.700	15.600.000	94,83
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	58.557.700	57.600.000	98,36
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	60.391.700	57.600.000	95,38
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.040.700	53.908.900	89,79
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.499.700	11.535.000	79,55
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.499.700	14.300.000	98,62
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	19.714.700	19.584.700	99,34
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	24.102.700	19.420.000	80,57
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.292.920.860	3.084.248.000	93,66
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	57.081.000	56.000.000	98,11
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.087.432.000	1.066.417.300	98,07
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.651.310.461	8.315.587.205	96,12
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	444.908.000	444.539.000	99,92
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.132.819.100	1.124.530.396	99,27
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	240.000.000	240.000.000	100,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	67.277.900	34.650.000	51,50
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	25.621.800	20.660.000	80,63
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.714.370.000	5.480.770.110	95,91
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	40.074.000	38.400.000	95,82
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.579.700	13.378.900	43,75
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.989.300	8.120.000	62,51
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	19.139.300	11.900.000	62,18
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	426.202.900	423.485.799	99,36
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	479.123.761	475.153.000	99,17
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	18.204.700	-	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.179.740.900	933.571.720	79,13
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.000.000	72.000.000	100,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.669.900	1.925.000	33,95
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	617.300.000	617.300.000	100,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.410.600	6.300.000	55,21
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	47.217.900	-	-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	191.293.500	3.000.000	1,57

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	234.849.000	233.046.720	99,23
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	56.546.900	14.248.500	25,20
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	56.546.900	14.248.500	25,20
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	56.546.900	14.248.500	25,20
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34.862.400	31.540.000	90,47
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.862.400	31.540.000	90,47
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18.692.000	17.200.000	92,02
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16.170.400	14.340.000	88,68
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	17.000.000	1.530.000	9,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.900.000	-	-
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	11.900.000	-	-
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.100.000	1.530.000	30,00
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.100.000	1.530.000	30,00
1.0003	**SMP NEGERI 3 MAUMERE**	**14.691.700**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.691.700	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.891.700	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.800.400	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0029	**SMP NEGERI KOLISIA**	**9.611.300**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.611.300	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.611.300	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.520.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.0033	**SMP NEGERI 45 WATU PAJUNG**	**16.018.100**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.018.100	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.218.100	-	-
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	460.800	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.400.000	-	-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.616.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
1.0044	**SMP NEGERI SATAP WOLOMAPA**	**7.571.500**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.571.500	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.300	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.011.300	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.880.200	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.880.200	-	-
1.0046	**SMP NEGERI 47 OJANG**	**8.780.000**	**-**	**-**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.780.000	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.980.000	-	-
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.000	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.800.000	-	-
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**2.631.791.400**	**2.475.555.220**	**94,06**
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.991.800	2.100.000	19,11

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.19.02.2.01	Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	10.991.800	2.100.000	19,11
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	10.991.800	2.100.000	19,11
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	217.715.900	142.715.000	65,55
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan. pengadaan. pemanfaatan. pemeliharaan. dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	217.715.900	142.715.000	65,55
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.298.083.700	2.225.740.220	96,85
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.939.843.900	1.867.860.100	96,29
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	358.239.800	357.880.120	99,90
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100,00
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	30.000.000	30.000.000	100,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	75.000.000	100,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000	75.000.000	100,00
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000	75.000.000	100,00
	DINAS KESEHATAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**203.476.376.439**	**171.506.178.453**	**84,29**
1.0001	**PUSKESMAS BOGANATAR**	**1.047.711.640**	**846.366.702**	**80,78**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.041.587.640	845.266.702	81,15
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.390.700	-	-
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	35.317.600	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.261.500	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.811.600	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	988.196.940	845.266.702	85,54
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.580.000	73.660.000	94,95
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.480.000	26.880.000	88,19
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.640.000	17.640.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.100.000	7.280.000	60,17
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	313.659.800	311.850.000	99,42
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.300.000	-	-
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000	550.000	5,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.435.000	11.542.000	32,57
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.160.000	10.160.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.370.800	91.720.800	85,42
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	288.796.540	239.103.902	82,79
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.160.000	10.160.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.560.000	12.560.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.794.800	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	32.160.000	32.160.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.124.000	1.100.000	17,96
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.124.000	1.100.000	17,96
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.124.000	1.100.000	17,96
1.0002	**PUSKESMAS WATUBAING**	**1.772.018.800**	**1.513.141.515**	**85,39**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.765.386.000	1.506.508.715	85,34
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	138.950.800	101.325.150	72,92
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	42.917.800	40.102.800	93,44
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.125.600	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	83.907.400	61.222.350	72,96
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.626.435.200	1.405.183.565	86,40
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.960.000	91.090.000	96,95
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	64.840.000	56.150.000	86,60
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.160.000	20.420.000	81,16
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.840.000	14.340.000	76,11
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	491.760.000	436.409.200	88,74

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.160.000	6.420.000	70,09
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.100.000	8.540.000	84,55
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.976.000	39.700.000	57,56
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.160.000	6.820.000	74,45
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150.443.800	127.110.000	84,49
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	585.401.400	502.210.365	85,79
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	12.900.000	12.900.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.100.000	18.660.000	92,84
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.194.000	1.314.000	59,89
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	63.440.000	63.100.000	99,46
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.632.800	6.632.800	100,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.800	6.632.800	100,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.632.800	6.632.800	100,00
1.0003	**PUSKESMAS WAIGETE**	**2.316.660.747**	**1.462.715.475**	**63,14**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.303.303.947	1.459.395.475	63,36
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	574.727.300	219.897.838	38,26
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	66.479.800	48.336.200	72,71
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	157.185.700	77.565.100	49,35
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	351.061.800	93.996.538	26,77
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.728.576.647	1.239.497.637	71,71
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.320.000	17.220.000	17,17
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.880.000	44.130.000	66,99
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.600.000	17.730.000	95,32
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.560.000	27.770.000	72,02
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	455.453.800	402.251.600	88,32
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.760.000	10.240.000	38,27
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.680.000	11.700.000	70,14
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.158.000	25.860.000	71,52
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.240.000	3.550.000	43,08
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160.042.000	101.235.000	63,26
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	714.002.847	532.531.037	74,58
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.140.000	4.000.000	96,62
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.140.000	1.030.000	5,68
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	920.000	820.000	89,13
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	64.680.000	39.430.000	60,96
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.356.800	3.320.000	24,86
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.356.800	3.320.000	24,86
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.356.800	3.320.000	24,86
1.0004	**PUSKESMAS TANARAWA**	**1.491.556.990**	**1.170.778.214**	**78,49**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.488.030.190	1.169.071.414	78,57
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.259.398	70.691.422	58,78
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	36.852.700	32.247.200	87,50
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.231.600	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	57.175.098	38.444.222	67,24
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.367.770.792	1.098.379.992	80,30
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.440.000	76.440.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.640.000	30.940.000	80,07
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	75.600.000	64.540.000	85,37
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.740.000	16.380.000	82,98
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	444.660.600	343.091.000	77,16
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.000.000	5.250.000	25,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.440.000	16.360.000	84,16
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63.864.000	30.070.000	47,08
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.320.000	12.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.626.800	84.250.000	80,52

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	394.560.592	360.558.992	91,38
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	36.550.000	6.800.000	18,60
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	47.880.000	40.600.000	84,80
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	688.800	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.760.000	10.780.000	91,67
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.526.800	1.706.800	48,40
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.526.800	1.706.800	48,40
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.526.800	1.706.800	48,40
1.0005	**PUSKESMAS HEWOKLOANG**	**1.203.604.397**	**1.067.857.851**	**88,72**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.717.397	1.063.992.851	88,69
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	125.523.506	112.635.579	89,73
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	91.068.391	89.916.579	98,74
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.861.200	1.072.500	27,78
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	30.593.915	21.646.500	70,75
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.193.891	951.357.272	88,56
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.360.000	52.710.000	79,43
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.060.000	21.560.000	86,03
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.240.000	30.170.000	99,77
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.800.000	9.520.000	97,14
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	320.427.900	307.249.000	95,89
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.120.000	9.380.000	62,04
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.480.000	11.480.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.494.800	29.540.000	71,19
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.280.000	4.900.000	67,31
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.910.200	81.850.000	93,11
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	327.316.991	282.408.272	86,28
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	12.320.000	10.710.000	86,93
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.180.000	4.900.000	94,59
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	734.000	280.000	38,15
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	89.040.000	70.690.000	79,39
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	24.430.000	24.010.000	98,28
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.887.000	3.865.000	99,43
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.887.000	3.865.000	99,43
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.887.000	3.865.000	99,43
1.0006	**PUSKESMAS BERU**	**1.722.724.599**	**1.521.004.004**	**88,29**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.713.923.799	1.517.584.004	88,54
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	221.383.150	144.972.523	65,48
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	77.266.800	62.825.363	81,31
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.918.600	3.055.000	19,19
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	128.197.750	79.092.160	61,70
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.492.540.649	1.372.611.481	91,96
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.440.000	66.640.000	95,97
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.460.000	103.460.000	100,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.460.000	26.460.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.200.000	23.520.000	93,33
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	435.808.000	435.100.000	99,84
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.100.000	2.100.000	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37.380.000	37.380.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	67.705.000	46.970.000	69,37
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.720.000	13.720.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.984.000	73.680.000	99,59
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	495.126.849	401.911.481	81,17
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.250.000	8.250.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.200.000	11.200.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.466.800	980.000	66,81
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	77.280.000	77.280.000	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	43.960.000	43.960.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.800.800	3.420.000	38,86
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.800.800	3.420.000	38,86
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.800.800	3.420.000	38,86
1.0007	**PUSKESMAS KOPETA**	**1.746.748.380**	**1.868.264.037**	**106,96**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.742.750.180	1.864.564.037	106,99
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	224.404.160	126.598.614	56,42
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	75.909.960	55.121.309	72,61
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.649.100	2.909.700	12,30
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	124.845.100	68.567.605	54,92
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.518.346.020	1.737.965.423	114,46
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	151.140.000	151.140.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	73.368.000	72.800.000	99,23
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	35.280.000	35.280.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.120.000	8.120.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	352.224.000	348.040.000	98,81
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.400.000	21.000.000	93,75
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.720.000	20.720.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.484.400	30.498.000	75,33
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.760.000	11.760.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160.888.600	156.630.000	97,35
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	566.525.020	505.088.243	89,16
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.556.000	-	-
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.000.000	7.000.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	53.620.000	52.220.000	97,39
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.100.000	700.000	33,33
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.160.000	6.160.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.998.200	3.700.000	92,54
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.998.200	3.700.000	92,54
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.998.200	3.700.000	92,54
1.0008	**PUSKESMAS WOLOMARANG**	**1.440.730.625**	**1.584.685.519**	**109,99**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.432.640.625	1.576.665.519	110,05
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	143.674.000	98.837.080	68,79
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	23.850.500	22.252.700	93,30
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.134.100	12.582.050	50,06
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	94.689.400	64.002.330	67,59
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.288.966.625	1.477.828.439	114,65
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	148.140.000	147.440.000	99,53
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.600.000	54.250.000	99,36
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.800.000	11.200.000	66,67
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000	11.200.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	354.055.700	345.657.600	97,63
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.560.000	7.560.000	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.760.000	11.760.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.548.500	22.890.000	32,91
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.200.000	4.200.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.768.000	114.730.000	89,10
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	436.659.425	386.929.011	88,61
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	420.000	420.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.240.000	2.240.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.015.000	700.000	68,97
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	42.000.000	40.810.000	97,17

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.090.000	8.020.000	99,13
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.090.000	8.020.000	99,13
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.090.000	8.020.000	99,13
1.0009	**PUSKESMAS MAGEPANDA**	**1.418.936.888**	**1.400.500.634**	**98,70**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.409.400.888	1.391.244.634	98,71
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	147.495.200	97.905.150	66,38
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	44.339.700	39.755.700	89,66
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.733.300	14.485.000	61,03
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	79.422.200	43.664.450	54,98
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.261.905.688	1.293.339.484	102,49
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.320.000	64.830.000	92,19
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.520.000	34.790.000	88,03
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.200.000	17.150.000	94,23
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.160.000	19.460.000	96,53
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	425.798.000	413.828.000	97,19
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.660.000	7.840.000	81,16
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.840.000	19.040.000	87,18
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	78.544.800	48.860.000	62,21
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.080.000	2.870.000	93,18
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.208.000	54.930.000	70,24
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	385.962.888	270.130.674	69,99
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.120.000	1.120.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.780.000	26.570.000	99,22
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.282.000	742.000	32,52
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	58.800.000	56.420.000	95,95
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	21.630.000	21.490.000	99,35
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.536.000	9.256.000	97,06
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.536.000	9.256.000	97,06
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.536.000	9.256.000	97,06
1.0010	**PUSKESMAS NELLE**	**1.204.973.400**	**1.066.244.095**	**88,49**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.177.271.400	1.040.082.095	88,35
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119.011.700	79.348.549	66,67
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	34.822.400	23.356.509	67,07
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.298.300	3.010.500	36,28
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	75.891.000	52.981.540	69,81
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.259.700	960.733.546	90,78
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.350.000	65.300.000	90,26
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.800.000	49.840.000	96,22
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.200.000	24.850.000	98,61
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000	10.360.000	92,50
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	319.956.000	209.216.000	65,39
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	21.280.000	11.620.000	54,61
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.030.000	22.120.000	96,05
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.220.000	31.080.000	70,28
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.800.000	7.630.000	77,86
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.475.000	60.200.000	73,89
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	140.497.333	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	312.559.700	251.991.213	80,62
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.000.000	3.640.000	52,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.400.000	8.000.000	85,11
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	809.000	409.000	50,56
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	42.000.000	41.860.000	99,67
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	26.180.000	22.120.000	84,49
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.702.000	26.162.000	94,44

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.702.000	26.162.000	94,44
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.702.000	26.162.000	94,44
1.0011	**PUSKESMAS KOTING**	**1.224.983.900**	**1.179.229.268**	**96,26**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.210.085.100	1.164.330.468	96,22
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	135.467.100	101.437.100	74,88
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	74.885.100	68.114.350	90,96
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.696.400	7.235.600	52,83
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	46.885.600	26.087.150	55,64
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.074.618.000	1.062.893.368	98,91
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	107.800.000	100.695.000	93,41
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.160.000	39.480.000	95,92
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.880.000	26.880.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.440.000	12.040.000	89,58
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.680.000	147.210.000	92,77
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.200.000	25.200.000	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.440.000	20.440.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.560.000	36.580.000	97,39
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.640.000	3.640.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	179.606.800	168.894.000	94,04
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	91.551.468	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	320.048.400	250.422.900	78,25
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.040.000	5.040.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	111.160.000	111.160.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	442.800	140.000	31,62
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	23.520.000	23.520.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.898.800	14.898.800	100,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.898.800	14.898.800	100,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.898.800	14.898.800	100,00
1.0012	**PUSKESMAS NITA**	**2.011.615.350**	**2.246.454.388**	**111,67**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.995.079.350	2.233.018.388	111,93
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	284.260.900	202.018.266	71,07
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	62.579.000	54.893.961	87,72
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.226.000	6.955.000	75,38
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	212.455.900	140.169.305	65,98
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.710.818.450	2.031.000.122	118,72
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	173.700.000	173.700.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.700.000	51.550.000	99,71
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.360.000	21.280.000	99,63
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.000.000	23.080.000	74,45
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	424.080.000	392.710.000	92,60
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	59.550.000	59.400.000	99,75
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.540.000	24.540.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.365.750	48.044.600	85,24
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	23.680.000	23.580.000	99,58
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	179.060.000	164.760.000	92,01
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	455.703.628	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	569.478.700	497.031.894	87,28
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	7.320.000	7.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	50.000.000	50.000.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.784.000	1.100.000	61,66
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	37.200.000	37.200.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.536.000	13.436.000	81,25
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.536.000	13.436.000	81,25
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.536.000	13.436.000	81,25

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.0013	**PUSKESMAS NANGA**	**1.269.672.976**	**1.243.255.882**	**97,92**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.260.822.976	1.234.545.882	97,92
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	147.122.000	60.534.611	41,15
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	41.309.000	27.993.001	67,76
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33.213.700	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	72.599.300	32.541.610	44,82
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.113.700.976	1.174.011.271	105,42
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.640.000	48.220.000	99,14
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	63.560.000	61.810.000	97,25
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	39.060.000	36.120.000	92,47
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.290.000	14.350.000	83,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	346.536.000	316.296.000	91,27
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34.720.000	34.650.000	99,80
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.570.000	10.500.000	99,34
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.216.000	45.906.000	83,14
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	33.600.000	32.620.000	97,08
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.780.000	65.760.000	81,41
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	195.891.604	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	322.408.976	256.657.667	79,61
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.640.000	8.330.000	228,85
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.120.000	10.430.000	68,98
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	560.000	420.000	75,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.710.000	10.710.000	100,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.290.000	25.340.000	80,98
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.850.000	8.710.000	98,42
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.850.000	8.710.000	98,42
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.850.000	8.710.000	98,42
1.0014	**PUSKESMAS PAGA**	**1.679.725.500**	**1.605.703.123**	**95,59**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.671.471.500	1.605.703.123	96,07
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.072.100	123.417.561	68,92
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	23.898.000	23.876.500	99,91
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.930.500	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.359.400	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	147.884.200	99.541.061	67,31
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.492.399.400	1.482.285.562	99,32
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	127.120.000	127.120.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.440.000	48.440.000	100,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.460.000	23.030.000	87,04
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.240.000	16.240.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	452.465.000	404.510.000	89,40
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.000.000	27.720.000	99,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.680.000	22.680.000	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80.080.000	56.770.000	70,89
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.080.000	10.080.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130.562.000	104.310.000	79,89
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	223.343.069	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	475.621.600	383.182.493	80,56
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.020.000	2.240.000	37,21
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.540.000	8.540.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	730.800	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	59.360.000	24.080.000	40,57
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.254.000	-	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.254.000	-	-
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.254.000	-	-
1.0015	**PUSKESMAS LEKEBAI**	**1.263.029.800**	**1.287.338.648**	**101,92**

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.260.835.000	1.285.358.648	101,95
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	94.470.300	48.928.390	51,79
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	23.382.900	23.325.140	99,75
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.204.200	7.461.000	90,94
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	62.883.200	18.142.250	28,85
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.166.364.700	1.236.430.258	106,01
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.560.000	63.560.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.720.000	33.910.000	94,93
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.360.000	23.360.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.800.000	16.000.000	80,81
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	372.040.000	368.600.000	99,08
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.180.000	8.860.000	87,03
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.120.000	13.980.000	99,01
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.865.900	28.210.000	88,53
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000	4.490.000	93,54
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.810.000	103.717.952	96,20
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	160.627.210	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	351.650.800	282.345.096	80,29
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.140.000	10.140.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.128.000	680.000	31,95
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	88.320.000	87.900.000	99,52
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	30.870.000	30.050.000	97,34
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.194.800	1.980.000	90,21
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.194.800	1.980.000	90,21
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.194.800	1.980.000	90,21
1.0016	**PUSKESMAS WOLOFEO**	**1.434.567.699**	**1.408.338.849**	**98,17**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.420.540.699	1.394.592.193	98,17
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	96.034.850	16.800.600	17,49
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	26.181.200	-	-
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	10.611.800	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.769.700	3.417.400	59,23
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	53.472.150	13.383.200	25,03
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.324.505.849	1.377.791.593	104,02
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.600.000	75.600.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.080.000	19.480.000	92,41
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.240.000	12.240.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.780.000	22.780.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	523.298.200	426.860.000	81,57
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.640.000	14.440.000	92,33
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.300.000	11.500.000	75,16
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.440.000	14.300.000	63,73
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.280.000	13.080.000	91,60
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.993.000	116.840.000	90,58
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	229.171.696	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	386.642.649	350.039.897	90,53
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.400.000	3.200.000	94,12
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.430.000	6.230.000	96,89
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.602.000	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.600.000	12.800.000	94,12
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	60.180.000	49.230.000	81,80
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.027.000	13.746.656	98,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.027.000	13.746.656	98,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.027.000	13.746.656	98,00
1.0017	**PUSKESMAS FEONDARI**	**1.133.057.348**	**1.112.236.825**	**98,16**

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.122.528.548	1.107.736.825	98,68
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44.731.000	18.947.930	42,36
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	14.638.500	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	626.600	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	29.465.900	18.947.930	64,30
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.077.797.548	1.088.788.895	101,02
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.400.000	68.400.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.800.000	50.480.000	95,61
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.400.000	10.400.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000	12.000.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	369.818.200	366.400.000	99,08
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.920.000	20.600.000	89,88
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.100.000	13.800.000	68,66
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.240.000	20.820.000	53,06
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.920.000	13.920.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.640.000	66.980.000	85,17
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	106.502.871	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	291.879.348	248.246.024	85,05
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	11.460.000	7.640.000	66,67
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.000.000	22.000.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.940.000	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	24.000.000	24.000.000	100,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	37.280.000	36.600.000	98,18
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.528.800	4.500.000	42,74
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.528.800	4.500.000	42,74
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.528.800	4.500.000	42,74
1.0018	**PUSKESMAS BOLA**	**1.478.438.149**	**1.441.112.805**	**97,48**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.472.301.149	1.435.432.805	97,50
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.613.400	69.474.540	42,72
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.466.300	10.164.500	70,26
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	148.147.100	59.310.040	40,03
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.309.687.749	1.365.958.265	104,30
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	122.080.000	111.665.000	91,47
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.320.000	38.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.120.000	15.120.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.700.000	10.480.000	97,94
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.280.000	5.280.000	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	387.727.000	322.077.000	83,07
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.480.000	2.160.000	62,07
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.100.000	29.340.000	97,48
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	90.830.500	80.920.000	89,09
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.720.000	9.720.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57.820.000	41.980.000	72,60
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	217.075.535	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	435.170.749	379.220.730	87,14
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.320.000	1.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.412.500	1.320.000	93,45
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	43.320.000	43.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	787.000	140.000	17,79
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	23.760.000	23.760.000	100,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	32.740.000	32.740.000	100,00
		-	-	#DIV/0!
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.137.000	5.680.000	92,55
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.137.000	5.680.000	92,55
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.137.000	5.680.000	92,55
		-	-	#DIV/0!
1.0019	**PUSKESMAS HABIBOLA**	**1.506.139.666**	**1.362.722.946**	**90,48**

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.494.822.866	1.350.482.946	90,34
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	112.885.000	42.656.802	37,79
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	18.118.500	15.852.002	87,49
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.841.400	4.924.100	33,18
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	79.925.100	21.880.700	27,38
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.381.937.866	1.307.826.144	94,64
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.120.000	30.870.000	44,66
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	64.260.000	64.050.000	99,67
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.800.000	49.800.000	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.660.000	3.030.000	25,99
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	419.476.800	408.644.400	97,42
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.050.000	-	-
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.340.000	1.140.000	11,03
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.352.800	1.450.000	10,86
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.080.000	11.940.000	98,84
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.090.000	139.290.000	75,66
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	244.872.358	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	506.476.266	332.589.386	65,67
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.060.000	2.060.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.320.000	790.000	8,48
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.132.000	820.000	72,44
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	24.720.000	16.480.000	66,67
		-	-	#DIV/0!
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.316.800	12.240.000	108,16
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.316.800	12.240.000	108,16
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.316.800	12.240.000	108,16
		-	-	#DIV/0!
1.0020	**PUSKESMAS MAPITARA**	**1.455.401.859**	**1.394.937.079**	**95,85**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.448.245.059	1.392.100.279	96,12
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	113.906.700	29.844.850	26,20
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	61.243.000	12.876.000	21,02
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.660.500	1.612.500	97,11
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.306.300	4.636.800	19,08
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	26.696.900	10.719.550	40,15
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.334.338.359	1.362.255.429	102,09
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.360.000	87.360.000	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.680.000	41.470.000	99,50
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000	4.500.000	75,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.360.000	17.420.000	94,88
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	473.341.700	452.009.600	95,49
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.330.000	5.430.000	58,20
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.160.000	25.000.000	95,57
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.694.700	18.070.000	83,29
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.640.000	4.640.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.235.200	95.860.000	86,18
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	202.924.606	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	456.316.759	335.521.223	73,53
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	9.620.000	9.620.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.700.000	13.720.000	73,37
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.530.000	340.000	22,22
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.920.000	13.920.000	100,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.450.000	34.450.000	100,00
		-	-	#DIV/0!
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.156.800	2.836.800	39,64
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.156.800	2.836.800	39,64
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.156.800	2.836.800	39,64
		-	-	#DIV/0!
1.0021	**PUSKESMAS TELUK**	**1.432.729.890**	**1.297.969.183**	**90,59**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.428.259.890	1.296.589.183	90,78

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	81.788.470	53.235.000	65,09
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	12.439.000	12.421.300	99,86
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.390.970	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	66.958.500	40.813.700	60,95
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.346.471.420	1.243.354.183	92,34
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.840.000	2.240.000	11,29
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.120.000	36.440.000	98,17
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.600.000	16.840.000	90,54
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.500.000	15.820.000	67,32
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	342.792.000	336.239.900	98,09
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.200.000	8.520.000	92,61
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.860.000	12.540.000	84,39
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.170.000	27.290.000	93,56
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.760.000	1.880.000	50,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.372.000	78.070.000	63,80
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	256.421.496	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	420.425.420	353.492.787	84,08
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	252.320.000	50.140.000	19,87
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.032.000	540.000	26,57
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.520.000	7.520.000	100,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	42.960.000	39.360.000	91,62
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.470.000	1.380.000	30,87
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.470.000	1.380.000	30,87
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.470.000	1.380.000	30,87
1.0022	**PUSKESMAS PALUE**	**1.261.013.645**	**1.064.581.485**	**84,42**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.253.053.645	1.059.661.485	84,57
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	86.760.045	44.157.600	50,90
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	31.109.600	27.662.300	88,92
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.259.100	3.472.100	81,52
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	51.391.345	13.023.200	25,34
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.166.293.600	1.015.503.885	87,07
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.120.000	89.480.000	99,29
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.398.000	33.880.000	93,08
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.160.000	3.860.000	27,26
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.840.000	6.260.000	45,23
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	344.851.000	240.045.000	69,61
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	44.400.000	41.600.000	93,69
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.480.000	2.040.000	14,09
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.170.000	9.120.000	41,14
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000	2.010.000	33,50
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.974.000	134.220.000	87,17
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	109.737.893	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	354.570.600	273.610.992	77,17
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	30.360.000	30.360.000	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.130.000	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	39.840.000	39.280.000	98,59
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.960.000	4.920.000	61,81
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.960.000	4.920.000	61,81
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.960.000	4.920.000	61,81
1.0023	**PUSKESMAS TUANGGEO**	**1.034.082.600**	**865.712.768**	**83,72**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.028.584.600	865.712.768	84,17
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	63.336.200	42.818.498	67,61
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	23.249.300	22.369.998	96,22
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.184.200	1.417.500	33,88

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.902.700	19.031.000	53,01
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	965.248.400	822.894.270	85,25
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.080.000	57.120.000	81,51
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.680.000	17.800.000	86,07
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	18.080.000	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.720.000	5.760.000	36,64
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.160.000	19.820.000	98,31
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	322.742.400	227.995.800	70,64
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.220.000	8.220.000	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.420.000	13.130.000	79,96
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.776.000	27.064.000	82,57
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.680.000	10.000.000	93,63
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.030.000	78.850.000	78,05
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	121.516.035	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	287.240.000	180.428.435	62,81
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.800.000	2.990.000	62,29
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	460.000	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	54.240.000	34.120.000	62,91
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.498.000	-	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.498.000	-	-
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.498.000	-	-
1.0024	**PUSKESMAS WAIPARE**	**1.602.287.152**	**1.471.920.437**	**91,86**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.593.713.952	1.471.920.437	92,36
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	307.822.200	136.831.780	44,45
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	77.347.700	34.812.660	45,01
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.957.600	11.213.800	51,07
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	208.516.900	90.805.320	43,55
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.285.891.752	1.335.088.657	103,83
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	184.730.000	53.480.000	28,95
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.128.000	17.080.000	58,64
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.600.000	10.990.000	87,22
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.250.000	8.540.000	69,71
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	382.678.800	334.500.000	87,41
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.500.000	6.860.000	65,33
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.440.000	5.040.000	37,50
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.654.600	45.520.000	81,79
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.720.000	2.730.000	40,63
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.118.000	114.150.000	89,10
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	464.434.232	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	425.862.352	261.624.425	61,43
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.360.000	3.980.000	62,58
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.590.000	-	-
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	140.000	-	-
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.120.000	6.160.000	40,74
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.573.200	-	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.573.200	-	-
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.573.200	-	-
1.0025	**PUSKESMAS KEWAPANTE**	**1.430.066.555**	**1.338.751.258**	**93,61**
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.422.456.555	1.333.541.258	93,75
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	177.627.400	101.111.847	56,92
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	107.108.400	47.743.847	44,58
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.495.100	5.386.750	56,73
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	61.023.900	47.981.250	78,63
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.244.829.155	1.232.429.411	99,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.200.000	40.860.000	94,58
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.640.000	38.500.000	99,64
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.680.000	22.540.000	99,38
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.250.000	16.240.000	84,36
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	409.730.000	351.370.000	85,76
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.560.000	7.560.000	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.260.000	14.840.000	97,25
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.100.000	35.840.000	96,60
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.320.000	5.320.000	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	138.030.000	136.840.000	99,14
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	176.378.224	#DIV/0!
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	384.929.155	263.571.187	68,47
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.160.000	6.160.000	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	56.840.000	56.280.000	99,01
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	840.000	840.000	100,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	59.290.000	59.290.000	100,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.610.000	5.210.000	68,46
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.610.000	5.210.000	68,46
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.610.000	5.210.000	68,46
	DINAS KESEHATAN	**166.893.897.884**	**137.684.355.463**	**82,50**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.254.098.975	75.673.437.116	97,95
1.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.274.800	90.560.000	75,29
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.042.800	44.460.000	80,77
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.232.000	46.100.000	70,67
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.989.614.232	74.663.741.289	98,26
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.544.699.332	74.219.759.289	98,25
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	444.914.900	443.982.000	99,79
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.201.600	23.414.000	92,91
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.197.200	13.014.000	98,61
1.02.01.2.05.0005	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.004.400	10.400.000	86,63
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.960.500	181.048.525	71,29
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.797.900	43.794.413	99,99
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.152.600	41.773.102	99,10
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.986.608	99,96
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.010.000	65.494.402	47,46
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.627.800	22.723.219	69,64
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.388.400	8.385.218	99,96
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.239.400	14.338.001	59,15
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.250.870	83.229.213	58,10
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	136.050.870	81.029.213	59,56
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000	2.200.000	30,56
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.169.173	608.720.870	88,33
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.212.000	371.763.870	84,64
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.957.173	236.957.000	94,80
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83.964.186.584	57.728.193.354	68,75
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.833.492.366	22.066.757.499	67,21
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	13.377.269.903	9.049.591.922	67,65
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.011.196.060	929.386.209	91,91
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	5.069.465.800	2.784.028.610	54,92
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.543.582.900	255.200.000	16,53
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.502.235.903	1.206.381.452	80,31
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	163.833.000	163.504.800	99,80
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.610.079.963	7.288.730.559	75,84
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	269.141.236	142.425.400	52,92
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	286.687.600	247.508.547	86,33
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.770.524.018	35.578.448.922	70,08
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.075.000	33.075.000	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	285.950.860	275.880.860	96,48
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	55.280.000	10.280.000	18,60

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.270.000	54.360.000	91,72
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.720.000	-	-
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.233.376.800	1.200.416.800	97,33
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	80.288.600	79.488.307	99,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	97.766.000	93.302.783	95,43
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	430.643.200	427.120.926	99,18
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	206.330.000	204.760.000	99,24
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.360.000	4.360.000	100,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.670.000	11.670.000	100,00
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4.630.000	4.180.000	90,28
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	578.262.800	551.031.049	95,29
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.119.507.429	31.173.100.371	67,59
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	46.787.000	45.562.000	97,38
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.330.830.329	1.229.651.626	92,40
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11.280.000	11.280.000	100,00
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.080.000	3.700.000	90,69
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	174.416.000	165.229.200	94,73
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	60.579.000	-	-
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60.579.000	-	-
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.591.200	82.986.933	27,70
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	299.591.200	82.986.933	27,70
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.061.982.426	2.700.782.117	66,49
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.609.044.226	2.177.159.573	83,45
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.485.198.626	2.063.500.023	83,03
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	123.845.600	113.659.550	91,78
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.452.938.200	523.622.544	36,04
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.452.938.200	523.622.544	36,04
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	431.854.900	400.688.271	92,78
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	155.667.000	152.566.100	98,01
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	155.667.000	152.566.100	98,01
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	276.187.900	248.122.171	89,84
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	276.187.900	248.122.171	89,84
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.181.775.000	1.181.254.605	99,96
1.02.05.2.01	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.020.255.000	1.020.254.605	100,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.020.255.000	1.020.254.605	100,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.520.000	161.000.000	99,68
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	161.520.000	161.000.000	99,68
	RSUD dr T C HILLERS MAUMERE			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**128.795.834.680**	**132.892.208.616**	**103,18**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.029.822.430	44.934.742.077	97,62
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.527.557.430	40.445.432.417	97,39
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.527.557.430	40.445.432.417	97,39
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.502.265.000	4.489.309.660	99,71
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.502.265.000	4.489.309.660	99,71
1.02.02.2.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	82.766.012.250	87.957.466.539	106,27
1.02.02.2.01.0014	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.214.735.000	14.408.074.059	83,70
1.02.02.2.02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.214.735.000	14.408.074.059	83,70

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.02.02.2.02.0032	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.551.277.250	73.549.392.480	112,20
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	65.551.277.250	73.549.392.480	112,20
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.428.145.604	15.830.020.176	70,58
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.528.206.136	5.526.492.579	84,66
1.03.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.012.000	135.054.000	90,03
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.432.000	48.489.000	84,43
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.580.000	86.565.000	93,50
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.881.274.770	4.415.385.526	90,46
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.742.682.770	4.279.421.526	90,23
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.592.000	135.964.000	98,10
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.584.600	161.128.070	45,31
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.847.100	2.365.500	83,08
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.897.500	26.578.527	86,02
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.875.000	7.650.000	97,14
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.250.000	2.680.800	36,98
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.715.000	121.853.243	39,73
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	406.873.050	153.626.085	37,76
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.414.050	-	-
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.937.200	2.442.000	4,79
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.521.800	151.184.085	93,60
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.669.096	373.963.159	94,99
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	98.201.500	79.301.488	80,75
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.467.596	294.661.671	99,73
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.792.620	287.335.739	84,31
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.215.720	177.100.086	98,27
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	49.192.300	3.420.000	6,95
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	867.000	17,52
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.434.600	105.948.653	99,54
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	75.000.000	-	-
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	-
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	75.000.000	-	-
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.505.915.335	4.140.778.247	75,21
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.505.915.335	4.140.778.247	75,21
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.931.044.635	4.140.778.247	83,97
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	574.870.700	-	-
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100.000.000	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	100.000.000	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.598.899.100	2.536.518.264	70,48
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.598.899.100	2.536.518.264	70,48
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	3.598.899.100	2.536.518.264	70,48
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	113.940.000	13.490.000	11,84
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	113.940.000	13.490.000	11,84
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	-	-
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	13.940.000	13.490.000	96,77
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	87.087.700	69.114.481	79,36
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	87.087.700	69.114.481	79,36

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	87.087.700	69.114.481	79,36
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	150.000.000	-	-
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	-	-
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Pariwisata. Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	150.000.000	-	-
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.160.322.633	3.467.322.633	56,28
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.160.322.633	3.467.322.633	56,28
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	4.641.841.790	2.701.841.790	58,21
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	750.000.000	-	-
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	604.524.043	604.524.043	100,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	163.956.800	160.956.800	98,17
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	39.219.900	20.578.465	52,47
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	26.616.500	8.829.977	33,17
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknisi atau Analis	1.586.100	1.476.795	93,11
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknisi atau Analis	25.030.400	7.353.182	29,38
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.590.700	4.074.870	88,76
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	4.590.700	4.074.870	88,76
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	8.012.700	7.673.618	95,77
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	6.050.200	6.023.618	99,56
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1.962.500	1.650.000	84,08
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	69.554.800	55.725.507	80,12
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	40.333.100	40.241.979	99,77
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	40.333.100	40.241.979	99,77
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.221.700	15.483.528	52,99
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	29.221.700	15.483.528	52,99
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**10.138.301.046**	**8.191.470.201**	**80,80**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.569.449.346	2.300.818.035	89,55
1.04.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.544.100	30.115.000	98,60
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.544.100	30.115.000	98,60
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.267.230.424	2.015.748.694	88,91
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.530.424	1.962.948.694	88,68
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.700.000	52.800.000	98,32
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.327.800	61.268.407	91,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.367.800	7.278.700	98,79
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.036.222	138.904.760	93,83
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	24.006.076	16.771.214	69,86
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.030.146	122.133.546	98,47
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.310.800	54.781.174	97,28
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.910.800	52.381.174	97,16
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000	2.400.000	100,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	667.155.900	481.223.600	72,13
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	661.534.300	475.645.800	71,90
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	503.697.400	318.189.800	63,17
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	157.836.900	157.456.000	99,76
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5.621.600	5.577.800	99,22
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5.621.600	5.577.800	99,22
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.336.693.900	2.020.340.204	86,46
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.336.693.900	2.020.340.204	86,46

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.336.693.900	2.020.340.204	86,46
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.565.001.900	3.389.088.362	74,24
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.565.001.900	3.389.088.362	74,24
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.565.001.900	3.389.088.362	74,24
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**588.124.208**	**350.153.982**	**59,54**
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	271.177.200	270.867.170	99,89
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	271.177.200	270.867.170	99,89
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	271.177.200	270.867.170	99,89
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	316.947.008	79.286.812	25,02
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	316.947.008	79.286.812	25,02
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	316.947.008	79.286.812	25,02
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**5.289.756.995**	**4.925.916.049**	**93,12**
1.05.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.800.000	4.600.000	33,33
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.800.000	4.600.000	33,33
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.959.057.870	2.769.859.196	93,61
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.920.447.870	2.731.249.196	93,52
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.610.000	38.610.000	100,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.704.000	60.763.801	98,48
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.154.000	14.056.900	99,31
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.540.000	9.500.000	99,58
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	100,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.010.000	27.206.901	97,13
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.928.800	20.002.200	95,57
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.928.800	20.002.200	95,57
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.484.125	823.985.594	97,34
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	20.856.285	15.379.148	73,74
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.627.840	808.606.446	97,94
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.481.000	215.302.186	81,41
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.481.000	215.302.186	81,41
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	804.066.800	775.589.280	96,46
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	804.066.800	775.589.280	96,46
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.108.000	17.608.280	97,24
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	37.793.800	37.080.000	98,11
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	748.165.000	720.901.000	96,36
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	319.234.400	255.813.792	80,13
1.05.04.2.01	Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	273.229.600	214.198.992	78,40
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.422.000	68.390.000	88,33
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	195.807.600	145.808.992	74,47
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	46.004.800	41.614.800	90,46
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	46.004.800	41.614.800	90,46
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.115.376.419	2.734.844.700	87,79
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.599.047.019	2.328.974.176	89,61
1.05.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.373.200	19.326.200	99,76
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.373.200	19.326.200	99,76
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.761.091	1.747.614.211	89,54
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.877.073.091	1.672.928.211	89,12
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.688.000	74.686.000	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.513.500	131.603.239	98,57
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.712.700	1.199.000	70,01
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.584.600	7.402.550	97,60
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	10.470.000	99,71
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.751.200	6.751.200	100,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.965.000	105.780.489	98,89
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.338.800	14.102.550	98,35
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.338.800	14.102.550	98,35
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.434.848	70.618.722	76,40
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	63.944.860	48.986.431	76,61
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.489.988	21.632.291	75,93
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.625.580	345.709.254	89,19
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.025.580	341.004.254	90,21
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000	4.705.000	49,01
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	516.329.400	405.870.524	78,61
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	156.823.100	120.654.296	76,94
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	61.562.600	48.798.420	79,27
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	95.260.500	71.855.876	75,43
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	271.328.100	199.122.028	73,39
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	198.073.700	172.159.357	86,92
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	73.254.400	26.962.671	36,81
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88.178.200	86.094.200	97,64
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	88.178.200	86.094.200	97,64
	DINAS SOSIAL			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.178.530.392	3.578.764.707	85,65
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.156.961.892	2.720.551.843	86,18
1.06.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.400.000	10.860.000	95,26
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.400.000	10.860.000	95,26
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.199.542.785	1.964.662.779	89,32
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.128.385	1.899.255.979	88,99
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.414.400	65.406.800	99,99
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.352.100	74.842.621	93,14
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.903.000	3.878.500	99,37
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	2.650.000	35,33
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.554.600	9.538.400	99,83
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.555.000	47.450.530	99,78
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.335.300	41.003.400	94,62
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.245.000	3.463.200	81,58
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.090.300	37.540.200	96,03
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.189.407	560.847.649	76,08
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	575.000	104.500	18,17
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	691.451.940	530.794.149	76,77
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.018.400	54.397.494	78,82
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.330.500	95,16
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.623.900	10.607.400	84,03
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	171.992.200	168.541.783	97,99
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	694.500	-	-
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	694.500	-	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	171.297.700	168.541.783	98,39
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.057.100	17.909.038	93,98
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125.953.900	124.587.550	98,92
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	16.077.400	6.690.450	41,61
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	16.077.400	6.690.450	41,61
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	16.077.400	6.690.450	41,61
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	419.962.400	316.865.455	75,45

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	419.962.400	316.865.455	75,45
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	67.546.600	66.607.670	98,61
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	47.977.800	47.645.568	99,31
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	218.884.900	180.470.450	82,45
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.655.700	14.812.766	94,62
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	57.817.900	439.553	0,76
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	12.079.500	6.889.448	57,03
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	347.709.800	311.745.906	89,66
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	11.256.100	11.159.856	99,14
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	336.453.700	300.586.050	89,34
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	244.392.900	217.838.765	89,13
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	92.060.800	82.747.285	89,88
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	13.751.600	6.037.500	43,90
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	13.751.600	6.037.500	43,90
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	13.751.600	6.037.500	43,90
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.353.933.281	6.624.685.180	90,08
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.765.612.007	2.487.052.448	89,93
2.07.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.905.100	33.819.229	99,75
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.905.100	33.819.229	99,75
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.433.487.731	2.212.327.289	90,91
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.619.531	2.140.679.289	90,68
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.868.200	71.648.000	98,33
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.056.300	85.637.083	99,51
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.481.300	14.392.500	99,39
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.415.000	7.410.000	99,93
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.005.000	11.995.173	99,92
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.155.000	51.839.410	99,39
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.338.800	14.322.330	99,89
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.338.800	14.322.330	99,89
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.712.376	79.266.713	59,73
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	56.604.000	25.222.610	44,56
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.108.376	54.044.103	71,01
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.036.700	41.734.804	92,67
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.036.700	38.784.804	92,26
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.950.000	98,33
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	20.075.000	19.945.000	99,35
2.07.01.2.13.0004	Monitoring. Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20.075.000	19.945.000	99,35
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.413.129.800	4.069.358.038	92,21
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.397.766.800	4.056.128.438	92,23
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.387.705.100	4.046.178.438	92,22
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	10.061.700	9.950.000	98,89
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6.457.900	6.330.000	98,02
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6.457.900	6.330.000	98,02
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	8.905.100	6.899.600	77,48
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	8.905.100	6.899.600	77,48
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	138.436.374	31.608.094	22,83
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	115.965.074	24.171.410	20,84
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	24.924.200	24.171.410	96,98
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	91.040.874	-	-
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12.246.600	6.346.684	51,82
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	8.110.000	3.393.920	41,85
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2.586.600	1.442.764	55,78
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	1.550.000	1.510.000	97,42
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	10.224.700	1.090.000	10,66
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	2.740.700	750.000	27,37
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	7.484.000	340.000	4,54
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	36.755.100	36.666.600	99,76

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.404.500	5.342.100	98,85
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.404.500	5.342.100	98,85
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	31.350.600	31.324.500	99,92
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.130.900	13.110.500	99,84
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.219.700	18.214.000	99,97
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.152.400	30.740.800	98,68
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	31.152.400	30.740.800	98,68
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.152.400	30.740.800	98,68
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.152.400	30.740.800	98,68
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.152.400	30.740.800	98,68
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	279.216.620	268.853.739	96,29
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.074.900	19.830.475	79,08
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.074.900	19.830.475	79,08
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.398.600	6.672.271	90,18
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.676.300	13.158.204	74,44
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	196.585.220	194.469.647	98,92
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.487.000	8.378.175	98,72
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.487.000	8.378.175	98,72
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.307.400	29.924.450	98,74
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.062.400	14.062.400	100,00
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.245.000	15.862.050	97,64
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	157.790.820	156.167.022	98,97
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.790.820	156.167.022	98,97
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.741.000	18.221.387	87,85
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.741.000	18.221.387	87,85
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.741.000	18.221.387	87,85
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	16.664.200	16.604.400	99,64
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	16.664.200	16.604.400	99,64
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	16.664.200	16.604.400	99,64
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.151.300	19.727.830	97,90
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.151.300	19.727.830	97,90
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak. kecamatan layak Anak. desa/kelurahan layak Anak. dan DRPPA	20.151.300	19.727.830	97,90
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.429.427.284	8.554.502.717	90,72
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.595.803.922	3.331.803.146	92,66
2.14.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.300.000	46.292.000	99,98

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.300.000	46.292.000	99,98
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.103.166.810	2.878.302.969	92,75
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.009.510.210	2.784.654.969	92,53
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.656.600	93.648.000	99,99
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.175.200	163.539.350	82,52
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.074.300	13.818.716	98,18
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.050.000	88.750.000	72,13
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.690.900	11.684.534	99,95
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.360.000	49.286.100	99,85
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.702.812	81.820.748	97,75
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	42.587.230	40.705.166	95,58
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.115.582	41.115.582	100,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.459.100	161.848.079	98,41
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.559.100	63.292.182	99,58
2.14.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.900.000	98.555.897	97,68
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	96.000.000	84.400.000	87,92
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	84.400.000	87,92
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	96.000.000	84.400.000	87,92
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.304.503.662	2.917.811.727	88,30
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.029.500.000	977.800.000	94,98
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	928.700.000	923.600.000	99,45
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.800.000	54.200.000	53,77
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	863.478.862	828.043.699	95,90
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	863.478.862	828.043.699	95,90
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.411.524.800	1.111.968.028	78,78
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	66.155.200	47.028.400	71,09
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	923.239.600	674.057.145	73,01
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	422.130.000	390.882.483	92,60
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.433.119.700	2.220.487.844	91,26
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.433.119.700	2.220.487.844	91,26
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.433.119.700	2.220.487.844	91,26
	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.456.571.943	2.076.612.840	84,53
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.074.386.785	1.834.045.140	88,41
2.09.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.040.000	14.004.000	99,74
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.040.000	14.004.000	99,74
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.845.463.773	1.658.696.971	89,88
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.770.445.773	1.583.836.971	89,46
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.018.000	74.860.000	99,79
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.074.200	69.359.419	88,84
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.604.200	12.117.215	96,14
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	3.985.000	99,63
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	3.998.000	99,95
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.470.000	49.259.204	85,71
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.354.600	19.313.000	99,79
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.354.600	19.313.000	99,79
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.512.812	41.080.030	75,36
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	29.360.624	16.635.340	56,66
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.152.188	24.444.690	97,19
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.941.400	31.591.720	50,19
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.664.400	29.536.020	58,30
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	125.000	12,50
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.277.000	1.930.700	17,12
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	163.156.700	117.743.000	72,17

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	110.636.700	80.711.000	72,95
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	8.550.000	4.440.000	51,93
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	26.997.600	11.295.000	41,84
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok. Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	60.017.300	50.736.000	84,54
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.071.800	14.240.000	94,48
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	5.020.000	-	-
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.020.000	-	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	47.500.000	37.032.000	77,96
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	7.520.000	2.190.000	29,12
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	39.980.000	34.842.000	87,15
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	83.016.200	49.470.000	59,59
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	36.175.000	30.040.000	83,04
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	36.175.000	30.040.000	83,04
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.841.200	19.430.000	41,48
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	46.841.200	19.430.000	41,48
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	136.012.258	75.354.700	55,40
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	136.012.258	75.354.700	55,40
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	72.977.700	39.452.000	54,06
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	63.034.558	35.902.700	56,96
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.179.514.106	7.670.795.920	93,78
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.172.428.862	2.873.803.449	90,59
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.728.883.742	2.440.825.083	89,44
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.925.742	2.336.935.083	89,03
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.958.000	103.890.000	99,93
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.283.200	55.939.617	99,39
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.001.300	10.939.705	99,44
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.531.900	8.294.776	97,22
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.912.600	128.656.810	99,80
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.392.200	96.253.400	99,86
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.520.400	32.403.410	99,64
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.051.520	130.415.723	95,86
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	44.790.028	39.160.631	87,43
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.261.492	91.255.092	99,99
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.732.700	101.433.646	95,93
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.182.700	98.883.646	95,83
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000	2.550.000	100,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	24.826.200	24.759.323	99,73
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	24.826.200	24.759.323	99,73
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	24.826.200	24.759.323	99,73
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	201.811.988	191.950.760	95,11
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	163.028.088	153.168.969	93,95
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	163.028.088	153.168.969	93,95
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.783.900	38.781.791	99,99
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	38.783.900	38.781.791	99,99
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	677.844.856	662.641.264	97,76
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	677.844.856	662.641.264	97,76
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	603.287.456	588.562.864	97,56
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	74.557.400	74.078.400	99,36
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	18.471.900	18.430.316	99,77
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.471.900	18.430.316	99,77

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. Pengolahan. dan/atau Penimbunan	18.471.900	18.430.316	99,77
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18.827.900	18.272.606	97,05
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.827.900	18.272.606	97,05
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.827.900	18.272.606	97,05
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	122.732.400	121.073.378	98,65
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.732.400	121.073.378	98,65
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	83.742.900	82.178.779	98,13
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	38.989.500	38.894.599	99,76
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	32.233.800	31.579.401	97,97
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	32.233.800	31.579.401	97,97
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	26.386.800	25.979.331	98,46
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5.847.000	5.600.070	95,78
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.910.336.200	3.728.285.423	95,34
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.910.336.200	3.728.285.423	95,34
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	15.468.500	15.300.430	98,91
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	104.905.900	103.697.044	98,85
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.290.642.900	4.956.545.442	93,69
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.364.499.246	4.069.552.632	93,24
2.12.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.120.000	21.060.000	99,72
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.120.000	21.060.000	99,72
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.544.086.757	3.284.370.052	92,67
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.436.142.757	3.176.454.052	92,44
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.944.000	107.916.000	99,97
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.020.000	-	-
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.020.000	-	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.006.600	105.810.700	99,82
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.545.400	29.510.700	99,88
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.930.000	24.920.000	99,96
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.831.200	6.831.200	100,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.700.000	44.548.800	99,66
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.197.389	387.918.398	94,34
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.859.000	16.425.800	91,97
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	98.258.715	96.977.912	98,70
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.079.674	274.514.686	93,03
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.068.500	270.393.482	97,59
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.964.100	29.074.482	97,03
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.550.000	13.550.000	100,00
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	233.554.400	227.769.000	97,52
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	178.176.000	178.055.798	99,93
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	166.727.200	166.627.798	99,94
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4.552.600	4.502.600	98,90
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	118.429.400	118.379.998	99,96
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	43.745.200	43.745.200	100,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	5.244.000	5.244.000	100,00
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	5.244.000	5.244.000	100,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.204.800	6.184.000	99,66
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.204.800	6.184.000	99,66
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	164.255.300	155.530.200	94,69

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	131.722.100	123.177.000	93,51
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan. Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.714.100	8.707.000	99,92
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	117.998.000	109.598.000	92,88
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	5.010.000	4.872.000	97,25
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	32.533.200	32.353.200	99,45
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2.715.000	2.715.000	100,00
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2.740.000	2.630.000	95,99
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3.780.000	3.770.000	99,74
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	19.128.200	19.108.200	99,90
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	4.170.000	4.130.000	99,04
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	571.729.854	541.442.312	94,70
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	509.502.954	492.855.132	96,73
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	471.119.254	460.464.152	97,74
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.252.100	24.219.380	99,87
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	14.131.600	8.171.600	57,83
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.312.900	29.262.900	99,83
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.740.600	8.740.600	100,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.709.400	15.659.400	99,68
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	4.862.900	4.862.900	100,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.914.000	19.324.280	58,71
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.334.000	19.324.280	99,95
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	13.580.000	-	-
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11.982.500	11.964.500	99,85
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	11.982.500	11.964.500	99,85
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.416.700	2.416.700	100,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	9.565.800	9.547.800	99,81
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.401.992.670	3.073.904.558	90,36
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.708.954	2.372.533.293	89,10
2.13.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.449.476	54.394.000	99,90
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.449.476	54.394.000	99,90
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.352.355.940	2.070.369.347	88,01
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.257.045.940	1.975.062.347	87,51
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.310.000	95.307.000	100,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.800.700	95.735.480	99,93
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.430.900	17.426.600	99,98
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.390.000	15.388.000	99,99
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.499.800	13.499.800	100,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.480.000	49.421.080	99,88
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.030.100	12.876.000	98,82
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.030.100	12.876.000	98,82
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.747.388	70.518.582	91,88
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	23.757.806	17.529.000	73,78
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000	7.300.000	100,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.689.582	45.689.582	100,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.325.350	68.639.884	97,60
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.875.150	62.616.884	98,03
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.050.200	1.023.000	97,41
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000	-	-
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
		-	-	#DIV/0!
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	47.570.000	47.492.000	99,84

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	47.570.000	47.492.000	99,84
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	47.570.000	47.492.000	99,84
		-	-	#DIV/0!
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	497.203.026	461.395.946	92,80
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	497.203.026	461.395.946	92,80
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.649.965	30.614.800	99,89
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	211.791.798	176.231.454	83,21
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	108.241.488	108.117.788	99,89
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	146.519.775	146.431.904	99,94
		-	-	#DIV/0!
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	194.510.690	192.483.319	98,96
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	194.510.690	192.483.319	98,96
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	32.673.200	32.565.100	99,67
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	161.837.490	159.918.219	98,81
	DINAS PERHUBUNGAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.296.939.632	7.358.591.438	88,69
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.286.222.204	3.916.662.507	91,38
2.15.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.981.100	19.998.000	76,97
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.781.100	6.822.000	53,38
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.200.000	13.176.000	99,82
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.314.657.444	3.071.276.025	92,66
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.757.444	2.989.376.025	92,47
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.900.000	81.900.000	100,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.665.000	12.488.261	45,14
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.665.000	12.488.261	45,14
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.189.500	112.913.890	86,73
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.600	2.952.500	98,53
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.354.500	27.765.850	67,14
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.235.000	5.595.000	60,58
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.438.400	11.438.400	100,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.165.000	65.162.140	100,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.734.200	35.734.200	100,00
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35.734.200	35.734.200	100,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.810.360	411.856.820	95,16
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	38.472.000	98,65
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	75.321.286	54.939.946	72,94
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.489.074	318.444.874	99,99
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.184.600	252.395.311	79,08
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.184.600	251.745.311	79,12
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	650.000	65,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.914.329.846	3.346.086.040	85,48
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.221.452.598	2.803.160.714	87,02
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.081.489.400	1.866.417.551	89,67
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.139.963.198	936.743.163	82,17
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	37.607.600	33.368.500	88,73
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	37.607.600	33.368.500	88,73
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	443.040.148	300.635.202	67,86
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	443.040.148	300.635.202	67,86
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	112.251.400	110.448.624	98,39
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	112.251.400	110.448.624	98,39
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	72.936.800	72.334.000	99,17
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	72.936.800	72.334.000	99,17
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12.902.300	12.301.000	95,34
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12.902.300	12.301.000	95,34
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.139.000	13.838.000	97,87
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14.139.000	13.838.000	97,87

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	96.387.582	95.842.891	99,43
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	96.387.582	95.842.891	99,43
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	96.387.582	95.842.891	99,43
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.524.377.625	3.222.361.969	91,43
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.319.421.025	3.030.847.169	91,31
2.16.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.932.500	23.878.500	99,77
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.932.500	23.878.500	99,77
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.663.095.014	2.469.886.392	92,74
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.575.192.614	2.382.008.792	92,50
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.361.700	24.361.700	100,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.540.700	63.515.900	99,96
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.164.500	80.150.180	80,83
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.962.800	1.961.300	99,92
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.402.200	40.068.780	68,61
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.740.000	2.740.000	100,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.259.500	3.259.500	100,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.800.000	32.120.600	97,93
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.574.411	402.360.951	84,25
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	288.804.789	213.990.729	74,10
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.162.400	9.126.700	99,61
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.607.222	179.243.522	99,80
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.654.600	54.571.146	98,05
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.161.100	30.519.146	97,94
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000	17.800.000	100,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.693.500	6.252.000	93,40
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	125.905.700	118.110.800	93,81
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.905.700	118.110.800	93,81
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	53.766.100	53.727.800	99,93
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	11.846.700	11.846.700	100,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	8.400.700	8.400.700	100,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan. Opini. dan Aspirasi Publik	13.438.800	13.438.800	100,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17.459.800	17.383.400	99,56
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	14.023.100	6.343.100	45,23
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	6.970.500	6.970.300	100,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	79.050.900	73.404.000	92,86
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79.050.900	73.404.000	92,86
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	19.551.900	16.766.800	85,76
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	59.499.000	56.637.200	95,19
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	122.738.000	120.601.708	98,26
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	122.738.000	120.601.708	98,26
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	122.738.000	120.601.708	98,26
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	24.833.200	24.825.200	99,97
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	33.887.400	33.081.208	97,62
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	41.058.700	40.021.300	97,47
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	9.751.000	9.720.800	99,69
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	13.207.700	12.953.200	98,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	47.803.600	47.621.308	99,62
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	47.803.600	47.621.308	99,62
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.803.600	47.621.308	99,62
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.357.500	5.335.600	99,59
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.167.200	24.151.008	99,93
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	11.556.200	11.426.200	98,88
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.722.700	6.708.500	99,79
	DINAS PERDAGANGAN. PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH			

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	795.380.680	384.386.848	48,33
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	15.990.100	12.326.148	77,09
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.697.200	6.506.148	67,09
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.697.200	6.506.148	67,09
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.292.900	5.820.000	92,49
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.292.900	5.820.000	92,49
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	33.915.900	20.605.000	60,75
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.915.900	20.605.000	60,75
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola. Profil Risiko. Kinerja Keuangan. dan Permodalan	33.915.900	20.605.000	60,75
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	202.657.400	141.157.600	69,65
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	202.657.400	141.157.600	69,65
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	202.657.400	141.157.600	69,65
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	319.183.300	166.378.100	52,13
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	319.183.300	166.378.100	52,13
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.624.600	17.065.000	78,91
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	45.838.500	32.300.000	70,46
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	215.978.200	105.033.300	48,63
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15.362.000	11.979.800	77,98
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	20.380.000	-	-
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	223.633.980	43.920.000	19,64
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	223.633.980	43.920.000	19,64
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	161.533.800	20.820.000	12,89
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. Sumber Daya Manusia. serta Desain dan Teknologi	62.100.180	23.100.000	37,20
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**7.267.376.105**	**6.002.658.186**	**82,60**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**7.173.881.105**	**5.985.078.186**	**83,43**
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.424.151.174	4.950.462.263	91,27
3.30.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.646.000	70.463.000	97,00
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.028.000	62.505.000	99,17
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.618.000	7.958.000	82,74
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.949.546.248	3.647.504.193	92,35
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.832.952.448	3.536.269.793	92,26
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.593.800	111.234.400	95,40
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.124.900	96.042.042	98,89
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.163.000	43.026.900	99,68
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.495.000	9.495.000	100,00
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.336.900	25.315.742	99,92
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.130.000	18.204.400	95,16
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.591.626	1.067.089.742	88,66
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	122.869.240	89.247.500	72,64
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.080.722.386	977.842.242	90,48
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.242.400	69.363.286	68,51
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.242.400	69.363.286	68,51
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.598.863.831	896.690.323	56,08
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.509.647.331	818.281.823	54,20
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.509.647.331	818.281.823	54,20
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	89.216.500	78.408.500	87,89
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	89.216.500	78.408.500	87,89

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	85.732.400	82.065.000	95,72
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	85.732.400	82.065.000	95,72
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	54.251.200	53.695.000	98,97
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.293.000	10.120.000	98,32
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	21.188.200	18.250.000	86,13
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	65.133.700	55.860.600	85,76
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	65.133.700	55.860.600	85,76
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	40.424.100	31.600.600	78,17
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.709.600	24.260.000	98,18
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	93.495.000	17.580.000	18,80
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	93.495.000	17.580.000	18,80
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	93.495.000	17.580.000	18,80
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	93.495.000	17.580.000	18,80
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**3.903.520.942**	**3.498.062.763**	**89,61**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.629.888.744	3.233.453.033	89,08
2.18.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.192.792	47.015.400	99,62
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.068.500	41.891.500	99,58
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	5.124.292	5.123.900	99,99
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.585.182.440	2.238.176.666	86,58
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.300.000	99.944.000	94,02
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.268.000	-	-
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.268.000	-	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.666.196	118.082.180	95,48
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.329.800	300.000	12,88
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.200.200	20.383.380	96,15
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.703.400	2.703.400	100,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.843.796	9.520.000	80,38
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.775.000	6.363.700	93,93
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.814.000	78.811.700	100,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.249.100	297.866.100	98,55
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	302.249.100	297.866.100	98,55
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.607.906	193.570.764	90,62
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	110.778.466	94.401.600	85,22
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.829.440	99.169.164	96,44
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.422.310	238.797.923	95,74
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.673.700	32.156.773	81,05
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.600.000	15.600.000	100,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.148.610	191.041.150	98,40
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	28.159.500	22.502.000	79,91
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.159.500	22.502.000	79,91
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	28.159.500	22.502.000	79,91
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	29.583.400	27.789.258	93,94
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.583.400	27.789.258	93,94
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	29.583.400	27.789.258	93,94
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	51.698.618	50.448.200	97,58
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	51.698.618	50.448.200	97,58
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30.589.748	30.589.500	100,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	21.108.870	19.858.700	94,08
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	74.100.000	74.069.200	99,96
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.100.000	74.069.200	99,96
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	74.100.000	74.069.200	99,96

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	90.090.680	89.801.072	99,68
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.090.680	89.801.072	99,68
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90.090.680	89.801.072	99,68
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**916.743.600**	**402.273.976**	**43,88**
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	916.743.600	402.273.976	43,88
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.055.000	249.900.559	62,47
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.592.100	36.640.800	51,18
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	5.392.200	-	-
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.160.000	54.253.328	93,28
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	103.480.500	2.336.550	2,26
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	135.930.200	135.469.881	99,66
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	25.500.000	21.200.000	83,14
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	516.688.600	152.373.417	29,49
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	23.469.100	3.400.000	14,49
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.250.000	122.293.259	28,23
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	59.969.500	26.680.158	44,49
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**3.247.180.462**	**2.783.120.489**	**85,71**
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.979.759.762	2.674.180.613	89,74
2.24.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.444.000	15.444.000	100,00
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.444.000	15.444.000	100,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.699.278.828	2.448.358.798	90,70
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.639.878.828	2.389.208.798	90,50
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.400.000	59.150.000	99,58
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.388.800	42.400.160	72,62
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.680.400	2.680.400	100,00
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.487.900	8.487.900	100,00
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.805.500	3.415.000	50,18
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.415.000	27.816.860	68,83
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.162.234	129.250.912	82,77
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	84.352.164	64.372.566	76,31
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.810.070	64.878.346	90,35
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.485.900	38.726.743	76,71
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.235.900	38.726.743	81,99
2.24.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.250.000	-	-
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	235.602.900	89.402.075	37,95
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	134.407.200	64.680.461	48,12
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	32.620.600	11.518.181	35,31
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	34.137.600	23.618.280	69,19
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	67.649.000	29.544.000	43,67
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	3.986.500	179.820	4,51
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	3.986.500	179.820	4,51
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	97.209.200	24.541.794	25,25
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	97.209.200	24.541.794	25,25
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	31.817.800	19.537.801	61,41
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	19.315.400	18.970.680	98,22
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	7.123.700	6.952.080	97,59
2.24.03.2.01.0004	Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	12.191.700	12.018.600	98,58
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan. dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	12.502.400	567.121	4,54
2.24.03.2.03.0001	Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	12.502.400	567.121	4,54
	DINAS PERIKANAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**14.545.504.879**	**13.314.473.067**	**91,54**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**14.545.504.879**	**13.314.473.067**	**91,54**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.772.487.279	4.086.481.740	85,63
3.25.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.394.700	22.118.900	98,77

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.394.700	22.118.900	98,77
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.774.456.378	2.400.594.505	86,52
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.684.522.378	2.310.756.505	86,08
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.934.000	89.838.000	99,89
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.678.800	89.774.000	96,87
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.543.800	15.188.100	91,81
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.135.000	65.585.900	97,69
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.839.101	1.538.233.411	84,90
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.990.257	832.117.499	80,32
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.906.000	1.906.000	100,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	773.942.844	704.209.912	90,99
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.118.300	35.760.924	50,28
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.934.800	35.027.924	51,56
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.183.500	733.000	23,02
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	9.045.939.500	8.955.320.327	99,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	727.078.100	272.671.000	37,50
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	727.078.100	272.671.000	37,50
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	727.078.100	272.671.000	37,50
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**699.838.400**	**673.325.899**	**96,21**
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	651.838.400	625.325.899	95,93
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.030.000	23.890.000	99,42
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	24.030.000	23.890.000	99,42
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.808.400	601.435.899	95,80
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	521.298.400	521.179.899	99,98
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	106.510.000	80.256.000	75,35
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	48.000.000	48.000.000	100,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	48.000.000	48.000.000	100,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	48.000.000	48.000.000	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**5.178.285.985**	**3.664.215.591**	**70,76**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**5.178.285.985**	**3.664.215.591**	**70,76**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.439.300.983	3.197.401.233	92,97
3.26.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.510.000	21.450.000	99,72
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.510.000	21.450.000	99,72
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.055.796.558	2.837.538.557	92,86
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.966.894.858	2.750.438.557	92,70
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.901.700	87.100.000	97,97
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.616.900	66.150.686	97,83
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.283.600	2.280.502	99,86
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.468.300	12.341.400	91,63
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	6.993.000	99,90
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.865.000	39.535.784	99,17
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.070.000	23.004.150	99,71
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.048.500	4.027.150	99,47
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.021.500	18.977.000	99,77
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.082.125	190.509.323	97,66
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	230.000	129.000	56,09
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	69.184.879	64.716.677	93,54
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.667.246	125.663.646	100,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.225.400	58.748.517	77,07
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.117.100	44.178.117	89,94
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.350.000	2.350.000	100,00
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.758.300	12.220.400	49,36
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	749.874.772	332.944.978	44,40
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	724.902.272	308.657.898	42,58
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	196.189.400	45.886.135	23,39

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.381.300	27.760.000	97,81
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	111.372.900	21.765.700	19,54
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	388.958.672	213.246.063	54,82
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	24.972.500	24.287.080	97,26
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	24.972.500	24.287.080	97,26
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	63.425.400	63.067.320	99,44
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	63.425.400	63.067.320	99,44
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	51.802.300	51.549.600	99,51
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	11.623.100	11.517.720	99,09
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	925.684.830	70.802.060	7,65
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	48.392.830	48.119.560	99,44
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	32.096.900	31.963.560	99,58
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	16.295.930	16.156.000	99,14
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	877.292.000	22.682.500	2,59
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan. Bimbingan Teknis. dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	877.292.000	22.682.500	2,59
	DINAS PERTANIAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**24.832.161.334**	**21.160.743.555**	**85,22**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**24.832.161.334**	**21.160.743.555**	**85,22**
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.311.726.539	18.163.581.237	94,05
3.27.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.949.400	61.364.150	89,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.949.400	61.364.150	89,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.881.889.052	16.877.594.580	94,38
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.766.016.052	16.762.410.330	94,35
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.873.000	115.184.250	99,41
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.096.700	55.878.150	87,18
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.616.700	7.492.650	98,37
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.100.000	10.073.600	99,74
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.380.000	38.311.900	82,60
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.673.500	39.097.000	91,62
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.681.500	7.650.000	99,59
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	34.992.000	31.447.000	89,87
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.879.387	997.171.757	89,60
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	94.106.115	81.064.600	86,14
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.773.272	916.107.157	89,92
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.238.500	132.475.600	93,80
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.788.500	129.245.200	94,49
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.450.000	3.230.400	72,59
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.887.580.945	1.512.897.035	52,39
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	989.727.200	906.390.035	91,58
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	204.559.300	177.335.690	86,69
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	785.167.900	729.054.345	92,85
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.897.853.745	606.507.000	31,96
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.381.532.745	503.027.800	36,41
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	516.321.000	103.479.200	20,04
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.167.460.700	84.695.900	7,25
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.167.460.700	84.695.900	7,25
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.167.460.700	84.695.900	7,25
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	440.296.350	427.474.633	97,09
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	440.296.350	427.474.633	97,09
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	156.608.900	152.458.200	97,35
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	283.687.450	275.016.433	96,94

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.025.096.800	972.094.750	94,83
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.025.096.800	972.094.750	94,83
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	197.937.500	165.473.700	83,60
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	137.159.300	137.121.050	99,97
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	690.000.000	669.500.000	97,03
	SEKRETARIAT DAERAH			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1.0001	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**1.304.769.205**	**865.730.552**	**66,35**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.304.769.205	865.730.552	66,35
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.500.000	28.500.000	100,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.500.000	28.500.000	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.030.407.795	702.577.405	68,18
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.214.220	6.576.005	91,15
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.658.575	86.216.358	77,91
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.345.000	1.036.000	19,38
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	907.190.000	608.749.042	67,10
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.842.400	14.398.030	90,88
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.842.400	14.398.030	90,88
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.829.210	19.549.178	72,87
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	13.099.500	5.843.984	44,61
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.729.710	13.705.194	99,82
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.560.000	30.597.650	42,76
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.060.000	30.597.650	43,06
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	-	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.000.000	3.500.000	50,00
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.000.000	3.500.000	50,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	124.629.800	66.608.289	53,44
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	64.655.000	42.000.000	64,96
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	59.974.800	24.608.289	41,03
1.0002	**BAGIAN PEMERINTAHAN**	**224.022.300**	**196.113.077**	**87,54**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	141.908.000	114.803.958	80,90
4.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.873.800	52.421.233	99,14
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.873.800	52.421.233	99,14
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.339.600	24.802.642	97,88
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.339.600	24.802.642	97,88
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.163.700	9.293.363	33,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.163.700	9.293.363	33,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000	3.996.335	50,84
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	7.860.000	3.996.335	50,84
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.670.900	24.290.385	87,78
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.670.900	24.290.385	87,78
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	82.114.300	81.309.119	99,02
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	22.427.400	22.360.000	99,70
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	22.427.400	22.360.000	99,70
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	59.686.900	58.949.119	98,76
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	59.686.900	58.949.119	98,76
1.0003	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**6.367.234.076**	**4.574.129.688**	**71,84**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.708.676	123.017.946	80,56
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.916.600	34.833.000	99,76
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.916.600	34.833.000	99,76
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.534.900	9.893.400	27,84
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.923.500	3.872.000	98,69
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.946.400	2.946.400	100,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.665.000	3.075.000	10,73
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000	7.090.450	90,21
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	7.860.000	7.090.450	90,21
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.410.676	46.248.596	93,60
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.600.000	1.230.902	76,93
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.660.676	43.067.694	94,32
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	1.950.000	90,70
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	24.986.500	24.952.500	99,86
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.986.500	24.952.500	99,86

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.214.525.400	4.451.111.742	71,62
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.214.525.400	4.451.111.742	71,62
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.705.649.700	2.963.047.742	79,96
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	51.949.500	51.594.000	99,32
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.456.926.200	1.436.470.000	58,47
1,0004	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**411.094.964**	**337.754.867**	**82,16**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.947.664	137.420.258	69,07
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.141.200	29.026.000	99,60
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.141.200	29.026.000	99,60
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.364.510	34.304.946	70,93
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.523.510	11.228.080	97,44
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.310.000	1.250.000	95,42
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.600.000	2.598.296	99,93
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.931.000	19.228.570	58,39
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.553.094	42.956.495	55,39
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	59.545.000	24.996.401	41,98
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.008.094	17.960.094	99,73
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.888.860	31.132.817	70,94
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.338.860	29.857.817	74,02
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.550.000	1.275.000	35,92
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	212.147.300	200.334.609	94,43
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	212.147.300	200.334.609	94,43
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6.301.800	6.210.557	98,55
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	190.060.000	178.620.000	93,98
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15.785.500	15.504.052	98,22
1.0005	**BAGIAN PEREKONOMIAN**	**742.954.100**	**516.554.743**	**69,53**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.711.500	125.434.209	84,92
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.479.000	32.443.000	99,89
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.479.000	32.443.000	99,89
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.293.200	50.247.232	97,96
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.203.200	6.911.882	95,96
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.750.000	3.566.560	95,11
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.340.000	39.768.790	98,58
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.818.200	14.636.460	92,53
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.818.200	14.636.460	92,53
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.860.000	6.857.869	87,25
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	7.860.000	6.857.869	87,25
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.261.100	21.249.648	52,78
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.861.100	20.549.648	55,75
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.400.000	700.000	20,59
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	595.242.600	391.120.534	65,71
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	595.242.600	391.120.534	65,71
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	297.989.600	98.806.758	33,16
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.410.000	235.635.776	98,01
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.843.000	56.678.000	99,71
1.0006	**BAGIAN HUKUM**	**1.011.426.600**	**783.929.749**	**77,51**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.110.800	64.947.703	33,29
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.800.000	22.800.000	100,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.800.000	22.800.000	100,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.380.000	-	-
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.380.000	-	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.934.000	7.222.400	40,27
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.524.000	7.222.400	95,99
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.410.000	-	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.059.200	754.000	1,42
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	39.346.300	754.000	1,92
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.712.900	-	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.360.000	4.406.503	47,08
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	9.360.000	4.406.503	47,08
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.577.600	29.764.800	86,08
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.747.600	28.014.800	88,24
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.830.000	1.750.000	61,84

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	816.315.800	718.982.046	88,08
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	816.315.800	718.982.046	88,08
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	513.907.900	471.150.816	91,68
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	210.144.600	179.575.624	85,45
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	92.263.300	68.255.606	73,98
1.0007	**BAGIAN ORGANISASI**	**573.812.700**	**415.802.476**	**72,46**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	573.812.700	415.802.476	72,46
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.095.400	26.766.000	98,78
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.095.400	26.766.000	98,78
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.900.000	45.698.428	57,19
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.745.000	3.255.823	42,04
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.155.000	42.442.605	58,82
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.794.000	14.629.800	98,89
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.794.000	14.629.800	98,89
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.547.300	64.997.869	92,13
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	62.860.000	60.804.054	96,73
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.687.300	4.193.815	54,56
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.365.100	15.302.241	62,80
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.765.100	14.748.741	67,76
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000	553.500	21,29
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	357.110.900	248.408.138	69,56
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	153.234.100	118.498.488	77,33
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	28.132.200	23.966.039	85,19
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.173.800	61.538.150	63,99
4.01.01.2.13.0004	Monitoring. Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.362.400	21.638.717	57,92
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	42.208.400	22.766.744	53,94
1.0008	**BAGIAN UMUM**	**7.077.524.099**	**6.048.833.211**	**85,47**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.077.524.099	6.048.833.211	85,47
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.050.670	104.757.500	92,66
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.050.670	104.757.500	92,66
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.901.800	29.578.100	82,39
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.901.800	29.578.100	82,39
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.017.400	349.899.732	80,62
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	236.801.700	218.425.902	92,24
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.882.900	46.349.800	96,80
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.519.700	40.021.200	60,16
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.983.100	32.932.978	89,05
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.050.000	1.050.000	100,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.780.000	11.119.852	24,83
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	881.478.900	648.663.341	73,59
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	881.478.900	648.663.341	73,59
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.464.885.629	2.201.185.864	89,30
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	770.771.392	596.155.388	77,35
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.694.114.237	1.605.030.476	94,74
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.392.900	712.088.597	70,13
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626.396.100	401.263.197	64,06
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.661.500	3.039.000	28,50
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.085.300	266.200.900	86,40
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.250.000	41.585.500	59,20
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93.984.600	93.800.000	99,80
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93.984.600	93.800.000	99,80
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.038.812.200	1.908.860.077	93,63
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.551.893.700	1.429.167.250	92,09
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	486.918.500	479.692.827	98,52
1.0009	**BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**	**218.541.191**	**211.665.927**	**96,85**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.028.691	96.953.558	94,10
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.640.000	29.640.000	100,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.640.000	29.640.000	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.590.500	38.137.918	93,96
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.010.500	17.131.535	90,12
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.580.000	21.006.383	97,34
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.810.000	5.774.734	73,94
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	7.810.000	5.774.734	73,94

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.988.191	23.400.906	93,65
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.988.191	23.400.906	93,65
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	115.512.500	114.712.369	99,31
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	115.512.500	114.712.369	99,31
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	41.726.100	41.040.159	98,36
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	39.018.000	38.984.690	99,91
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	34.768.400	34.687.520	99,77
1.0010	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**712.304.988**	**649.351.368**	**91,16**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.804.988	287.399.368	86,88
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.120.600	26.761.000	98,67
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.120.600	26.761.000	98,67
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.310.600	84.499.160	75,91
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.040.600	43.127.600	87,94
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.590.000	2.058.600	36,83
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.680.000	39.312.960	69,36
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.058.900	32.023.500	96,87
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.058.900	32.023.500	96,87
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.608.388	107.060.388	98,57
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	77.598.000	76.050.000	98,01
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.010.388	31.010.388	100,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.706.500	37.055.320	73,08
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.556.500	27.985.320	74,52
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.150.000	9.070.000	68,97
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	381.500.000	361.952.000	94,88
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	381.500.000	361.952.000	94,88
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	227.790.000	223.392.000	98,07
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12.090.000	-	-
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	141.620.000	138.560.000	97,84
1.0011	**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	**11.589.774.908**	**10.231.370.890**	**88,28**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.589.774.908	10.231.370.890	88,28
4.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.473.600	33.765.810	97,95
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.473.600	33.765.810	97,95
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.797.340.470	9.507.842.724	88,06
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.660.231.980	9.370.743.724	87,90
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.108.490	137.099.000	99,99
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.550.300	84.390.567	98,64
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.822.000	10.541.160	97,40
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.675.000	8.667.000	99,91
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.353.400	16.509.000	95,13
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.699.900	48.673.407	99,95
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.409.338	86.101.372	97,39
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	62.521.138	60.744.272	97,16
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.888.200	25.357.100	97,95
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.750.000	5.225.000	77,41
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.750.000	5.225.000	77,41
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	577.251.200	514.045.417	89,05
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	577.251.200	514.045.417	89,05
	SEKRETARIAT DPRD			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**32.333.249.580**	**31.037.573.872**	**95,99**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.504.367.252	25.322.380.527	95,54
4.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.174.000	51.066.000	58,58
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.174.000	51.066.000	58,58
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.798.655.742	2.579.153.166	92,16
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.656.245.742	2.436.887.166	91,74
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.410.000	142.266.000	99,90
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.520.000	126.383.482	80,75
4.02.01.2.05.0005	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	137.965.000	118.689.302	86,03
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.555.000	7.694.180	41,47
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.762.100	688.683.600	99,99
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.400	15.000.000	100,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.429.500	177.382.300	99,97
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338.310.800	338.281.500	99,99

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.041.400	21.040.000	99,99
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	100,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.780.000	132.779.800	100,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.665.300	146.339.786	42,58
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.279.600	-	-
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.385.700	146.339.786	99,97
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.930.526	393.418.661	88,42
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	223.712.422	173.093.348	77,37
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.218.104	220.325.313	99,60
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.586.120	847.135.742	98,78
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.663.800	329.423.842	96,99
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.700.000	9.700.000	100,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	508.222.320	508.011.900	99,96
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.391.103.464	16.762.769.500	96,39
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.215.103.464	16.602.269.500	96,44
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	53.500.000	38.000.000	71,03
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	122.500.000	122.500.000	100,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.735.970.000	3.727.430.590	99,77
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.442.470.000	2.433.930.590	99,65
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.293.500.000	1.293.500.000	100,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5.828.882.328	5.715.193.345	98,05
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.152.407.212	1.118.969.700	97,10
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.152.407.212	1.118.969.700	97,10
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	368.005.000	363.887.434	98,88
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	4.525.000	4.525.000	100,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	181.740.000	181.740.000	100,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	181.740.000	177.622.434	97,73
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.765.280.116	1.710.970.540	96,92
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.497.360.000	1.469.120.040	98,11
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	190.920.116	190.610.500	99,84
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	77.000.000	51.240.000	66,55
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.543.190.000	2.521.365.671	99,14
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	189.540.000	189.165.671	99,80
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.353.650.000	2.332.200.000	99,09
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**9.483.107.414**	**8.627.362.507**	**90,98**
	PERENCANAAN	**7.769.344.614**	**7.096.344.612**	**91,34**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.887.645.014	4.480.704.208	91,67
5.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.623.900	31.605.600	99,94
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.623.900	31.605.600	99,94
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.611.994.262	3.306.244.427	91,54
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.801.262	3.191.875.727	91,31
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.193.000	114.368.700	98,43
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.288.600	343.666.572	95,65
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.643.900	23.558.508	99,64
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.150.000	63.123.700	99,96
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.004.700	7.004.700	100,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.791.000	42.090.400	98,36
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.009.000	60.008.800	100,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.690.000	147.880.464	90,90
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.184.900	97.659.900	76,19
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.184.900	97.659.900	76,19
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.150.352	493.122.822	94,26
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	212.172.342	189.692.209	89,40
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.978.010	303.430.613	97,57
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.403.000	208.404.887	89,29
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.325.300	123.003.987	93,66
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.504.400	15.631.000	80,14
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.538.000	19.934.900	72,39
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.875.300	18.785.000	78,68
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.160.000	31.050.000	99,65
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.075.788.100	1.855.666.555	89,40
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.274.452.400	1.193.080.993	93,62
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12.910.000	12.909.400	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	135.515.500	134.871.320	99,52
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	101.334.400	101.193.200	99,86
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.024.692.500	944.107.073	92,14
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	57.216.300	34.658.400	60,57
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	57.216.300	34.658.400	60,57
5.01.02.2.03	Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	379.406.400	314.681.530	82,94
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	166.707.200	141.085.530	84,63
5.01.02.2.03.0003	Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	212.699.200	173.596.000	81,62
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	364.713.000	313.245.632	85,89
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	364.713.000	313.245.632	85,89
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	805.911.500	759.973.849	94,30
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	346.732.400	318.849.745	91,96
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	90.238.800	83.281.624	92,29
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.366.700	931.400	27,67
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.907.200	17.716.060	98,93
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	13.825.200	9.174.404	66,36
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	180.975.400	172.613.878	95,38
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.587.200	9.676.119	91,39
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.110.700	6.690.400	94,09
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.721.200	18.765.860	82,59
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	252.521.400	242.104.454	95,87
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	31.126.400	28.376.580	91,17
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.954.900	44.820.224	97,53
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.954.800	45.172.300	98,30
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18.589.700	16.969.300	91,28
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	24.719.100	21.945.000	88,78
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.768.200	20.629.260	99,33
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	44.483.100	44.330.070	99,66
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	20.925.200	19.861.720	94,92
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	206.657.700	199.019.650	96,30
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	63.034.700	59.568.560	94,50
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.326.100	16.176.000	93,36
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.756.600	26.468.306	98,92
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23.415.800	22.759.380	97,20
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	23.192.500	22.424.380	96,69
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.843.200	16.675.200	99,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.399.100	21.610.504	96,48
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	13.689.700	13.337.320	97,43
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**1.713.762.800**	**1.531.017.895**	**89,34**
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.713.762.800	1.531.017.895	89,34

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	201.043.600	183.501.708	91,27
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	20.596.400	14.088.400	68,40
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	180.447.200	169.413.308	93,89
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	273.964.300	232.564.500	84,89
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	273.964.300	232.564.500	84,89
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	744.691.100	673.248.073	90,41
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	744.691.100	673.248.073	90,41
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	494.063.800	441.703.614	89,40
5.05.02.2.04.0001	Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	341.429.200	327.540.094	95,93
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	152.634.600	114.163.520	74,80
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**326.417.703.224**	**265.271.965.665**	**81,27**
	KEUANGAN	**326.417.703.224**	**265.271.965.665**	**81,27**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.117.253.456	57.329.350.471	67,35
5.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.659.400	36.162.000	98,64
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.659.400	36.162.000	98,64
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.788.879.014	56.152.876.958	67,02
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.303.194.114	55.737.895.759	66,91
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350.327.900	303.000.000	86,49
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	127.964.900	111.653.999	87,25
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.392.100	327.200	4,43
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.472.800	-	-
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.735.000	-	-
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.737.800	-	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.839.400	223.327.289	90,47
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.314.600	5.245.705	98,70
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.905.000	63.884.500	99,97
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800	19.999.338	100,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.620.000	134.197.746	85,14
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.263.600	22.180.000	87,79
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.263.600	22.180.000	87,79
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.650.342	768.657.469	93,21
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.173.200	14.980.800	98,73
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	133.324.954	95.042.598	71,29
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.972.400	31.913.033	99,81
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.179.788	626.721.038	97,29
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.488.900	126.146.755	88,53
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.272.300	88.565.650	91,99
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.700.000	7.829.579	73,17
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.700.000	15.935.000	95,42
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.816.600	13.816.526	73,43
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.130.991.400	2.725.003.460	87,03
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.718.514.400	1.439.258.511	83,75
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.370.600	80.787.400	84,71
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	97.770.500	86.774.982	88,75
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	63.490.600	46.851.800	73,79
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	62.962.100	60.873.096	96,68
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	51.687.100	45.962.000	88,92
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi. Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	55.443.200	49.905.000	90,01
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	621.738.300	502.959.633	80,90
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	571.443.700	489.994.600	85,75
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15.425.800	5.400.000	35,01
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	83.182.500	69.750.000	83,85
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	408.382.600	404.091.533	98,95
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	128.690.500	127.073.000	98,74
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	279.692.100	277.018.533	99,04
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.004.094.400	881.653.416	87,81
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran	309.455.500	275.262.424	88,95

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	426.971.800	373.434.323	87,46
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	267.667.100	232.956.669	87,03
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.080.924.388	905.925.848	83,81
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.924.388	905.925.848	83,81
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	185.752.900	176.660.000	95,10
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.012.200	94.061.000	92,21
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.565.800	162.645.020	83,59
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	256.444.800	211.938.840	82,65
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	183.250.688	117.179.288	63,94
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	158.898.000	143.441.700	90,27
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	237.088.533.980	204.311.685.886	86,18
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	237.088.533.980	204.311.685.886	86,18
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	237.088.533.980	204.311.685.886	86,18
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	9.254.225.286	8.746.704.644	94,52
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	226.698.887.330	195.428.109.218	86,21
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.135.421.364	136.872.024	12,05
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**8.633.236.548**	**7.959.544.033**	**92,20**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.662.799.008	6.214.804.916	93,28
5.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.220.100	33.426.200	97,68
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.220.100	33.426.200	97,68
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.882.744.770	5.536.602.773	94,12
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.747.084.770	5.401.554.773	93,99
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.660.000	135.048.000	99,55
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.690.000	83.708.622	69,36
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.690.000	83.708.622	69,36
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.763.800	89.957.365	81,96
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.203.800	19.202.400	99,99
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	14.000.000	100,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.050.000	11.046.363	99,97
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.510.000	45.708.602	69,77
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.643.600	68.257.391	99,44
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.650.000	15.624.638	99,84
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.092.600	29.817.553	99,09
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.901.000	22.815.200	99,63
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.574.038	322.788.878	89,03
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.175.000	635.900	12,29
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	83.718.410	67.846.900	81,04
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.390.800	127.162.307	98,28
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.289.828	127.143.771	88,12
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.162.700	80.063.687	95,13
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.138.500	49.356.687	94,66
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	6.500.000	83,33
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.224.200	24.207.000	99,93
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.970.437.540	1.744.739.117	88,55
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.970.437.540	1.744.739.117	88,55
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.867.200	5.093.042	86,81
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	113.823.700	98.844.753	86,84
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	21.333.800	18.435.544	86,41
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	602.761.640	421.328.640	69,90
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	379.846.100	378.832.700	99,73
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	159.759.500	156.388.835	97,89
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	92.787.100	92.453.861	99,64
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	47.584.700	46.994.850	98,76
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	389.114.100	386.440.211	99,31
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	44.585.100	30.510.000	68,43
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	47.369.700	46.614.178	98,41
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43.468.800	43.271.020	99,55
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	22.136.100	19.531.483	88,23

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**6.832.450.596**	**6.229.251.307**	**91,17**
	KEPEGAWAIAN	**6.471.996.296**	**5.997.586.077**	**92,67**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.440.297.596	3.180.028.951	92,43
5.03.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.177.500	32.577.000	98,19
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.221.300	12.803.600	96,84
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.956.200	19.773.400	99,08
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.140.446.808	2.900.905.107	92,37
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.073.816.008	2.834.705.607	92,22
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.630.800	66.199.500	99,35
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.407.300	31.208.560	93,42
5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	33.407.300	31.208.560	93,42
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.361.000	88.451.452	92,75
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998.100	511.100	51,21
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.887.900	13.887.700	100,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	10.495.000	99,95
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.750.000	8.749.950	100,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.225.000	54.807.702	89,52
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.015.600	44.496.925	96,70
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.015.600	44.496.925	96,70
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.530.394	37.009.685	87,02
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	24.099.500	21.746.291	90,24
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.430.894	15.263.394	82,81
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.358.994	45.380.222	91,94
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.358.994	44.080.222	93,08
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	300.000	30,00
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.031.698.700	2.817.557.126	92,94
5.03.02.2.01	Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	239.572.100	206.588.126	86,23
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	220.959.100	188.146.286	85,15
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.613.000	18.441.840	99,08
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	99.840.600	97.062.260	97,22
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.840.600	97.062.260	97,22
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.663.136.600	2.497.608.213	93,78
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	335.000.000	260.000.000	77,61
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.328.136.600	2.237.608.213	96,11
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.149.400	16.298.527	55,91
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14.679.700	11.659.907	79,43
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.469.700	4.638.620	32,06
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**360.454.300**	**231.665.230**	**64,27**
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	360.454.300	231.665.230	64,27
5.04.02.2.02	Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	360.454.300	231.665.230	64,27
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. Sumber Belajar. Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Kepemimpinan dan Prajabatan. serta Jabatan Fungsional	360.454.300	231.665.230	64,27
	INSPEKTORAT DAERAH			
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.336.310.179	5.031.534.119	94,29
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.618.751.479	4.315.486.719	93,43
6.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.759.900	44.325.500	106,14
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.730.000	13.640.000	99,34
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.029.900	30.685.500	109,47
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.835.191.702	3.536.439.375	92,21
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.759.806.002	3.461.060.875	92,05
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.385.700	6.378.500	99,89
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000	69.000.000	100,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	357.795.200	355.196.098	99,27
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	357.795.200	355.196.098	99,27
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.065.780	154.054.460	99,99
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800	1.906.000	99,96
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.686.900	8.682.000	99,94
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750.000	750.000	100,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.532.000	4.527.000	99,89
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.190.080	138.189.460	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.516.778	80.229.649	99,64
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.932.000	15.931.650	100,00
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.584.778	64.297.999	99,56
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.847.019	44.254.711	94,47
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	45.419.800	42.828.192	94,29
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.219	639.619	99,91
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.000	786.900	99,99
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.575.100	100.986.926	98,45
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	2.100.000	100,00
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.075.200	10.035.000	99,60
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	508.169.000	507.187.800	99,81
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	429.731.400	428.891.300	99,80
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	67.435.600	66.997.000	99,35
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24.773.600	24.763.000	99,96
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	11.313.100	11.141.200	98,48
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	45.997.600	45.985.000	99,97
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	183.001.200	182.797.600	99,89
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.210.300	97.207.500	100,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	78.437.600	78.296.500	99,82
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	78.437.600	78.296.500	99,82
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	209.389.700	208.859.600	99,75
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	23.599.700	23.238.600	98,47
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	23.599.700	23.238.600	98,47
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	185.790.000	185.621.000	99,91
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	185.790.000	185.621.000	99,91
	KECAMATAN			
	UNSUR KEWILAYAHAN	**5.071.733.308**	**4.812.936.716**	**94,90**
	KELURAHAN MADAWAT	**373.013.981**	**365.050.020**	**97,86**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.904.781	142.101.720	95,43
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.489.400	22.889.400	86,41
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.489.400	22.889.400	86,41
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.099.400	16.099.400	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.219.000	2.219.000	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.630.400	4.630.400	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.750.000	5.750.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.957.500	8.485.950	85,22
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.957.500	8.485.950	85,22
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.221.240	82.040.655	98,58
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	9.682.350	8.550.485	88,31
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.538.890	73.490.170	99,93
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.137.241	12.586.315	95,81
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.637.241	12.086.315	95,64
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.700.000	2.700.000	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.700.000	2.700.000	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.700.000	2.700.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.409.200	220.248.300	99,48
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	221.409.200	220.248.300	99,48
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.670.000	5.670.000	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.404.200	12.243.300	98,70
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	203.335.000	202.335.000	99,51
	KELURAHAN KABOR	**360.818.602**	**357.361.320**	**99,04**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.899.002	148.927.320	98,04
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000	19.200.000	100,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000	19.200.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.982.600	13.894.000	99,37
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.850.600	3.769.000	97,88
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.300.000	6.295.000	99,92
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.832.000	3.830.000	99,95
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.702.800	19.700.000	99,99
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.702.800	19.700.000	99,99
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.719.002	81.031.870	96,79

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	15.199.800	12.516.388	82,35
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.519.202	68.515.482	99,99
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.294.600	15.101.450	98,74
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.194.600	14.001.450	98,64
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.000	1.100.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.875.000	15.865.000	99,94
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.875.000	15.865.000	99,94
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.875.000	15.865.000	99,94
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	193.044.600	192.569.000	99,75
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	193.044.600	192.569.000	99,75
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.729.600	15.259.000	97,01
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.650.000	164.650.000	100,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	12.665.000	12.660.000	99,96
	KELURAHAN NANGALIMANG	**347.776.772**	**340.894.975**	**98,02**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.408.672	133.930.460	95,39
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.226.000	20.226.000	100,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.226.000	20.226.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.544.700	45.821.398	98,45
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	550.900	550.900	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.120.000	28.408.452	97,56
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.005.000	15.005.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.868.800	1.857.046	99,37
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.128.200	10.120.980	99,93
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.128.200	10.120.980	99,93
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.339.862	52.968.379	90,79
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	17.224.280	11.852.797	68,81
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.115.582	41.115.582	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.169.910	4.793.703	92,72
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.169.910	4.793.703	92,72
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	207.368.100	206.964.515	99,81
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	207.368.100	206.964.515	99,81
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.368.600	7.368.600	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.134.500	4.820.000	93,87
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194.865.000	194.775.915	99,95
	KELURAHAN KOTA UNENG	**383.846.578**	**375.234.302**	**97,76**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.796.578	102.193.174	92,23
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000	19.200.000	100,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000	19.200.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.002.800	24.875.000	99,49
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	497.500	497.500	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.869.900	13.848.240	99,84
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.497.400	6.391.260	98,37
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.138.000	4.138.000	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.093.478	53.625.689	89,24
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	18.977.896	12.510.107	65,92
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.115.582	41.115.582	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.500.300	4.492.485	69,11
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.300	2.992.485	59,85
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	1.500.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	273.050.000	273.041.128	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	270.720.000	270.720.000	100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.500.000	4.500.000	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.220.000	266.220.000	100,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.330.000	2.321.128	99,62
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	2.330.000	2.321.128	99,62
	KECAMATAN ALOK	**3.606.277.375**	**3.374.396.099**	**93,57**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.508.923.675	3.277.176.099	93,40
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.280.000	6.270.000	99,84
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.280.000	6.270.000	99,84

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.393.679.691	3.164.118.538	93,24
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.358.339.691	3.129.988.538	93,20
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.340.000	34.130.000	96,58
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.250.300	16.250.300	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	595.900	595.900	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.129.500	7.129.500	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.970.000	5.970.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.554.900	2.554.900	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.313.600	28.293.443	99,93
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.050.200	18.031.493	99,90
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.263.400	10.261.950	99,99
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.584.384	41.899.488	96,13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	16.173.996	14.489.100	89,58
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.410.388	27.410.388	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.815.700	20.344.330	97,74
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.815.700	19.344.330	97,62
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.780.000	63.780.000	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.780.000	63.780.000	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	63.780.000	63.780.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.710.000	9.700.000	99,90
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.710.000	9.700.000	99,90
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.710.000	9.700.000	99,90
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.090.000	16.090.000	100,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.090.000	16.090.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.773.700	7.650.000	98,41
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.773.700	7.650.000	98,41
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.773.700	7.650.000	98,41
	KELURAHAN WURING	**394.201.956**	**390.706.724**	**99,11**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.895.956	149.446.711	97,74
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.250.000	32.250.000	100,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.250.000	32.250.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.527.000	19.430.900	99,51
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	799.600	799.600	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.784.600	9.701.500	99,15
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.442.800	2.442.800	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000	6.487.000	99,80
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.557.900	18.257.513	98,38
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.557.900	18.257.513	98,38
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.975.856	63.850.637	96,78
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	684.000	672.600	98,33
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	10.471.080	8.357.261	79,81
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.820.776	54.820.776	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.585.200	15.657.661	94,41
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.935.200	14.557.661	97,47
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.650.000	1.100.000	66,67
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.150.000	17.110.000	99,77
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.150.000	17.110.000	99,77
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.150.000	17.110.000	99,77
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	224.156.000	224.150.013	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	224.156.000	224.150.013	100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.850.000	10.850.000	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.756.000	3.750.013	99,84
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	209.550.000	209.550.000	100,00
	KELURAHAN HEWULI	**323.016.536**	**298.826.233**	**92,51**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.746.636	83.831.819	93,41
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.719.800	18.333.000	92,97
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.719.800	18.333.000	92,97

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.150.400	5.950.374	96,75
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	496.900	492.400	99,09
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.627.500	3.431.974	94,61
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.026.000	2.026.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.849.500	25.478.200	98,56
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.849.500	25.478.200	98,56
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.200.836	32.379.145	89,44
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	8.790.448	5.685.437	64,68
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.410.388	26.693.708	97,39
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.100	1.691.100	92,61
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.226.100	1.091.100	88,99
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000	600.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.269.900	214.994.414	92,17
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.269.900	214.994.414	92,17
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.514.600	6.331.400	84,25
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.197.100	15.197.100	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.048.200	182.965.914	91,46
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	10.510.000	10.500.000	99,90
	KELURAHAN WAILITI	**336.234.588**	**333.620.887**	**99,22**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.972.288	107.704.786	98,84
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.425.000	22.416.500	99,96
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.425.000	22.416.500	99,96
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.801.200	32.778.200	99,93
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.214.300	1.200.000	98,82
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.380.700	21.372.000	99,96
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.010.600	6.010.600	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.195.600	4.195.600	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.411.400	17.400.360	99,94
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.411.400	17.400.360	99,94
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.143.988	29.222.226	96,94
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.733.600	1.811.838	66,28
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.410.388	27.410.388	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.190.700	5.887.500	95,10
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.990.700	2.687.500	89,86
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000	3.200.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	227.262.300	225.916.101	99,41
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227.262.300	225.916.101	99,41
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.904.700	8.887.000	99,80
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.547.600	199.219.101	99,34
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	17.810.000	17.810.000	100,00
	KELURAHAN WOLOMARANG	**407.129.788**	**405.972.150**	**99,72**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.902.688	169.932.673	99,43
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.990.800	29.968.640	99,93
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.990.800	29.968.640	99,93
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.586.800	17.451.092	99,23
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	831.200	831.000	99,98
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.002.600	7.867.190	98,31
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450.000	450.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.458.000	2.457.925	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.845.000	5.844.977	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.263.000	24.585.610	97,32
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.263.000	24.585.610	97,32
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.812.488	89.760.664	99,94
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	7.581.324	7.529.500	99,32
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.231.164	82.231.164	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.249.600	8.166.667	98,99
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.099.600	6.016.667	98,64
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.150.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	236.227.100	236.039.477	99,92
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	236.227.100	236.039.477	99,92
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	17.791.200	17.691.650	99,44
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	212.135.900	212.047.827	99,96
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	6.300.000	6.300.000	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	KECAMATAN ALOK BARAT	**3.137.336.983**	**2.926.076.801**	**93,27**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.075.039.383	2.866.779.201	93,23
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.978.300	14.978.300	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.978.300	14.978.300	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.920.892.691	2.714.735.851	92,94
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.046.891	2.672.890.051	92,84
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.845.800	41.845.800	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.485.892	19.461.467	99,87
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	526.500	526.500	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.678.900	11.659.967	99,84
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.175.492	2.175.000	99,98
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.105.000	5.100.000	99,90
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.474.300	76.426.750	98,65
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.826.500	44.804.850	99,95
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.647.800	31.621.900	96,86
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.089.000	12.907.600	98,61
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	13.089.000	12.907.600	98,61
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.119.200	28.269.233	97,08
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.919.200	26.069.233	96,84
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000	2.200.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.770.000	46.770.000	93,97
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.770.000	46.770.000	93,97
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.770.000	46.770.000	93,97
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.527.600	12.527.600	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.527.600	12.527.600	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.527.600	12.527.600	100,00
	KELURAHAN WAIOTI	**360.702.058**	**355.269.647**	**98,49**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.337.058	129.304.836	96,25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.048.000	15.726.506	98,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.048.000	15.726.506	98,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.983.800	8.959.907	99,73
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.593.800	3.570.165	99,34
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.050.000	1.050.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.190.000	1.189.742	99,98
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.150.000	3.150.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.014.400	9.934.770	99,20
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.014.400	9.934.770	99,20
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.770.358	79.845.969	96,47
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	9.996.108	7.154.615	71,57
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.774.250	72.691.354	99,89
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.520.500	14.837.684	89,81
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.870.300	7.187.534	81,03
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.700.000	2.699.950	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.950.200	4.950.200	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	219.950.000	219.550.000	99,82
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	219.950.000	219.550.000	99,82
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.150.000	2.150.000	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	207.800.000	207.400.000	99,81
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.415.000	6.414.811	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.415.000	6.414.811	100,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	6.415.000	6.414.811	100,00
	KELURAHAN NANGAMETING	**398.861.493**	**383.525.997**	**96,16**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.182.993	136.418.578	92,06
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.526.928	22.725.860	92,66
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.526.928	22.725.860	92,66
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.693.740	16.683.700	99,94
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.612.500	1.610.500	99,88
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.090.040	8.082.000	99,90
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.121.200	2.121.200	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.870.000	2.870.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.794.200	23.468.525	98,63
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.794.200	23.468.525	98,63
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.018.425	60.484.082	97,53
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	17.927.643	16.395.500	91,45
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.090.782	44.088.582	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.149.700	13.056.411	61,73
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.499.700	11.406.411	58,50
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.650.000	1.650.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000	12.074.548	80,50
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	12.074.548	80,50
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000	12.074.548	80,50
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229.948.500	229.302.871	99,72
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	229.948.500	229.302.871	99,72
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.827.900	9.823.371	99,95
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.000.000	28.868.500	99,55
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	185.741.400	185.233.000	99,73
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	5.379.200	5.378.000	99,98
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.730.000	5.730.000	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.730.000	5.730.000	100,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.730.000	5.730.000	100,00
	KELURAHAN WAIROTANG	**324.403.065**	**297.215.958**	**91,62**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.544.365	84.280.092	96,27
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.020.000	20.010.000	99,95
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.020.000	20.010.000	99,95
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.570.200	8.931.505	93,33
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	837.800	837.800	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.439.900	4.428.800	99,75
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.380.000	2.380.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.232.500	1.004.905	81,53
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680.000	280.000	41,18
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.721.400	11.535.750	98,42
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.400	11.535.750	98,42
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.619.365	41.367.584	94,84
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	13.987.267	11.765.696	84,12
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.632.098	29.601.888	99,90
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.613.400	2.435.253	93,18
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.113.400	1.935.253	91,57
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.415.600	2.473.800	11,04
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.415.600	2.473.800	11,04
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.415.600	2.473.800	11,04
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	214.443.100	210.462.066	98,14
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	214.443.100	210.462.066	98,14
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	40.133.100	40.133.100	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	168.010.000	167.648.966	99,79
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	6.300.000	2.680.000	42,54
	KELURAHAN BERU	**341.470.888**	**330.565.105**	**96,81**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.320.888	113.274.761	94,14
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.721.100	24.745.000	89,26
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.721.100	24.745.000	89,26
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.247.500	24.056.387	95,28
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.814.000	1.722.000	94,93
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.305.400	10.178.069	98,76
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.550.000	3.500.000	98,59
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.828.100	3.826.318	99,95
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.750.000	4.830.000	84,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.306.600	17.885.000	97,70
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.306.600	17.885.000	97,70
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.759.988	37.782.122	95,03
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	10.892.400	9.391.234	86,22

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.867.588	28.390.888	98,35
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.285.700	8.806.252	94,84
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.935.700	7.456.252	93,96
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000	1.350.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.150.000	10.900.000	97,76
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.150.000	10.900.000	97,76
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.150.000	10.900.000	97,76
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210.000.000	206.390.344	98,28
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	210.000.000	206.390.344	98,28
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.787.590	4.530.000	94,62
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.915.000	29.485.344	98,56
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	172.331.440	170.275.000	98,81
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	2.965.970	2.100.000	70,80
	KELURAHAN KOTA BARU	**463.546.685**	**461.950.011**	**99,66**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.802.385	117.374.943	98,80
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.477.000	23.435.650	99,82
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.477.000	23.435.650	99,82
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.033.900	13.909.656	106,72
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	672.900	672.200	99,90
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.886.000	4.800.706	123,54
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.875.000	1.836.750	97,96
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.100.000	5.100.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.915.000	19.913.400	99,99
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.915.000	19.913.400	99,99
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.326.471	51.390.707	96,37
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	11.504.789	9.600.625	83,45
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.821.682	41.790.082	99,92
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.050.014	8.725.530	96,41
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.400.014	8.225.530	97,92
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.000	500.000	76,92
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.094.300	10.950.550	98,70
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.094.300	10.950.550	98,70
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.094.300	10.950.550	98,70
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	333.650.000	333.624.518	99,99
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	333.650.000	333.624.518	99,99
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.150.000	3.150.000	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	99.974.518	99,97
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.500.000	230.500.000	100,00
	KECAMATAN ALOK TIMUR	**3.738.146.156**	**3.508.095.956**	**93,85**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.620.187.956	3.393.726.401	93,74
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.800.500	8.360.000	94,99
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.800.500	8.360.000	94,99
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.453.503.856	3.233.061.245	93,62
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.417.143.856	3.196.701.245	93,55
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.360.000	36.360.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.595.000	30.478.451	96,47
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.491.600	2.481.500	99,59
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.133.400	12.085.170	99,60
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.150.000	10.073.000	99,24
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.988.781	99,78
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.820.000	850.000	46,70
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.191.000	18.059.919	99,28
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.548.400	2.497.500	98,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.642.600	15.562.419	99,49
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.560.806	35.250.194	93,85
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	21.413.012	19.102.500	89,21
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.147.794	16.147.694	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.536.794	68.516.592	97,14
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.200.194	53.578.232	97,06

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.900.000	2.800.000	96,55
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.436.600	12.138.360	97,60
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.684.800	63.393.555	95,06
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.684.800	63.393.555	95,06
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.684.800	63.393.555	95,06
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.391.400	18.150.000	98,69
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.391.400	18.150.000	98,69
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.391.400	18.150.000	98,69
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.800.000	19.800.000	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.800.000	19.800.000	100,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.800.000	19.800.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.082.000	13.026.000	99,57
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.082.000	13.026.000	99,57
	KECAMATAN BOLA	**1.428.738.846**	**1.206.481.636**	**84,44**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.259.674.126	1.140.002.176	90,50
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.930.000	98,83
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	5.930.000	98,83
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.151.538.140	1.069.036.785	92,84
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.119.980.540	1.037.487.585	92,63
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.557.600	31.549.200	99,97
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.167.000	4.167.000	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.086.000	1.086.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.625.000	2.625.000	100,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	456.000	456.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.762.000	12.518.580	55,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.762.000	12.518.580	55,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.235.254	23.364.394	85,79
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	8.831.860	4.961.000	56,17
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.098.200	1.098.200	100,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.305.194	17.305.194	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.971.732	24.985.417	52,08
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.241.580	7.155.167	69,86
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.230.152	17.830.250	50,61
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	115.998.000	38.869.460	33,51
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.300.700	23.949.060	33,12
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.300.700	23.949.060	33,12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	43.697.300	14.920.400	34,14
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	43.697.300	14.920.400	34,14
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.710.620	6.720.000	49,01
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.710.620	6.720.000	49,01
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.710.620	6.720.000	49,01
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.769.300	9.500.000	45,74
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.769.300	9.500.000	45,74
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.284.300	-	-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.485.000	9.500.000	76,09
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.586.800	11.390.000	61,28
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.586.800	11.390.000	61,28
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.486.800	11.390.000	99,16
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.100.000	-	-
	KECAMATAN DORENG	**1.333.180.255**	**1.112.768.095**	**83,47**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.214.339.435	1.097.218.095	90,36
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	-	-

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.076.664.700	1.019.433.904	94,68
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.043.078.800	987.105.304	94,63
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.585.900	32.328.600	96,26
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.680.500	14.986.100	95,57
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	694.400	-	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.836.100	4.836.100	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.325.000	9.325.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	825.000	825.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.355.400	12.520.000	53,61
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.520.000	12.520.000	100,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.835.400	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.345.327	22.067.791	94,53
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.199.033	1.510.000	68,67
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.146.294	20.557.791	97,22
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.293.508	28.210.300	40,71
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.810.908	28.210.300	42,22
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.482.600	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.611.700	8.400.000	8,97
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.611.700	8.400.000	8,97
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	93.611.700	8.400.000	8,97
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.429.120	7.150.000	49,55
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.429.120	7.150.000	49,55
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.429.120	7.150.000	49,55
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000	-	-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.000.000	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.800.000	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000	-	-
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	900.000	-	-
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	900.000	-	-
	KECAMATAN HEWOKLOANG	**1.361.088.060**	**1.225.376.534**	**90,03**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.275.859.430	1.140.147.904	89,36
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.553.000	7.540.000	99,83
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.553.000	7.540.000	99,83
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.147.084.026	1.046.338.552	91,22
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.111.130.326	1.010.388.552	90,93
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.953.700	35.950.000	99,99
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.628.500	6.360.500	59,84
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.224.300	3.910.500	74,85
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.150.000	750.000	23,81
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.254.200	1.700.000	75,41
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.724.000	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.552.000	-	-
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.172.000	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.959.910	47.773.288	97,58
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.624.922	3.456.500	74,74
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.334.988	44.316.788	99,96
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.909.994	32.135.564	65,70
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.709.994	31.435.564	65,89
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	700.000	58,33
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.520.000	65.520.000	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.520.000	65.520.000	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	65.520.000	65.520.000	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.268.630	10.268.630	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.268.630	10.268.630	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.268.630	10.268.630	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.440.000	9.440.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.440.000	9.440.000	100,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.440.000	9.440.000	100,00
	KECAMATAN KANGAE	**1.858.588.686**	**1.700.662.728**	**91,50**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.743.860.586	1.594.949.228	91,46
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.296.679.724	1.159.897.093	89,45
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.879.724	1.128.097.093	89,19
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.800.000	31.800.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.002.700	16.913.300	93,95
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.316.600	1.296.000	98,44
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.457.700	1.405.000	96,38
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.292.000	1.276.700	98,82
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	-	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.966.400	5.965.600	99,99
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.970.000	6.970.000	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.662.100	29.573.998	99,70
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.032.000	6.031.000	99,98
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.630.100	23.542.998	99,63
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.855.588	37.427.488	87,33
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.460.994	15.432.694	99,82
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.315.000	6.932.600	56,29
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.079.594	15.062.194	99,88
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.660.474	345.137.349	98,42
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.905.194	18.366.626	97,15
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.322.800	13.881.723	80,14
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000	565.000	38,97
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.982.480	312.324.000	99,79
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.090.500	81.760.500	97,23
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.848.300	60.581.000	96,39
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62.848.300	60.581.000	96,39
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.242.200	21.179.500	99,70
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.242.200	21.179.500	99,70
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.966.200	15.366.000	90,57
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.966.200	15.366.000	90,57
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.966.200	15.366.000	90,57
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.311.400	6.627.000	90,64
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.250.000	4.210.000	99,06
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.061.400	2.417.000	78,95
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.360.000	1.960.000	30,82
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.360.000	1.960.000	30,82
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.040.000	-	-
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.320.000	1.960.000	45,37
	KECAMATAN KEWAPANTE	**1.732.188.238**	**1.604.423.124**	**92,62**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.928.238	1.440.583.124	92,05
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.200.000	11.110.000	99,20
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.200.000	11.110.000	99,20
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.410.153.924	1.311.967.535	93,04
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.372.264.124	1.274.937.535	92,91
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.889.800	37.030.000	97,73
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.040.800	14.123.700	88,05
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.097.500	54,88
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.390.000	9.250.000	98,51
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.650.800	3.776.200	81,19
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.616.100	8.388.825	87,24

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.616.100	8.388.825	87,24
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.593.014	48.886.923	82,03
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	17.419.826	8.343.285	47,90
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.950.300	11.469.200	95,97
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.222.888	29.074.438	96,20
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.324.400	46.106.141	79,05
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.745.200	41.538.600	85,22
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.200.000	1.272.541	57,84
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	3.145.000	69,89
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.879.200	150.000	5,21
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	129.720.000	128.300.000	98,91
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	129.720.000	128.300.000	98,91
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	128.400.000	128.300.000	99,92
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.320.000	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.240.000	17.240.000	89,60
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.240.000	17.240.000	89,60
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.240.000	17.240.000	89,60
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.300.000	18.300.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.300.000	18.300.000	100,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.300.000	18.300.000	100,00
	KECAMATAN KOTING	**1.239.878.047**	**1.134.130.028**	**91,47**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.177.219.947	1.071.621.928	91,03
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.312.500	5.594.400	76,50
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.312.500	5.594.400	76,50
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.074.564.630	978.853.461	91,09
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.046.645.430	950.934.261	90,86
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.919.200	27.919.200	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.087.600	22.616.976	93,89
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.302.600	17.856.976	92,51
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.955.000	2.955.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.830.000	1.805.000	98,63
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.877.123	24.390.773	84,46
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.529	7.514.179	62,62
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.876.594	16.876.594	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.378.094	40.166.318	94,78
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.009.194	36.797.418	94,33
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.868.900	2.868.900	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.034.300	45.994.300	99,91
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.034.300	45.994.300	99,91
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.034.300	45.994.300	99,91
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.345.000	1.345.000	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.345.000	1.345.000	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.345.000	1.345.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.278.800	15.168.800	99,28
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.278.800	15.168.800	99,28
	KECAMATAN LELA	**1.850.523.844**	**1.685.281.786**	**91,07**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.709.627.244	1.561.297.446	91,32
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.534.500	8.040.000	94,21
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.534.500	8.040.000	94,21
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.349.336.350	1.216.286.205	90,14
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.319.576.950	1.186.727.405	89,93
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.759.400	29.558.800	99,33
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.042.400	23.728.200	98,69
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.256.000	1.250.000	99,52
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.093.200	4.840.000	95,03

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.589.800	15.535.000	99,65
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.103.400	2.103.200	99,99
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.042.400	22.907.847	78,88
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.042.400	22.907.847	78,88
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.422.600	13.504.000	87,56
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.399.300	10.868.000	87,65
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.023.300	2.636.000	87,19
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.248.994	276.831.194	97,73
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.998.994	59.182.194	91,05
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.250.000	217.649.000	99,72
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103.169.500	87.105.340	84,43
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.997.900	60.028.000	92,35
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	64.997.900	60.028.000	92,35
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	38.171.600	27.077.340	70,94
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	38.171.600	27.077.340	70,94
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.463.900	9.462.000	99,98
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.463.900	9.462.000	99,98
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.463.900	9.462.000	99,98
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.139.800	15.543.000	96,30
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.139.800	15.543.000	96,30
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.139.800	15.543.000	96,30
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.123.400	11.874.000	97,94
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.123.400	11.874.000	97,94
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.123.400	11.874.000	97,94
	KECAMATAN MAGEPANDA	**1.368.809.762**	**1.227.435.486**	**89,67**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.177.205.374	1.062.180.398	90,23
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.065.216.750	955.869.904	89,73
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.034.016.750	924.669.904	89,43
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.200.000	31.200.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.942.100	3.780.700	95,91
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.090.000	1.090.000	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.852.100	2.690.700	94,34
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.283.100	9.324.000	82,64
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.878.000	-	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.405.100	9.324.000	99,14
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.066.030	3.464.433	57,11
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	6.066.030	3.464.433	57,11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.697.394	83.741.361	98,87
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.666.494	76.710.461	98,77
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.030.900	6.030.900	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	134.516.388	132.255.088	98,32
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.924.400	36.537.100	96,34
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.924.400	36.537.100	96,34
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	96.591.988	95.717.988	99,10
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	96.591.988	95.717.988	99,10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	4.850.000	48,50
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	4.850.000	48,50
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	4.850.000	48,50
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.235.000	28.150.000	93,10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.235.000	28.150.000	93,10
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.085.000	7.000.000	77,05

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.150.000	21.150.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.853.000	-	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.853.000	-	-
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.478.000	-	-
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.375.000	-	-
	KECAMATAN MAPITARA	**1.206.234.625**	**1.034.262.077**	**85,74**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.131.865.525	976.622.977	86,28
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.655.600	7.165.600	93,60
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.655.600	7.165.600	93,60
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	998.855.837	848.368.689	84,93
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	966.887.837	816.400.689	84,44
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.968.000	31.968.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.039.800	6.039.500	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	387.200	387.200	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.129.800	2.129.800	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	522.800	522.500	99,94
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.681.500	20.200.000	89,06
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.681.500	20.200.000	89,06
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.905.694	14.410.194	90,60
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.200.500	705.000	32,04
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.705.194	13.705.194	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.727.094	80.438.994	99,64
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.267.094	70.228.994	99,95
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.210.000	10.210.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.353.600	38.503.600	74,98
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.353.600	38.503.600	74,98
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	51.353.600	38.503.600	74,98
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.835.500	13.335.500	96,39
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.835.500	13.335.500	96,39
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.835.500	13.335.500	96,39
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.230.000	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.230.000	-	-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.230.000	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.950.000	5.800.000	97,48
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.950.000	5.800.000	97,48
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.950.000	5.800.000	97,48
	KECAMATAN MEGO	**1.400.363.551**	**1.264.459.379**	**90,30**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.356.635.351	1.220.863.225	89,99
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000	8.500.000	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000	8.500.000	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.236.513.878	1.100.914.869	89,03
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.399.878	1.078.200.869	89,15
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.114.000	22.714.000	83,77
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.821.200	5.821.200	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.821.200	5.821.200	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.373.151	43.338.501	99,92
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.270.363	4.270.363	100,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.102.788	39.068.138	99,91
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.427.122	62.288.655	99,78
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.427.122	62.288.655	99,78
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.621.000	29.502.280	99,60
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.621.000	29.502.280	99,60
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.621.000	29.502.280	99,60

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.506.600	9.506.600	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.506.600	9.506.600	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.506.600	9.506.600	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.600.600	4.587.274	99,71
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.600.600	4.587.274	99,71
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.600.600	4.587.274	99,71
	KECAMATAN NITA	**1.729.051.113**	**1.481.983.356**	**85,71**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.604.186.513	1.425.233.756	88,84
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.695.600	37.750.700	88,42
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.088.100	22.330.700	92,70
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.607.500	15.420.000	82,87
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.407.693.399	1.254.907.166	89,15
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.944.899	1.219.271.166	88,87
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.748.500	35.636.000	99,69
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.035.300	16.874.896	99,06
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	746.600	746.000	99,92
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.543.700	5.535.894	99,86
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.745.000	4.745.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	5.848.002	97,47
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.161.726	8.961.200	59,10
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.600	520.600	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	14.641.126	8.440.600	57,65
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.600.488	106.739.794	87,78
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.567.688	91.706.994	86,06
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.032.800	15.032.800	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.605.000	42.590.000	49,75
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.162.000	30.530.000	69,13
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.980.000	30.530.000	98,55
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.182.000	-	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	27.869.000	-	-
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27.869.000	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.574.000	12.060.000	88,85
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.574.000	12.060.000	88,85
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.999.600	9.999.600	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.600	9.999.600	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.600	9.999.600	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.260.000	4.160.000	14,22
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.260.000	4.160.000	14,22
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.356.000	2.080.000	61,98
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.244.000	2.080.000	25,23
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.592.000	-	-
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.356.000	-	-
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.356.000	-	-
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.356.000	-	-
	KECAMATAN NELLE	**1.219.346.592**	**1.106.160.352**	**90,72**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.088.606.992	978.077.262	89,85
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.058.500	6.380.000	90,39
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.058.500	6.380.000	90,39
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	935.702.370	829.788.566	88,68
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	905.102.370	799.188.566	88,30
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.600.000	30.600.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.823.100	10.789.186	99,69
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	879.200	859.500	97,76
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.900	460.000	97,07
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.320.000	1.320.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.150.000	8.149.686	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.273.100	22.045.791	94,73
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.260.000	6.224.991	99,44

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.013.100	15.820.800	92,99
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.765.928	54.434.903	95,89
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	966.900	959.000	99,18
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	15.430.740	13.224.950	85,71
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.368.288	40.250.953	99,71
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.983.994	54.638.816	99,37
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.264.994	49.924.816	99,32
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	995.000	99,50
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.719.000	3.719.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.054.600	81.453.300	98,07
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.036.600	66.505.300	97,75
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.540.000	31.010.000	95,30
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.496.600	35.495.300	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.018.000	14.948.000	99,53
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.018.000	14.948.000	99,53
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.514.500	10.270.000	97,67
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.514.500	10.270.000	97,67
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.514.500	10.270.000	97,67
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.864.500	24.714.000	99,39
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.864.500	24.714.000	99,39
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.864.500	24.714.000	99,39
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.306.000	11.645.790	94,64
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.306.000	11.645.790	94,64
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.306.000	11.645.790	94,64
	KECAMATAN PAGA	**1.351.582.117**	**1.275.581.401**	**94,38**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.259.766.423	1.184.815.801	94,05
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.754.400	15.584.400	98,92
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.805.000	3.805.000	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.949.400	11.779.400	98,58
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.058.965.785	991.735.764	93,65
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.026.766.785	959.536.764	93,45
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.199.000	32.199.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.131.000	64.996.650	99,79
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.378.500	22.264.150	99,49
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.732.500	4.732.500	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.020.000	32.000.000	99,94
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.560.500	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.560.500	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.238.538	39.703.037	94,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.528.150	9.992.650	79,76
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.710.388	29.710.387	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.116.200	72.795.950	96,91
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.890.600	71.570.350	96,86
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.225.600	1.225.600	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.919.100	72.819.100	99,86
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.989.400	63.959.400	99,95
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.500.000	55.500.000	100,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.489.400	8.459.400	99,65
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.929.700	8.859.700	99,22
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.929.700	8.859.700	99,22
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.881.400	13.881.400	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.881.400	13.881.400	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.881.400	13.881.400	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.015.194	4.065.100	81,06

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.015.194	4.065.100	81,06
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.355.194	595.100	43,91
	KECAMATAN PALUE	**1.619.012.770**	**1.368.238.314**	**84,51**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.541.210.570	1.329.734.314	86,28
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.210.300	10.502.000	86,01
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.210.300	10.502.000	86,01
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.244.252.206	1.154.493.020	92,79
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.213.219.006	1.123.893.020	92,64
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.033.200	30.600.000	98,60
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.019.000	40.139.900	80,25
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.000	-	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.617.400	5.136.500	59,61
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.650.000	5.355.000	70,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.555.600	488.400	19,11
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.290.000	29.160.000	99,56
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.212.400	29.212.330	93,59
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.980.000	9.923.510	99,43
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.232.400	19.288.820	90,85
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.851.164	87.276.064	99,35
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	5.620.000	5.044.900	89,77
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.231.164	82.231.164	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.665.500	8.111.000	7,01
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.350.900	8.111.000	44,20
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	-	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.114.600	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.182.400	23.414.000	47,61
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.130.000	20.534.000	68,15
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.830.000	17.384.000	72,95
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.300.000	3.150.000	50,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.662.400	2.880.000	19,64
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.290.400	-	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.372.000	2.880.000	27,77
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.390.000	-	-
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.390.000	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.999.800	9.550.000	95,50
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.800	9.550.000	95,50
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.800	9.550.000	95,50
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.480.000	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.480.000	-	-
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.520.000	-	-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.960.000	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.140.000	5.540.000	49,73
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.140.000	5.540.000	49,73
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.080.000	3.740.000	91,67
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.060.000	1.800.000	25,50
	KECAMATAN TANA WAWO	**1.245.017.258**	**1.146.936.453**	**92,12**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.159.161.458	1.087.628.053	93,83
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.480.000	12.474.000	99,95
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.480.000	12.474.000	99,95
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	900.208.438	856.241.977	95,12
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	874.016.638	830.051.977	94,97
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.191.800	26.190.000	99,99
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.397.200	32.337.200	99,81
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	232.200	232.200	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.725.000	3.725.000	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.440.000	22.380.000	99,73

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.315.900	55.069.700	99,55
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.345.300	28.345.300	100,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.970.600	26.724.400	99,09
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.802.420	60.095.976	78,25
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.594.150	610.000	16,97
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.682.300	4.665.200	99,63
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.525.970	54.820.776	80,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.957.500	71.409.200	87,13
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.757.500	65.275.550	88,50
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.200.000	6.133.650	74,80
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.759.400	41.800.000	61,69
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.200.000	41.800.000	70,61
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.550.000	37.800.000	90,97
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.650.000	4.000.000	22,66
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.559.400	-	-
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.559.400	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.096.400	17.508.400	96,75
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.096.400	17.508.400	96,75
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.096.400	17.508.400	96,75
	KECAMATAN TALIBURA	**1.556.008.685**	**1.447.273.435**	**93,01**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.446.280.385	1.337.545.135	92,48
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.096.700	10.916.700	98,38
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.096.700	10.916.700	98,38
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.313.925.563	1.207.670.143	91,91
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.279.245.563	1.172.990.143	91,69
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.680.000	34.680.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.303.700	32.180.300	99,62
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.034.800	1.034.800	100,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.807.700	17.684.400	99,31
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.848.000	3.847.900	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.613.200	4.613.200	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.880.900	34.079.498	97,70
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.880.900	34.079.498	97,70
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.935.122	26.394.321	97,99
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.400	117.400	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	2.346.828	1.821.000	77,59
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.470.894	24.455.921	99,94
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.138.400	26.304.173	96,93
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.138.400	24.304.173	96,68
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.144.500	49.144.500	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.001.300	48.001.300	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48.001.300	48.001.300	100,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.143.200	1.143.200	100,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.143.200	1.143.200	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.053.800	12.053.800	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.053.800	12.053.800	100,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.053.800	12.053.800	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.440.000	27.440.000	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.440.000	27.440.000	100,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.440.000	27.440.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.090.000	21.090.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.090.000	21.090.000	100,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.090.000	21.090.000	100,00

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
	KECAMATAN WAIGETE	**1.291.887.660**	**1.147.440.015**	**88,82**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.193.841.660	1.062.340.186	88,99
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.440.000	7.440.000	100,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.440.000	7.440.000	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.037.738.320	928.677.096	89,49
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.003.613.320	894.552.096	89,13
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.125.000	34.125.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.226.400	18.076.902	99,18
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.400	2.100.000	99,98
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.596.000	11.486.760	99,06
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.530.000	4.490.142	99,12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.027.500	23.438.300	86,72
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.027.500	23.438.300	86,72
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.270.640	37.073.388	89,83
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	8.350.152	4.153.000	49,74
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.920.488	32.920.388	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.138.800	47.634.500	76,66
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.088.800	47.034.500	76,99
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.050.000	600.000	57,14
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.196.400	60.516.806	83,82
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.319.200	54.423.078	84,61
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.374.800	40.353.078	99,95
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.944.400	14.070.000	58,76
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.877.200	6.093.728	77,36
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.877.200	6.093.728	77,36
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.999.600	11.733.023	90,26
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.999.600	11.733.023	90,26
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.744.800	4.136.325	87,18
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.254.800	7.596.698	92,03
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.850.000	12.850.000	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.850.000	12.850.000	100,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.340.000	6.340.000	100,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.510.000	6.510.000	100,00
	KECAMATAN WAIBLAMA	**1.549.398.925**	**1.430.444.520**	**92,32**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.472.561.025	1.356.300.484	92,10
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000	7.700.000	98,72
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.800.000	7.700.000	98,72
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.234.888.720	1.135.264.975	91,93
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.197.440.720	1.097.949.975	91,69
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.448.000	37.315.000	99,64
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.489.000	18.224.474	71,50
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.213.800	1.200.000	98,86
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.932.700	8.896.134	99,59
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.962.500	2.878.340	97,16
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.380.000	5.250.000	42,41
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.737.300	43.872.499	95,92
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.597.400	19.522.999	99,62
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.139.900	24.349.500	93,15
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.363.092	35.904.581	96,10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	6.352.704	4.894.193	77,04
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.010.388	31.010.388	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.282.913	115.333.955	95,09
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.142.713	88.813.955	99,63
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000	1.800.000	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.340.200	24.720.000	81,48
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.589.400	58.144.723	99,24
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.776.900	51.412.803	99,30
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.392.800	38.382.040	99,97
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.384.100	13.030.763	97,36

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.812.500	6.731.920	98,82
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.812.500	6.731.920	98,82
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.450.000	2.399.900	97,96
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.450.000	2.399.900	97,96
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.450.000	2.399.900	97,96
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.398.500	7.299.413	98,66
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.398.500	7.299.413	98,66
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.398.500	7.299.413	98,66
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.400.000	6.300.000	75,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	6.300.000	75,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.200.000	3.400.000	80,95
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.200.000	2.900.000	69,05
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**4.665.103.272**	**4.128.593.137**	**88,50**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**4.665.103.272**	**4.128.593.137**	**88,50**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.196.910.668	2.032.816.132	92,53
8.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.996.800	21.903.776	99,58
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.996.800	21.903.776	99,58
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.024.295.440	1.869.649.383	92,36
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.476.440	1.790.831.383	92,05
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.819.000	78.818.000	100,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.649.800	52.612.857	99,93
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.047.000	16.032.215	99,91
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.860.000	4.860.000	100,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.957.800	5.957.742	100,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.785.000	25.762.900	99,91
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.266.618	37.337.907	80,70
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	15.613.130	13.856.500	88,75
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.653.488	23.481.407	76,60
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.702.010	51.312.209	99,25
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.481.910	35.221.209	99,27
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	100,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.920.100	11.791.000	98,92
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	532.477.450	522.977.544	98,22
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	532.477.450	522.977.544	98,22
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	43.411.200	43.231.675	99,59
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	45.788.200	45.588.191	99,56
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	443.278.050	434.157.678	97,94
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	852.996.154	850.459.342	99,70
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	852.996.154	850.459.342	99,70
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	810.914.654	810.914.654	100,00
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42.081.500	39.544.688	93,97
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	78.699.100	78.512.262	99,76

Kode	Uraian Urusan/Organisasi/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78.699.100	78.512.262	99,76
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	78.699.100	78.512.262	99,76
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	75.501.000	74.257.824	98,35
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	75.501.000	74.257.824	98,35
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.501.000	74.257.824	98,35
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	928.518.900	569.570.033	61,34
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	928.518.900	569.570.033	61,34
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	928.518.900	569.570.033	61,34
	Jumlah	4.665.103.272	4.128.593.137	88,50